PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TAKALAR
NOMOR 14 TAHUN 2024

PEMERINTAH
KAB. TAKALAR

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2024-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15 (lima belas) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya periode RPJMD sebelumnya

sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang emndasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah ptogram prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Takalar.
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode Tahun 2025.

2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PERUBAHAN RKPD

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih dan arah kebijakan nasional.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi daerah sampai akhir Desember 2025;
    b. prioritas pembangunan daerah sampai akhir Desember 2025; dan
    c. rencana kerja dan pendanaan sampai akhir Desember 2025.
(3) Selain muatan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perubahan RKPD 2025 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua) RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai :
    b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
    c. acuan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Takalar dalam mendukung capaian target dan sasaran Pembangunan Daerah; dan
    d. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025 serta sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun 2025.

5. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2025
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP
(2) Sistematika uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun 2025:
a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana

Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 17 Juli 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 11

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.4 Maksud dan Tujuan 8
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 10
2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro 10
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 10
2.1.2 Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDRB 13
2.1.3 PDRB Perkapita 20
2.1.4 Indeks Gini 20
2.1.5 Angka Kemiskinan 22
2.1.6 Tingkat Pengangguran terbuka 26
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia 29
2.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 33
2.1.9 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 34
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Sampai Triwulan Ke I 36
2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 36
2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 39
2.2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 55
2.2.4 Evaluasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 60
2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025 65
2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan Triwulan ke I 65

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan Triwulan ke I 66
2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025 Triwulan selanjutnya 66
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 68
3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah 68
3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro 68
3.2 Tantangan Perekonomian Daerah 76
3.2.1 Aspek Eksternal 76
3.2.2 Aspek Internal 77
3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah 77
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 79
3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 79
3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 83
3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 89
BAB IV SASARAN DAN PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 92
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 93
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 101
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 101
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 106
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 114
4.3 Perioritas Pembangunan kabupaten Takalar Tahun 2025 174
4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2025 211
4.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2025 211
4.4.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD 265
BAB V RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 267
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 267
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 268
5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 298
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1412
6.1 Indikator Makro Pembangunan 1412
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 1414

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1417
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1432
BAB VII PENUTUP 1440
7.1 Kaidah Pelaksanaan 1440
7.2 Kesimpulan 1441

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2024 11
Tabel II-2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2020 – 2024 12
Tabel II-3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar (milyar rupiah) Tahun 2020 – 2024 14
Tabel II-4 Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 19
Tabel II-5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 20
Tabel II-6 Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023 21
Tabel II-7 Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 23
Tabel II-8 Angka Kemiskinan (P0) Periode Maret Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020– 2024 23
Tabel II-9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 25
Tabel II-10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 28
Tabel II-11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2020-2024 29
Tabel II-12 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 29
Tabel II-13 Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 31
Tabel II-14 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 31
Tabel II-15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 32

Tabel II-16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar Tahun 2021 – 2024 33
Tabel II-17 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 36
Tabel II-18 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2025 Sampai Triwulan I 39
Tabel II-19 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 45
Tabel II-20 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 49
Tabel II-21 Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan 52
Tabel II-22 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 55
Tabel II-23 Evaluasi Indikator SPM Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025 60
Tabel III-1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024–2025 (Persen, YoY) 71
Tabel III-2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 (Persen) 73
Tabel III-3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 (Persen) 74
Tabel III-4 Inflasi Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 75
Tabel III-5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 75
Tabel III-6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 76

Tabel III-7 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Takalar Tahun 2025 78
Tabel III-8 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 82
Tabel III-9 Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 88
Tabel III-10 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 91
Tabel IV-1 Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025 96
Tabel IV-2 Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 104
Tabel IV-3 Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 104
Tabel IV-4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 108
Tabel IV-5 Keselaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupatten Tahun 2025 116
Tabel IV-6 Perubahan Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025 167
Tabel IV-7 Arah Prioritas dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025 212
Tabel IV-8 Tabel Rincian Usulan Pokok Pikiran DPRD Kab. Takalar Tahun 2025 266
Tabel V-1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 268
Tabel V-2 Sandingan Prioritas Pembangunan RKPD 2025 Dengan Perubahan RKPD 2025 270
Tabel V-3 Indikasi Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Takalar Tahun 2025 299
Tabel VI-1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Takalar Tahun 2024-2026 1413
Tabel VI-2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Takalar Tahun 2026 1415
Tabel VI-3 Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Takalar 1418

Tabel VI-4 Realisasi SPM Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Target 2025 (Permendagri No 59 Tahun 2021) 1433

DAFTAR GRAFIK

Grafik II-1 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 13
Grafik II-2 Angka Kemiskinan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 24
Grafik II-3 Capaian IPM Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 32
Grafik II-4 Total Penurunan Emisi GRK Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 8
Gambar IV-1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 102
Gambar IV-2 Prioritas Nasional Tahun 2025 103

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah, serta kondisi lain yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan Tahun 2025 melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (semester I) dan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Data capaian indikator makro Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II belum sepenuhnya tersedia sampai dengan dilakukannya penyusunan perubahan RKPD 2025 sehingga gambaran capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Takalar masih menggunakan realisasi Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 3,86%; Tingkat Kemiskinan 7,75%; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,84%; Gini Rasio 0,381; Indeks Pembangunan Manusia 72,06; dan PDRB Perkapita (ADHB) 42,36 Juta/Rp.

Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke I (Pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Takalar Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Takalar pada RKPD Pokok Tahun 2025, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor ...);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 309);
34. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan.
2. Keterkaitan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar dan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
3. Perubahan RKPD Kabupaten Takalar dan dokumen RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.
4. Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD. Sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RENJA-PD Tahun 2025.

Gambar I-1
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

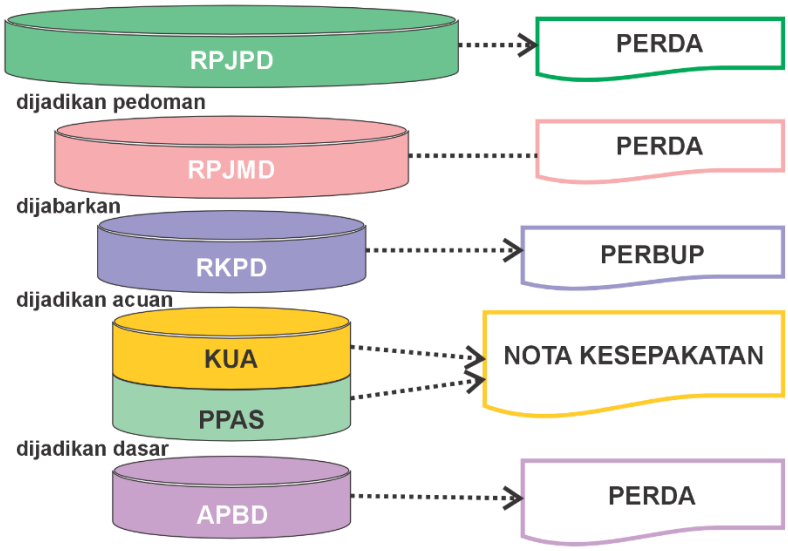

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 2.

Tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD, serta menjadi dasar Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2025 serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritasdan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rincian perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2024 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Visi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam RPJPD Kabupaten Takalar 2025-2045 adalah "**Takalar sebagai Daerah Industri Agromaritim yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**". Visi tersebut diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 melalui Tujuh Tujuan, dan Dua Puluh Dua Sasaran Pembangunan dengan 42 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan Tahun Anggaran 2025 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini didasarkan pada adanya kondisi social dan ekonomi yang sudah tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun 2025.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan

nilai PDRB tahun sebelumnya. Dari Tabel II-1 nampak bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berkembang rata rata jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Hal ini dikarenakan PDRB ADHK dipengaruhi oleh harga pada tahun berjalan :

Tabel II-1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	PDRB ADHK (Milyar Rp.)	Pertumbuhan (persen)
1	2019	6,616.25	6.87
2	2020	6,575.76	-0.61
3	2021	6,908.05	5.05
4	2022	7,228.40	4.64
5	2023	7,507.06	3.86
6	2024	7,832.68	4.34
Rata-rata		***7,111.37***	***4.03***

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2025 (BPS)

Pada periode 2019-2024, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar cukup signifikan yakni 6,87 persen. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami resesi dan melambat hingga -0,61 persen. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19. Hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dibatasi, mengakibatkan laju inflasi tak terkendali, daya beli masyarakat menurun karena lemahnya pendapatan serta meningkatnya jumlah pengangguran khususnya dari sektor jasa. Selanjutnya seiring dengan kelonggaran kebijakan PSBB yang diberikan pemerintah, dimana aktivitas ekonomi dibuka sedikit demi sedikit serta banyaknya program stimulan dalam bentuk bantuan sosial di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga mencapai 5,05 persen. Namun hal ini diyakini hanya merupakan pertumbuhan ekonomi semu dimana pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi tidak mencerminkan perbaikan nyata dalam kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Hanya merupakan low base effect yang terjadi akibat kontraksi yang besar di tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan tahun berikutnya akan terlihat tinggi karena perbandingan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Tahun 2021 belum dapat diasumsikan bahwa indikator ekonomi telah pulih sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali mengalami kontraksi di Tahun 2022 dan 2023. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar kembali meningkat di Tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,34 persen (meningkat 0,48 poin).

Jika dibandingkan dengan daerah se kawasan, Kabupaten Takalar yang tergabung dalam Kawasan Ekonomi Makassar bersama Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2024 hanya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kabupten Maros. Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten/kota dalam Kawasan Ekonomi Makassar pada periode 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Takalar	-0,61	5,05	4,64	3,86	**4,34**
Gowa	1,76	7,26	4,59	5,82	5,39
Makassar	-1,27	4,47	5,40	5,31	5,56
Maros	-10,87	1,36	9,13	5,00	3,79
Pangkep	-1,69	3,46	4,93	4,75	5,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar berada lebih rendah 0,68 poin dari pertumbuhan ekonomi Sulsel dan0,69 poin dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, meskipun mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar secara urutan masih terbilang rendah. Kabupaten Takalar hanya menempati posisi ke-18 sebagai kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan. Dalam Kawasan Ekonomi Makassar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pangkep. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar hanya lebih tinggi dari Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros. Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-1
Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024

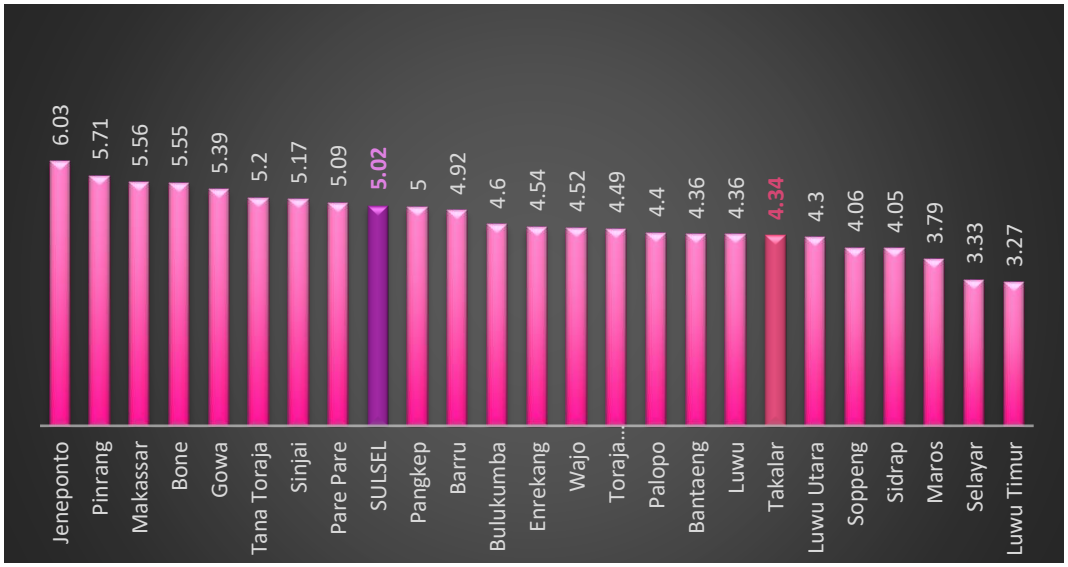

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

2.1.2 Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Untuk mengetahui kinerja sektor perekonomian, menggambarkan struktur ekonomi dan menggambarkan pertumbuhan ekonomi, maka PDRB juga dihitung per sektor usaha. Sektor lapangan usaha yang menjadi komponen perhitungan PDRB terdapat 17 sektor usaha. Tingkat PDRB Kabupaten Takalar per sektor lapangan usaha untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar (milyar rupiah) Tahun 2020 – 2024

TAHUN										
NO	SEKTOR	2020		2021		2022		2023		2024	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	5.019,28	3.027,89	5.699,39	3.297,61	6.320,33	3.413,74	6.530,13	3.543,31	6,660.66	3,675.77
2	Pertambangan Dan Penggalian	185,98	106,41	194,26	109,76	208,08	112,54	229,29	120,58	232.73	122.42
3	Industri Pengolahan	518,24	358,77	534,69	366,41	604,13	398,09	639,11	409,99	686.99	426.87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,49	11,77	12,26	12,00	12,86	12,22	13,83	12,76	14.76	13.06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	4,52	3,65	4,82	3,86	5,29	4,19	5,54	4,35	5.80	4.54
6	Konstruksi	749,41	453,33	776,83	465,14	865,43	488,56	939,05	513,27	973.20	528.14
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.264,65	935,77	1.340,95	975,04	1.475,83	1.029,75	1.601,04	1.075,53	1,722.77	1,132.75
8	Transportasi dan Pergudangan	265,67	197,97	279,50	204,25	314,71	219,22	357,45	230,35	389.97	245.35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	31,99	21,58	33,52	22,36	37,08	24,06	40,96	25,87	44.67	27.70
10	Informasi Dan Komunikasi	410,77	302,93	426,28	313,53	455,91	330,52	490,50	351,94	526.06	374.63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,11	90,10	198,32	96,58	214,10	97,03	212,76	95,02	217.56	96.35
12	Real Estate	540,02	383,44	546,61	387,56	595,75	410,21	639,89	434,56	690.42	459.95
13	Jasa Perusahaan	0,58	0,43	0,59	0,43	0,67	0,47	0,77	0,51	0.79	0.52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734,49	445,52	748,12	450,18	788,53	472,03	776,95	458,92	831.50	478.44
15	Jasa Pendidikan	141,35	96,13	147,85	100,69	152,71	102,75	164,37	108,02	183.97	115.70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,38	79,84	159,04	87,17	180,00	96,51	197,62	103,87	212.65	109.66
17	Jasa Lainnya	22,38	15,22	23,06	15,47	25,64	16,50	29,12	18,22	33.59	20.83
PDRB		***10.220,31***	***6.575,76***	***11.126,11***	***6.908,05***	***12.257,05***	***7.228,40***	***12.868,38***	***7.507,06***	***13,428.09***	***7,832.68***

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2024

Sebagai daerah agromaritim, sektor lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Takalar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan tingkat kontribusi pada tahun 2024 sebesar 49,6 persen. capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,15 poin jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi modil dan sepeda yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2024, kontribusi sektor usaha ini terhadap PDRB sebesar 12,83 persen, meningkat 0.39 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk laju pertumbuhan per sektor, sektor jasa lainnya menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dengan capaian 14,34 persen, disusul oleh sektor penyediaan akomodasi dan makanan dengan capaian 7,06 persen serta sektor transportasi dan pergudangan dengan capaian 6,51 persen.

Jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi per sektor, terdapat beberapa sektor usaha yang mengalami kontraksi di Tahun 2024. Sektor usaha yang mengalami kontraksi di atas 1 poin antara lain :

a. Sektor jasa perusahaan

   Sektor ini secara spesifik mencakup berbagai aktivitas jasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas bisnis, biasanya bukan langsung ke konsumen akhir, tetapi untuk kebutuhan internal atau antar perusahaan seperti jasa konsultan, jasa desain grafis dan arsitektur, jasa outsourching dan jasa penyewaan alat berat. Sektor ini mengalami kontraksi yag cukup besar yakni 6,68 poin. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor ekonomi lain seperti pertanian, , pertambangan dan galian, konstruksi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta real estate. Sehingga jika sektor-sektor tersebut mengalami kontraksi, maka sektor penyedia jasa perusahaan juga akan terdampak. Selain permintaan jassa yang menurun, tingkat ketersediaan tenaga kerja terampil yang menjadi asset pada sektor ini masih sangat rendah. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, selain meningkatkan minat investasi agar aktivitas perekonomian terus bergerak, diharapkan pula dapat menyediakan tenaga kerja lokal yang telah dibekali kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan melalui pelatihan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan Misi Bupati Pertama Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Program Unggulan Takalar Unggul Pelayanan Publik, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Meskipun menjadi sektor dengan tingkat kontraksi tertinggi di Tahun 2024, namun dengan tingkat

kontribusi yang hanya 0,01 persen, maka sektor ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Sektor pertambangan dan penggalian

Potensi pertambangan dan penggalian di Kabupaten Takalar mencakup sumber daya alam non logam dan non energi berupa pasir, batu kali, batu pecah, tanah liat dan garam. Sektor yang berkontribusi sebesar 1,73 persen terhadap PDRB ini mengalami kontraksi yang cukup besar di Tahun 2024 yakni mencapai 5,63 poin. Kontraksi ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas konstruksi di Kabupaten Takalar sehingga permintaan bahan kontruksi menurun. Sejalan dengan Misi Ketiga Membangun dan Mengembangkan Kemudahan Akses Infrastruktur, aktifitas konstruksi di Tahun 2025 diharapkan meningkat dengan adanya berbagai proyek pemerintah yang akan dilaksanakan seperti pembangunan Kantor Camat di tiga kecamatan baru, pembangunan Kantor Bupati baru serta aktifitas pembangunan di Kawasan Industri Takalar. Untuk komoditas garam, produksi pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 272,15 persen jika dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2023. Namun produk garam di Kabupaten Takalar masih merupakan garam rumah tangga yang bernilai jual rendah. Untuk itu, Kabupaten Takalar yang merupakan salah satu sentra produksi garam di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksi garam dari garam rumah tangga menjadi garam industri yang lebih bernilai jual tinggi. Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Takalar Unggul Produksi Hasil Laut dan Budidaya Perikanan.

c. Sektor konstruksi

Sektor ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur dan bangunan. Sektor ini mengalami kontraksi sebesar 2,16 poin di Tahun 2024, disebabkan karena aktifitas pekerjaan konstruksi yang rendah. Seperti disampaikan di atas bahwa sejalan dengan Misi Ketiga dan Program Unggulan Keenam Bupati Takalar, beberapa pekerjaan konstruksi bangunan kantor direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2025. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

d. Sektor pengadaan listrik dan gas

Sektor ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan energi listrik dan gas kepada konsumen, baik rumah tangga, industri maupun bisnis lainnya. Meskipun sektor ini dominan dikelola oleh pemerintah pusat melalui PLN dan Pertamina, namun aktivitas ekonominya berlangsung di daerah dan menciptakan nilai tambah lokal

yang menjadi dasar perhitungan PDRB oleh BPS. Sektor ini mengalami kontraksi di Tahun 2024 sebesar 2,05 poin. Hal ini menjadi efek domino dari peningkatan laju pertumbuhan sektor ini di Tahun 2023 sebesar 2,15 poin. Peningkatan ini disebabkan karena karena meningkatnya konsumsi LPG 3 Kg untuk pengairan di sektor pertanian sebagai dampak dari kekeringan yang terjadi. Konsumsi LPG 3 Kg kembali normal di Tahun 2024 seiring dengan berakhirnya bencana kekeringan, sehingga permintaan gas menurun dan mengakibatkan kontraksi dari sektor ini.

e. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (-2,04 poin).
Dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,58 % di tahun 2024, sektor ini juga mengalami kontraksi sebesar 2,04 poin. Yang dihitung dalam PDRB adalah output ekonomi dari kedua sektor ini seperti upah tenaga kerja, keuntungan lembaga kesehatan dan belanja masyarakat untuk jasa tersebut. Angka PDBR sektor ini dapat dipengaruhi jumlah fasilitas kesehatan, tingkat layanan, program pemerintah terkait jaminan kesehatan dan perubahan demografi. Saat ini, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Takalar telah melampaui standar kebutuhan wilayah. Sama halnya denga tingkat kepesertaan penduduk terhadap BPJS yang telah mencapai di atas 95%. Sedangkan untuk perubahan demografi di Tahun 2024, trend pertambahan jumlah penduduk masih normal dan cukup konsisten mengikuti trend tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diperkirakan kontraksi di sektor ini disebabkan oleh tingkat layanan yang menurun. Hal ini sejalan dengan fenomena Covid-19 yang terjadi dikurun waktu tahun 2019 sampai dengan awal 2023, dimana intensitas pemeriksaan kesehatan sangat tinggi dalam tiga tahun tersebut. Pandemi Covid 19 melandai pada Tahun 2023 dimana intensitas pemeriksaan kesehatan turun sangat seiginifikan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada sektor tersebut.

Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB juga mengalami kontraksi sebesar -0,06 poin. Meskipun kontraksinya di bawah satu poin, namun mengingat kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 49,6 %, maka akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar. Kontraksi ini dipengaruhi el nino yang menguat di pertengahan hingga akhir 2023 dan berdampak terhadap musim tanam 2024. Meskipun produksi pertanian khususnya komoditas padi mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun elnino menyebabkan biaya produksi menjadi sangat tinggi dalam hal pengairan lahan. Ditambah lagi dengan permasalahan kelangkaan pupuk dan harga jual gabah yang rendah

menjadi banyak faktor yang menyebabkan kontraksi di sektor ini. Pemanfaatan teknologi pada bidang pertanian dan perikanan diharapkan mampu menekan biaya produksi menjadi lebih rendah. Selain itu, standarisasi harga komoditas hasil pertanian yang adil juga senantiasa menjadi harapan bagi petani demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta menjadi motivasi bagi generasi milenial untuk menjadi petani muda. Partisipasi generasi milenial pada sektor pertanian diharapkan mampu mempercepat transformasi ke arah pertanian modern yang berbasis digital. Data kontribusi dan laju pertumbuhan per sektor PDRB Kabupataen Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-4
Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

No	SEKTOR	Kontribusi terhadap PDRB ADHB					Laju Pertumbuhan per Sektor				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	49,11	51,23	51,56	50,75	49.6	-1,55	7,31	3,52	3,80	**3.74**
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,82	1,75	1,70	1,78	1.73	2,77	3,14	2,53	7,15	**1.52**
3	Industri Pengolahan	5,07	4,81	4,93	4,97	5.12	-2,07	2,13	8,64	2,99	**4.12**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,11	0.11	2,52	1,91	1,86	4,37	**2.32**
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0.04	8,61	5,61	8,76	3,80	**4.41**
6	Konstruksi	7,33	6,98	7,06	7,30	7.25	-1,03	2,61	5,03	5,06	**2.90**
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	12,37	12,05	12,04	12,44	12.83	-1,41	4,20	5,61	4,45	**5.32**
8	Transportasi dan Pergudangan	2,60	2,51	2,57	2,78	2.9	-1,91	3,18	7,33	5,08	**6.51**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,31	0,30	0,30	0,32	0.33	-7,10	3,63	7,59	7,52	**7.06**
10	Informasi Dan Komunikasi	4,02	3,83	3,72	3,81	3.92	10,43	3,50	5,24	6,48	**6.45**
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,78	1,75	1,65	1.62	6,70	7,19	0,47	-2,08	**1.40**
12	Real Estate	5,28	4,91	4,86	4,97	5.14	-0,69	1,07	5,84	5,94	**5.84**
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,00	0,00	0,00	0.01	-4,91	1,32	8,96	9,02	**2.34**
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,19	6,72	6,43	6,04	6.19	-0,30	1,05	4,85	-2,78	**4.25**
15	Jasa Pendidikan	1,38	1,33	1,25	1,28	1.37	4.45	4,75	2,04	5,13	**7.11**
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,43	1,47	1,54	1.58	10,05	9,17	10,72	7,62	**5.58**
17	Jasa Lainnya	0,22	0,21	0,21	0,23	0.25	-9,72	1,66	6,66	10,37	**14.34**
PDRB		***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***-0,61***	***5,05***	***4,64***	***3.86***	***4.34***

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2024 (BPS)

2.1.3 PDRB Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Nilai PDRB perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun. Nilai ini menunjukkan rata-rata banyaknya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk.

PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dimana dari 33,97 juta/jiwa di Tahun 2020, menjadi 42,36 juta/jiwa di tahun 2024. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga terus meningkat di setiap tahun, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Takalar tidak stagnan dan semakin membaik. Meskipun demikian, PDRB perkapita Kabupaten Takalar Tahun 2023 masih jauh lebih rendah dari PDRB perkapita Provinsi Sulsel (73,57 juta/jiwa) dan PDRB perkapita nasional (78,62 juta/jiwa). Data PDRB Perkapita Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Perkapita (juta)		
	Takalar	Provinsi	Nasional
2020	33.97	55.68	57.29
2021	36,58	59.50	62.26
2022	39,73	65.35	71.03
2023	41,14	69.70	75,00
2024	42,36	73,57	78,62

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2025 dan BPS Provinsi Sulsel, 2025

2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-6
Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2023

No	Indeks Gini	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Takalar	0,482	0,356	0,368	0,375	0,386
2.	Sulsel	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377
3.	Nasional	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

Gini Rasio Kabupaten Takalar cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antarpenduduk, meskipun sektor pertanian dan perikanan yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat masih menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata, terutama kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor primer tersebut. Dominasi sector pertanian dan perikanan yang belum inklusif menyebabkan nilai tambah sector ini belum merata. Kelompok petani dan nelayan kecil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi dan pasar. Selain itu, rendahnya nilai tambah sebagian besar komoditas pertanian dan perikanan karena masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa proses pengolahan lebih lanjut, sehingga nilai ekonomi dinikmati lebih besar oleh pelaku distribusi.

Untuk menurunkan tingakt ketimpangan dan memastikan bahwa pertumbuhan sector unggulan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan pembangunan kedepan dapat diarahkan pada :

1. Penguatan ekonomi rakyat dengan meningkatkan posisi tawar dan kapasitas usaha masyarakat kecil melalui optimalisasi peran koperasi, kelembagaan kelompok tani/nelayan dan BUMDes.
2. Peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan mendapat bagian ekonomi yang lebih besar dari rantai pasok
3. Pemerataan akses terhadap input produksi dan teknologi pertanian/perikanan melalui bantuan social usaha mikro, subsidi yang tepat sasaran dan pelatihan khususnya dalam pemanfaatan teknologi dalam sektor ini.

4. Pengembangan kawasan berbasis potensi local dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yan berbasis wilayah dan menekan ketimpangan antar kecamatan
5. Perlindungan pendapatan masyarakat miskin dan rentan melalui integrasi bantuan social dengan program pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan basis data kemiskinan yang valid dan up to date.

Kenaikan gini rasio di tengah dominasi sector primer menunjukkan urgensi untuk menjadikan pertanian dan perikanan bukan hanya sebagai motor pertumbuhan, tetapi juga sebagai alat pemerataan. Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan inklusif, sektor unggulan Takalar dapat menjadi penggerak utama pengurangan ketimpangan dan peningkataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

2.1.5 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan di bawah garis kemiskinan. Trend perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Namun pada Tahun 2023, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 8,25 persen di Tahun 2022 menjadi 8,29 persen. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran pada Bulan Maret 2023, dimana kenaikan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,22 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,58 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,89 persen; kelompok transportasi sebesar 13,63 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,53 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen. Kenaikan harga ini juga berimbas pada meningkatanya garis kemiskinan di Kabupaten Takalar. Meskipun garis kemiskinan pada sepuluh tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Namun, Kenaikan Garis Kemiskinan secara signifikan terjadi pada Tahun 2023, dimana kenaikannya mencapai Rp. 29.879,- (7,49 persen) dari Rp. 299.062,- perkapita/bulan di Tahun 2022 menjadi Rp. 428.941,- perkapita/bulan di Tahun 2023.

Pada tahun 2024, Angka kemiskinan Kabupaten Takalar kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 7,75 persen atau turun 0,54 poin dari kondisi tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.510 jiwa atau turun 1.500 jiwa dari kondisi tahun 2023. Ditengah menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2024, Garis kemiskinan Kabupaten Takalar malah mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.852,- dari Rp.428.941,- di Tahun 2023 menjadi Rp. 455.793 di Tahun 2024. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-7
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/Kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Angka Kemiskinan
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,60	8,25
2022	399.062	24,75	8,25
2023	428.941	25,01	8,29
2024	455.793	23,51	7,75

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2024 juga terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dari 8,70 persen di Tahun 2023 turun menjadi 8,06 persen di Tahun 2024. Sedangkan secara nasional, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan dari 9,36 persen di tahun 2023 menjadi 8,57 persen di Tahun 2024. Perbandingan angka kemiskinan antara Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional untuk periode 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-8
Angka Kemiskinan (P_0) Periode Maret
Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020– 2024

Tahun	Wilayah		
	Takalar	Sulawesi Selatan	Nasional
2020	8,44	8,72	9,78
2021	8,25	8,78	10,14
2022	8,25	8,63	9,54
2023	8,29	8,70	9,36
2024	7,75	8,06	8,57

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar berada di posisi 10, daerah

dengan tingkat kemiskinan terendah di Tahun 2024. Kota Makassar menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah dengan capaian 4,97 persen. Sedangkan daerah dengan tingkat kemiskinan teringgi adalah Kabupaten Pangkep dengan capaian 12,41 persen :

Grafik II-2

Angka Kemiskinan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

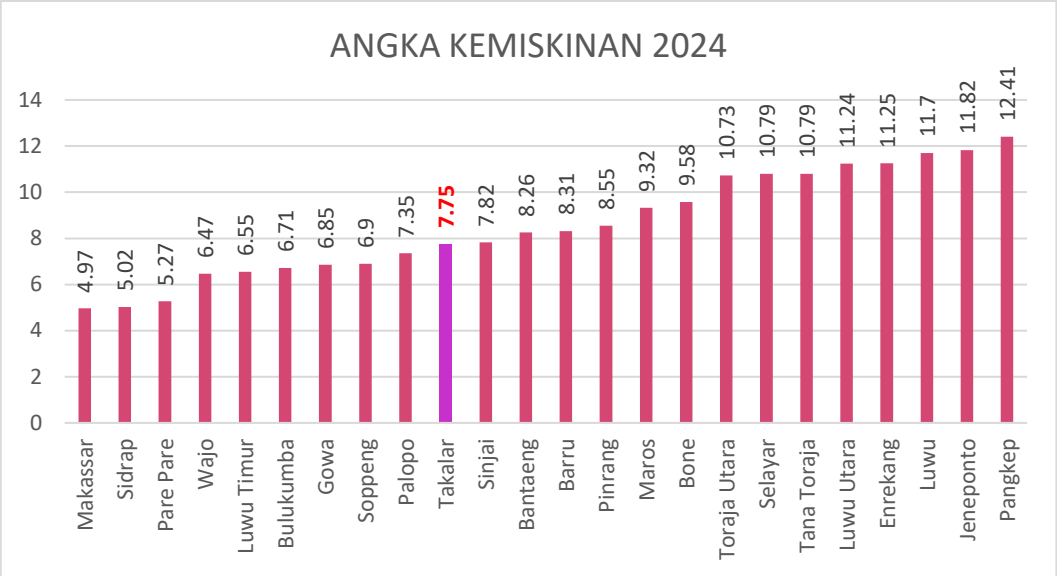

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan (Po) tidak serta merta diikuti dengan turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini dapat dilihat dari kondisi kemiskinan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024, dimana untuk P1 dan P2 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023, meskipun P0 mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang keluar dari kemiskinan adalah orang-orang yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan, sehingga jika terjadi peningkatan pendapatan walaupun sedikit maka mereka akan keluar dari status miskin dan masuk ke dalam kelompok rentan miskin, namun mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap P1 dan P2 karena kondisi mereka yang tidak terlalu miskin. Sedangkan kelompok miskin yang tersisa jutru memiliki kesenjangan pengeluaran yang semakin jauh dari garis kemiskinan serta mengalami ketimpangan pengeluaran yang semakin

lebar antar penduduk miskin. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
2020	1,09	0,21
2021	1,03	0,17
2022	0,88	0,15
2023	0,81	0,11
2024	1,22	0,29

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar

Faktor- faktor yang mungkin mempengaruhi peningkatan P1 dan P2 antara lain :

1. Terjadinya kontraksi sebesar 0.06 poin pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor perekonomian utama di Kabupaten Takalar. Hal ini akan berdampak langsung terhadap rumah tangga miskin yang mayoritas bergantung pada sektor ini.
2. Kenaikan harga bahan pokok khususnya beras dan LPG 3 Kg yang meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga miskin
3. Program bantuan sosial dan subsidi pemerintah yang belum menjangkau kelompok msayarakat sangat miskin secara optimal
4. Pemanfaatan teknologi dalam sektor primer seperti mekanisme pertanian berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar, termasuk buruh tani yang merupakan kelompok miskin ekstrem. Bila tidak diimbangi dengan program alih keterampilan ata perluasan lapangan kerja alternatif, maka transformasi ini justru dapat memperdalam kemiskinan kelompok tersebut. Pemanfaatan teknologi akan menurunkan partisipasi buruh tani dalam proses produksi pertanian sehingga mereka kehilangan pemasukan dan beresiko semakin jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kebijakan yang direkomendasikan antara lain :

1. Peningkatan kualitas data kesejahteraan sosial dan efektivitas targetting bansos agar menjangkau kelompok miskin ekstrem
2. Mendorong pemulihan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber penghidupan utama

3. Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui monitoring secara rutin serta intervensi harga melalui operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat
4. Oprtimalisasi program pemanfaatan pekarangan untuk usaha pertanian dan peternakan berskala kecil untuk mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta dapat menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat
5. Meningkatkan intervensi pada ketimpangan antar wilayah melalui pemetaan pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan potensi dan pemerataan infrastruktur
6. Mendorong pemanfaatan teknologi yang inklusif disertai dengan pendidikan keterampilan baru bagi tenaga kerja sektor primer, guna mencegah eksklusi ekonomi.
7. Penguatan program pelatihan dan pendampingan seperti :
   a. pelatihan diversifikasi usaha misalnya pertanian organik, peternakan skala rumah tangga dan pengolahan hasil tani
   b. Program padat karya berbasis desa untuk menyerap tenaga jkerja yang terdampak
   c. Kemitraan dengan UMKM, BUMDes dan Koperasi Merah Putih untuk integrasi tenaga kerja ke dalam rantai nilai lokal
   d. Kolaborasi lintas sektor dengan BLK (Balai Latihan Kerja) dan Perguruan Tinggi lokal dalam menyediakan pelatihan adaptif.

Penurunan angka kemiskinan di Takalar patut diapresiasi, namun perlu diwaspadai trend kenaikan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Fokus kebijakan ke depan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara absolut, tetapi juga mengurangi beban dan ketimpangan di antara masyarakat miskin itu sendiri. Selain itu, dalam menghadapi modernisasi sektor primer, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi transisi tenaga kerja agar tidak memperparah kemiskinan ekstrem

2.1.6 Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok sebagai berikut:

1. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang tidak memiliki usaha dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan
4. penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat

pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik diperoleh hasil sebesar 3,84 persen, lebih tinggi 0,26 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini juga lebih tinggi dari target TPT yang ditetapkan untuk Tahun 2024 yakni sebanyak 3,11 persen dengan kelebihan 0,73 poin. Namun jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulsel dan Nasional, capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Takalar tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 4,19 persen dan Nasional yaitu sebesar 4,91 persen.

Indikator ini juga menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap suplai tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis, pemanfaatan teknologi secara masif, dan lain-lain. Kabupaten Takalar yang merupakan daerah yang berbasis ekonomi pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan, dengan pemanfaatan teknologi dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas serta rendahnya minat anak muda untuk berpartisipasi pada sektor ini, menyebabkan daya serap tenaga kerjanya mulai menurun. Selain itu, kontraksi ekonomi yang terjadi di sektor jasa perusahaan, kostruksi dan pertanian yang menjadi andalan serapan tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar. Terakhir, kondisi ekonomi global yang tidak stabil dalam 5 tahun terakhir setelah pandemi Covid-19 kemudian dilanjutkan dengan ketegangan Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung sampai saat ini, memaksa para pelaku usaha pada seluruh level untuk berupaya keras menjaga stabilitas usahanya, salah satunya melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk menjawab hal tersebut, sejalan dengan Tujuh Program Prioritas Daerah Kabupaten Takalar, beberapa kebijakan yang dapat menjadi solusi antara lain :

1. Program padat karya produkstif dan infrastruktur desa dengan pelibatan tenaga kerja lokal
2. Pemberian pelatihan, peralatan dan akses modal usaha bagi UMKM agar bisa memperluas usahanya dan meyerap tenaga kerja
3. Mendorong hilirisasi lokal pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga petani dan nelayan tidak hanya terlibat dalam proses produksi saja, namun juga masuk pada proses pengolahan dan pemasaran

4. Membangun sentra pengolahan kecil berbasis potensi kewilayahan
5. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dengan berbasis pada keterampilan pengolahan potensi lokal seperti pengolahan hasil pertanian/perikanan, teknik pendingin untuk usaha kuliner dan perikanan, teknik packaging dan pemasaran, digital marketing, desain grafis dan lain-lain.
6. Kemitraan pelatihan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan magang dan pelatihan tenaga kerja agar spesifikasi tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
7. Diversifikasi usaha tani dengan mendorong petani tidak hanya menanam padi dan jagung saja, tapi juga menanam tanaman hortikultura dan perkebunan yang bernilai jual tinggi seperti cabai, bawang, semangka, kelapa dan pisang.

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka antara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II-10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2020	4,16	6,31	7,07
2	2021	3,93	5,72	6,49
3	2022	2,63	4,51	5,86
4	2023	3,58	4,33	5,32
5	2024	3,84	4,19	4,91

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar, TPT Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 merupakan kabupaten dengan TPT terendah di kawasan tersebut. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan TPT tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai TPT sebesar 9,71 persen. Perbandingan TPT kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar untuk Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Takalar	4,16	3,93	2,63	3,58	3,84
2.	Gowa	6,44	4,30	3,26	3,43	3,91
3.	Makassar	15,92	13,18	11,82	10,60	9,71
4.	Maros	6,28	6,30	5,04	3,64	4,34
5.	Pangkep	5,18	5,86	5,23	5,05	3,99

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Takalar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Takalar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH), sedangkan pendidikan diukur dengan Indeks Pendidikan dengan dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

2.1.7.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. UHH Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-12
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Usia Harapan Sekolah		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,18	70,57	71,47
2	2021	67,30	70,66	71,57
3	2022	67,64	70,97	71,85
4	2023	73,43	73,63	73,93
5	2024	73,69	73,83	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2024 dan BPS Provinsi Sulsel, 2024

Untuk pengukuran UHH, Badan Pusat Statistik melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Hal ini dilakukan sejak Tahun 2023. Dengan penggunaan sistem baru ini, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana capaian pada Tahun 2023 yang sebesar 73,43 tahun meningkat menjadi 73,83 tahun di Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Sulsel, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2023 masih lebih rendah 0,14 poin. Sedangkan untuk UHH nasional, hingga dokumen ini disusun, data tersebut belum dirilis.

2.1.7.2 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Berdasarkan standar internasional yang digunakan UNDP batas maksimum Harapan Lama Sekolah 18 tahun sedangkan batas maksimum Rata-rata Lama Sekolah 15 tahun.

Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 sebesar 61,38, meningkat 1,15 poin dari capaian Tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Takalar. Meskipun demikian, Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar masih jauh di bawah Indeks Pendidikan Provinsi Sulsel dengan selisih 6 poin hampir di setiap tahunnya. Perbandigan antara Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulsel untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-13
Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pendidikan	
		Takalar	Provinsi
1	2020	58,77	65,29
2	2021	59,47	65,76
3	2022	60,13	66,34
4	2023	60,23	N/A
5	2024	61,38	66,61

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Tahun 2025

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 adalah 12,49 tahun, yang berarti anak berusia 7 tahun pada 2023 diharapkan dapat bersekolah selama 12,49 tahun atau sampai dengan jenjang sekolah menengah atas tahun terakhir. Harapan lama sekolah mengalami peningkatan 0,01 tahun dari Tahun 2022 (HLS 2022 selama 12,48 tahun). Namun demikian, Harapan lama sekolah Kabupaten Takalar tetap masih lebih rendah dari HLS Provinsi dan HLS Nasional.

2.1.7.3 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita disesuaikan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-14
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pengeluaran Kapita Disesuaikan (Ribu/orang/tahun)		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,31	71,93	71,94
2	2021	67,72	72,24	72,29
3	2022	68,31	72,82	72,91
4	2023	71,46	74,6	74,39
5	2024	72,06	75,18	75,02

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2025 dan BPS Provinsi Sulsel, 2025

Pengeluaran Perkapita disesuaikan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 adalah Rp. 11.679.000 per orang per tahun naik Rp. 440.000,-. Dibandingkan Tahun 2023 (3,91 persen). Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data komposit IPM di atas, maka capaian IPM Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional tersaji pada tabel berikut.

Tabel II-15
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,31	71,93	71,94
2	2021	67,72	72,24	72,29
3	2022	68,31	72,82	72,91
4	2023	71,46	74,6	74,39
5	2024	72,06	75,18	75,02

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2024 dan BPS Provinsi Sulsel, 2024

Penggunaan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang oleh Badan Pusat Statistik dalam melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 berdampak pada kenaikan IPM Kabupaten Takalar secara signifikan, dimana capaian IPM Kabupaten Takalar meningkat 3,15 poin dari 68,31 pada Tahun 2022 menjadi 71,46 pada Tahun 2023. Kemudian kembali mengalami kenaikan di Tahun 2024 dengan capaian 72,06 atau bertambah sebesar 0,60 poin. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Takalar. Namun demikian, IPM Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari IPM Provinsi Sulsel yang sebesar 75,18 di tahun 2024.

Selain itu, jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar di tahun 2024 masih berada di urutan 19 :

Grafik II-3
Capaian IPM Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

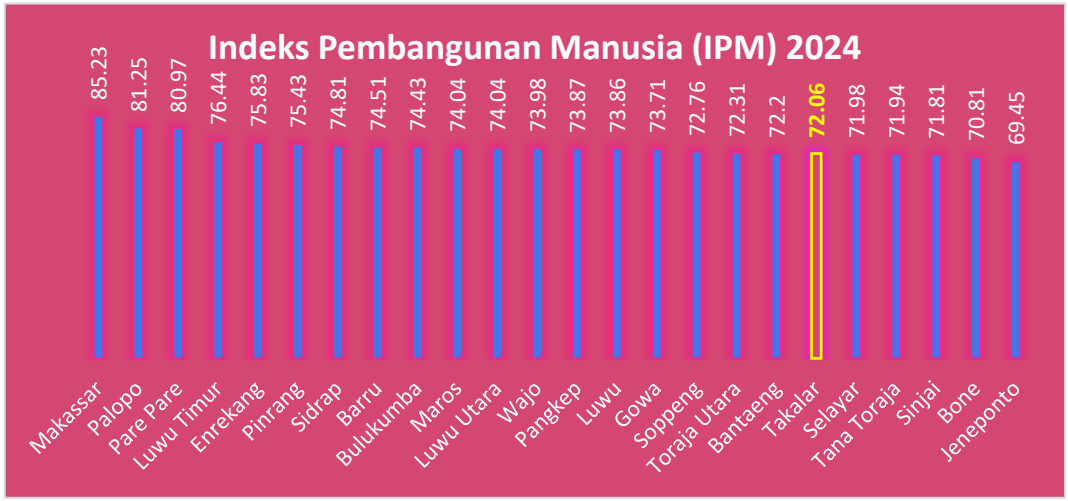

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO3-N), Total Fosfat (T-Phosphat), total nitrogen, Fecal Coliform, klorofil dan transparansi; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan vegetasi non hutan. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dan indikator kompositnya diklasifikasikan berdasarkan range capaian dengan klasifikasi sangat baik (skor 90-100), baik (skor 70-90), sedang (skor 50-70), kurang (skor 25-50) dan sangat kurang (skor 0-25).

Tabel II-16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar Tahun 2021 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Peningkatan Indeks Kualitas Air	Angka	0	0	60	60
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Angka	85.69	85.95	90.31	92.80
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	Angka	30.39	30.39	32.41	32.26
IKLH		41.36	41.47	66.23	67.21

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2025

Pada tahun 2024, capaian Indeks Kualitas Air sebesar 60 dengan kategori sedang, capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 92,80 dengan kategori baik dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 32,26 dengan kategori kurang. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,21 dengan kategori sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH Provinsi Sulsel Tahun 2024 yang sebesar 75,70, IKLH Kabupaten Takalar berada lebih rendah 8,49 poin dari capaian tersebut. Dari ketiga indikator penyusun IKLH,

Capaian Indeks Tutupan Lahan merupakan indikator dengan capaian terendah. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa upaya penambahan ruang terbuka hijau antara lain melalui penghijauan, hutan kota dan penanaman pada sempadan sungai. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya pelestaria hutan pada tutupan hutan bervegetasi melalui pemberdayaan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 6626/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 bahwa luas hutan di Kabupaten Takalar 7.121 Ha atau 12,79 persen dari luas wilayah Kabupaten Takalar, yang terdiri dari hutan lindung seluas 85 Ha, hutan produksi seluas 2.810 Ha dan kawasan konservasi seluas 4.226 Ha.

2.1.9 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah emisi gas dari berbagai aktifitas manusia di bumi yang dilepaskan ke atmosfer dan menimbulkan efek rumah kaca dimana panas matahari terperangkap didalamnya dan mencegahnya bocor kembali ke ruang angkasa sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang dimaksud adalah *Karbon Dioksida* (CO2), *Belerang Dioksida* (SO2), *Nitrogen Monoksida* (NO), *Nitrogen Dioksida* (NO2), *Gas Metana* (CH4) dan *Klorofluorokarbon* (CFC).

Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan aksi nyata dari semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim baik itu melalui pembangunan rendah karbon maupun pembangunan berketahanan iklim. Aksi nyata tersebut meliputi beberapa sektor yakni energi, transportasi, lahan, pengolahan limbah dan kawasan pesisir dan kelautan. Sebagai wadah/platform perekaman aksi tersebut maka Bappenas menyediakan Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) yang akan menyajikan data dan informasi total pencapaian penurunan emisi GRK sebagai indikator dari aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara akurat, transparan dan partisipatif.

Sejak Tahun 2020 Kabupaten Takalar secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang yang dianggarkan dalam APBD melalui Aplikasi AKSARA. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu meskipun belum mencakup semua sektor. Dari Tahun 2020-2024, hanya sektor energi dan pemanfaatan lahan yang dilaporkan secara aktif oleh

perangkat daerah pengampu data. Berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada Aplikasi AKSARA, persentase penurunan emisi GRK Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2023 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-4
Total Penurunan Emisi GRK Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

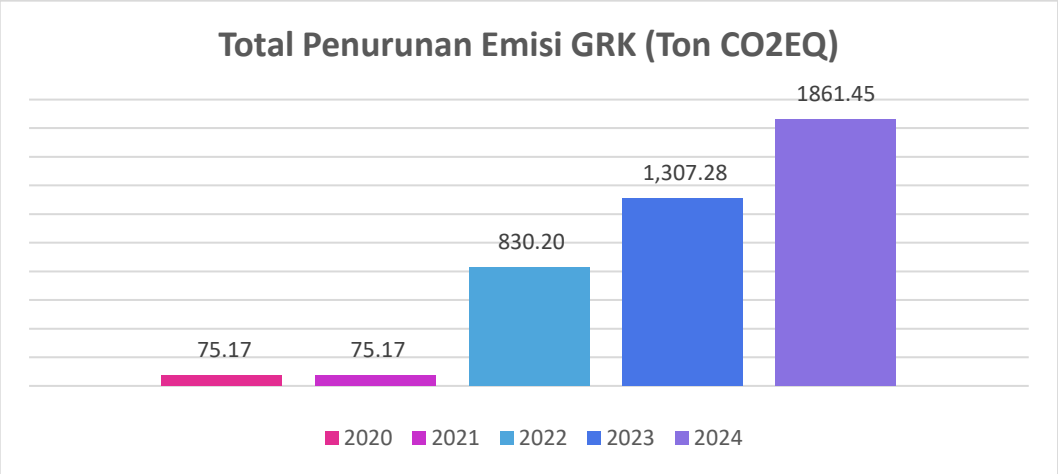

Sumber : Aplikasi AKSARA Bappenas RI

Hingga Tahun 2023, dari beberapa aksi yang dilaksanakan dan dilaporkan pada Aplikasi AKSARA dapat menurunkan potensi emisi GRK sebanyak 1.307,28 Ton CO2EQ yang dikontribusi oleh sektor lahan sebanyak 1.151,03 Ton CO2EQ (88.05 persen), sektor energi sebanyak 120,12 Ton CO2EQ (9,19 persen) dan sektor kawasan pesisir dan kelautan sebanyak 36,13 Ton CO2EQ (2,76 persen). Kemudian pada Tahun 2024, terjadi peningkatan penurunan potensi emisi GRK hingga mencapai 1.861 Ton CO2EQ atau meningkat hingga 42,39 persen. Capaian ini dikontribusi oleh peningkatan yang terjadi di sektor lahan dengan capaian sebesar 1.705,2 Ton CO2EQ. Sementara kontribusi dua sektor lainnya yakni sektor energi dan kawasan pesisir tidak mengalami perubahan. Upaya penurunan potensi emisi GRK tentu saja didukung oleh anggaran yang dialokasikan pada masing-masing perangkat daerah pengampu. Besaran APBD yang mendukung pelaksanaan upaya tersebut pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,03 Milyar dengan rincian Rp. 767,28 juta untuk pembiayaan efisiensi energi melalui penggunaan lampu jalan hemat energi jenis LED/CFL dan Rp. 1,26 milyar untuk pembiayaan penggunaan pupuk organik dan varietas padi rendah emisi pada lahan pertanian. Sedangkan terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran yakni kegiatan car freeday sebagai upaya mengurangi emisi kendaraan dan penanaman mangrove di kawasan pesisir. Sedangkan pada Tahun 2024, berdasarkan laporan pada Aplikasi AKSARA bahwa

anggaran yang dialokasi untuk penurunan potensi emisi GRK pada APBD adalah sebesar Rp.244.548.000 untuk kegiatan penggunaan pupuk organik dan varietas padi rendah emisi pada lahan pertanian. Capaian kinerja maupun besaran alokasi anggaran ini kemungkinan besar masih akan bertambah, karena beberapa perangkat daerah pengampu belum melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penurunan potensi GRK tahun 2024 untuk Tahun 2024.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Sampai Triwulan Ke I

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-17
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*3*	*4*	*5*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	16	66	6	16	68
2	Dinas Kesehatan	4	16	70	4	16	71
3	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	2	2	3	2	2	4
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	13	23	51	13	23	52
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	14	62	3	14	66
6	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	2	10	17	2	10	19
7	Dinas Sosial Pemberdayaan	9	18	46	9	18	49

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Masyarakat dan Desa						
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7	13	27	7	13	29
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	20	48	8	20	49
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	16	44	8	16	46
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10	19	47	10	19	53
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	30	5	14	32
13	Dinas Perhubungan	2	11	26	2	11	29
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5	13	38	5	13	39
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	10	28	5	10	32
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8	18	43	8	18	46
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	19	51	6	19	52

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
18	Dinas Perikanan	4	16	35	4	16	38
19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	17	38	6	17	40
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6	12	25	6	12	27
21	Sekretariat Daerah	3	21	71	3	21	87
22	Sekretariat DPRD	2	17	70	2	17	71
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	17	44	4	17	48
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	83	3	13	84
25	Badan Pendapatan Daerah	2	9	46	2	9	49
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	33	3	12	35
27	Inspektorat Daerah	3	12	46	3	12	50
28	Kecamatan Pattalassang	3	10	25	3	10	27
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	6	17	38	6	17	41
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	5	12	31	5	12	36
31	Kecamatan Mangarabombang	4	13	32	4	13	36
32	Kecamatan Mappakasunggu	3	12	23	3	12	26
33	Kecamatan Sanrobone	3	10	18	3	10	21
34	Kecamatan Galesong	5	13	28	5	13	30
35	Kecamatan Galesong Utara	5	14	32	5	14	38

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
36	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	5	14	27	5	14	29
37	Kecamatan Galesong Selatan	5	12	22	5	12	23
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	42	6	12	44
	TOTAL	189	537	1506	189	537	1616

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Bappelitbangda

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 189, jumlah kegiatan 537, dan jumlah sub kegiatan 1506, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 189, jumlah indikator kegiatan sebanyak 537, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 1616.

2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-18
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2025
Sampai Triwulan I

NO	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	367.470.988.709	57.800.012.167	7,95%	15,73%
2	Dinas Kesehatan	119.413.720.524	17.846.296.146	4,60%	14,94%
3	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	118.488.387.392	22.867.511.974	10,19%	19,30%
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.939.646.766	2.698.459.671	4,93%	4,03%

NO	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.346.233.760	1.577.129.284	6,79%	18,90%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.031.236.816	425.863.720	23,53%	14,05%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.788.105.763	759.120.199	15,85%	13,12%
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.227.438.068	1.176.326.411	3,31%	16,28%
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11.406.121.874	1.173.504.342	2,41%	10,29%
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	16.364.539.848	2.350.930.992	13,34%	14,37%
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	10.065.046.240	1.517.276.955	30,69%	15,07%
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.528.671.531	623.360.487	21,42%	13,76%
13	Dinas Perhubungan	7.405.818.172	914.948.565	13,51%	12,35%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	6.627.912.394	1.336.922.524	0,85%	20,17%
15	Dinas Penanaman Modal dan	3.416.127.054	519.329.292	8,47%	15,20%

NO	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
16	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	8.191.250.185	1.354.229.581	7,46%	16,53%
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.321.025.548	546.757.604	11,57%	16,46%
18	Dinas Perikanan	6.526.814.256	920.527.280	22,18%	14,10%
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.117.295.660	781.590.834	21,72%	12,78%
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.050.922.795	706.726.716	25,92%	17,45%
21	Sekretariat Daerah	35.675.164.693	8.039.653.716	20,12%	22,54%
22	Sekretariat DPRD	37.080.972.566	6.036.335.536	19,20%	16,28%
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.050.995.109	784.126.841	14,54%	12,96%
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	191.690.022.197	9.402.054.323	11,79%	4,90%
25	Badan Pendapatan Daerah	10.911.032.803	1.269.934.475	18,17%	11,64%
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.330.230.913	902.197.387	18,11%	14,25%
27	Inspektorat	17.936.169.855	1.729.331.064	7,77%	9,64%
28	Kecamatan Pattallassang	9.796.225.393	1.584.644.760	40,26%	16,18%
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	8.415.592.258	1.245.634.812	17,69%	14,80%
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	6.922.588.783	1.128.331.164	23,97%	16,30%

NO	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
31	Kecamatan Mangarabombang	3.372.273.817	563.596.805	1,22%	16,71%
32	Kecamatan Mappakasunggu	2.495.848.566	413.453.649	15,30%	16,57%
33	Kecamatan Sanrobone	1.389.137.012	220.053.740	6,49%	15,84%
34	Kecamatan Galesong	1.917.260.543	302.389.696	12,34%	15,77%
35	Kecamatan Galesong Utara	3.181.114.352	548.425.598	19,80%	17,24%
36	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	1.393.731.718	217.017.327	2,01%	15,57%
37	Kecamatan Galesong Selatan	1.722.482.120	294.767.663	4,39%	17,11%
38	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.421.497.176	720.788.852	8,03%	13,30%
	Total	***1.136.429.643.229***	***153.299.562.152***	***13,63%***	***13,49%***

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Bappelitbangda

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp. **153.299.562.152,-** anggaran tersebut dilaksanakan oleh 38 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 13,49 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 13,63 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian masih kurang 11,51 persen dari target 25 persen yang diharapkan pada triwulan I. Adapun organisasi perangkat daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 20 persen (tinggi) adalah :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 14,05 persen dengan realisasi fisik sebesar 23,53 persen;
2. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan dengan realisasi anggaran sebesar 15,07 persen dengan realisasi fisik 30,69 persen;
3. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan realisasi anggaran sebesar 13,76 persen dengan realisasi fisik sebesar 21,42 persen;

4. Dinas Perikanan dengan realisasi anggaran sebesar 14,10 persen dengan realisasi fisik sebesar 22,18 persen;
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi anggaran sebesar 12,78 persen dengan realisasi fisik sebesar 21,72 persen;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar 17,45 persen dengan realisasi fisik sebesar 25,92 persen;
7. Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 22,54 persen dengan realisasi fisik sebesar 20,12 persen;
8. Kecamatan Pattallassang dengan realisasi anggaran sebesar 16,18 persen dengan realisasi fisik sebesar 40,26 persen;
9. Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan realisasi anggaran sebesar 16,30 persen dengan realisasi fisik sebesar 23,97 persen;

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan I masih dalam kategori sedang yaitu 10-20 persen dengan jumlah sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) OPD atau 86,84 persen dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 3 (Tiga) OPD atau 7,89 persen dari jumlah keseluruhan OPD dengan realisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 10 persen hingga triwulan I.

2.2.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 25 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori sangat tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 189 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 107 program atau 56,61 persen

(realisasinya 0-10 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 45 program atau 23,81 persen (realisasi >10-20 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 37 program atau 19,58 persen (realisasi diatas 20 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 537 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 281 kegiatan atau 52,33 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 10 persen, sedangkan yang berada dalam kategori sedang sebanyak 135 kegiatan atau 25,14 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 20 persen sebanyak 121 kegiatan atau masih 22,53 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1506 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 terdapat 916 sub kegiatan atau 60,82 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 188 sub kegiatan, dan 402 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-19
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	5	1	0	16	10	2	4	66	46	3	17
2	Dinas Kesehatan	4	3	0	1	16	12	2	2	70	52	7	11
3	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	2	0	1	1	2	0	1	1	3	0	1	2
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	13	7	3	3	23	10	4	9	51	26	6	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	0	1	2	14	4	3	7	62	37	2	23
6	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	2	1	1	0	10	6	3	1	17	8	6	3
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	5	1	3	18	9	2	7	46	33	2	11
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7	5	1	1	13	8	2	3	27	19	0	8
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	7	1	0	20	15	4	1	48	40	3	5
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	4	2	2	16	6	3	7	44	16	2	26
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10	6	2	2	19	8	6	5	47	31	3	13
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	2	1	2	14	7	3	4	30	15	4	11
13	Dinas Perhubungan	2	1	1	0	11	6	2	3	26	16	4	6
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5	1	1	3	13	3	5	5	38	13	7	18

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	4	0	1	10	6	3	1	28	20	2	6
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8	6	1	1	18	12	3	3	43	30	3	10
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	3	2	1	19	13	2	4	51	41	1	9
18	Dinas Perikanan	4	2	1	1	16	7	5	4	35	9	14	12
19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	3	1	2	17	6	4	7	38	19	7	12
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6	1	1	4	12	4	3	5	25	12	6	7
21	Sekretariat Daerah	3	2	0	1	21	5	8	8	71	32	14	25
22	Sekretariat DPRD	2	0	2	0	17	9	4	4	70	51	7	12
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	2	0	17	12	4	1	44	31	7	6
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	1	2	0	13	2	8	3	83	35	20	28
25	Badan Pendapatan Daerah	2	1	1	0	9	6	3	0	46	23	11	12
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	2	1	0	12	5	3	4	33	17	5	11
27	Inspektorat Daerah	3	1	2	0	12	10	2	0	46	39	4	3
28	Kecamatan Pattalassang	3	1	1	1	10	4	4	2	25	13	2	10
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	6	5	1	0	17	13	3	1	38	29	4	5
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	5	3	1	1	12	6	3	3	31	23	2	6
31	Kecamatan Mangarabombang	4	3	1	0	13	11	2	0	32	30	0	2
32	Kecamatan Mappakasunggu	3	2	1	0	12	3	7	2	23	7	10	6
33	Kecamatan Sanrobone	3	2	1	0	10	8	1	1	18	13	0	5
34	Kecamatan Galesong	5	2	2	1	13	6	5	2	28	16	5	7
35	Kecamatan Galesong Utara	5	2	1	2	14	7	4	3	32	17	4	11
36	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	5	4	1	0	14	11	2	1	27	22	2	3
37	Kecamatan Galesong Selatan	5	4	1	0	12	7	4	1	22	14	3	5
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	4	1	1	12	4	6	2	42	21	5	16
TOTAL		**189**	**107**	**45**	**37**	**537**	**281**	**135**	**121**	**1506**	**916**	**188**	**402**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Bappelitbangda

2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 10 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 10 – 20 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 20 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 20 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 189 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan satu capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 10 persen terdapat 105 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 10-20 persen) terdapat 31 program, selebihnya sebanyak 53 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 20 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 537 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan satu terdapat 282 kegiatan (52,51 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 10 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 113 kegiatan (21,04 persen), selebihnya terdapat 142 kegiatan (26,44 persen) yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1506 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan satu dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 10 persen terdapat 965 sub kegiatan (64,08 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 124 kegiatan, selebihnya yang capaian

kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 417 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 20 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-20
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6	5	0	1	16	12	2	2	66	47	4	15
2	Dinas Kesehatan	4	4	0	0	16	13	2	1	70	41	6	23
3	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	2	1	0	1	2	1	0	1	3	1	0	2
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	13	10	1	2	23	16	0	7	51	39	0	12
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	2	1	0	14	11	2	1	62	58	1	3
6	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	2	0	1	1	10	5	1	4	17	7	2	8
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	4	1	4	18	8	2	8	46	31	1	14
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7	5	1	1	13	8	2	3	27	19	0	8
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	7	1	0	20	15	5	0	48	39	3	6
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	4	2	2	16	9	1	6	44	30	2	12
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10	4	1	5	19	8	3	8	47	26	1	20
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	2	0	3	14	5	2	7	30	15	2	13
13	Dinas Perhubungan	2	1	0	1	11	7	1	3	26	19	2	5
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5	5	0	0	13	9	4	0	38	34	2	2

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%		0 - 10%	>10 – 20%	> 20%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	3	0	2	10	5	2	3	28	17	2	9
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8	6	1	1	18	13	3	2	43	34	4	5
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	3	1	2	19	13	2	4	51	41	1	9
18	Dinas Perikanan	4	2	0	2	16	7	4	5	35	25	2	8
19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	3	0	3	17	8	4	5	38	18	2	18
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6	1	0	5	12	0	4	8	25	7	3	15
21	Sekretariat Daerah	3	0	2	1	21	5	3	13	71	28	8	35
22	Sekretariat DPRD	2	1	0	1	17	9	4	4	70	51	10	9
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	0	2	17	8	4	5	44	21	4	19
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	1	2	0	13	3	3	7	83	56	1	26
25	Badan Pendapatan Daerah	2	0	1	1	9	3	4	2	46	23	9	14
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	1	1	1	12	6	3	3	33	21	3	9
27	Inspektorat Daerah	3	3	0	0	12	8	4	0	46	36	6	4
28	Kecamatan Pattalassang	3	1	1	1	10	4	2	4	25	13	2	10
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	6	1	4	1	17	6	8	3	38	18	11	9
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	5	1	1	3	12	3	3	6	31	10	2	19
31	Kecamatan Mangarabombang	4	4	0	0	13	11	2	0	32	30	0	2
32	Kecamatan Mappakasunggu	3	0	3	0	12	1	10	1	23	5	13	5
33	Kecamatan Sanrobone	3	2	1	0	10	8	0	2	18	14	0	4
34	Kecamatan Galesong	5	2	2	1	13	5	5	3	28	15	3	10
35	Kecamatan Galesong Utara	5	2	1	2	14	6	4	4	32	16	4	12
36	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	5	4	1	0	14	11	2	1	27	23	1	3
37	Kecamatan Galesong Selatan	5	4	0	1	12	7	3	2	22	13	3	6
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	4	0	2	12	5	3	4	42	24	4	14
TOTAL		**189**	**105**	**31**	**53**	**537**	**282**	**113**	**142**	**1506**	**965**	**124**	**417**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I, diolah Bappelitbangda

2.2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

Realisasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan urusan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dalam kategori sedang (10-20 persen), sedangkan realisasi anggaran masuk kategori tinggi (diatas 20 persen). Hal dimaksud digambarkan sebagai berikut :

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian dalam kategori sedang, baik kinerja maupun keuangan;
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan rata-rata capaian kinerja masih pada kategori rendah namun untuk keuangan sudah kategori sedang;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan rata-rata capaian dalam kategori sedang, baik kinerja maupun keuangan;
4. Unsur Pendukung Urusan pemerintahan rata-rata capaian dalam kategori sedang, baik kinerja maupun keuangan;
5. Unsur Penunjang Urusan pemerintahan dengan raat-rata capaian kinerja pada kategori sedang namun untuk keuangan masih pada kategori rendah;
6. Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian dalam kategori rendah, baik kinerja maupun keuangan;
7. Unsur Kewilayahan rata-rata capaian kinerja pada kategori sedang, baik kinerja maupun keuangan; dan
8. Unsur Pemerintahan umum rata-rata capaian kinerja masih pada kategori rendah namun untuk keuangan sudah pada kategori sedang.

Tabel II-21
Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan

Kode		Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran			Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja			
			RKPD	APBD	Realisasi	Rp (%)	K (%)	Rp	K
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Urusan Pemerintahan Wajib	**783.323.371.226**	**745.420.966.471**	**112.550.964.902**	**15,10%**	**11,03%**	**S**	**S**
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	724.766.589.681	687.645.768.170	103.959.594.161	15,12%	12,94%	S	S
1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	392.586.180.162	366.858.437.149	57.800.012.167	15,76%	15,90%	S	S
1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	248.101.848.443	237.902.107.916	40.713.808.120	17,11%	7,39%	S	R
1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	68.393.560.332	55.653.799.766	1.666.197.171	2,99%	5,69%	S	R
1	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.581.523.000	11.285.847.000	1.032.262.500	9,15%	4,17%	R	R
1	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11.824.477.744	11.377.470.576	2.002.993.004	17,60%	15,16%	S	S
1	6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	279.000.000	4.568.105.763	744.321.199	16,29%	29,33%	S	T
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	58.556.781.545	57.775.198.301	8.591.370.741	14,87%	9,13%	S	R
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	27.564.000,00	182.500.000	0	0,00%	0,00%	R	R
2	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.440.787.320,00	4.235.296.674	700.528.142	16,54%	2,31%	S	R
2	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	9.998.370,00	257.499.140	8.915.980	3,46%	5,56%	R	R
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.020.000.000,00	107.828.450	3.068.860	2,85%	25,00%	R	T

Kode		Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran			Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja			
			RKPD	APBD	Realisasi	Rp (%)	K (%)	Rp	K
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11.174.925.147,00	9.957.217.790	1.514.208.095	15,21%	43,67%	S	T
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.941.792.868,00	4.528.671.531	623.360.487	13,76%	21,42%	S	T
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.722.668.020,00	1.220.000.000	14.799.000	1,21%	2,36%	R	R
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.918.966.000,00	7.170.825.200	472.976.200	6,60%	2,50%	R	R
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4.759.315.776,00	7.405.818.172	914.948.565	12,35%	13,51%	S	S
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	4.873.726.129,00	6.478.937.394	1.324.056.524	20,44%	2,56%	T	R
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.261.939.755,00	7.029.938.068	1.176.326.411	16,73%	9,93%	S	R
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3.329.701.160,00	3.416.127.054	519.329.292	15,20%	8,47%	S	R
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	991.921.700,00	1.701.986.720	759.229.581	44,61%	6,21%	T	R
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	20.000.000,00	138.975.000	8.461.700	6,09%	0,00%	R	R
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	10.000.000,00	10.000.000	4.404.300	44,04%	0,00%	T	R
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.070.000.000,00	612.551.560	0	0,00%	0,00%	R	R
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.963.620.200,00	3.306.025.548	545.353.604	16,50%	11,57%	S	S
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	19.855.100,00	15.000.000	1.404.000	9,36%	9,26%	R	R
3		Urusan Pemerintahan Pilihan	47.427.765.661	39.306.336.884	5.345.859.842	13,60%	17,36%	S	S

Kode		Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran			Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja			
			RKPD	APBD	Realisasi	Rp (%)	K (%)	Rp	K
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	6.844.037.398,00	6.526.814.256	920.527.280	14,10%	22,18%	S	T
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4.627.133.798,00	6.489.263.465	595.000.000	9,17%	8,70%	R	R
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	32.316.900.281,00	22.224.336.368	3.123.605.846	14,05%	21,42%	S	T
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.599.694.184,00	4.030.922.795	701.612.516	17,41%	26,85%	S	T
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	20.000.000,00	20.000.000	5.114.200	25,57%	25,00%	T	T
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	20.000.000,00	15.000.000	0	0,00%	0,00%	R	R
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	48.427.949.288	72.756.137.259	14.075.989.252	19,35%	19,66%	S	S
4	1	Sekretariat Daerah	22.528.498.209,00	35.675.164.693	8.039.653.716	22,54%	20,12%	T	T
4	2	Sekretariat DPRD	25.899.451.079,00	37.080.972.566	6.036.335.536	16,28%	19,20%	S	S
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	212.291.658.153	214.982.281.022	12.358.313.026	5,75%	16,05%	R	S
5	1	Perencanaan	4.915.245.896,00	5.540.995.129	777.745.061	14,04%	29,08%	S	T
5	2	Keuangan	201.417.658.093,00	202.601.055.000	10.671.988.798	5,27%	14,98%	R	S
5	3	Kepegawaian	4.097.944.354,00	5.599.819.033	863.181.269	15,41%	17,17%	S	S
5	4	Pendidikan Dan Pelatihan	1.560.812.110,00	730.411.880	39.016.118	5,34%	19,05%	R	S
5	5	Penelitian Dan Pengembangan	299.997.700,00	509.999.980	6.381.780	1,25%	0,00%	R	R
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	16.521.240.460	17.936.169.855	1.729.331.064	9,64%	7,77%	R	R
6	1	Inspektorat Daerah	16.521.240.460,00	17.936.169.855	1.729.331.064	9,64%	7,77%	R	R
7		Unsur Kewilayahan	39.984.925.041	40.606.254.562	6.518.315.214	16,05%	14,35%	S	S
7	1	Kecamatan	39.984.925.041,00	40.606.254.562	6.518.315.214	16,05%	14,35%	S	S
8		Unsur Pemerintahan Umum	5.023.917.479	5.421.497.176	720.788.852	13,30%	8,03%	S	R
8	1	Kesatuan Bangsa dan politik	5.023.917.479,00	5.421.497.176	720.788.852	13,30%	8,03%	S	R
		JUMLAH	1.153.000.827.308	1.136.429.643.229	153.299.562.152	13,49%	13,16%	S	S

2.2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel II-22
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Takalar
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target			Capaian			Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target		Capaian	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2024	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	67.20	67.30	68.24	67.31	67.72	68.31	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	2.45	2.45	3.21	3.40
Angka rata – rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7.40	7.60	8.20	7.29	7.49	7.64	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	68.83	69.70	71.46	72.06
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.60	14.80	15.20	12.41	12.42	12.48	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	2.92	3.91	3.19	3.72
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68.60	68.80	70.20	67.18	67.3	67.64	PDRB Perkapita	Rp.Juta	43.38	49.52	41.14	42.36
Tingkat penganggguran terbuka (TPT)	Persen	3	2.5	2	4.16	3.93	2.63	Indeks Gini	Nilai	0.35	0.35	0.386	0.385
PDRB/kapita (juta)	Juta	38.75	40	40	33.97	36.58	39.73	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,62-5,98	5,04-6,52	3.86	4.34
Pertumbuhan ekonomi (persentase)	Persen	7.49	7.54	7.54	-0.61	5.05	4.64	Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT)	%	3.32	3.11	3.58	3.84

Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target			Capaian			Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target		Capaian	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2024	2023	2024
Kontribusi pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	Persen	7.71	7.76	7.81		7.31	3.52	Angka Kemiskinan	%	7.09	6.9	8.29	7.75
Kontribusi peternakan terhadap PDRB	Persen	9.11	9.46	9.81				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Nilai	59.02	59.06	70.29	67.21
Kontribusi perikanan terhadap PDRB	Persen	13.26	13.51	13.76				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat / Nilai	BB (71-72)	B(73-75)	CC (52,33)	B (68,26)
Kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	6.19	6.24	6.29	5.07	2.13	8.64	Nilai Sakip Daerah	Predikat / Nilai	B (63,37)	B (64,05)	B (63,37)	B (64,05)
Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	9.79	9.84	9.89	12.37	4.2	5.61	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	Nilai	60-70	70-80	93.78	82.39
% penduduk di atas garis kemiskinan	Persen	91.65	92	92.35	91.56	91.75	91.75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	0.03	0.18	0.04	0.15
Nilai investasi PMDN	Juta	43,000,000,000	44,000,000,000	45,000,000,000	117,145,870,000	22,827,758,000		Angka Kriminalitas	Kasus / 100.00	91.91	89.41	89.41	19.96

Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target			Capaian			Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target		Capaian	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2024	2023	2024
									0 Penduduk				
Nilai investasi PMDN	Juta	43,000,000,000	44,000,000,000	45,000,000,000	117,145,870,000	22,827,758,000							
Penghargaan lingkungan hidup	Piagam	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura								
Tingkat kepatuhan terhadap RTRW	Persen	70	80	90	40								
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka				N/A	41.36	41.47						
Indeks Desa Membangun	Angka	0.6474	0.6474	0.6474	0.671								
Persentase rumah layak huni (persen)	Persen	28	30	32	54.6	91.48							
Persentase pemukiman kumuh (persen)	Persen	12	10	8		2.26							
Angka kriminalitas	Persen	96	98	100	8.84	9.22	30.78						
Persentase angka gangguan	Persen	98	98	98	93.26	97.51	100						

Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target			Capaian			Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target		Capaian	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2024	2023	2024
ketertiban dan ketenteraman (persen)													
Persentase tingkat waktu tanggap (persen)	Persen	15	15	15	15	15	15						
Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	A	C (49,49)								
Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A	CC (59,39)	B (61,14)	B (61,45)						
Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP						
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	0.15	0.3	0.32	0.13	0.29	0.3						
Capaian SPM pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan, sosial, Ketentrama	Persen	75	80	85		46.11							

Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target			Capaian			Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target		Capaian	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2024	2023	2024
n dan ketertiban, perumahan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang													

2.2.4 Evaluasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel II-23

Evaluasi Indikator SPM Kabupaten Takalar Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pendidikan					
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	81.49	64.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99.32	89.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92.79	77.97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Keseteraan					
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	39.33	34.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kemampuan Literasi					
5	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Persen			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD		52.4	53.77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP		59.5	51.92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kemampua Numerasi					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Persen			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD		50.77	54.57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP		57.57	53.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B					
7	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	67.23	66.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4					
8	Proporsi pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	69.11	65.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Iklim Keamanan					
9	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD	Persen	73.8	72.9	
	SMP	Persen	68.88	67.68	
Iklim Kebhinekaan					
10	Indeks Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD	Persen	69.9	68.09	
	SMP	Persen	69.93	67.93	
Iklim Inklusivitas					
11	Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD	Persen	58.45	55.95	
	SMP	Persen	56.73	54.38	
Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
12	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	9.44	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
13	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	19	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
14	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	19.44	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan balita					
15	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	48	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
16	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	25.88	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,					
17	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	19.03	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;					
18	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	21.6	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					
19	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	13.06	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus					
20	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	32.69	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
21	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	739	41.68	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					
22	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	6969	24.12	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)					
23	Jumlah Warga Negara dengan risiko	Persen	100	11.85	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan				
Pekerjaan Umum					
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	98.00	78.68	**Dinas PUTRPKP**
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah					
25	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	95.00	0.00	**Dinas PUTRPKP**
Perumahan Permukiman					
Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota					
26	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100.00	-	**Dinas PUTRPKP**
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
27	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	-	-	**Dinas PUTRPKP**
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
28	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	98	42	Satpol PP & Pemadam Kebakaran
Pelayanan informasi rawan bencana					
29	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	13.5	BPBD
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
30	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	Persen	100	0.12	BPBD

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Triwulan I	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
31	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	40.47	BPBD
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
32	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	97	-	Satpol PP & Pemadam Kebakaran
Sosial					
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					
33	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	12,00	Dinas Sosial & PMD
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
34	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	52,00	Dinas Sosial & PMD
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
35	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	81,6	Dinas Sosial & PMD
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
36	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	-	Dinas Sosial & PMD
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
37	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang	Persen	100	11.67	Dinas Sosial & PMD

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Triwulan I	
	memperoleh perlindungan dan jaminan sosial				

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan Triwulan ke I

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian atau efisiensi anggaran.
2. Adanya keterbatasan pada penentuan anggaran kas per sub kegiatan , Anggaran kas yang tersedia pada triwulan I masih kurang dalam pemenuhan beberapa kebutuhan,
3. Adanya keterbatasan atau keterlambatan pencairan anggaran pada Triwulan I
4. Pelaksanaan kegiatan belum banyak ditriwulan I, sebagian besar jadwalnya ada di triwulan berikutnya
5. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai
6. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
7. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
8. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
9. Aplikasi perencanaan yang terkadang mengalami gangguan atau kapasitas pendukung peningkatan efektifitas berjalannya aplikasi yang kurang memadai.

Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan Triwulan ke I

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke I tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh OPD dapat disampaikan bebrapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dan Memaksimalkan Anggaran yang tersedia
2. Memaksimalkan pemetaan kegiatan sesuai anggaran kas pertriwulan
3. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
4. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
5. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
6. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
7. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
8. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima dan penyusunan dokumen serta pengetahuan tentang teknologi atau aplikasi;
9. Peningkatan Kapasitas pendukung efektifitas berjalannya aplikasi perencanaan.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan factor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi proram di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Badan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;

6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
9. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
10. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengembangan sumber daya alam sektor unggulan serta optimalisasi potensi sektor pariwisata dan sektor lainnya untuk mengefektifkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan digitalisasi. Lebih lanjut, ini dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif dengan memanfaatkan teknologi digital.

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar mengalami perbaikan dengan pertumbuhan yang positif dan lebih tinggi dibandingkan kinerja Tahun 2024 meskipun belum melampaui kinerja nasional dan provinsi, terlihat pada capaian Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Takalar mampu tumbuh positif pada posisi 4,34%, berada dibawah angka Pertumbuhan ekonomi provinsi yang juga sudah tumbuh positif pada posisi 5,02% dan nasional pada posisi 5,03%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan PDRB ADHB pada beberapa sektor lapangan usaha antara lain : Pertanian, Kehutanan & Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi dan Takalar.

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ketahanan perekonomian Indonesia sendiri tetap terjaga meskipun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 mencapai 4,87% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Perkembangan dalam lima tahun terakhir

menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di EMEs dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2018 dapat mencapai di atas 5%, kecuali pada periode pandemi Covid-19.

Laju inflasi dalam tren yang menurun utamanya karena keberhasilan pemerintah dalam menurunkan inflasi bahan pangan setelah idul fitri. Tingkat inflasi tercatat sebesar1,95% (yoy) pada bulan April 2025. Digitalisasi ekonomi makin meluas seiring dengan perkembangan transaksi digital yang tumbuh signifikan. Secara konseptual, digitalisasi berdampak positif pada pengendalian inflasi, khususnya inflasi inti. Pengaruh digitalisasi terhadap inflasi terjadi melalui dua jalur utama, yakni jalur permintaan dan jalur penawaran. Ke depan, akselerasi digitalisasi diprakirakan dapat terus memperkuat upaya pengendalian inflasi di Indonesia. Hal ini didukung kebijakan Bank Indonesia yang terus mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) melalui kebijakan sistem pembayaran yang mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Kebijakan ini diyakini dapat mendukung percepatan digitalisasi di berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi perekonomian dan berkontribusi terhadap terkendalinya inflasi.

Melihat tren normal pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun lima tahun sebelum pandemi di kisaran 5%, lalu pascapandemi saat ini bisa kembali ke tren jangka panjang di kisaran 5%, maka pemerintah membutuhkan upaya luar biasa untuk bisa mencapai target pertumbuhan 5,3-5,7% dalam jangka pendek. Ada beberapa tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia pada Tahun 2025

Pertama, Peningkatan Tarif Perdagangan. Salah satu hambatan terbesar pada 2025 adalah peningkatan tarif perdagangan yang diberlakukan oleh mitra dagang utama Indonesia, seperti Amerika Serikat dan China. Kondisi ini diprediksi akan mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Selain itu, pengurangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) oleh Amerika Serikat menjadi ancaman serius bagi industri manufaktur Indonesia, khususnya tekstil dan produk tekstil. Fasilitas ini sebelumnya memberikan keuntungan berupa akses pasar dengan tarif rendah.

Kedua, Tekanan Inflasi Global. Di tahun 2025, tekanan inflasi global diperkirakan tetap ada, meskipun tingkat inflasi global diproyeksikan melambat. Salah satu penyebab utama adalah gangguan rantai pasok dan konflik perdagangan yang berlanjut. Selain itu, ketidakpastian dalam

kebijakan moneter global, seperti suku bunga AS, turut memengaruhi stabilitas harga.

Ketiga, Pengetatan Pasar Tenaga Kerja Negara Maju. Pengetatan pasar tenaga kerja di negara maju menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat perubahan dinamika ekonomi global. Di Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, pasar tenaga kerja yang ketat ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran dan tingginya tekanan upah. Selain itu, pengetatan ini dipengaruhi oleh permintaan tinggi terhadap tenaga kerja di sektor tertentu, sementara tenaga kerja yang tersedia tidak sejalan dengan kebutuhan keterampilan yang berkembang. Kondisi ini berimplikasi pada inflasi yang lebih persisten di sektor jasa, sehingga memaksa bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Keempat, Ketegangan Geopolitik. Pada tahun 2025, ketegangan geopolitik global diperkirakan tetap intens, dengan berbagai konflik dan rivalitas antar kekuatan utama dunia seperti perang di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah. Selain itu, persaingan antara kekuatan utama seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia juga berimbas pada dinamika politik dan ekonomi di kawasan lain, termasuk di negara berkembang. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Indonesia dituntut memainkan peran diplomasi yang cerdas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi terhadap stabilitas global.

Kelima, Tekanan pada Industri Tekstil dan Pasar Domestik. Industri tekstil Indonesia saat ini seperti kita tahu sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan domestik. Pasar domestik yang lemah tidak mampu menopang industri, sementara ekspor menjadi satu-satunya andalan. Peningkatan impor produk dari negara-negara seperti China, yang mengalami kelebihan pasokan (oversupply) akibat penurunan permintaan internasional, kemungkinan besar akan mencari pasar baru, termasuk Indonesia. Dengan harga lebih kompetitif ini dapat menekan pasar domestik Indonesia. Melihat tantangan yang dihadapi, diperlukan kebijakan strategis untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing ekspor. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal, pengembangan pasar alternatif, dan peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi pada 2025.

Pada saat ini ekonomi dunia memang masih belum terang dan penuh badai. Menurutnya, hal ini tercermin dari masih banyaknya negara mengalami lonjakan inflasi dan perekonomian yang melambat. Bahkan, tahun depan banyak yang bakal masuk ke jurang resesi. Meski perekonomian Indonesia saat ini tanggung dan mampu tumbuh di atas 5 persen, jika

perekonomian global masih dibayangi awan gelap akan tetap terdampak. Karenanya, koordinasi dengan berbagai pihak harus dilakukan, terutama kebijakan moneter Bank Indonesia, dan sektor riil melalui kebijakan di Otoritas Jasa Keuangan. Bila ketiganya bisa berjalan dengan serentak, maka ekonomi akan tetap tangguh.

Tabel III-1
Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024–2025
(Persen, YoY)

Uraian	Realisasi Tahun 2023 a)	Target RPJMN Tahun 2023 b)	Target RKP Tahun 2024 c)
Pertumbuhan PDB			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,09	3,7–3,8	3,4
Pertambangan dan Penggalian	5,41	1,9–1,9	1,0
Industri Pengolahan	-2,9	5,2–5,5	4,2
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,3	5,2–5,2	5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	4,3–4,4	5,4
Konstruksi	-3,3	5,8–6,1	5,7
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,7	5,6–6,0	4,4
Transportasi dan Pergudangan	-15,0	7,1–7,4	4,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,2	6,1–6,3	5,4
Informasi dan Komunikasi	10,6	7,7–8,8	9,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,2	6,4–6,9	4,6
Real Estate	2,3	5,0–5,0	4,1
Jasa Perusahaan	-5,4	8,4–8,4	4,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,0	4,8–5,1	2,9
Jasa Pendidikan	2,6	5,2–5,2	3,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,6	7,6–8,0	4,9
Jasa Lainnya	-4,1	9,3–9,5	4,6

Sumber: a) BPS, 2024; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas

B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I – 2022 mencapai Rp.136,69 Trilliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai RP.83,36 Trilliun. Ekonomi Sulawesi selatan triwulan I- 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami konstraksi sebesar – 5,77 % (q - to - q). Dari sisi produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,17 persen. Ekonomi Sulawesi selatan triwulan I – 2022 terhdadap triwulan I – 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,27 persen (y – on – y) . Dari sisi produksi lapangan usaha pengadaan Listrik danGas pertumbuhan tertinggi sebesar 19,82 persen. Dari sisi pengeluaran komponen ekspor jasa barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 77,10 persen.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan untuk “Inovasi pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”, dengan prioritas meliputi Pemantapan Reformasi Birokrasi, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial, Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan Berbudaya, dan Pengelolaan Komoditas Unggulan berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan jagung serta kakao, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel III-2
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 (Persen)

URAIAN	Target RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,23-6,71	5,23-6,71		

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan; 2025

C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar

Perekonomian Kabupaten Takalar berdasarkan besaran Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2024 mencapai Rp. 13.428,09 Milyar dan atas dasar konstan 2010 mencapai RP.7.832,68 Milyar. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,34% pada Tahun 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 0,48 poin dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 3,86%.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025, diarahkan untuk "Penguatan Pondasi Transformasi Menuju Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital" dengan prioritas meliputi : Takalat Unggul Teknologi Digital, Takalar Unggul Peningkatan PAD, Takalar Unggul Produksi Hasil Laut dan Budidaya Perikanan, Takalar Unggul Produksi Hasil Pertanian, Takalar Unggul BUMD, BUMDes dan UMKM, Takalar Unggul Pelayanan Publik, Infrasturktur dan SDM serta Takalar Unggul BISA (Bersih, Indah, Sehat dan nyAman).

Dalam rangka meningkatkan kontribusi perekonomian Kabupaten Takalar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi digital. Takalar merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Makassar yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain bisa meningkatkan peran Takalar pada sektor jasa serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi. Potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa. Rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja produktif. Dengan

optimalisasi potensi-potensi tersebut, dan dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan mampu menjadi motor di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Tabel III-3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 (Persen)

URAIAN	Target Ranhir RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	4.45%	6.10-7.14%	4.45%	Belum rilis

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2025

3.1.1.2 Inflasi

Capaian Inflasi Takalar didasarkan pada capaian inflasi Kota Makassar sebagai daerah sample IHK. Untuk Tahun 2024, capaian tingkat inlfasi sebesar 1,19% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,59. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2024 sebesar 3,48%. Tingkat Inflasi Tahunan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,98 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,71 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,34 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen. Kenaikan terutama dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang membaik dan cenderung meningkat akibat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang juga semakin membaik. Dengan membaiknya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi tetap stabil. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan II 2025 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,55% (YoY). Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Takalar

akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.

Tabel III-4
Inflasi Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025

URAIAN	Target Ranhir RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025
Inflasi	2,9%	3,51%	2,9%	1,96% (Mei 2025)

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2025

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Takalar 2024 sebesar 3,84 persen. Kondisi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang ada pada RKPD Pokok Tahun 2025 sebesar 2,9 persen. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari lapangan pekerjaan lokal yang semakin berkurang. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Takalar juga berupaya mendorong optimalisasi penyerapan tenaga kerja antara lain melalui job fair dan penyederhanaan izin usaha.

Tabel III-5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025

URAIAN	Target Ranhir RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,58	2,20	3,58	Belum Rilis

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2025

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan melandainya pandemi Covid-19 serta dibukanya aturan pengetatan kegiatan masyarakat secara nasional, maka sebagian besar masyarakat di Takalar dapat beraktivitas secara normal kembali, khususnya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Takalar dimana pada Tahun 2024 mencapai 7,75 persen, turun 0,54 poin dibandingkan dengan capaian di Tahun 2023 yang mencapai 8,29 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar menjadi kabupaten kesepuluh dengan tingkat kemiskinan terendah.

Tabel III-6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar Target Ranhir RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan II Tahun 2025

URAIAN	Target Ranhir RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan	7,62 - 5,16	6,69	7,62 - 5,16	Belum rilis

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2025

3.2 Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1 Aspek Eksternal

Perekonomian global pada tahun ini dinilai lebih sulit. Pasalnya, faktor perang dagang kini tak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tapi sudah meluas ke Uni Eropa. Apalagi dengan kondisi saat ini, wabah Virus Covid – 19 (Coronavirus Disease 19) telah menyebar di beberapa belahan dunia yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Diperkirakan situasi ekonomi tahun ini tidak mudah di tengah perlambatan ekonomi global dan ancaman resesi di sejumlah negara. Indonesia harus menggunakan kekuatan perekonomian dalam negeri. konsumsi domestik, yang berkontribusi hampir separuh dari perekonomian nasional. Selain itu penopang pertumbuhan lainnya adalah, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi. pertumbuhan ekonomi baru menyasar sektor yang dinilai punya potensi besar, antara lain sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan dan pariwisata inklusif. Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Ketidakpastian global masih tinggi.

2. Probabilitas terjadinya resesi global tetap tinggi.
3. Tekanan inflasi yang presisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat.
4. Dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global.
5. Deglobalisasi akibat geopolitik.
6. Risiko scarring effect akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju.
7. Defisit anggaran di berbagai negara diperkirakan belum kembali ke level tahun 2019.

3.2.2 Aspek Internal

Perekonomian Takalar Tahun ini diperkirakan akan sedikit membaik dari tahun sebelumnya meskipun progresnya diperkirakan tidak akan agresif dan akan bergerak lambat. Takalar harus memanfaatkan kondisi perekonomian global, nasional dan internal Sulwesi Selatan dengan lebih mengedepankan konsumsi lokal, optimalisasi belanja pemerintah serta optimalisasi sektor yang dinilai mempunyai potensi besar antara lain, sektor pertanian dan perikanan, pariwisata dan perdagangan besar, kecil dan eceran. Beberapa tantangan perekonomian daerah antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi
   Meskipun pertumbuhan ekonomi Takalar pertahunnya rata-rata masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, namun pertumbuhan ekonomi tahun ini akan diprediksi belum seprogresif tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dampak ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global dan nasional yang diprediksi masih akan terjadi pada tahun ini.
2. *Climate Change*
   Perubahan iklim yang terjadi secara global juga mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Takalar. Musim hujan yang intensitasnya lebih panjang menyebabkan beberapa wilayah produksi pertanian mengalami gagal panen dan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan banyak nelayan yang produksinya tidak optimal.

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel III-7
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Indikator	Target Ranhir RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	6,10-7,14	4,45
2	Laju Inflasi (Nilai)	2,90	3,51	2,90
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	42,49-47,03	51,24	42,49-47,03
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,62-5,16	6,69	7,62-5,16
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,24	73,45	72,24
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,58	2,20	2,20

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2025

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Takalar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Takalar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Takalar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Takalar 2025, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kabupaten Takalar.

Perekonomian Kabupaten Takalar pada perubahan Tahun 2025 dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan berusaha (penyederhanaan proses perijinan dan digitalisasi perijinan, mempermudah akses ke penyedia modal, dll)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb);
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan;
7. Mengembangkan ketenagakerjaan;
8. Peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan titik-titik strategis perekonomian rakyat.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Regulasi yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Adapun aspek - aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan pendapatan daerah antara lain adalah pertumbuhan penduduk, nilai investasi dan pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat lebih maksimal adalah :

a. Dalam merencanakan target pendapatan supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.
b. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah serta penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.
c. Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pungutan dan peningkatan fasilitas pelayanan termasuk sistemnya.
d. Peningkatan dan Pengembangan sumber-sumber pendapatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta penggalian sumber-sumber lain pendapatan daerah, melalui pendayagunaan dan optimalisasi kerja perusahaan-perusahaan daerah yang telah di bentuk dan meningkatkan kerjasama dengan investor nasional dan lokal, serta dunia usaha lainnya.

e. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola pendapatan serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
f. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dengan demikian, Perubahan Pendapatan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah sebagai berikut :

3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sampai dengan Mei Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Takalar mencapai Rp. 266,08 Milyar, atau baru 21,94 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.212.755.775.038 pada APBD Pokok 2025. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.17,713 Milyar lebih atau baru 8,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.219.248.884.957,00, Pendapatan Transfer terealisasi Rp.248,369 Milyar lebih atau 25% dari Target yang sebesar Rp.993.506.890.081,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 0,00, karena tidak ditargetkan pada APBD Pokok 2025.

Dalam Perubahan RKPD 2025, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.213.716.262.596,00 atau naik sebesar Rp.-960.487.558,00 dibandingkan Target Pokok 2025. Adapun rincian perubahan target pendapatan daerah selengkapnya adalah sebagai berikut :

3.3.1.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 205.365.356.828,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.883.528.129,00 atau 6,33% dibandingkan APBD Pokok 2025 yang sebesar Rp. 219.248.884.957,00. PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp. 48.344.746.828,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 158.271.871,00 atau meningkat 0,33 % dari APBD Pokok 2025 yang telah ditargetkan sebesar Rp. 48.186.474.957,00. Retribusi Daerah sebesar Rp. 3.551.410.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.638.200.000,00 atau meningkat 21,91% dari APBD Pokok 2025 yang telah ditargetkan sebesar Rp. 2.913.210.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap atau tidak mengalami perubahan dari APBD Pokok 2025 yang telah ditargetkan sebesar Rp.14,000,000,000.00 turun sebesar Rp. 3.900.000.000,00 atau 27,86% menjadi Rp. 10.100.000.000,00. Kemudian PAD dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.154.149.200,000.00, mengalami penurunan sebesar Rp. 10.780.000.000,00 atau 6,99% dari APBD Pokok 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.154.149.200.000,00.

3.3.1.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Transfer ditargetkan Rp. 1.008.350.905.768,00, turun sebesar Rp. 14.844.015.687,00 atau 1,49% dari target pokok RKPD 2025 yang sebesar Rp.993.506.890.081,00, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025. Pada RKPD Perubahan Tahun 2025, Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 937.630.185.000,00 yang berkurang Rp. 15,849,253,000.00 (1,66%) dari APBD Pokok dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 70.720.720.768,00 yang bertambah sebesar Rp.30.693.268.687,00 (76,68 %) dari target yang telah ditetapkan pada APBD Pokok 2025.

3.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, tidak ditargetkan untuk sumber pendapatan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah sama dengan kondisi di Anggaran Pokok 2025.

Adapun struktur pendapatan daerah pada rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel III-8
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar
Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,212,755,775,038.00**	**1.213.716.262.596,00**	**960.487.558,00**	**0.08**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**219,248,884,957.00**	**205.365.356.828,00**	**(13.883.528.129,00)**	**-6,33**
4.1.01	Pajak Daerah	48,186,474,957.00	48.344.746.828,00	158.271.871,00	0.33
4.1.02	Retribusi Daerah	2,913,210,000.00	3.551.410.000,00	638.200.000,00	21,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,000,000,000.00	10,100,000,000.00	(3,900,000,000.00)	-27.86
4.2	**Pendapatan Transfer**	**993,506,890,081.00**	**1.008.350.905.768,00**	**14.844.015.687,00**	**1,49**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**953,479,438,000.00**	**937,630,185,000.00**	**-15,849,253,000.00**	**-1.66**
4.2.01.05	Dana Desa	76,268,700,000.00	76,268,700,000.00	-	0.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8,016,881,000.00	7,974,153,000.00	(42,728,000.00)	-0.53
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	18,337,091,000.00	18,337,091,000.00	-	0.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	658,555,511,000.00	651,690,726,000.00	(6,864,785,000.00)	-1.04
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	192,301,255,000.00	183,359,515,000.00	(8,941,740,000.00)	-4.65
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**40,027,452,081.00**	**70.720.720.768,00**	**30,693,268,687.00**	**56,60**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	32,336,999,365.00	52.859.114.052,00	20,522,114,687.00	62,18
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7,690,452,716.00	17.861.606.716,00	10,171,154,000.00	43,06

Sumber : Bapenda; BPKD Kabupaten Takalar, 2025; Diolah Bappelitbangda

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana struktur Belanja Daerah dibagi ke dalam empat kelompok belanja yakni; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Klasifikasi Belanja Operasi terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari satu jenis belanja yakni Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga terdiri atas satu jenis belanja yakni Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Transfer terdiri dari dua jenis belanja yaitu; Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun aspek - aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan belanja daerah antara lain adalah rasionalisasi PAD yang tidak sesuai dengan target pokok, serta memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang sifatnya mandatory.

kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 khususnya pada Penyesuaian Belanja Daerah diarahkan pada beberapa hal, yaitu :

1. Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan rasional;
2. Memilih kegiatan/proyek dengan skala prioritas dimana kegiatan secara signifikan dapat mengatasi issu atau permasalahan di bidangnya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
4. Membuat atau meninjau kebijakan/regulasi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
5. Memperhatikan kebijakan belanja pegawai berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
6. Memperhatikan program dan kegiatan yang sifatnya mandatory.

Dengan demikian, Perubahan Belanja Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Belanja Daerah sebagai berikut :

3.3.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria :

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
c) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d) Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
e) Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak

memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.3.2.4 Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten kepada Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dialokasikan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan daftar Nama Desa serta besaran pagu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas

wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi Dana Alokasi khusus (DAK).

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III-9
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
5	**BELANJA DAERAH**	**1,183,542,239,179.00**	**1,183,578,276,814.00**	**36,037,635.00**	**0.003%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**964,455,676,638.00**	**960,897,086,667.27**	**- 3,558,589,970.73**	**-0.37%**
5.1.01	Belanja Pegawai	580,076,850,812.86	586,050,625,335.89	5,973,774,523.03	1.03%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332,951,326,463.14	342,564,034,969.38	9,612,708,506.24	2.89%
5.1.03	Belanja Bunga	12,096,567,195.00	12,096,567,195.00	-	0.00%
5.1.05	Belanja Hibah	39,315,932,167.00	20,170,859,167.00	- 19,145,073,000.00	-48.70%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15,000,000.00	15,000,000.00	-	0.00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**67,689,480,138.00**	**71,970,586,243.73**	**4,281,106,105.73**	**6.32%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2,215,500,000.00	2,472,000,000.00	256,500,000.00	11.58%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,006,003,407.00	25,807,528,194.00	- 2,198,475,213.00	-7.85%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,593,736,946.00	23,788,504,454.73	8,194,767,508.73	52.55%
5.2.04	Belanja Modal, Jalan dan Jembatan	21,624,239,785.00	19,534,553,595.00	- 2,089,686,190.00	-9.66%
5.2.05	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	0	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00%
5.2.06	Belanja Modal Asset Lainnya	250,000,000.00	250,000,000.00	-	0.00%
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4,400,000,000.00**	**4,400,000,000.00**	**-**	**0.00%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	-	0.00%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**146,997,082,403.00**	**146,310,603,903.00**	**- 686,478,500.00**	**-0.47%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,110,744,903.00	3,110,744,903.00	-	0.00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143,886,337,500.00	143,199,859,000.00	- 686,478,500.00	-0.48%

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar, 2025, Diolah Bappelitbangda

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk penyertaan Modal Daerah pada badan usaha milik daerah yang dinilai menguntungkan.

3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan diarahkan : Pemerintah Kabupaten Takalar akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut **:**

Tabel III-10
Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
6	**Pembiayaan Daerah**	**31,933,754,959.00**	**31,933,754,959.00**	**-**	**0,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**10,000,000,000.00**	**9,075,550,077.00**	**-924,449,923.00**	**-9.24%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00	9,075,550,077.00	-924,449,923.00	-9.24%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**39,213,535,859.00**	**39,213,535,859.00**	**0**	**0,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39,213,535,859.00	39,213,535,859.00	0.00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**-29,213,535,859.00**	**-30,137,985,782.00**	**-924,449,923.00**	**3.16%**

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar, 2025; Diolah Bappelitbangda

BAB IV
SASARAN DAN PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan masa pemerintahan periode 2025 – 2029, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Preseiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan pembangunan nasional Asta Cita.
2. Arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah.
3. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain : penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; program makan bergizi gratis; pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; pengendalian inflasi; peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; dukungan swasembada pangan; pengembanagn industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
4. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Takalar sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan mendukung terwujudnya Asta Cita sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan RKPD Pokok tahun 2025, dimana RKPD Pokok tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 sementara untuk Perubahan RPKD Tahun 2025 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029.

Visi Rancangan RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan perwujudan pencapaian visi jangka panjang Periode pertama yaitu **"TAKALAR MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI EKONOMI DIGITAL",** untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi. rumusan misi Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup
5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan
7. Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten takalar selama kurun waktu 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik.
3. Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan.
4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan.
6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah.
7. Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, 7 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 18 sasaran pembangunan sebagai rangkaian kinerja untuk mencapai tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Takalar yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia

   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 2 sasaran sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses
   b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara prima dan merata

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik

   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 2 sasaran sebagai berikut:

   a. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah

3. Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan

   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 1 sasaran sebagai berikut:

   a. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah

4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 3 sasaran sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan
   b. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana
   c. Meningkatnya ketahanan air dan energi

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan

   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 4 sasaran sebagai berikut:

   a. Meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi
   b. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah.
   c. Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal dalam mendukung pertumbuhan
   d. Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan.

6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah

   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 4 sasaran sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat
   b. Meningktanya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal
   c. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender
   d. Meningkatnya ketertiban dan keamanan

7. Menurunnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Tujuan ini dijabarkan ke dalam 2 sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial
b. Meningkatnya partisipasi angakatan kerja

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada pada Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan capaian pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel IV-1
Perubahan Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025

RKPD POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
T1.Memperkuat daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,25	T1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	IT. 1. Indeks Pembangunan Manusia	72,24
S1. Meningkatnya kualitas hidup manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,45	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses	IS.1. Rata-rata Lama Sekolah	7,55
S1.2: Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	35,18		IS.2. Harapan Lama Sekolah	12,68
T2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB/kapita	51,24	S2. Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata	IS.3. Angka Harapan Hidup	74,05
	Gini Rasio	0,34	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	IT.2. Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)
S2.1.Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	7,14	S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	IS.4. Nilai SAKIP	B (>60-70)

RKPD POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	Tingkat pengangguran terbuka	2,2	S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	IS.5. Indeks Pelayanan Publik	B- (3,01 - 3,50)
S2.2. Berkurangnya penduduk miskin	Angka kemiskinan (%)	6,69		IS.6. Indeks SPBE Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital (2026)	2,9
S2.3.: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	70,72		IS.7. Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (30,00 – 59,99)
T3. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah		T3. Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan	IT.3. Indeks Layanan Infrastruktur	
Sasaran 3.1.: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	BB (71)	S5. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	IS.8. Indeks Layanan Infrastruktur	
S3.2.: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepatuhan terhadap SPM	95	T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan	IT.4..1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,22
	Indeks Kepatuhan terhadap stan dar pelayanan Non SPM	B (76,61-88,30)		IT.4.2 Persentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca	28,76
S3.3, Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka kriminalitas	86,91	S.6. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan serta energi	IS.9 Indeks Kualitas Air	70,88

RKPD POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
				IS.10. Indeks Kualitas Udara	79,13
				IS.11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,88
			S.7. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	IS.12. Indeks Risiko Bencana	125,23
			S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi	IS.13. Kapasitas Air Baku	290
				IS.14. Konsumsi listrik per kapita (KWh)	555,71
			T.5.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	IT.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,45
			S.9.Meningkatnya produktifitas ekonomi	IS.15. Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	
				IS.16. Kontribusi Industri terhadap PDRB	5,3
				IS.17. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	7,06 atau 0,38
				IS.18. Persentase UMKM Terdigitalisasi	
				IS.19. Nilai investasi	
			S.10. Meningkatnya swasembada pangan	IS.20. Indeks Ketahanan Pangan	84,89

RKPD POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
			S.11. Meningkatnya stabilitas fiskal	IS.21. Tingkat Inflasi	2,9
				Indeks Akses Keuangan daerah	4,38
			S.12. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS.22. Persentase Desa Mandiri	30,20
			T.6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah	IT.7. Angka kriminalitas	
				IT. 6.2 Indeks Pembangunan Gender	
			S.13. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	IS.23. Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	
			S.14. Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	IS.24. Persentase Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam preservasi dan pemajuan kebudayaan	
			S.15. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender	IS.25. Indeks Pembangunan Keluarga	
				IS.26. Indeks Perlindungan Anak	62,32 (2023)
				IS.27. Indeks Pembangunan Pemuda	
				IS.29. Indeks Ketimpangan Gender	0,187

RKPD POKOK TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
TUJUAN/ SASARAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN/ SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
			S.16. Meningkatnya ketertiban dan keamanan	Tingkat Penanganan Tindak Kriminal	
			T.7. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	IT.8. Tingkat Kemiskinan	7,62 – 5,16
				IT.9. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58
			S.17. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	IS.31 Persentase penduduk peserta perlindungan dan jaminan sosial	
			S.18. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	IS.32. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,43

Sumber Data: Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, diolah Bappelitbangda

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah gambaran prioritas pembangunan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :

Gambar IV-1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

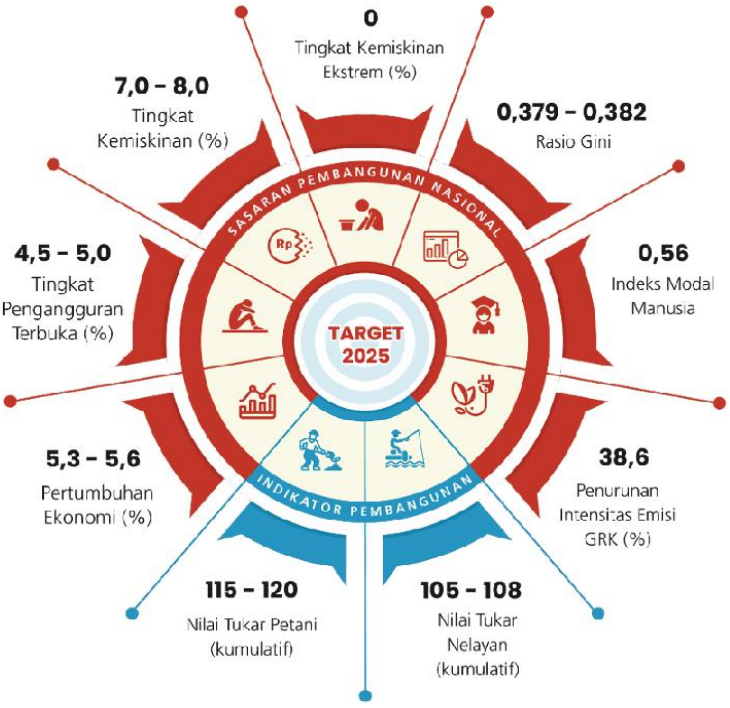

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

4.2.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

Gambar IV-2
Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

4.2.1.4 Kebijakan Kewilayahan dan Sarana PrasaranaWilayah pada RKP Tahun 2025

RKP 2025 memetakan arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Prioritas intervensi kebijakan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-2
Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Indikator Makro	Target Tahun 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50 – 6,30
Kemiskinan (%)	7,30 – 7,89
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80 – 4,10
Indeks Modal Manusia	0,52
Rasio Gini	0,371 – 0,376
Intensitas Emisi GRK (%)	37,00

Sumber data : Ranhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Dalam RKP Tahun 2025 telah ditetapkan pula sejumlah intervensi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional di Sulawesi Selatan yang dirumuskan berdasarkan prioritas nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV-3
Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1.	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar Kabupaten Takalar	Peningkatan kualitas wilayah metropolitan Makassar (Mamminasata): 1. Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, dengan output : bantuan PSU bidang perumahan, bantuan pembangunan rumah susun, pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, pengembangan SPAM regional Mamminasata, pemenuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD, dengan output: Jalan Tol Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar
2.	Kawasan Industri Takalar	Pengembangan Kawasan Industri Takalaar, melalui: 1. Pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/ jembatan, dengan output pengembangan konektivitas

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		kawasan industri dengn lokus bahan baku dan simpul transportasi. 2. Pengembangan sarana prsarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/limbah), dengan output fasilitasi pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri Takalar. 3. Peningkatan investasi kawasan, dengan output percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, san fasilitsi peningkatan investasi di kawasan industri. 4. Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan output pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan industri Takalar. 5. Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar
3.	Kawasan Sentra Rumput Laut	Pengembangan sentra rumput laut Kabupaten Takalar melalui : 1. Pengembangang budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut 2. Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan output: peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut – Ocean Prosperity – Infrastructure For Coral Reef Areas. 3. Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan output: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas petani, pengembangan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi baya

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut. 4. Pengembangan input produksi rumput laut 5. Pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut
4.	Kawasan Sentra Garam	Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui: 1. Pengembangan korporasi petambak garam, dengan output bantuan sarana pengembangan usaha, korporasi petambak garam, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) 2. Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam, dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri 3. Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan output sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2025 **yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"**. Dalam rangka operasionalisasi tema pembangunan Tahun 2025 sebagai tahun awal RPJMD Tahun 2025-2029, terdapat 8 prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tabel IV-4
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD	Target P_RKPD 2025
1	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	**T.1. Meningkatnya kualitas Modal Manusia**	**1**	**Indeks Modal Manusia**	**Angka**	**n.a**	**0,52**	**0,52**
		S.1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	2	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,83	73,95*	**73,95***
		S.2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	3	Rata rata lama sekolah	Tahun	8,86	9,47	**9,47**
			4	Harapan lama sekolah	Tahun	13,55	13,80-13,81	**13,80-13,81**
			5	Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi	Persen	23,04	24,11	**24,11**
2	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial	**T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif**	**6**	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Angka**	**2,87**	**3,04**	**3,04**
		S.3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi	7	Indeks Demokrasi Provinsi	Angka	76,43 (2023)	82,36	**82,36**
		S.4. Meningkatnya kualitas	8	Indeks Kerukunan	Persen	79,04	79,08	**79,08**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD	Target P_RKPD 2025
	dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan		Umat Beragama				
			9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	55,26 (2023)	56,43–56,51	**56,43–56,51**
		S.5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	10	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,74 (2023)	61,37-62,48	**61,37-62,48**
			11	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,67 (2023)	56,78	**56,78**
			12	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,366 (2023)	0,348-0,344	**0,348-0,344**
3	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	T.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,2-5,8	**5,2-5,8**
			14	Rasio Gini	Angka	0,363	0,360	**0,360**
			15	Indeks Ekonomi Biru	Skor	80,86(data tahun 2023)	82,02*	**82,02***
		S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	16	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	13,02	13,05	**13,05**
			17	Rasio Volume usaha	Persen	0,90	0,95	**0,95**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD	Target P_RKPD 2025
				Kopersasi terhadap PDRB (%)				
			18	Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi pangan	Persen	6,99	7,05	**7,05**
			19	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,82	85,02	**85,02**
4	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	S.7. Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global	20	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	9,68	10,5*	**10,5***
		S.8. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	21	Tingkat Inflasi	Persen	1,23	3,2 -3,8	**3,2 -3,8**
			22	Inklusi Keuangan	Persen	75,02	80	**80**
5	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan	S.9. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	22	Persentase Desa Mandiri	Persen	32,88	33,09*	**33,09***
		S.10. Menurunnya Kemiskinan dan	24	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,77	7,30-7,89	**7,30-7,89**
			25	Tingkat	Persen	4,19 (Agt)	3,80 – 4,10	**3,80 – 4,10**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD	Target P_RKPD 2025
	ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	penganggguran		Pengangguran Terbuka				
6	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	T.4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	26	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	54,43 (2022)	55,37	**55,37**
		S.11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	27	Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	59,93 (2022)	61,66	**61,66**
		S.12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	28	Nilai Pilar Keterampilan Masyarakat ITDN)	Nilai	53,92 (2022)	61,66	**61,66**
		T.5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, responsif dan	**29**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**81,74**	**81,80**	**81,80**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD	Target P_RKPD 2025
		berorientasi pada Pelayanan Publik						
		S.11. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	30	Nilai SAKIP	Angka	69,02	69,27	**69,27**
		S12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	31	Indeks SPBE	Poin	3,94	4,01	**4,01**
			32	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,12	4,41	**4,41**
		S.13. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	32	Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	60	**60**
7	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.	T.6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan	34	Indeks Williamson	Angka	n.a	0,55	**0,55**
			35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,69	77,61	**77,61**
			36	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Angka	n.a	29,70	**29,70**
		S.13. Meningkatnya Kualitas infrastruktur	37	Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	85,64	88,39	**88,39**
8	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung	S.14. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana	38	Indeks Resiko	Poin	140,76	135,46	135,46

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD	Target P_RKPD 2025
	akselerasi pertumbuhan ekonomi	dan perubahan iklim		Bencana				

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan agenda pertama pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian 5 (lima) tahun dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 - -2029 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029. dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2025, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD Sulsel) Tahun 2025 serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam Rancangan RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2021-2041 untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2025 pada RKPD Pokok yaitu **"Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Daya Saing Ekonomi dan Pelayanan Dasar",** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Pembangunan Manusia; 2.Penguatan Infrastruktur Wilayah; 3.Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja; 4.Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi; 5. Pelestarian Lingkungan Hidup; 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor. Selanjutnya tema perubahan RKPD Tahun 2025 yang sesuai dengan Rancanagn RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 adalah **Penguatan Landasan Implementasi sistem layanan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Digital.** prioritas pembangunan daerah mengalami penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu :

1. **Prioritas Daerah -1**. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital;
2. **Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital;
3. **Prioritas Daerah-3**. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehtan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya;
4. **Prioritas daerah-4**. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan

5. **Prioritas Daerah-5**. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Keselarasan prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas pembagunan Kabupaten Takalar dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-5
Keselaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupatten Tahun 2025

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Pembangunan Manusia	Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	**Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi** serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	**Prioritas Daerah -1**. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi			Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	**Proritas Nasional 2**. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,			Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.			
			Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			memenuhi kompetensi minimum				
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan sebagai budaya			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan BPK - RI dan APIP
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			Program Penataan Organisasi	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Program Pembinaan Sejarah			Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan			Program Pengelolaan Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Program Pembinaan	Nilai Tingkat Kegemaran			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentese bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Perpustakaan	Membaca Masyarakat				
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Level maturitas UKPBJ
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentasi peningkatan informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terlayani
			Persentase anak usia pendidikan			Program Kepegawaian Daerah	Persentase capaian kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan				
			Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)
			Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk skala kabupateni
			Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil skala provinsi
			Persentase warga negara penderita			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan				
			Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah
			Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**Proritas Nasional 2**. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	**Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian
			Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH	**Prioritas Nasional.3**. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas**, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**
				produksi melalui peran aktif koperasi			
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	**Prioritas Nasional. 5**. Melanjutkan **hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam** untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan OPT yang tertangani
			Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	**Prioritas Nasional** 6. **Membangun dari desa** dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		Program Penyuluh Pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya
		Program Pengembangan Kapasitas dan Daya	Persentase Pengembangan kapasitas daya	**Prioritas Nasional 1**- Memperkokoh **Ideologi**		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Saing Kepemudaan	Saing Kepemudaan	**pancasila demokrasi** dan hak asasi manusia (HAM)			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Kelompok Tribina			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Kemandirian Pangan					
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan infrastruktur wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			Program Pengembanagn Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Wisatawan

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota				
			Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Barang Pokok dan Penting Antar Waktu
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)			Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan
		Prograam Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi pajak Daerah
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Tingkat ketersediaan energi berdasarkan AKG 2.400 Kkal per kapita per hari
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang MemilikiSertifikat Kompetensi				2.Tingkat Ketersediaan Protein energi berdasarkan AKG 63 gram pe rkapita per hari
		Program Penyelenggar	Persentase wilayah yang telah tersusun			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi (%)

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		aan Penataan Ruang	rencana tata ruang				
			Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang mendapatkan ijin			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian
		Program Kawasan Permukiman	Persentae ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak
			Persentase keetrsediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas
		Program Perumahan	Persentase Kawasan			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		dan Kawasan Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani			Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Persentase penurunan Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikat, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan	Persentase peningkatan layanan sertifikat, kualifikasi, klasifikasi, dan register perumahan dan kawasan permukiman			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi daerah

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		dan Kawasan Permukiman					
		Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)
			Persentase layanan angkutan darat			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Bumdes berkategori maju
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.				Persentase Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatannya

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
Peran Aktif Koperasi							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;			Persentase Penayangan SIRUP			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memilki pemerintahan yang baik
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih mendapatkan pekerjaan

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			Tingkat Inflas			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	**Prioritas Nasional 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	**Prioritas Daerah-3**. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehtan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PAUD yang telah melaksanakan PAUD Holitik Integratif (PAUD HI)
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya				Persentase Sekolah Dasar yang berakreditasi A
		Program Pengelolaan	Persentase Poklahsar yang				Persentase Sekolah Menengah Pertama minimal berakreditasi B

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		dan Pemasaran Hasil Perikanan	meningkat kelasnya				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan				Persentase PKBM minimal berakreditasi B
			Cakupan bina kelompok petani			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan				Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar Menengah
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura			Program Pengembangan Kurikulum	Persebtase penerapn kurikulum muatan lokal pada seluruh satuan pendidikan SD/SMP

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan terstandarisasi nasional
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorngan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS terakreditasi yang memberikan pelayanan standar
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan				Persentase Puskesmas terakreditasi yang memberikan pelayanan standar
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase peningkatan usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV				Persentase Pemenuhan Mutu Layanan RS sesuai Indikator Mutu Nasional (IMN)
			Persentase Penurunan kejadian dan				Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit Menular

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			jumlah kasus penyakit hewan menular				
			Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit Tidak Menular
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha				Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
		Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas				Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase keaktifan Kader Posyandu dalam upaya kesehatan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota				Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi aktif			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi			Program Pengembangan Kebudayaan	1. Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
		Program Penilaian Kesehatan	Persentase KSP/USP Sehat				2. Tingkat pengembangan kebudayaan masyarakat

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		KSP/USP Koperasi					
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang bersertifikat kompetensi			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yg mendapatkan layanan komprehensif
		Program Perencanaan dan Pembangunan Insdustri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase ketersediaan sarpras olahraga yang memenuhi standar

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			Ditetapkan dalam RPIP				
			Persentase cakupan pengembangan sentra industri				2. Peningkatan prestasi olahraga
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait				3. Persentase tenaga keolahragaan yang berlisensi
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender di Tingkat Pemerintah Provinsi

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait				
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota				2. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional	Persentase informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)
		Program Peningkatan Sarana Didtribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Pembangunan Daerah**	**indikator**
		Program Stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelendangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di luar panti
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	**Prioritas Nasional.3**. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas**, mendorong	**Prioritas daerah-4**. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
				kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			
			Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi			Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
		Program Pengelolaan Data dan satuan Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasipenanaman modal			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan Wisata			Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan Rumah Korban Bencana Skala Kabupaten yang tertangani
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota			Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak Kekayaan Intelektual	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penataan bangunan gedung kewenangan Provinsi (%)

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Konektifitas Darat
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan kunjungan kapal
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	**Prioritas Nasioan. 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	**Prirorıtas Daerah-5.** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengelolaan sampah

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
				mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi				Persentase timbulan sampah yang terkelola
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			Program Pengendalian Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan pada media air dan udara
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang			Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemahaman kelompok masyarakat terhadap lingkungan hidup

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			disabilitas diluar panti				
			Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti			Program Pengelolaan Bencana	Persentase kebencanaan yang tertangani
			Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Persentase pelayanana rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti				
			Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota				
			Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia				
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota				
			Persentase Peningkatan kapasitas bagi				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)				
		Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar				
		Progarm Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa				
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan				
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	jagung sesuai kebutuhan)				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi				
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase peningkatan usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV				
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				
			Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung kesehatan hewandan kesehatan masyarakat veteriner				
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal				
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi				
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP				
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM				
		Program Pengelolaan Data dan satuan Informasi	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Penanaman Modal					
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan Wisata				
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota				
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi				
		Program Pelayanan	Persentase koperasi aktif				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Izin Usaha Simpan Pinjam					
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi				
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat				
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang bersertifikat kompetensi				
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi				
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Mikro (UMKM)					
		Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas				
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana				
		Progaram Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas				
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Pelestarian Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air				
			Indeks kualitas udara				
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan				
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola				
		Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota				
		Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota				
		Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota				
			Persentase layanan angkutan darat				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota				
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi. Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah				
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum dan	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Keprotokoleran)					
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%				
			Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu				
			Nilai Sakip Sekretariat Daerah				
			Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			perangkat daerah				
			Capaian kinerja Perangkat Daerah				
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan				
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu				
			Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu				
			Persentase Perangkat Daerah				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			yang menyusun laporan tepat waktu				
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu				
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah				
			Jumlah penambahan wajib pajak baru				
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga	Persentase penyelesaian temuan				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		n dan Asistensi	berulang kode 01, 02 dan 03				
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada				
		Program Pencegahan Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
			Waktu Tanggap (Response Time				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			Penanganan Kebakaran				
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota				
		Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarkat				
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Serta Budaya Politik					
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina				
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat				
		Program Peningakatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik,pertahanan dan keamanan				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
			Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan				

RKPD POKOK TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	indikator
			dinyatakan sah/legal				
			Persentase penanganan pasca bencana				
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan				
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan				

Sumber Data : Rancangan RPJMD Tahun 2025 – 2029, diolah Bappelitbangda

Perubahan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 indikator dan target Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-6
Perubahan Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025

RKPD POKOK TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				
No.	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD**	**Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan**	**Target 2025**	**No.**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD**	**Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan**	**Target 2025**
1		Memperkuat Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,25	1	**Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehtan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya	T1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	IT.1. Indeks Pembangunan Manusia	72,24
	Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM	73,45			S1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi secara merata	IS.1. Rata-rata Lama Sekolah	7,55
	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	35,18				IS.2. Harapan Lama Sekolah	12,68
2		Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB Perkapita	51,24	2		S2.Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata	IS.3. Usia Harapan Hidup	74,05
			Indeks Gini	0,34			T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	IT.2. Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)

RKPD POKOK TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025	No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025
	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6,10-7,14		Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital	S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	IS.4. Nilai SAKIP	B (>60-70)
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,2	3		S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	IS.5. Indeks Pelayanan Publik	B (3,01 – 3,50)
	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Angka Kemiskinan	6,69				IS.6. Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital (2026)	2,9
	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	59,1				IS.7. Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (30,00 – 59,99)
3		Memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	BB (71-80)			T3. Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	IT.3. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	
	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Daerah	BB (71-80)	4	Prioritas daerah-4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	S5. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	IS.8. Indeks Layanan Infrastruktur	

RKPD POKOK TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025	No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025
			Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	90-100					
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,61-88,30)			T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan	IT.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,22
	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	86,91				IT.5. Persentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca	28,76
						Prioritas Daerah-5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	S8. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan.	IS.12. Indeks Kualitas Air	70,88
								IS.13. Indeks Kualitas Udara	79,13
					5			IS.14. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,88
							S.9. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	IS.15. Indeks Risiko Bencana	125,23
							S.10. Meningkatnya ketahanan air dan energi	IS.16. Kapasitas Air Baku	290

RKPD POKOK TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025	No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025
								IS.17. Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)	555,71
							T.5.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	IT.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,45
						Prioritas Daerah -2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital	S.11.Meningkatnya produktifitas ekonomi	IS.18. Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	
								IS.19. Kontribusi Industri terhadap PDRB	5,3
								IS.20. Persentase Usaha Mikro menjadi wirausaha	0,38
								IS.21. Persentase peningkatan investasi	
					6		S.12. Meningkatnya swasembada pangan	IS.22. Indeks Ketahanan Pangan	84,89
							S.13. Meningkatnya stabilitas fiskal	IS.23. Tingkat Inflasi	2,9
								Indeks Akses Keuangan Daerah	4,38

RKPD POKOK TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025	No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025
							S.14. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS.24. Persentase Desa Mandiri	30,20
							T.6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah	IT.7. Angka kriminalitas	
								Indeks Pembangunan Gender	
						Prioritas Daerah-3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehtan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya	S.15. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	IS.25. Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	
							S.16. Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	IS.26. Persentase Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam preservasi dan pemajuan kebudayaan	
							S.17. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender	IS.27. Indeks Pembangunan Keluarga	
								IS.28. Indeks Perlindungan Anak	

RKPD POKOK TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025	No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025
								IS.29. Indeks Pembangunan Pemuda	
					7				
								IS.31. Indeks Ketimpangan Gender	
							S.18. Meningkatnya ketertiban dan keamanan	IS.32. Tingkat penanganan tindak kriminal	
							T.7. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	IT.8. Tingkat Kemiskinan	7,62-5,16
								IT.9. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58
						Prioritas Daerah-3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehtan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan	S.19. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	IS.33. Persentase penduduk peserta perlindungan dan jaminan sosial	

RKPD POKOK TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025	No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Target 2025
						memegang nilai - nilai agama dan budaya			
						Prioritas Daerah -2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital	S.20. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	IS.34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,43

4.3 Perioritas Pembangunan kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
1	Pembangunan Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	99.206.122.405	**Prioritas Daerah -1**. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		
			Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%						
			Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%				Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah		
			Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%			Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
							Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan sebagai budaya	55%	1.015.000.000			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,4	10.375.000.000		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan BPK - RI dan APIP		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	100%	221.000.000		Program Penataan Organisasi	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah		
		Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	136.887.410.946		Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%			Program Pengelolaan Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentese bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani		
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Level maturitas UKPBJ		
			Persentase warga negara produktif yang	100%			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			mendapatkan pelayanan kesehatan				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentasi peningkatan informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi		
			Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terlayani		
			Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			Program Kepegawaian Daerah	Persentase capaian kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik		
			Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)		
			Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat	100%			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			yang mendapatkan pelayanan kesehatan					penduduk skala kabupateni		
			Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil skala provinsi		
			Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi		
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7			Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		
			Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH				Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi		
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH			**Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
						berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital	Sarana Pertanian			
			Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	100%			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,12	70.552.030.000		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan OPT yang tertangani		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	10%	1.000.000.000		Program Penyuluh Pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya		
			Persentase Kelompok Tribina	83%	1.454.241.000		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak		
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	27,17	2.254.784.000		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas		
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	80			Program Pengendali	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			yang dilayani oleh jaringan irigasi				an Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menular Strategis (PHMS)		
			Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	100%	6.279.375.000		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap		
			Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan	100%			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya		
			pokok air minum sehari hari				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		
		Program Pengelolaan dan	Persentase rumah tangga yang memiliki	100%	4.307.866.000		Program Pengemba	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
		Pengembangan Sistem Air Limbah	akses terhadap layanan sanitasi layak.				nagn Daya Tarik Destinasi Wisata			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	10%	1.000.000.000		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Wisatawan		
		Program Pengembangan Permukiman	Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik		500.000.000		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf		
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG)	50%	600.000.000		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	11.597,98	700.000.000		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	Persentase Koefisien Variasi Harga Barang Pokok dan Penting Antar Waktu		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
							Barang Penting			
			Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	80%			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	75%	20.555.967.000		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan		
			Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60	305.000.000		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
			Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%	700.000.000		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi pajak Daerah		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Tingkat ketersediaan energi berdasarkan AKG 2.400 Kkal per kapita per hari		
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	100%	950.000.000			2.Tingkat Ketersediaan Protein energi berdasarkan AKG 63 gram pe rkapita per hari		
			Persentase layanan angkutan darat	100%			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi (%)		
			Persentase layanan angkutan penyeberangan	100%	400.000.000		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian		
			Persentase perumahan yang mendapatkan izin	60%	640.885.780		Program Penyediaan Dan	Persentase luas areal pertanian yang terdampak		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
							Pengembangan Prasarana Pertanian	pembangunan prasarana pertanian		
			Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	150.000.000		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak		
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	100%	500.000.000		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas		
			Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,93 %			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20,41 %	1.099.680.100		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan		
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja		Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	22.050 ton	7.106.027.000		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
			Volume produksi perikanan budidaya	590.403 Ton	1.050.000.000		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi daerah		
			Persenatse poklahsar yang meningkat kelasnya	26%	400.000.000		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)		
			Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	4,50 %	7.395.000.000		Program Pengelolaan	Persentase peningkatan pajak daerah		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
							Pendapatan Daerah			
			Cakupan bina kelompok petani	60			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Bumdes berkategori maju		
			Persentase peningkatan produksi peternakan	4				Persentase Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatannya		
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	95	1.300.000.000		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memilki pemerintahan yang baik		
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman	90			Program Pelatihan Kerja dan Produktivi	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih mendapatkan pekerjaan		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
							tas Tenaga Kerja			
			perkebunan dan holtikultura				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri		
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	95		**Prioritas Daerah-3**. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehtan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PAUD yang telah melaksanakan PAUD Holitik Integratif (PAUD HI)		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
						agama dan budaya				
			Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	90	1.500.000.000			Persentase Sekolah Dasar yang berakreditasi A		
			Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100				Persentase Sekolah Menengah Pertama minimal berakreditasi B		
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	-7				Persentase PKBM minimal berakreditasi B		
			Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90	100.000.000		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar		
			Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	48,79	200.000.000			Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar Menengah		
			Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	200.000.000		Program Pengembangan Kurikulum	Persebtase penerapn kurikulum muatan lokal pada seluruh satuan pendidikan SD/SMP		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	20	130.000.000		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan terstandarisasi nasional		
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	50			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorngan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS terakreditasi yang memberikan pelayanan standar		
			Persentase cakupan pengembangan sentra industri	20				Persentase Puskesmas terakreditasi yang memberikan pelayanan standar		
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100	100.000.000			Persentase Pemenuhan Mutu Layanan RS sesuai Indikator Mutu Nasional (IMN)		
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan	100				Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit Menular		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait					Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit Tidak Menular		
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota	100				Persentase Imunisasi Dasar Lengkap		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)	25	25.000.000			Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	24	45.000.000		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar		
			Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	100			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase keaktifan Kader Posyandu dalam upaya kesehatan		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	23,72	50.000.000			Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
			Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	23,97	25.000.000		Program Pengembangan Kebudayaan	1. Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		
			Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	23,10	369.695.000			2. Tingkat pengembangan kebudayaan masyarakat		
			Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	50	20.000.000		Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		
			Lama kunjungan wisata	2	1.000.435.000		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yg mendapatkan layanan komprehensif		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan	100	8.000.000		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan		
			Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota	100			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase ketersediaan sarpras olahraga yang memenuhi standar		
			Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	100	61.000.000			2. Peningkatan prestasi olahraga		
			Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	75	50.000.000			3. Persentase tenaga keolahragaan yang berlisensi		
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	1	100.000.000		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender di Tingkat Pemerintah Provinsi		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
							Perempuan			
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	60	100.000.000			2. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi		
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	50.000.000		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)		
			Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	4	380.000.000		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	79	50.000.000		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas		
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60	305.000.000		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar,		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
								gelendangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di luar panti		
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	10	1.000.000.000		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	87,9	753.900.000	**Prioritas daerah-4**. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan/wilayah rentan rawan pangan	0	600.000.000		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	100	25.000.000		Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75	25.000.000		Program Penataan	Persentase penataan bangunan dan		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
							Bangunan Dan Lingkungannya	lingkungan pada kawasan strategis kabupaten		
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	23,5	50.000.000		Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan Rumah Korban Bencana Skala Kabupaten yang tertangani		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang bersertifikat kompetensi	25	100.000.000		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	25	50.000.000		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	48,79	200.000.000		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penataan bangunan gedung kewenangan Provinsi (%)		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
		Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	200.000.000		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	85	70.000.000		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Konektifitas Darat		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti	80	125.000.000		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan kunjungan kapal		
			Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	80		**Prioritas Daerah-5.** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengelolaan sampah		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
						lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
			Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti	80				Persentase timbulan sampah yang terkelola		
			Persentase pelayanana rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	80			Program Pengendalian Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan pada media air dan udara		
			Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial	80			Program Peningkatan	Persentase peningkatan pemahaman kelompok		

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Masyarakat (PSM)				Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	masyarakat terhadap lingkungan hidup		
			Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	80			Program Pengelolaan Bencana	Persentase kebencanaan yang tertangani		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia	100	105.000.000		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	60.000.000					
			Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial	80						

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Masyarakat (PSM)							
		Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	100	30.000.000					
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	87	11.000.000					
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	87	110.000.000					
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	25.000.000					
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas	100	25.000.000					
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	80	150.000.000					
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	59,05	1.481.240.000					
			Indeks kualitas udara	83,99						

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	32,24	50.000.000					
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Jumlah limbah B3 yang dikelola	30						
		Beracun (Limbah B3)								
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	35	50.000.000					
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	80	2.000.000.000					
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota		655.000.000					

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah		575.653.807.544					
		Program Penunjang Urusan	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	5.650.000.000					
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64						
			Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100						
			Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66						
			Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0						
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah	100	750.000.000					
			Capaian kinerja Perangkat Daerah	90						

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada	100	600.000.000					
		Perencanaan Pembangunan daerah	komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia							
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100						
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100						
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	85	1.000.000.000					
		Program Perumusann Kebijakan,	Persentase penyelesaian temuan	85	450.000.000					
			berulang kode 01, 02 dan 03							

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Persentase dokumen APBD tepat waktu	100	174.042.230.741					
			Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	93						
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	93						
			Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	91	2.787.782.359					
			Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100	7.544.708.300					
			Jumlah penambahan wajib pajak baru	100						
			Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	98	220.000.000					
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	450.000.000					

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	5.650.000.000					
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64						
			Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100						
			Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66						
			Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0						
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitas	100	5.900.000.000					
			Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	B						
			Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	100						

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100	990.000.000					
			Persentase Penayangan SIRUP	100						
			Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	100						
			Tingkat Inflasi	2,03						
		Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el	97	188.704.835					
			Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik	98						
			Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	55						
		Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	98	50.000.000					
			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100						
			Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada	100						

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan							
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	98	10.000.000					
			persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	98						
			Presentase raperda yang disahkan menjadi	100	11.750.000.000					
			perda tepat waktu sesuai propemperda							
			Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	100						
			Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	100	775.000.000					
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94	650.000.000					
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	94						
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan	100	950.000.000					

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Informasi Rawan Bencana							
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100						
			Persentase Warga Negara yang	100						
			Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
			Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100						
			Persentase penanganan pasca bencana	100						
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	98,25	700.000.000					
			Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15						
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	60.000.000					

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial	80						
			Masyarakat (PSM)							
			Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	100	500.000.000					
			Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	450.000.000					
			Angka potensi konflik SARA di masyarkat	2	100.000.000					
			Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	100	10.986.990.000					
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	66	100.000.000					
		Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	24	70.000.000					
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik,pertahanan dan keamanan	12	180.000.000					

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Anggaran Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Perubahan Anggaran Tahun 2025	
				Kinerja	Pagu				Kinerja	Pagu
			TOTAL		1.200.934.883.009,90					

4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2025

4.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2025

Pencapaian sasaran pembangunan perubahan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-7
Arah Prioritas dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul	T1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses	Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi secara merata diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan jangkauan metode pembelajaran berbasis digital dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan ke seluruh wilayah kabupaten berbasis kompetensi yang berfokus pada meningkatnya kemampuan kognitif, sosial, dan ketrampilan peserta didik untuk mendukung terwujudnya wajib belajar 13 tahun	1.	Optimalisasi pemanfaatan sarana pendidikan dan tenaga guru/ kependidikan serta keasadaran masyarakat terhadap partisipasi sekolah untuk pemenuhan wajib belajar 13 tahun diantaranya melalui bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu berbasis transaksi digital,	Pengembangan pemanfaatan teknologi digital untuk ekosistem smart pendidikan berbasis School IT (skul.id) dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa dan satuan pendidikan melalui perbaikan metode pembelajaran pada setiap satuan pendidikan di seluruh kecamatan,	Penguatan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan dunia pendidikan untuk pemerataan kualitas antar satuan pendidikan melalui pemenuhan jumlah dan kualitas PAUD dan pendidikan dasar,	Kolaborasi antar pihak dalam mendorong perwujudan masyarakat terpelajar berbasis Intelektualisme diantaranya melalui pembangkitan minat dan kegemaran membaca dalam masyarakat, revitalisasi perpustakaan daerah dan perpustakaan desa, pengembangan kelompok diskusi kalangan pemuda dan pelajar, dan	Kolaborasi antar pihak dalam pemantapan wajib belajar 13 tahun,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			termasuk Pendidikan Anak Usia Dini.						
				2.	Pembagian kluster sekolah berdasarkan empat kriteria untuk optimalisasi akses.	Pelatihan guru dalam penguasaan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan produktif (KIP learning),	Akurasi data warga putus sekolah untuk diaktifkan dalam program kesetaraan Paket A, B dan C dengan kurikulum berbasis pembekalan life skill,	Penguatan Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan pendidikan sebagai wadah perwujudan intelektualisme anak, remaja, pemuda, dan tokoh masyarakat dengan lokus prioirtas pada ibukota kabupaten.	Peningkatan capaian literasi dan numerasi siswa,
				3.	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM pendidikan.	Pemantapan keterpenuhan empat kriteria kluster sekolah pada seluruh kecamatan, pengembangan sistem pengukuran capaian literasi dan numerasi siswa dengan lokus prioritas pada satu pendidikan terpilih di ibu kota kabupaten.	Prioritisasi efektivitas Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar urusan pendidikan pada kecamatan dengan kualitas pendidikan paling tertinggal,	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	Efektivitas Gerakan Posyandu Terintegrasi untuk layanan pendidikan,
				4.	Dukungan pelaksanaan program MBG pada satuan pendidikan, dengan fokus wilayah pada seluruha kecamatan di Takalar.	Pemantapan Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	Pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT) dengan lokus prioritas pada satuan pendidikan di dibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak	Ekosistem smart pendidikan berbasis school.id, penerapan metode pembelajaran kreatif, inovatif dan produktif,
				5.	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik	Akselerasi pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan,	Evaluasi pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	modern, adaptif dan berakhlak	kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	diseluruh wilayah termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.	seluruh satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.
				6.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak.	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, diseluruh wilayah termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.	Evaluasi pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi
				7.	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, diseluruh wilayah termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.	Pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada seluruh satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.	Evaluasi pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				8.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM pendidikan.	Pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada seluruh satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.		Evaluasi Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, diseluruh wilayah termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.
				9.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk ekosistem smart pendidikan berbasis School IT (skul.id) dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa dan satuan pendidikan melalui perbaikan metode pembelajaran pada setiap satuan pendidikan di seluruh kecamatan,	Pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada seluruh satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM pendidikan.		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyara	Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan	1.	Optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana, fasilitas dan SDM kesehatan untuk perbaikan akses layanan kesehatan diantaranya melalui peningkatan cakupan jaminan	Pemenuhan dan optimalisasi fungsi tenaga kesehatan dan sarana-prasarana untuk kualitas pelayanan yang merata	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi antar pihak untuk upaya promotif dan preventif kesehatan melalui penyadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup,	Kolaborasi antar pihak untuk pembudayaan pola hidup sehat diantaranya melalui Pemenuhan sarana pendukung pola hidup sehat termasuk ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana	Kolaborasi antar pihak untuk perwujudan Kabupaten Sehat diantaranya melalui pemantapan cakupan dan kualitas pemenuhan SPM kesehatan,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
		kat secara prima dan merata	pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui penguatan system layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh wilayah.		kesehatan secara gratis (khususnya rumah tangga miskin dan miskin ekstrem) pada seluruh kecamatan, dan		pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk penduduk usia sekolah, usia produktif dan lanjut usia,	untuk aktivitas, koneksivitas tranportasi yang memungkinkan warga berjalan kaki atau naik sepeda, i	penguatan kader Posyandu dalam memantapkan Gerakan Posyandu Terintegrasi 6 layanan dasar bidang kesehatan,
				2.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya	Pelayanan prima untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir, imuniasi lengkap untuk semua bayi, pengobatan TB tuntas, penanganan stunting secara konvergen, dan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar pada seluruh wilayah kecamatan.	pemenuhan sarana-prasarana pendukung pola hidup sehat dengan fokus wilayah pada seluruh kecamatan, dan	Penanganan limbah medis secara aman, pemenuhan air minum aman, pemenuhan fasilitasi sanitas, dan pembudayaan pola hidup bersih dengan fokus wilayah pada seluruh kecamatan.	Evaluasi pelakasanaan sistim digitalisasi kesehatan dan telemedicine, dan pemantapan upaya promotive dan preventif kesehatan serta pembudayaan pola hidup sehat pada seluruh Kecamatan.
				3.	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu (Posyandu terintegrasi 6 layanan dengan standar pelayanan minimal (SPM)) yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh	Pemenuhan alat kesehatan pada Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Polongbangkeng Utara, serta pengadaan alat dan bahan untuk optimalisasi fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).	pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) untuk warga pulau atau nelayan penangkap ikan bermobilitas tinggi..	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya	Pengembangan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sarana prasarana penanganan limbah medis				
				4.	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyanduyang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sarana prasarana penanganan limbah medis	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau.	Evaluasi pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sarana prasarana penanganan limbah medis
				5.	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Pemantapan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					stunting berbasis Posyandu	sarana prasarana penanganan limbah medis			
				6.	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu	Evaluasi Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu
				7.	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Evaluasi Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.
				8.	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif	Evaluasi Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.		terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses
				9.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (Kader Kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.
				10.	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (kader kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (kafder kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Evaluasi Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (Kader Kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat
				11.	Pembangunan dan pengadaan sarana RS Pratama di Polongbangkeng Utara, pembangunan Puskesmas Laikang di Kecamatan Mangarabombang, penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Takalar	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal(kader kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Keberlanjutan pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					menjadi Labkesmas Tingkat 2.				
				12.	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM kesehatan	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)			
				13.		Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM kesehatan			
Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan nilai kejujuran,etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan	1.	Optimalisasi sumberdaya dan penguatan norma untuk perwujudan ASN berintegritas diantaranya melalui perbaikan tata kelola data base ASN dan non ASN berbasis elektronik (smart ASN), penempatan dan promosi jabatan ASN berdasarkan peringkat hasil assessment dengan melibatkan pihak eksternal yang kompeten dan independen,	Kolaborasi antar perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam mendorong reformasi birokrasi tematik dan general;	Optimalisasi sumberdaya dalam mendorong budaya kinerja dan akuntabilitas penerimaan daerah melalui coaching clinic SAKIP untuk seluruh OPD dalam penyusunan dokumen kinerja,	Kolaborasi multi-pihak dalam pencegahan korupsi melalui penilaian mandiri akuntabilitas kinerja oleh inspektorat dan pelibatan pihak eksternal, koordinasi dan pertukaran informasi dengan instansi penegak hukum terkait temuan-temuan MCP yang mengindikasikan potensi tindak pidana korupsi.	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi antar aktor dalam mematangkan akuntabilitas dan integritas tatakelola pemerintahan melalui pemantapan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi menyeluruh implementasi SAKIP.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpercaya, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien.						
				2.	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis konsistensi perencanaan dan penganggaran, implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah.	akuntabilitas kinerja melalui pelibatan seluruh ASN dalam penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;	Pelaksanaan sistem reward and punishment berbasis kinerja OPD,	Digitalisasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan dan barang milik daerah, diiringi dengan pemantapan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan. lokus aktivitas pada Dinas Kominfo.	Menjamin keberlanjutan skor MCP dengan menetapkan regulasi daerah yang mendukung implementasi MCP, terutama di area yang memiliki potensi risiko korupsi tinggi.
				3.	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	pembentukan zona integritas berbasis risiko untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; serta peningkatan efektivitas pengawasan APIP melalui audit berbasis risiko dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan lokus prioritas pada sekretariat daerah dan inspektorat.	Implementasi sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital untuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak, serta meluaskan praktik perencanaan dan penganggaran partisipatif ke tingkat kecamatan dan desa, .	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
				4.	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Meningkatkan partisipasi publik dan transparansi melalui peningkatan respons terhadap laporan/aduan masyarakat berbasis digital	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
						dengan pemanfaatan teknologi informasi	dengan lokus prioritas pada dengan lokus prioritas pada Setda, Inspektorat, Bappenda, serta pemerintah kecamatan dan desa		
				5.	Peyusunan regulasi terkait kedisiplinan ASN	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi
				6.	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Peyusunan regulasi terkait kedisiplinan ASN	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
				7.	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Peyusunan regulasi terkait kedisiplinan ASN	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah
				8.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
				9.	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					penerapan manajemen risiko.	perencanaan pusat dengan daerah	jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital		penerapan manajemen risiko.
				10.		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah		
				11.			Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.		
		S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah diarahkan pada pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali termasuk penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya, melalui pemanfaatan teknologi	1.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan penguatan regulasi/kelembagaan sebagai pondasi pemerintahan digital melalui harmonisasi arsitektur pemerintahan digital daerah dengan arsitektur pemerintahan digital nasional, penyusunan kebijakan pengelolaan data dan pembentukan tim koordinasi pemerintahan digital lintas OPD,	Optimalisasi sumberdaya untuk perluasan jangkauan pemerintahan digital melalui perluasan jangkauan digital services, digital monitoring and evaluation, pengembang-an jaringan broadband hingga menjangkau seluruh pelosok; digitalisasi layanan publik dan sistem internal pemerintahan untuk layanan digital prioritas (layanan perizinan, administrasi kependudukan, PAD, UMKM Berbasis digital, pendidikan dan kesehatan); interoperabilitas awal dengan interkoneksi sitem keuangan; perencanaan dan pelayanan (API gateway awal).	Kolaborasi antar pihak internal pemerintah dan non pemerintah dalam mempercepat pemerataan integrasi lintas OPD melalui pengelolaan data terpadu yang fokus pada interoperabilitas data menyeluruh dan pengembangan sistem pengelolaan data lintas sektor dengan strategi integrasi aplikasi layanan publik dan manajemen internal OPD dan satu portal layanan publik daerah;	Optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan inovasi dalam penanganan produk unggulan daerah dari hulu ke hilir melalui introduksi teknologi tepat guna, akses permodalan yang terbuka, dan manajemen usaha berbasis digital dengan lokus utama pada kecamatan sentra produk unggulan;	Konsolidasi layanan proaktif dan sistem pemerintahan digital berkelanjutan yang berfokus pada konsolidasi semua capaian menjadi tata kelola adaptif dan layanan publik digital berbasis kebutuhan masyarakat dengan upaya utama layanan proaktif dan prediktif melalui implementasi AI sederhana untuk menyarankan layanan kepada warga berdasarkan profil dan layanan publik yang mendeteksi kebutuhan otomatis misalnya uintuk bantuan sosial; penerapan sistem pemerintahan digital

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			informasi dan penguatan ekosistem inovasi.						terintegrasi dengan sistem nasional; keterlibatan komunitas melalui pemanfaatan sistem pengaduan publik berbasis komunitas; .
				2.	Penguatan infrastruktur digital dengan pemutakhiran jaringan dan hardware di seluruh OPD dan UPT serta integrasi domain aplikasi,	Implementasi Singel Sign On untuk pegawai dan admin OPD; pelatihan teknis admin OPD untuk pengelolaan sisten informasi dengan lokus prioritas pada seluruh OPD.	Pembuatan dashboard pemantauan pembangunan berbasis data sektoral; evaluasi sistem pemerintahan digital melalui penilaian mandiri sisitem pemerintahan digital oleh Pemda dan revieu oleh Kemen PANRB;	Evaluasi penerapan pemerintahan berbasis digital dalam fokus pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan layanan publik melalui sistem monitoring real-time untuk RKPD, keuangan dan kinerja ASN,	Skema reward OPD digital dengan pemberian insentif kinerja untuk OPD dengan inovasi digital terbaik dan pelayanan tercepat
				3.	Pelatihan dasar ASN terkait literasi digital dan manajemen pemerintahan digital, pengintegrasian program pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi desa, Pojok Internet Desa Kepulauan (POINDES) di 6 (enam) desa Kecamatan Kepulauan Tanakeke.	kreasi inovasi untuk pengembangan produk unggulan daerah berbasis digitalisasi.	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penerapan kanal aduan dan feedback masyarakat digital dan layanan UMKM digital dengan lokus utama pada produk unggulan daerah.	Pemanfaatan Big Data dalam integrasi dan analisis data pendidikan, kemiskinan dan kesehatan untuk kebijakan adaptif, pelayanan publik otomatis (notifikasi, izin digital, chatbot sederhana), dan audit sistem pemerintahan digital tahunan untuk penguat-an kualitas dan efisiensi dengan lokus seluruh OPD.	Keberlanjutan pengembangan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*
				4.	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan	Keberlanjutan pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					kerja fungsional *government*	institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*	institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*	institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*	informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
				5.	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Keberlanjutan pengembangan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi
				6.	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Keberlanjutan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,* dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah
				7.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking*	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,*	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,*	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,*	Keberlanjutan Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah	dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah	dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah	dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah	mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah
				8.	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	
				9.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan
				10.	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					antara wilayah perkotaan dan pedesaan	wilayah perkotaan dan pedesaan	wilayah perkotaan dan pedesaan	wilayah perkotaan dan pedesaan	
				11.	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.
				12.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	
Misi 3. Membang	T3. Meningkatnya daya	S5. Meningkatnya Kualitas	Meningkatkanya pemerataan pembangunan infrastruktur dan	1.	Prsispan pengembangan Kawasan Industri Takalar melalui penyiapan lahan yang memiliki	Kolaborasi antar lapisan pemerintah dan mitra pembangunan internasional untuk pengembangan pusat-	Kolaborasi multipihak dan optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan Kawasan Industri Takalar	Optimalisasi Kolaborasi multipihak dan optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan Kawasan	Keberlanjutan pengembangan Kawasan Industri Takalar melalui penyiapan lahan yang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
un dan meng embang kan kemu dahan akses infras truktur	saing infrast ruktur berkel anjuta n	Layanan Infrastru ktur Daerah	infrastruktur dasar yang berkualitas diantaranya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air yang mendukung konektifitas dan pelayanan dasar yang berkelanjutan.		infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.	pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;	melalui penyiapan lahan yang memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.	Industri Takalar melalui penyiapan lahan yang memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.	memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.
				2.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk pemenuhan indrastruktur layanan dasar bagi kebutuhan air minum aman, penanganan limbah domestik yang berlenjutan	Pembangunan dan rehabilitasi gedung - gedung perkantoran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air untuk pemenuhan berbagai kebutuhan melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sekunder dan tersier,	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi antar pihak dalam mendorong transisi energi melalui rintisan dan inisiatif pemanfaatan panel surya dan pemanfaatan kotoran ternak untuk sumber bionergi skala rumah tangga, diiringi dengan
				3.	infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah daratan dan antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan, diantaranya membangun jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Takalar dan	Pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Pembangunan sarana pompanisasi dan pengembangan embung, pembangunan dan perbaikan jalan tani, pembuatan bangunan pengendali banjir dan abrasi, dengan lokus prioritas pada sentra padi sawah dan kawasan pesisir.	Opfimalisasi sumberdaya untuk memantapkan pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintegrasi 6 Layanan pada selruh kecamatan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					Kabupaten Gowa yaitu Jembatan Manongkoki (Takalar) - Bilonga (Gowa), Salaka (Takalar) - Kaluarrang (Gowa).				
				4.	Pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi
				5.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung - gedung perkantoran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan
				6.	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
				7.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan
				8.	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan
				9.	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
				10.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah
				11.	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal	efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan
				12.	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air
				13.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal	Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal
				14.	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
				15.	Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan	pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
						sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman			
				16.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman			Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
				17.				pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.
				18.					Menjaga keberlanjutan kualitas udara secara kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap pabrik, pengendalian bau busuk akibat limbah di sekitar wilayah Kecamatan Mangarombang,, Kecamtan Galesong Utara, penerapan teknologi dan inovasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
									untuk daur ulang sampah dan limbah diseluruh wilayah Kabupaten Takalar, menuju Takalar BISA (Bersih Indah Asri dan nyAman)
Misi 4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan	S.6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, pelestarian sumberdaya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan peningkatan kualitas ekosistem lingkungan hidup yang seimbang.	1.	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai terutama di wilayah aliran sungai; pencegahan dan penanganan pencemaran laut dan pesisir; perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar;	Kolaborasi multipihak dalam memelihara cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan,	Memelihara kualitas udara secara kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap pabrik, pengendalian bau busuk akibat limbah di sekitar wilayah Kecamatan Mangarombang dan Kecamatan Galesong Utara, penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah.	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau
				2.	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa	pencegahan dan penanganan pencemaran air di lokasi Kawasan Industri Takalar Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Kepulauaan Tanakeke dan Kawasan Pesisir; pencegahan dan	pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultur, pengembangan ekonomi sirkular berbasis pertanian terpadu,	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar	penanganan potensi pencemaran air dari limbah pabrik pada Kawasan Pabrik Gula Takalar.			antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar
				3.	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	menjaga kelestarian hutan mangrove khususnya di Kecamatan Kepualauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu.	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,				pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,
				4.	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai
				5.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai terutama di wilayah aliran sungai; pencegahan dan	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai	

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					penanganan pencemaran laut dan pesisir; perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar;	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,	lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar		
				6.	pencegahan dan penanganan pencemaran air di lokasi Kawasan Industri Takalar Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Kepulauaan Tanakeke dan Kawasan Pesisir; pencegahan dan penanganan potensi pencemaran air dari limbah pabrik pada Kawasan Pabrik Gula Takalar.	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
							pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,		
				7.			Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai		
		S.7. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah, swasta, peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi bencana berbasis pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan ketangguhan wilayah serta peningkatan kesadaran keluarga terhadap ketangguhan bencana.	1.	Optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana melalui penguatan kelembagaan BPBD dan sinergi antar OPD, revisi dan penetapan regulasi/perda kebencanaan, rencana kontijensi, inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial, pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan, serta pengembangan sistim dini lokal (Early Warning System - EWS), serta penanganan sampah dan abrasi pantai dengan lokus prioritas pada wilayah rawan bencana.	Kolaborasi antar pihak dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur mitigasi bencana dengan fokus pada infrastruktur fisik dan sistem mitigasi melalui pembangunan sarana prasarana mitigasi (tanggul, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara/ akhir), integrasi sistem informasi kebencanaan (SIK) berbasis data real-time, sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat, pelatihan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, dan relawan dengan lokus prioritas pada wilayah rawan bencana.	Pengembangan kerangka kerja untuk integrasi mitigasi dalam tata kelola pembangunan dengan fokus pada mainstreaming mitigasi ke semua sektor pembangunan, integrasi mitigasi dalam pembangunan infrastruktur daerah, evaluasi dan uji coba sistem peringatan dini berbasis komunitas, penguatan kemitraan dengan dunia usaha (CSR untuk kebencanaan), program desa/kelurahan tangguh bencana (DESTANA), pendidikan kebencanaan di sekolah dan madrasah, dan pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana terutama pada lokus terjadinya banjir dan abrasi.	Evaluasi pengembangan inovasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan komunitas dengan fokus pada adaptasi berbasis komunitas dan teknologi inovatif, pengembangan aplikasi mobile sistem informasi dan pelaporan kebencanaan, simulasi penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas daerah, penguatan koperasi atau lembaga ekonomi lokal pasca bencana, pembentukan tim siaga bencana di tiap desa/kelurahan, integrasi mitigasi non-alam (pandemi, konflik sosial, industri) dalam kebijakan daerah, penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi untuk inovasi mitigasi.	Replikasi dan keberlanjutan fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen risiko, penguatan sistem pembiayaan keberlanjutan mitigasi (dana cadangan), dan pengembangan indeks ketahanan daerah terhadap bencana untuk seluruh wilayah.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				2.	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif
				3.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana
		S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi	Meningkatnya ketahanan air dan energi diarahkan pada penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, menjamin ketersediaan air bersih dan energi khususnya listrik bagi seluruh masyarakat, menghindari krisis air, pangan, dan energi.	1.	Kolaborasi antar pihak dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan air melalui konservasi sumberdaya air sungai dan air tanah, pengolahan air bersih dan aman untuk diminum, penyimpanan air tanah dengan pembangunan embung, penyediaan daerah resapan air, dengan lokus prioritas pada wilayah sumber air dan aliran air.	Kolaborasi antar pihak dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong transisi energi menuju bauran energi terbarukan dengan energi konevensional melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai bioethanol sumber energi rumah tangga, pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi, dan inisiasi pemanfaatan energi bayu dengan lokus prioritas di Kecamatan Mangngara-bombang dan Kecamatan ekosistem persawahan.	Optamalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk penguatan ketahanan pangan melalui pengendalian ketersediaan bahan pangan utama, penguatan akses pangan rumah tangga dengan sistem distribusi pangan yang terjangkau, penganekaragaman bahan pangan untuk menjamin konsumsi pangan yang memenuhi standar pola pangan harapan, diringi dengan pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemerintah.	Kerjasama dengan Provinsi serta stakeholder lainnya dalam pemantapan sistem ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, ketersediaan air bersih dan distribusi listrik bagi seluruh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke, dan Kecamatan Mangarabombang. Kerjasama dengan Provinsi serta stakeholder lainnya.	Pemanfaatan dan keberlanjutan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, ketersediaan air bersih dan distribusi listrik bagi seluruh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke, dan Kecamatan Mangarabombang, diiringi dengan distribusi air yang menjangkau seluruh wilayah baik pemenuhan sumberdaya air maupun energi.
				2.	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				3.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.
Misi 5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital	T.5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	S.9. Meningkatnya produktifitas dan daya saing ekonomi	Meningkatnya produktifitas ekonomi diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri Takalar, peningkatan skill pelaku usaha, regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil mikro, pemasaran berbasis digital, penguatan ekonomi syariah untuk memperkuat ekosistem industri halal dan penguatan kewirausahaan dan UMKM halal yang berbasis digital. Menstimulan pelaku usaha dari	1.	Persiapan kawasan industri dengan fokus pembangunan/ pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi;	Peningkatan investasi Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;	Akselerasi pengembangan Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;	Evaluasi pengembangan Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;	Pemantapan pengembangan Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			kelompok marginal.						
				2.	pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan sampah/limbah untuk pemenuhan infrastruktur kawasan industri Takalar. di Kecamatan Mangarabombang; optimalisasi sentra produksi di Kawasan Sandi, Desa Pa'batangang, Desa Bontokassi, Kawasan Rumput Laut di Kecamatan Mangarabombang, Sentra produk pertanian di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, Kepulauan Tanakeke, sebagian wilayah pesisir dengan penerapan Teknologi modern berbasis digital.	pengembangan Rumput Laut dan Produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis; dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;	pengembangan Rumput Laut dan Produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis; dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;	pengembangan Rumput Laut dan Produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;	pengembangan rumput laut dan produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis; dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;
				3.	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan meningkatkan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai	peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM, BUMDes dan Kopdes Merah Putih pada rantai nilai tambah ekonomil melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) serta penerapan	Peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM dan BUMDes serta Kopdes Merah Putih pada rantai nilai tambah ekonomil melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan	peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM, BUMDes dan Kopdes pada rantai nilai tambah ekonomi melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), dan penerapan	peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM dan BUMDes pada rantai nilai tambah ekonomil melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism)	teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.	pemasaran) dan penerapan teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.	teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.	penerapan teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.
				4.	Penerapan Teknologi, Informasi Komunikasi dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulanberbasis ekonomi digital	Persiapan kawasan industri dengan fokus pembangunan/ pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi;	Pembangunan/ Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi	Pembangunan/ Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi	Pembangunan/ Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi
				5.	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar
				6.	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
									peningkatan investasi di kawasan industri
				7.	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar
				8.	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar
				9.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					kelembagaan, serta adopsi teknologi	unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	sesuai dengan komoditas unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar
				10.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
				11.	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
				12.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah				
				13.	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah
				14.		Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
						daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	partisipasi daerah dalam rantai pasok domestik dan global.
		S.10. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah	Meningkatnya swasembada pangan diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, Penggunaan teknologi pertanian modern, menjaga ketersedian pangan daerah, dan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan stabilitas harga pangan.	1.	Kolaborasi antar pihak untuk pengembangan kerja sama antar wilayah dalam distribusi komoditas pangan, implementasi mekanisme subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga pangan, pembentukan mekanisme penyangga (buffer) untuk memitigasi fluktuasi harga, dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan untuk peningkatan produktivitas pertanian dan nelayan berteknologi pertanian modern.	Kolaborasi multipihak dalam optimalisasi lahan dan peningkatan praktek pertanian modern; kerja sama antar wilayah dalam distribusi komoditas pangan, implementasi mekanisme subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga pangan. dan pembentukan mekanisme penyangga (buffer) untuk memitigasi fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan harga di daerah pemasok utama.	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk peningkatan produktivitas padi sawah, jagung, dan komoditas tanaman pangan lainnya;	Optimalisasi sumberdaya untuk peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi pangan hewani melalui perkawinan alami dan inseminasi buatan serta pelayanan kesehatan hewan, pengolahan hasil peternakan dan produk turunannya;	Pemantapan kemandirian pangan daerah, implementasi teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan untuk stabilisasi harga jangka panjang,
				2.	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	penguatan kelembagaan petani dan sistem penyuluhan untuk mendukung inovasi pertanian; dan pemenuhan sarana-prasarana pertanian pendukung untuk peningkatan produktivitas pertanian dengan lokus prioritas pada sentra produksi pangan.	peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengembangan usaha pengolahan hasil-hasil perikanan dengan lokus prioritas pada sentra peternakan dan perikanan.	pembangunan jaringan penggilingan padi modern terintegrasi dengan pengemasan yang memenuhi standar pasar modern pada lokasi sentra produksi beras, dan integrasi manajemen rantai pasok pangan dalam penanganan bencana dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
									ketahanan ekonomi dengan lokus prioritas pada sentra padi sawah.
				3.	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan
				4.			Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal
		S.11. Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya stabilitas fiskal diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital, pengelolaan aset daerah dengan baik serta menjaga inflasi tetap stabil dan meningkatnya akses keuangan pelaku usaha.	1.	Optimalisasi sumberdaya dan penguatan regulasi untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam format Smart Pendapatan Asli Daerah (Smart PAD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD);	Kolaborasi antar pihak untuk menjaga stabilitas pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis;	Konsolidasi sumberdaya dan regulasi untuk inklusi keuangan daerah melalui penguatan akses keuangan oleh pelaku usaha;	Penguatan tatakelola perekonomian dan kapasitas fiskal untuk pengembangan ekonomi syariah melalui penggalakan dan pengelolaan imfak, zakat dan sedekah untuk mendorong ekonomi produktif, integrasi sistem stabilisasi ekonomi daerah dengan sistem regional dan nasional dalam suatu platform digital pemantauan pasokan dan harga secara real-time, seiring dengan pemantapan akses keuangan bagi pelaku usaha pada seluruh wilayah.	Optimnalisasi sumberdaya untuk pemantapan integrasi sistem stabilisasi ekonomi daerah dengan sistem regional dan nasional melalui pengembangan platform digital pemantauan pasokan dan harga secara real-time, diseleraskan dengan pemantapan inklusi keuangan dan ekonomi syariah pada seluruh kecamatan.
				2.	perbaikan sistem tata kelola investasi daerah	penguatan pengendalian inflasi daerah yang	penguatan pengendalian inflasi daerah yang	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					(pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya; penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota;	terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota; akselerasi pengembangan infrastruktur stabilisasi harga melalui pembangunan gudang-gudang penyimpanan strategis di setiap kecamatan; pengembangan cadangan pangan daerah untuk antisipasi kelangkaan dan gejolak harga;	terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota;	yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis
				3.	pengembangan sistem pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan pokok dan hasil perikanan melalui efektivitas fungsi tim pengendali inflasi daerah (TPID); serta pemantauan stok dan harga secara berkala dengan lokus tersebar pada seluruh wilayah.	pembentukan koperasi pemasaran untuk komoditas pangan dan perikanan; serta pengembangan sistem pemantauan harga di daerah pemasok utama.	perluasan cakupan sistem pemantauan dan intervensi pasar dengan implementasi sistem informasi harga pangan terintegrasi;	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya
				4.	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	pengembangan jaringan pasar rakyat yang terjangkau di seluruh kecamatan;	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				5.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	pengembangan kemitraan antara produsen dengan jaringan ritel modern, dan penguatan kapasitas BUMDes dan Kopdes Merah Putih dalam manajemen rantai pasok pangan lokal.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya
				6.	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota
				7.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.
				8.	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya		
				9.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
							pembiayaan alternatif lainnya		
				10.			Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota		
				11.			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.		
		S.12. Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan	Meningkatnya pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, terpenuhinya akses pendidikan dan kesehetan, peningkatan ekonomi lokal melalui UMKM, Bumdes berbasis digital, Koperasi Merah Putih, tata kelola layanan pemerintah desa berbasis digital, dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan menciptakan vilage branding agar	1.	Optimalisasi sumberdaya untuk peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Koperasi Desa Merah Putih dengan fokus pada kegiatan produksi berbasis sumber daya lokal dan digitalisasi manajemen;	Optimalisasi sumberdaya pedesaan untuk peningkatan capaian SDGs Desa melalui pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, berbasis keunggulan masing-masing desa pada seluruh Kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan modal sosial masyarakat dalam bentuk saling bantu dan gotong royong, pengelolaan ekonomi kolektif berbasis sumberdaya milik bersama/kelompok, pengembangan pasar bersama warga desa, akselerasi produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di seluruh kecamatan berbasis koperasi desa merah putih.	Penguatan sistem sosial lokal desa berbasis hubungan trigonal antara keberdayaan komunitas lokal, pasar lokal dan administrasi lokal melalui optimalisi peran modal sosial desa, ekspansi produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa, serta pemantapan norma dan organisasi koperasi desa merah putih dalam pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah masing-masing desa pada seluruh Kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk pemantapan sistem sosial lokal desa berbasis hubungan trigonal komunitas lokal, pasar lokal dan administrasi lokal melalui penguatan modal sosial yang melembagakan kesalingpercayaan, kebajikan timbal-balik, kepatuhan kepada norma, dan perluasan jaringan sosial diantara aktor-aktor Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Desa Merah Putih, kelompo tani dan gabungan kelompok tani, dan pelaku UMK dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru pada seluruh Kecamatan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			fokus pembangunan di tingkat desa dapat tercapai.						
				2.	diiringi dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dengan sistem layanan pemerintah digital melalui konsep Desa/Kelurahan Digital.	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital
				3.	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa
				4.	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan
				5.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.
				6.	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				7.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan
				8.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam		Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam
				9.	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam				
Misi 6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kele	T.6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah	S.13. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	Meningkatnya kehidupan beragama maslahat diarahkan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan kontribusi positif masyarakat melalui aktifnya kelembagaan keagamaan yang	1.	Kolaborasi multipihak dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan beragama melalui penguatan kelembagaan dan SDM Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama (FKUB) dan pemeliharaan situasi kondusif bagi penyelenggaraan ibadah pada seluruh Kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan fasilitas kegiatan keagamaan melalui dukungan dan fasilitasi keberangkatan dan penjemputan jemaah haji serta bantuan pembangunan dan pemenuhan fasilitas masjid dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya dalam menggairahkan kegiatan ibadah dan spiritualitas masyarakat melalui dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Maudu'Lompoa ritual tahunan serta melanjutkan pemberian insentif imam masjid dan guru mengaji dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya dalam mendorong maslahat kehidupan beragama melalui penguatan peran BAZIS dalam penguatan ekonomi ummat dan perlindungan bagi fakir-miskin pada seluruh kecamatan diringi dengan pembangunan rumah tahfiz untuk menggairahkan pembacaan dan penghafalan Al-Quran sebagai bagian dari perbaikan spiritualitas dan	Kolaborasi multipihak dalam memantapkan kehidupan beragama maslahat melalui akselerasi kegiatan keagamaan serta peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan diiringi dengan pemberian teladan oleh pemimpin dan tokoh masyarakat untuk penerapan nilai-nilai keagamaan dalam

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
mbagaan keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, dan pemajuan kebudayaan			ada dimasyarakat, manjaga kehidupan beragama yang maslahat dengan menekankan sikap tasamuh (toleransi) dan menghormati perbedaan berdasarkan nilai - nilai agama dan kearifan lokal.					kehidupan sosial masyarakat.	kehidupan sehari-hari pada seluruh kecamatan.
				2.	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial
				3.	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika
				4.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					sumberdaya alam berkelanjutan.				sumberdaya alam berkelanjutan.
				5.	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama
		S.14. Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal diarahkan pada melestarikan warisan budaya dengan menanamkan nilai - nilai luhur dan kearifan lokal dan keagamaan yang menumbuhkan rasa bangga, dan dapat menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi.	1.	Kolaborasi stakeholder kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan melalui identifikasi secara cermat situs - situs budaya dan kearifan - kearifan lokal yang tersebar diwilayah Kabupaten Takalar untuk dilindungi sebagai warisan budaya diiringi dengan penguatan literasi budaya masyarakat pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk pelestarian kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya dengan fokus pada inventarisasi dan registrasi beragam cagar budaya, pemeliharaan bentuk fisik dan material berbagai cagar budaya, pengenalan dan publikasi berbagai benda dan tempat bersejarah, dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk pemajuan kebudayaan daerah melalui peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan, peningkatan intensitas pertunjukan seni, pembinaan kelompok dan sanggar seni tari, seni suara dan seni lainnya, pengembangan kreativitas dalam pemajuan kebudayaan daerah.	Optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan pariwisata budaya melalui pengenalan destinasi berbasis tempat bersejarah pada beberapa lokasi, promosi dan penyelenggaraan kegiatan tahunan seperti Maudu'Lompoa di Laikang, lomba perahu bermotor pada beberapa lokasi pesisir, dan penyelenggaraan ulang tahun daerah, serta pengenalan rumah adat dan pakaian adat pada beberapa lokasi.	Kolaborasi stakeholder kebudayaan dalam pemantapan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat, organisasi pemuda, seniman dan budayawan, serta instansi pemerintah dalam pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal serta kreativitas dalam pemajuan kesenian daerah.
				2.	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				3.	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya
				4.	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan
				5.	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal
				6.	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya
				7.	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi
		S.15. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga yang didukung tumbuh kembang anak secara sehat fisik dan mental, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga,	1.	Optimalisasi sumberdaya untuk penguatan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial melalui pemeliharaan nilai-nilai keluarga harga harmonis, pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah, dengan lokus	Optimalisasi sumberdaya untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, perkerja di bawah umur, dan perdagangan orang dengan lokus prioritas pada kecamatan kekerasan anak yang tinggi.	Kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemerintahan untuk pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial melalui pengintegrasian isu-isu tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga	Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sipil dalam penguatan peran pemuda dalam pembangunan termasuk dalam literasi domekorasi dan politik melalui pembinaan organisasi dan prestasi kepemudaaan pada seluruh kecamatan diiringi dengan pembinaan organisasi dan kegiatan olah raga dalam masyarakat untuk kesehatan dan	Optimalisasi sumberdaya untuk pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan keterampilan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan pembelajaran/literasi dengan lokus pada seluruh kecamatan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			penguatan karakter dan moral anak sebagai bagian dari masyarakat, untuk menciptkan lingkungan positif bagi generasi muda dan mendukung pembelaajran nilai - nilai agama.		prioritas pada kecamatan dengan angka perceraian dan KDRT yang tinggi.		pelaporan, dengan lokus pada seluruh OPD.	prestasi dengan lokus pada seluruh kecamatan.	
				2.	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
				3.	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah
				4.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				5.	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan
				6.	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector
				7.	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
									gender yang transformative
				8.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		S.16. Meningkatnya ketertiban dan keamanan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan diarahkan pada peningkatan peran aktif aparat keamanan, peran serta masyarakat yang aktif, peningkatan literasi hukum masyarakat, peningkatan teknologi dan infrastruktur keamanan serta peningkatan toleransi dan kerukunan antarwarga negara, meningkatnya	1.	Kolaborasi multipihak dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melalui sosialisasi kerangka kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum, pencegahan dan pengendalian tindak kriminalitas, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengoperasikan sistem keamanan lingkungan secara swadaya pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk penegakan Perda secara konsisten melalui sosialisasi cakupan Perda pada seluruh kecamatan, penguatan SDM dan sarana-prasarana satuan polisi pamong praja, penyadaran masyarakat untuk kepatuhan terhadap Perda, pengembangan sistem informasi penegakan Perda serta pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi peran Forkopimda dalam memelihara situasi sosial-politik yang kondusif melalui deteksi dini pontensi gangguan sosial-politik dan konflik sosial, kordinasi dan pembinaan organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat, penguatan semangat kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat, serta penyelenggaraan dialog antar organisasi sosial kemasyarakatan dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Peningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi politik tentang demokrasi substansial melalui pendidikan politik dan demokrasi untuk generasi muda, peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dengan pertimbangan obyektif dan rasional melalui penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu, gerakan melawan politik uang pada semua jenis pemilihan umum, dan jaminan ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk fasilitasi partai politik dalam memanifestasikan demokrasi susbtansial pada kiprahnya di parlemen dan dalam masyarakat, serta pengembangan ruang dialog publik untuk demokratisasi, diiringi dengan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman dalam menjaga situasi kondusif pada seluruh kecamatan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			perwujudan demokrasi susbstantif dengan memegang teguh nilai - nilai pancasila sebagai dasar negara yang sangat relevan dengan nilai - nilai keagamaan.						
				2.	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama
				3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
				4.	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait
Misi. 7 Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan	T.7. Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi	S.17. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial diarahkan pada peningkatan aksesibiltas kelompok rentan yaitu pada lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, serta pembangunan dan	1.	Kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasian data kemiskinan berbasis digital, diiringi dengan upaya dukungan dasar melalui pemberian bantuan sosial bagi petani, nelayan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, serta pembangunan dan	Pemberdayaan komunitas lokal untuk memanfaatkan potensi lokalitas dalam mendorong produktivitas orang miskin melalui pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan dengan lokus prioritas pada kantong kemiskinan di wilayah pesisir dan sebaran orang miskin pada seluruh kecamatan.	Pemberdayaan komunitas lokal untuk penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, diiringi dengan pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan industri rumah tangga sesuai potensi	Pemantapan pemberdayaan komunitas lokal dalam mendorong produktivitas orang miskin untuk penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga melalui pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi, manajemen usaha, akses pemasaran dan jejaring	Pengembangan inovasi lokal melalui peran riset daerah dalam mengembangkan inkubator bisnis bagi orang miskin yang telah memiliki usaha produktif diiringi dengan penguatan jejaring bisnis terhadap koperasi merah putih desa/kelurahan, BUMDes dan entitas lainnya, bersamaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
sosial	masyarakat		miskin, dan korban bencana, dengan metode sistem layanan terpadu berbasis data akurat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dimana layanan tidak hanya bersifat intervensi tetapi juga layanan untuk mencegah timbulnya kelompok rentan baru.		rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem dengan lokus prioritas pada kantong kemiskinan di setiap kecamatan.		lokal pada kontong kemiskinan di wilayah pesisir dan pertanian tanaman pangan/hortikultura serta sebaran orang miskin pada seluruh kecamatan.	dengan koperasi merah putih desa/kelurahan, BUMDes, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya dengan lokus prioritas pada komunitas lokal yang telah memiliki kekuatan produksi yang melibatkan orang miskin.	dengan penuntasan dukungan dasar dan keberdayaan orang miskin pada lokus-lokus yang capaian intervensinya lambat.
				2.	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu
				3.	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional
				4.	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial
				5.	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas
				6.	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi,	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi,	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi,	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi,	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya
				7.	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan
				8.	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain				integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain
		S.18. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja diarahkan pada Pelaksanaan afirmasi re-skilling dan up-skilling bagi angkatan kerja dan disabilitas, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, sektor pertanian, sektor industri untuk menunjang peningktan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor dan lapangan kerja serta dukungan kebijakan pemerintah.	1.	Kolaborasi multipihak untuk afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja melalui pelatihan, magang, dan sekolah lapang terutama pada bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, ekonomi kreatif dan pariwisata dengan lokus prioritas pada ibukota kabupaten dan kecamatan Sentra pertanian, peternakan, dan perikanan	Optimalisasi sumberdaya dalam mendukung kesiapan tenaga kerja bagi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pengembangan kewirausahaan untuk lahirnya usaha mikro baru dan berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil, perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas, dan upskilling bagi tenaga kerja yang telah berpartisipasi pada berbagai bidang pekerjaan.	Kolaborasi dan kerjasama antar sektor dalam mendorong investasi daerah yang dapat menyerap tenaga kerja melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam pembangunan kawasan industri di Mangngara'bombang, diiringi dengan stimulasi teknologi dan permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang sudah ada terutama pada sentra kerajinan di Takalar dan ibukota kabupaten sehingga dapat menyerap tenaga kerja.	Optimalisasi sumberdaya dalam perbaikan dan penguatan sistem keternagakerjaan dan hubungan kerja pada berbagai aktivitas ekonomi melalui pembenahan hubungan kerja antara pinggawa dan sawi pada usaha perikanan termasuk penangkapan ikan terbang, hubungan kerja pemilik lahan dan petani penyakap atau petani upahan pada sector pertanian, hubungan kerja pemilik dan penggembala pada usaha peternakan, serta hubungan kerja industrial pada operasional pabrik, usaha rumahan dan usaha mikro pengolahan makanan, serta berbagai arena hubungan kerja lainnya pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi multipihak dalam perluasan dan pemantapan kualitas dan serapan tenaga kerja melalui up-skilling dan re-skilling calon tenaga kerja dan tenaga kerja aktif terutama dalam penguasaan digitalisasi untuk ekonomi kreatif, industri kerajinan, dan UMKM bidang pengolahan hasil agromaritim dengan lokus prioritas pada sentra produk agromaritim.
				2.	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru
				3.	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru
				4.	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas

4.4.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka penyusunan RAPBD 2024 terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berbasis pada RPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 harus selaras dan berkesinambungan dengan RKPD sebelumnya sehingga pembangunan jangka panjang dan menengah daerah dapat direalisasikan secara bertahap. Mekanisme tersebut ditentukan dengan jelas dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Terkait dengan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2024, DPRD perlu memberikan input. Masukan ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh Pemda tidak menyimpang dari RPJPD dan RPD.

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Takalar perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Takalar dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Adapun hasil pokok-pokok pikiran DPRD meliputi :

1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas kesehatan;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
4. Peningkatan sarana prasarana pertanian;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan kapasitas masyarakat.

Pada RKPD tahun 2025 terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 190 usulan dan yang telah di integrasikan ke dalam dokumen perencanaan sebanyak 123 usulan berdasarkan pada hasil telaahan dari tim penyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV-8
Tabel Rincian Usulan Pokok Pikiran DPRD Kab. Takalar Tahun 2025

No.	OPD	Usulan	Diterima
1	Dinas Kesehatan	1	1
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5	4
3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	1	1
4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1	0
5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	105	72
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	1
7	Dinas Perhubungan	4	2
8	Dinas Perikanan	13	9
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	9
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	43	25
11	Sekretariat Daerah	1	1
	Total	190	125

BAB V
RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana pendapatan daerah Tahun 2025 pada Bab III Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp. 1.213.716.262.596,00,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp.205.365.356.828,00,- dan pendapatan transfer sebesar Rp.1.008.350.905.768,00,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.00,-. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025, dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.183.578.276.814,00.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut :

Tabel V-1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar
Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,212,755,775,038.00**	**1.213.716.262.596,00**	**960.487.558,00**	**0.08**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**219,248,884,957.00**	**205.365.356.828,00**	**(13.883.528.129,00)**	**-6,33**
4.1.01	Pajak Daerah	48,186,474,957.00	48.344.746.828,00	158.271.871,00	0.33
4.1.02	Retribusi Daerah	2,913,210,000.00	3.551.410.000,00	638.200.000,00	21,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,000,000,000.00	10,100,000,000.00	(3,900,000,000.00)	-27.86
4.2	**Pendapatan Transfer**	**993,506,890,081.00**	**1.008.350.905.768,00**	**14.844.015.687,00**	**1,49**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**953,479,438,000.00**	**937,630,185,000.00**	**-15,849,253,000.00**	**-1.66**
4.2.01.05	Dana Desa	76,268,700,000.00	76,268,700,000.00	-	0.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8,016,881,000.00	7,974,153,000.00	(42,728,000.00)	-0.53
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	18,337,091,000.00	18,337,091,000.00	-	0.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	658,555,511,000.00	651,690,726,000.00	(6,864,785,000.00)	-1.04
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	192,301,255,000.00	183,359,515,000.00	(8,941,740,000.00)	-4.65
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**40,027,452,081.00**	**70.720.720.768,00**	**30,693,268,687.00**	**56,60**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	32,336,999,365.00	52.859.114.052,00	20,522,114,687.00	62,18
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7,690,452,716.00	17.861.606.716,00	10,171,154,000.00	43,06

Sumber : Bapenda dan BKAD Kabupaten Takalar; 2025

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pertama Peningkatan mutu tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 5 (lima) program prioritas, prioritas kedua Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 4 (empat) program prioritas, prioritas ketiga Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program prioritas, prioritas keempat Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program prioritas, prioritas kelima Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 2 (dua) program prioritas, prioritas keenam Pengembangan sektor pariwisata guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 3 (tiga) program prioritas, prioritas ketujuh Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa yang berkelanjutan dengan 4 sasaran dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) program prioritas, prioritas kedelapan Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan 2 sasaran dan dijabarkan dalam 4 (empat) program prioritas, prioritas kesembilan Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 6 (enam) program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan Tahun 2025 adalah sebanyak 7 (tujuh) prioritas pembangunan dengan 13 (tiga belas) sasaran, dan 57 (lima puluh tujuh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel V-2. berikut :

Tabel V-2
Sandingan Prioritas Pembangunan RKPD 2025 Dengan Perubahan RKPD 2025

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas hidup manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	93.069.661.280			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%				
				Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%				
				Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%				
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%				
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan sebagai budaya	55%	526.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	60%	115.000.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	100%	135.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	75%	181.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Permuseuman	Presentase Pemenuhan Pengelolaan Permuseuman yang Dilaksanakan (%)	100%	126.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,4	16.000.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno (Eksemplar)	88	5.000.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	77,29	5.500.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	77,48	10.500.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	55	2.000.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	100%	221.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	100%	8.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan Kapasistas Kepramukaan (%)	100%	1.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	105.022.647.254			Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%				
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%				
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7				
				Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH					
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH					
				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	100%				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35%	425.000.000			Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	95%	1.500.000.000			Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga aktif	38%	210.000.000			Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya	100%	55.652.524.304			Rsud H. Padjonga Daeng Ngalle

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)					
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	95%	10.000.000			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,02	412.200.000			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				TFR (Angka Kelahiran Total)	2,06				
				Age Specific Fertility Rate (ASFR)	138				
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Capaian KB Aktif	80	886.062.800			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kelompok Tribina	83%	2.181.600.000			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	27,17	1.700.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80				Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	100%	3.625.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%				Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	600.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	10%	3.210.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG)	50%	57.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	11.597,98	850.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	80%				
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	75%	3.793.633.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60	10.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%	3.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%				
			Program Penyelenggaraan Lalu	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	100%	622.236.580			Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)						
				Persentase layanan angkutan darat	100%				
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan	100%	7.120.000			Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang mendapatkan izin	60%	500.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	250.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20,41%	800.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	22.050 ton	946.180.000			Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	590.403 Ton	20.000.000			Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persenatse poklahsar yang meningkat kelasnya	26%	20.000.000			Dinas Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	4,50%	409.999.880			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan bina kelompok petani	60				
				Persentase peningkatan produksi peternakan	4				
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	95	1.454.999.780			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan holtikultura	90				
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	95				
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan (%)	100	591.000.000			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan (%)	100	1.650.810.900			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	90	170.575.000			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100				
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	-7				
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian/peternakan yang dibina (%)	100	20.000.000			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90	5.157.460			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan (%)	75	124.999.800			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	48,79	22.500.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	300.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
									Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	20	340.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	50				
				Persentase cakupan pengembangan sentra industri	20				
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100	10.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100				
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota					
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	24	9.500.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	100				
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	23,72	20.000.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	23,97	60.000.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	23,10	18.560.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	50	5.000.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	2	11.600.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan	100	2.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota	100				
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif (%)	70	2.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kraetif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	100	3.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN (%)	100	500.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	75	20.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	1	10.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	60	20.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	4	7.500.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	79	15.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60	10.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	87,9	232.499.700			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan/ wilayah rentan rawan pangan	0	200.000.400			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75	15.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	48,79	22.500.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	300.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	85	3.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti	80	440.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	80				
				Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti	80				
				Persentase pelayanana rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	80				
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80				
				Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	80				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia	100	64.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	150.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80				
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	100	3.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	100	2.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa Yang Memiliki Kompetensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (%)	98	8.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	87	110.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas	100	15.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	80	1.561.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	59,05	5.900.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
				Indeks kualitas udara	83,99				
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	32,24	873.760.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	30	999.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh	35	2.040.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Pemerintah Daerah kabupaten/kota					
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	80	2.408.160.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah		524.134.496.228			Semua Perangkat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, Keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	13.639.803.921			Bagian Ortala Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64				
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100				
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66				
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0				
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada	100	1.205.900.000			Bappelitbangda

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Evaluasi Pembangunan Daerah	komponen perencanaan kinerja perangkat daerah					
				Capaian kinerja Perangkat Daerah	90				
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	806.000.000			Bappelitbangda
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100				
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100				
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai	85	6.920.100.000			Inspektorat Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				dengan ketentuan yang berlaku					
			Program Perumusann Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	85	1.038.872.000			Inspektorat Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu	100	183.320.357.754			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	93				
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	93				
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	91	1.042.366.044			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100	3.388.249.270			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Jumlah penambahan wajib pajak baru	100				
			Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	98	8.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	42.414.700			Kecamatan
		Meningkatnya kualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	13.639.803.921			Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
		pelayanan publik	Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, Keprotokoleran,)						
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64				
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100				
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66				
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0				
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitas	100	11.231.450.446			Sekretariat Daerah
				Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	B				
				Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	100				
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100	195.000.000			Sekretariat Daerah
				Persentase Penayangan SIRUP	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	100				
				Tingkat Inflasi	2,03				
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan (%)	100	589.455.352			Bappelitbangda
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penerbitan SK secara tepat waktu	100	90.224.000			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	100				
			Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el	97	725.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik	98				
				Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	55				
			Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	98	70.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				semua individu yang perceraiannya dilaporkan					
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100				
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	98	180.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	98				
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun (%)	98	20.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda	100	5.170.880.100			Sekretariat DPRD
				Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	100				
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	25	25.000.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat	25				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah					
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	25	957.400.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	25	15.000.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
				Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan daerah	25				
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	28,57	10.000.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	100	351.407.500			Kecamatan
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94	850.000.000			Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	94				
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	410.000.000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100				
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100				
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100				
				Persentase penanganan pasca bencana	100				
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	98,25	130.000.000			Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran
				Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	150.000.000			Dinas Sosial Dan Pemerintahan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80				
			Program Koordiansi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	100	49.010.000			Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	42.414.700			Kecamatan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarkat	2	14.382.550			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	100	17.553.194.000			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	66	7.224.850			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2025		Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	24	11.895.750			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik,pertahanan dan keamanan	12	20.458.995			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL						**1.075.965.750.218,80**		-	

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan sebuah produk perencana sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahap perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan, dan sosial. Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) antara lain tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanaha lingkungan hidup, perhubungan, dan seterusnya. Urusan pilihan 6 (enam) antara lain pertanian, Kehutanan, Perdagangan, dan seterusnya, Sedangkan untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan 8 (delapan) antara lain Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan seterusnya. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel V-3. berikut :

Tabel V-3
Indikasi Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							393.656.180.162,00	356.369.669.572,00	346.967.978.252,16							79.608.701.853,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.586.180.162,00	355.757.118.012,00	346.531.707.252,16							78.924.201.853,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							392.586.180.162,00	355.757.118.012,00	346.531.707.252,16							78.924.201.853,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				65 %	65 %	272.610.602.662,00	257.086.317.739,00	261.063.084.408,43							2.303.626.515,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Dokumen Perencanaan,	-			100 %	100 %	8.000.000,00	18.095.000,00	18.095.000,00			-	6. Perbaikan	Dinas Pendidikan		103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dan Kebudayaan			KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	3.572.000,00	3.572.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.441.800,00	2.441.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelo			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)		la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	3.641.800,00	3.641.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	3.233.400,00	3.233.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Kalabbirang			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	272.095.329.300,00	256.657.405.739,00	256.657.405.739,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		94.469.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2745 Orang/bulan	2745 Orang/bulan	272.088.329.300,00	256.649.087.739,00	260.625.854.408,43	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD						
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.767.000,00	1.767.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.369.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.000.000,00	5.615.000,00	5.615.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		224.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.572.000,00	2.572.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.000.000,00	2.322.000,00	2.322.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		148.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.322.000,00	2.322.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum	-	-			-	-	31.000.000,00	50.990.000,00	50.990.000,00			-	6. Perbaikan	-		351.844.926,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

						Perangkat Daerah													Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											Komponen					Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.754.926,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	4.000.000,00	13.566.000,00	13.566.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan			8.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Tangga yang Disediakan									ng, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	4.148.600,00	4.148.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				45 Dokumen	45 Dokumen	12.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelo			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Undangan yang Disediakan									Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)		la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	5.975.400,00	775.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

															Kalabbirang			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	18.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	1.000.000,00	0,00	5.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	424.273.362,00	338.230.000,00	338.230.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		614.312.589,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.073.362,00	6.030.000,00	6.030.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			126.612.589,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	331.200.000,00	331.200.000,00	331.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			397.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	18.000.000,00	13.660.000,00	13.660.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		307.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1.000.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	4.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLA	Persentase siswa dengan nilai kompetensi				100 30 % %	30 100 % %	119.162.053.700,00	98.670.800.273,00	85.468.622.843,73							75.975.075.338,00	

						AN PENDIDIKAN	numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jumlah Program Pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan															
	1	0 1	0 2	2. 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-			100 % 1 Unit	100 % 1 Unit	52.242.738.464,00	51.835.676.890,00	51.835.676.890,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		40.290.191.637,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	2. 01	00 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	1 Ruang	464.786.400,00	0,00	199.611.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	2. 01	00 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	389.131.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	2. 01	00 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan				5 Ruang	5 Ruang	308.039.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar,	DAU yang Ditentukan	-	1. Pemban			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKA

							Sekolah yang Telah Dibangun									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		gunan Manusia				N DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	16 Unit	756.644.000,00	1.440.000.000,00	2.151.669.240,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	1. Pembangunan Manusia			733.861.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	159.015.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang				10 Ruang	1 Ruang	267.959.300,00	0,00	182.353.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	-	1. Pembangunan Manusia			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									n, Semua Kel/Desa	Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	132.215.680,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	132.215.680,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	83.759.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				4 Paket	2 Paket	168.847.000,00	3.766.000.000,00	3.766.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																n, Semua Kel/Desa						
	1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	121.878.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	56.700.000,00	425.812.000,00	323.602.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	115.282.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba				75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	110.553.800,00	61.326.900,00	61.100.000,00	Kab. Takalar, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pemban			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Akademik dan Non Akademik									Kecamatan, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				125 Orang	125 Orang	23.244.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	725.490.000,00	240.384.900,00	822.470.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	755.110.000,00	1.351.423.410,00	982.617.560,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			476.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang				240 Satuan	240 Satuan	28.756.416.563,00	30.051.100.000,00	30.190.586.762,00	Kab. Takalar, Semua	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	1. Pemban			29.977.330.637,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Mengelola Dana BOS				Pendidikan	Pendidikan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				236 Orang	236 Orang	43.654.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	331.907.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																	
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	231.827.440,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	4 Unit	77.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	77.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			725.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1 Ruang	993.473.120,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Pakkabba	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	517.003.650,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	43.698.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah				30 Ruang	30 Ruang	11.547.683.440,00	200.000.000,00	3.514.197.180,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang	-	1. Pemban			2.128.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Direhabilitasi Sedang/Berat									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31546 Peserta Didik	31546 Peserta Didik	4.800.652.800,00	13.809.629.680,00	2.809.629.680,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	51.299.991,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	-	36.040.055.416,00	28.114.653.836,00	28.114.653.836,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		23.737.683.437,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	273.361.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	152.210.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	377.394.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	284.170.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																

							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	271.111.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah																	
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	159.015.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																	
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	203.547.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																	
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	140.501.200,00	0,00	79.198.342,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

															n, Semua Kel/Desa	Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP						KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah																
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	152.210.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	5 Unit	152.210.400,00	520.000.000,00	520.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Ruang	8 Ruang	5.814.615.940,00	0,00	951.061.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan	-	1. Pembangunan Manusia			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

															n, Semua Kel/Desa	Penggunaannya Bidang Pendidikan						KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1 Ruang	133.915.680,00	0,00	59.981.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	132.215.680,00	0,00	40.237.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1 Ruang	132.215.680,00	150.000.000,00	223.049.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Ruang	10 Ruang	132.215.680,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																n, Semua Kel/Desa						
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	132.215.680,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	140.141.660,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																
							Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	170.845.580,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	4 Unit	173.645.580,00	275.000.000,00	803.003.009,73	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																

							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	2 Paket	49.280.000,00	3.560.000.000,00	3.560.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	161.775.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	2 Paket	3.001.200.000,00	0,00	292.189.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	137.439.360,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima				3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	302.362.400,00	8.495.806.736,00	2.495.806.736,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pembangunan Manusia			475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Biaya Personil Peserta Didik									n, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan					KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	71.944.000,00	0,00	193.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				125 Orang	125 Orang	15.252.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				550 Orang	550 Orang	921.680.000,00	419.443.300,00	155.060.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	1.164.860.000,00	500.203.800,00	486.681.250,00	Kab. Takalar, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pemban			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							yang Dilaksanakan Pembinaan									Kecamatan, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	15.787.683.437,00	14.194.200.000,00	14.339.872.037,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	-	1. Pembangunan Manusia			15.787.683.437,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				90 Orang	90 Orang	22.125.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	106.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				4560 Satuan Pendidikan	4560 Satuan Pendidikan	49.785.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

															n, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan						KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	377.394.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				500 Buku	500 Buku	20.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	4.235.760.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																
							Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				10 Unit	10 Unit	132.215.680,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	211.799.004,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	1. Pembangunan Manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	142.499.975,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	-	19.713.131.600,00	12.958.258.147,00	12.958.258.147,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		8.536.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	5 Unit	1.297.104.000,00	366.423.600,00	366.423.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	1. Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD																	

							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	511.106.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD																
							Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	179.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	15 Paket	888.810.000,00	2.808.488.000,00	2.808.488.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	1. Pembangunan Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				12100 Peserta Didik	12100 Peserta Didik	1.025.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				150 Orang	150 Orang	14.335.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																n, Semua Kel/Desa						
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				215 Orang	215 Orang	736.960.000,00	145.493.300,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	558.750.000,00	320.743.200,00	224.255.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	4.563.600.000,00	4.633.200.000,00	4.633.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non	-	1. Pembangunan Manusia			5.665.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja						
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				250 Orang	250 Orang	22.500.000,00	259.559.680,00	222.313.680,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	362.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	6 Ruang	2.269.932.000,00	1.317.040.567,00	1.547.967.567,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	1. Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	44.520.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																n, Semua Kel/Desa						
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	2.248.313.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	2.810.392.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	1. Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	67.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				12100 Satuan Pendidikan	12100 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	57.309.800,00	34.619.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			45.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	2 Ruang	1.962.259.000,00	50.000.000,00	167.259.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Presentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			100 %	100 %	11.166.128.220,00	5.762.211.400,00	5.762.211.400,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		3.411.100.264,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				550 Peserta Didik	550 Peserta Didik	117.566.400,00	60.834.000,00	60.730.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				150 Orang	150 Orang	7.815.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	580.330.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	223.574.000,00	475.777.400,00	383.990.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			48.900.264,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	4.334.400.000,00	5.225.600.000,00	5.225.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	1. Pembangunan Manusia			2.370.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam				84 Orang	84 Orang	31.053.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pemban			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									Kecamatan, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	35.540.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	1.815.945.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	199.024.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	737.727.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	119.441.660,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				550 Peserta Didik	550 Peserta Didik	24.609.540,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium																
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	907.972.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	64.449.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pemban			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

															Kecamatan, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	632.338.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				10 unit	10 unit	691.788.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	35.370.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	590.182.320,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBAN	-				-	-	323.578.900,00	0,00	0,00							321.500.000,00	

						GAN KURIKULUM																
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	-	206.128.900,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		193.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				100 Dokumen	100 Dokumen	67.385.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	34.968.500,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	67.556.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			54.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal				100 Dokumen	100 Dokumen	36.218.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pembangunan Manusia			52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Pendidikan Dasar yang Tersusun									n, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan						KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-	-	117.450.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		128.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				120 Dokumen	120 Dokumen	40.848.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	41.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			42.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan				120 Dokumen	120 Dokumen	35.402.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							Nonformal yang Tersusun																
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	105.813.000,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	-	105.813.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.252.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	45.561.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-				-	-	40.972.000,00	0,00	0,00							67.500.000,00	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	-	14.140.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		22.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	6.901.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7.239.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	-	26.832.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	11.694.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang				1 Dokumen	1 Dokumen	7.569.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							Diselenggarakan oleh Masyarakat																
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7.569.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-				-	-	343.159.900,00	0,00	0,00								206.500.000,00	
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	343.159.900,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		206.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota																	
							Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				1 Kamus	1 Kamus	425.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				1 Bahasa	1 Bahasa	681.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota																	
							Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Publikasi	1 Publikasi	75.876.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan				1 Orang	1 Orang	27.975.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota																	
							Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				1 Buku	1 Buku	75.561.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	86.189.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	76.452.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.070.000.000,00	612.551.560,00	436.271.000,00								684.500.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.070.000.000,00	612.551.560,00	436.271.000,00								684.500.000,00	
7	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	460.000.000,00	115.106.000,00	0,00							326.500.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	200.000.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		79.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang				29 Objek	29 Objek	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pemban			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan									ng, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				45 Orang	45 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	150.000.000,00	115.106.000,00	115.106.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		122.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				13 Objek	13 Objek	50.000.000,00	115.106.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																	
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pembangunan Manusia			39.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Lembaga, dan Pranata Tradisional									n, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan						KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				25 Sertifikat	25 Sertifikat	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	110.000.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																	
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				13 Objek	13 Objek	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				55 Orang	55 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	2	2 2	0 2	2. 03	00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	2 2	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	90.000.000,00	142.900.160,00	86.050.000,00							80.000.000,00	
	2	2 2	0 3	2. 01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	90.000.000,00	142.900.160,00	142.900.160,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 3	2. 01	00 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				45 Orang	45 Orang	30.000.000,00	83.322.860,00	29.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 3	2. 01	00 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				25 Sertifikat	25 Sertifikat	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																	
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga	9 Lembaga	30.000.000,00	59.577.300,00	56.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	90.000.000,00	115.667.300,00	114.200.000,00								70.000.000,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	90.000.000,00	115.667.300,00	115.667.300,00			-	1. Pembangunan Manusia	-			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				45 Orang	45 Orang	30.000.000,00	115.667.300,00	114.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pemban			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

																Kecamatan, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		gunan Manusia			KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	210.000.000,00	238.878.100,00	236.021.000,00							131.500.000,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	60.000.000,00	55.800.700,00	55.800.700,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				13 Objek	13 Objek	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				0 Objek	0 Objek	30.000.000,00	55.800.700,00	55.181.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																n, Semua Kel/Desa						
	2	2 2	0 5	2. 02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	90.000.000,00	183.077.400,00	183.077.400,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 02	00 01	Pelindungan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				13 Objek	13 Objek	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 02	00 02	Pengembangan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				13 Objek	13 Objek	30.000.000,00	183.077.400,00	180.840.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			28.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 02	00 03	Pemanfaatan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				13 Objek	13 Objek	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah	-	-			-	-	60.000.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		15.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
	2	2 2	0 5	2. 03	00 01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				13 Objek	13 Objek	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 03	00 02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	2	2 2	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-				-	-	220.000.000,00	0,00	0,00							76.500.000,00	
	2	2 2	0 6	2. 01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	-	220.000.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 6	2. 01	00 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	1. Pemban			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

							Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu									Kecamatan, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		gunan Manusia				KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				45 Orang	45 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																	
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Dinas Kesehatan							146.632.011.114,00	127.864.269.951,00	116.192.983.697,07							142.927.195.553,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.632.011.114,00	127.864.269.951,00	116.192.983.697,07							142.927.195.553,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							146.632.011.114,00	127.864.269.951,00	116.192.983.697,07							142.927.195.553,00	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	60.784.409.690,00	60.620.625.615,00	60.916.124.942,00							59.216.947.443,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	149.999.330,00	155.000.840,00	155.000.840,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	28.547.330,00	50.000.060,00	50.000.060,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.840,00	10.000.060,00	10.000.060,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	14.999.450,00	9.999.760,00	9.999.760,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.999.040,00	15.000.220,00	15.000.220,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	15.454.580,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.999.810,00	35.000.160,00	35.000.160,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	49.999.280,00	20.000.580,00	20.000.580,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	56.791.611.890,00	59.163.844.865,00	59.163.844.865,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		54.907.774.558,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700 Orang/bulan	700 Orang/bulan	56.646.236.290,00	58.993.823.135,00	58.993.823.135,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			54.737.974.558,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			86.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	110.376.800,00	120.022.170,00	102.622.170,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.960,00	4.999.960,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.999.000,00	19.999.840,00	19.999.840,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.920,00	4.999.920,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.999.800,00	14.999.920,00	14.999.920,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.920,00	4.999.920,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Pelaksanaan Administrasi	-			100 %	100 %	205.421.800,00	79.913.650,00	79.913.650,00			-	6. Perbaikan	Barang Milik Daerah pada		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

						Perangkat Daerah	Barang Daerah pada Perangkat Daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah			
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.003.800,00	49.993.650,00	49.993.650,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	-	-	6. Perbaikan Tatakelo			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									Kalabbirang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	29.920.000,00	13.940.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.415.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.003.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Kalabbirang			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	14.999.550,00	9.999.790,00	9.999.790,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.760,00	4.999.820,00	4.999.820,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.940,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.850,00	4.999.970,00	4.999.970,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	232.120.070,00	59.999.640,00	59.999.640,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	1 Dokumen	232.120.070,00	29.999.750,00	18.219.750,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	0,00	29.999.890,00	29.999.890,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	488.995.750,00	435.406.350,00	435.406.350,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		505.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Komponen							Instalasi

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.481.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	5.750.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.998.200,00	15.000.500,00	17.740.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.999.950,00	30.000.100,00	30.000.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.040.000,00	20.008.800,00	20.008.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.520.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.002.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	49.998.200,00	69.997.000,00	69.997.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	249.956.000,00	249.999.950,00	249.999.950,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	400.000.000,00	66.870.000,00	66.870.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		825.060.085,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									ng, Kalabbirang			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	206.997.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Kalabbirang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	66.870.000,00	66.870.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola			70.060.085,00	DINAS KESEHATAN

																Kalabbirang			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	834.385.800,00	465.157.104,00	465.157.104,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		809.112.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.999.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	654.726.000,00	78.354.744,00	78.354.744,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			654.112.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149.660.000,00	66.810.000,00	66.810.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	319.992.360,00	319.992.360,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.166.875.500,00	184.433.376,00	184.433.376,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	10 Unit	51.880.000,00	59.934.000,00	59.934.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	19.997.700,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	29.998.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	14.999.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	49.858.776,00	175.031.103,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	74.640.600,00	74.640.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD Fasyankes	-			100 %	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fasyankes		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				100 %	100 %	82.925.838.244,00	65.959.374.796,00	54.095.357.215,07							81.705.248.110,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan fasilitas upaya pemenuhan upaya kesehatan perorang dan upaya kesehatan masyarakat	-			3825 KK	3825 KK	21.277.827.938,00	9.240.755.290,00	9.240.755.290,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		19.985.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	4.999.999.838,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	6. Perbaikan Tatakelola			0,00	DINAS KESEHATAN

															Kalabbirang			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.325.280.980,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	499.999.820,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan				1 Unit	1 Unit	35.071.254,00	129.000.000,00	129.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							SDM agar Sesuai Standar											tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	499.999.929,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				0 Unit	0 Unit	1.249.999.872,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh				5 Unit	5 Unit	999.998.184,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Fasilitas Kesehatan Lainnya												dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	499.999.476,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	251.928.000,00	0,00	1.439.002.880,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional				20 Unit	20 Unit	99.998.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Maintainance Center												Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				17 Unit	17 Unit	450.000.150,00	148.096.010,00	148.096.010,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																

							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	10 Paket	7.765.551.535,00	8.840.551.280,00	9.435.821.146,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				101215 Keluarga	101215 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				17 Paket	17 Paket	100.000.000,00	123.108.000,00	223.590.176,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan kegiatan	-			100 %	100 %	60.515.326.716,00	56.659.307.106,00	56.659.307.106,00			-	6. Perbaikan	Masyarakat		61.470.248.110,00	DINAS KESEHATAN

						untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penyediaan layanan upaya pemenuhan upaya kesehatan perorang dan upaya kesehatan masyarakat												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6428 Orang	6428 Orang	799.999.980,00	109.999.700,00	36.719.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6133 Orang	6133 Orang	799.999.970,00	608.660.040,00	608.660.040,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan				5844 Orang	5844 Orang	699.999.870,00	9.999.500,00	649.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelo			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	349.999.740,00	10.001.000,00	821.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	299.999.840,00	159.999.880,00	158.829.880,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan				6133 Orang	6133 Orang	311.553.100,00	10.000.000,00	141.911.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	6. Perbaikan Tatakelola			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar									Kalabbirang	ya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				655 Orang	655 Orang	699.999.930,00	60.010.000,00	60.010.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	173.960.400,00	10.000.000,00	7.255.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125 Orang	125 Orang	171.496.900,00	10.000.000,00	7.255.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	130.449.860,00	10.000.000,00	7.255.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				255 Orang	255 Orang	500.000.000,00	9.999.720,00	9.999.720,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	499.999.900,00	10.000.000,00	7.520.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	27.340.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.930,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	999.999.750,00	99.999.760,00	57.929.760,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																ya Bidang Kesehatan		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	149.999.860,00	25.192.000,00	25.192.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.730,00	399.999.880,00	399.999.880,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	499.999.680,00	247.799.450,00	247.799.450,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			247.800.110,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	149.499.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				250 Orang	250 Orang	85.499.790,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.970,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	980.699.460,00	245.414.990,00	245.414.990,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	31.272.931.200,00	28.937.716.814,00	25.882.486.860,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Bantuan Keuangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.272.948.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				350 Orang	350 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																

							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	499.999.940,00	324.999.850,00	229.351.850,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				17 Unit	17 Unit	12.410.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 Dokumen	3 Dokumen	18.599.343.676,00	24.713.960.992,00	13.899.312.443,07	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	362.191.200,00	190.317.230,00	179.777.230,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan	-	6. Perbaikan Tatakelola			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																n, Semua Kel/Desa	Bagi Hasil Pajak Rokok		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	270.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	199.925.300,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	21.040.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Penggunaannya Bidang Kesehatan		tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	413.336.300,00	277.204.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			218.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	20.430.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	9.937.840,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			100 %	100 %	79.419.990,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	79.419.990,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	1.053.263.600,00	59.312.400,00	59.312.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fasyankes		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																	

							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				5 Unit	5 Unit	919.182.200,00	59.312.400,00	38.212.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	134.081.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
14	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				100 %	100 %	1.846.763.700,00	1.233.226.760,00	1.130.458.760,00							405.000.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	100.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tenaga Kesehatan		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-			100 %	100 %	75.000.000,00	122.342.000,00	122.342.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sumber Daya Manusia Kesehatan		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.500.000,00	300.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	105.842.000,00	105.842.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persentase pelaksanaan	-			100 %	100 %	1.671.763.700,00	1.107.384.760,00	1.107.384.760,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sumber Daya Manusia Kesehatan		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

						Kabupaten/Kota	perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan															
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				55 Orang	55 Orang	1.671.763.700,00	1.107.384.760,00	1.020.816.760,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
15	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				100 %	100 %	424.999.900,00	0,00	0,00								450.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pelaksanaan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optkal, usaha mikro obat tradisional	-			100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan, RT Kelas I tertentu perusahaan RT	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga											Pelayanan Publik				
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan, RT Kelas I tertentu perusahaan RT	-			100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pelaksanaan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(DAM)	-			100 %	100 %	249.999.960,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran				1 Dokumen	1 Dokumen	249.999.960,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							dan Depot Air Minum (DAM)															
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-			100 %	100 %	49.999.940,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Makanan Jajanan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.940,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri RT	-			100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Industri Rumah Tangga		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
16	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				100 %	100 %	649.999.580,00	51.042.780,00	51.042.780,00							1.150.000.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	-			100 %	100 %	49.999.900,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan lintas sektor		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelo			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Pemberdayaan Masyarakat									Kalabbirang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten	-			100 %	100 %	499.999.890,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	499.999.890,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan				2155 Keluarga	2155 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat												dan Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten	-			100 %	100 %	99.999.790,00	51.042.780,00	51.042.780,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.790,00	51.042.780,00	51.042.780,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Mangarabombang						3.599.581.271,00	3.803.988.000,00	3.832.488.450,00							3.393.854.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.599.581.271,00	3.803.988.000,00	3.832.488.450,00							3.393.854.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.599.581.271,00	3.803.988.000,00	3.832.488.450,00							3.393.854.800,00	
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN	-				-	-	3.573.981.271,00	3.800.748.000,00	3.828.888.450,00							3.368.254.800,00	

						UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.561.981.271,00	3.800.748.000,00	3.800.748.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.356.254.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	28.500.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	8.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	56.100.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			56.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	19.200.000,00	13.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	265.802.000,00	631.338.000,00	494.598.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			265.802.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.400.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.530.000,00	15.000.000,00	21.600.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	182.500.000,00	74.250.000,00	124.515.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			182.500.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.565.776.471,00	2.610.300.000,00	2.638.800.450,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.373.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	243.094.800,00	243.440.000,00	264.755.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			243.094.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				100 Dokumen	100 Dokumen	14.428.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.428.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	151.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			151.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	65.000.000,00	118.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
18	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	25.600.000,00	3.240.000,00	3.600.000,00							25.600.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-			-	-	25.600.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		25.600.000,00	DINAS KESEHATAN

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.600.000,00	3.240.000,00	3.600.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Mangadu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.600.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pattopakang								3.564.029.271,00	3.822.504.500,00	3.805.255.400,00						3.495.252.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.564.029.271,00	3.822.504.500,00	3.805.255.400,00						3.495.252.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.564.029.271,00	3.822.504.500,00	3.805.255.400,00						3.495.252.800,00	
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	3.546.629.271,00	3.818.904.500,00	3.801.655.400,00						3.477.852.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	-	-			-	-	3.534.629.271,00	3.818.904.500,00	3.818.904.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		3.465.852.800,00	DINAS KESEHATAN

						Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	72.023.000,00	145.800.000,00	145.800.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Pattopakang Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.023.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	4.665.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.665.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan				100 Orang	100 Orang	48.600.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelo			48.600.000,00	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar									Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	45 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan				100 Orang	100 Orang	13.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Pelayanan Sesuai Standar									Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	240.065.000,00	496.442.000,00	496.442.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			240.065.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.800.000,00	29.100.000,00	29.100.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.040.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	45 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	184.600.000,00	101.562.500,00	101.562.500,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			184.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.567.776.471,00	2.612.500.000,00	2.595.250.900,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Pattopakang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.294.800,00	216.300.000,00	216.300.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Pattopakang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			237.294.800,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	26.565.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	95.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			95.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	43.400.000,00	43.400.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			43.400.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	17.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00							17.400.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	-	-			-	-	17.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	-		17.400.000,00	DINAS KESEHATAN

						Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												dan Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.400.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Mappakasunggu							2.286.375.271,00	2.529.015.000,00	2.686.985.470,00						2.231.723.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.286.375.271,00	2.529.015.000,00	2.686.985.470,00						2.231.723.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.286.375.271,00	2.529.015.000,00	2.686.985.470,00						2.231.723.800,00	
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.261.275.271,00	2.517.615.000,00	2.673.185.470,00						2.206.623.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-			-	-	2.249.275.271,00	2.505.615.000,00	2.505.615.000,00			-	6. Perbaikan	-		2.194.623.800,00	DINAS KESEHATAN

						untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	62.400.000,00	46.080.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			62.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	8.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	50.500.000,00	22.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			17.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	13.400.000,00	16.000.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik					
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	206.264.000,00	634.060.000,00	641.575.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			206.264.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan				-	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Takalar, Mappakas	DAK Non Fisik-Dana	-	-			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Kerja dan Olahraga									unggu, Semua Kel/Desa	BOK-BOK Puskesmas						
	1	0 2	0 2	2. 02	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.400.000,0 0	15.200.000,0 0	15.200.000,0 0	Kab. Takalar, Mappakas unggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.400.000, 00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2. 02	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.810.000,0 0	7.950.000,00	8.100.000,00	Kab. Takalar, Mappakas unggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.810.000, 00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2. 02	00 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	50 Orang	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kab. Takalar, Mappakas unggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			9.400.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2. 02	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	127.400.000,00	75.250.000,00	75.250.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			127.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.452.776.471,00	1.386.000.000,00	1.543.970.470,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	236.974.800,00	176.580.000,00	176.610.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			236.974.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000,00	11.200.000,00	11.600.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	93.600.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			93.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	32.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	37.175.000,00	43.400.000,00	Kab. Takalar, Mappakas	DAK Non Fisik-Dana	-	-			37.175.000,00	DINAS KESEHATAN

															unggu, Semua Kel/Desa	BOK-BOK Puskesmas						
	1	0 2	0 2	2. 03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2. 03	00 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2 2	1	0 2	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	25.100.000,00	11.400.000,00	13.800.000,00							25.100.000,00	
	1	0 2	0 5	2. 03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	-	-			-	-	25.100.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	-		25.100.000,00	DINAS KESEHATAN

						Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.100.000,00	11.400.000,00	13.800.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.100.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Sanrobone							3.170.486.271,00	3.432.675.000,00	3.329.887.600,00						2.977.709.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.170.486.271,00	3.432.675.000,00	3.329.887.600,00						2.977.709.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.170.486.271,00	3.432.675.000,00	3.329.887.600,00						2.977.709.800,00	
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	3.168.386.271,00	3.428.675.000,00	3.325.887.600,00						2.975.609.800,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.156.386.271,00	3.416.675.000,00	3.416.675.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.963.609.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	36.048.900,00	36.000.000,00	21.600.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.048.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	8.450.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	38.200.000,00	69.850.000,00	69.850.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	32 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	14.400.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	360.642.000,00	497.385.000,00	495.082.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			360.642.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.450.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.876.100,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.876.100,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	165.903.300,00	172.000.000,00	172.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			165.903.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.072.776.471,00	2.068.000.000,00	1.982.650.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	238.467.800,00	227.240.000,00	226.505.600,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			238.467.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	23.100.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	127.271.700,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			127.271.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone	DAK Non Fisik-Dana	-	6. Perbaikan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Sistem Informasi Kesehatan									, Sanro Bone	BOK-BOK Puskesmas		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	2.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00							2.100.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Sanro Bone	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
						Puskesmas Polongbangkeng Selatan						2.640.885.271,00	2.913.030.000,00	2.868.843.910,00							2.797.385.271,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.640.885.271,00	2.913.030.000,00	2.868.843.910,00							2.797.385.271,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.640.885.271,00	2.913.030.000,00	2.868.843.910,00							2.797.385.271,00	
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.640.885.271,00	2.907.170.000,00	2.862.983.910,00							2.791.385.271,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.628.885.271,00	2.907.170.000,00	2.907.170.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.779.385.271,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				304 Orang	304 Orang	36.882.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			36.882.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290 Orang	290 Orang	11.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	304 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1845 Orang	1845 Orang	52.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	27 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	6.000.000,00	22.600.000,00	37.500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				342 Orang	342 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	250 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	222.132.000,00	640.990.000,00	327.790.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			222.132.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.100.000,00	33.900.000,00	41.500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.800.000,00	27.300.000,00	59.300.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	870 Orang	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	140.100.000,00	65.450.000,00	146.650.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.707.774.471,00	1.666.500.000,00	1.622.313.910,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.707.776.471,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.196.800,00	232.080.000,00	375.080.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			237.194.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				34 Orang	34 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan				-	342 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							kesehatan sesuai standar									Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				342 Orang	342 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	250 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik					
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	72.200.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	33.100.000,00	67.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			66.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Pa'bundukang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-				-	-	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00							6.000.000,00	

						MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Bulukunyi							2.972.378.271,00	3.228.565.000,00	3.273.945.070,00							2.875.401.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.972.378.271,00	3.228.565.000,00	3.273.945.070,00							2.875.401.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.972.378.271,00	3.228.565.000,00	3.273.945.070,00							2.875.401.800,00	
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-				-	-	2.921.628.271,00	3.222.545.000,00	3.267.699.070,00							2.824.651.800,00	

						KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.909.628.271,00	3.222.545.000,00	3.222.545.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.812.651.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	35.000.000,00	88.980.000,00	88.980.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Bulukunyi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	6.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Bulukunyi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			6.900.000,00	DINAS KESEHATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	63.200.000,00	52.800.000,00	60.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			63.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Bulukunyi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Bulukunyi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	7.200.000,00	10.200.000,00	15.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	312.419.000,00	660.130.000,00	395.814.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			312.419.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Bulukunyi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	62.000.000,00	75.100.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.533.000,00	26.000.000,00	30.650.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			17.533.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	36 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Bulukunyi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	118.150.000,00	76.175.000,00	135.475.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			118.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.902.776.471,00	1.881.000.000,00	1.926.380.070,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Bulukunyi	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.710.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.399.800,00	252.760.000,00	415.300.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			237.399.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	150.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	138.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			138.700.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	38.700.000,00	49.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	50.750.000,00	6.020.000,00	6.246.000,00							50.750.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	50.750.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.750.000,00	6.020.000,00	6.246.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.750.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pattallassang							4.498.526.671,00	4.766.709.000,00	4.627.176.568,00							4.399.192.400,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.498.526.671,00	4.766.709.000,00	4.627.176.568,00							4.399.192.400,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4.498.526.671,00	4.766.709.000,00	4.627.176.568,00							4.399.192.400,00	

29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	4.479.676.671,00	4.764.409.000,00	4.624.876.568,00							4.380.342.400,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.467.676.671,00	4.764.409.000,00	4.764.409.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.380.342.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				844 Orang	844 Orang	42.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan				806 Orang	806 Orang	15.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa	DAK Non Fisik-Dana	-	6. Perbaikan			0,00	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar									ng, Semua Kel/Desa	BOK-BOK Puskesmas		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	768 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2573 Orang	2573 Orang	157.800.000,00	59.600.000,00	59.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			157.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan				-	60 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Jiwa Berat Sesuai Standar												tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				37 Orang	37 Orang	16.200.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				844 Orang	844 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				23 Dokumen	23 Dokumen	348.604.000,00	733.370.000,00	733.370.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			365.546.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				18 Dokumen	18 Dokumen	35.200.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			35.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	16.310.000,00	18.350.000,00	18.350.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	25 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				29 Dokumen	29 Dokumen	173.850.000,00	129.400.000,00	129.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			173.850.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.112.776.471,00	3.212.000.000,00	3.072.467.568,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.920.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				9 Dokumen	9 Dokumen	324.037.200,00	342.176.000,00	342.176.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			324.037.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	6.240.000,00	9.463.000,00	9.463.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			6.240.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				37 Orang	37 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	90 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				22 Orang	22 Orang	27.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan				-	3 Orang	0,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	DAK Non Fisik-Dana	-	6. Perbaikan			450.000,00	DINAS KESEHATAN

							pelayanan kesehatan malaria									ng, Semua Kel/Desa	BOK-BOK Puskesmas		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2 Dokumen	42.759.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.759.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				11 Dokumen	11 Dokumen	130.050.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelo			28.200.000,00	DINAS KESEHATAN

															ng, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	31.700.000,00	31.700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	18.850.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00							18.850.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	18.850.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		18.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan				36 Dokumen	36 Dokumen	18.850.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	DAK Non Fisik-Dana	-	6. Perbaikan			18.850.000,00	DINAS KESEHATAN

							Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								ng, Semua Kel/Desa	BOK-BOK Puskesmas		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Puskesmas Polongbangkeng Utara						3.451.414.271,00	3.739.347.000,00	3.664.894.900,00							3.325.869.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.451.414.271,00	3.739.347.000,00	3.664.894.900,00							3.325.869.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.451.414.271,00	3.739.347.000,00	3.664.894.900,00							3.325.869.800,00	
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	3.425.514.271,00	3.726.222.000,00	3.649.144.900,00							3.299.969.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.411.714.271,00	3.711.822.000,00	3.711.822.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.286.169.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				445 Orang	458 Orang	63.000.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	0 Orang	7.898.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2931 Orang	3719 Orang	81.400.000,00	94.800.000,00	80.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	51 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	11.400.000,00	6.800.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				485 Orang	0 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	360.814.000,00	732.022.000,00	458.350.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			360.814.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	7.700.000,00	9.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.600.000,00	20.900.000,00	39.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.250.000,00	9.650.000,00	18.700.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	3600 Orang	0,00	17.800.000,00	17.200.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	150.800.000,00	103.650.000,00	147.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	2.292.776.471,00	2.310.000.000,00	2.236.267.900,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	273.475.800,00	234.500.000,00	414.527.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			273.475.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	

							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	60 Orang	6.000.000,00	1.750.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	0 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.400.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	89.800.000,00	75.900.000,00	77.900.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			89.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	5.600.000,00	4.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	28.250.000,00	50.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi	-	-			-	-	13.800.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00			-	6. Perbaikan	-		13.800.000,00	DINAS KESEHATAN

						Kesehatan Secara Terintegrasi												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	25.900.000,00	13.125.000,00	15.750.000,00							25.900.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-	-			-	-	25.900.000,00	13.125.000,00	13.125.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		25.900.000,00	DINAS KESEHATAN

						Kabupaten/Kota																
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.900.000,00	13.125.000,00	15.750.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.900.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Ko'mara							2.851.869.271,00	3.013.682.000,00	2.974.003.910,00						2.701.592.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.851.869.271,00	3.013.682.000,00	2.974.003.910,00						2.701.592.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.851.869.271,00	3.013.682.000,00	2.974.003.910,00						2.701.592.800,00	
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.832.419.271,00	3.013.682.000,00	2.974.003.910,00						2.701.592.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	-	-			-	-	2.820.419.271,00	3.013.682.000,00	3.013.682.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	-	2.701.592.800,00	DINAS KESEHATAN

						Daerah Kabupaten/Kota												dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	16.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	107.000.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			107.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	9.600.000,00	36.550.000,00	36.550.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	186.538.000,00	499.282.000,00	499.282.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			186.538.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.200.000,00	56.650.000,00	56.650.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.860.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	154.350.000,00	147.550.000,00	147.550.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			154.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.822.776.471,00	1.793.000.000,00	1.753.321.910,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.630.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.294.800,00	230.800.000,00	230.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			237.294.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang				100 Orang	100 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polomban	-	-	6. Perbaikan			0,00	DINAS KESEHATAN

							mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									gkeng Utara, Ko'mara			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	155.450.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			155.450.000,00	DINAS KESEHATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	41.650.000,00	41.650.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	19.450.000,00	0,00	0,00							0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	-	-			-	-	19.450.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN

						Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												dan Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Ko'mara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Towata						2.449.526.271,00	2.567.255.000,00	2.727.596.580,00							2.307.949.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.449.526.271,00	2.567.255.000,00	2.727.596.580,00							2.307.949.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.449.526.271,00	2.567.255.000,00	2.727.596.580,00							2.307.949.800,00	
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	PERSENTASE PELAKSANAAAN PROGRAM				100 %	100 %	2.449.526.271,00	2.567.255.000,00	2.727.596.580,00							2.307.949.800,00	

						KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	2.433.266.271,00	2.567.255.000,00	2.567.255.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		2.291.689.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				170 Orang	170 Orang	8.500.000,00	21.000.000,00	28.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Kampung Beru Kab. Takalar, Polombangkeng Utara,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Towata Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Barat Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Parang Luara						
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				195 Orang	195 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				376 Orang	376 Orang	18.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			18.800.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	228 Orang	0,00	11.400.000,00	12.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Parang Luara Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Kampung Beru Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Barat Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.400.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				744 Orang	45 Orang	37.200.000,00	17.000.000,00	24.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72 Orang	72 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2541 Dokumen	2541 Dokumen	293.092.000,00	603.130.000,00	448.040.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			293.092.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	92 Dokumen	0,00	4.600.000,00	7.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Kampung Beru Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Barat Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Parang Luara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				259 Dokumen	259 Dokumen	26.450.000,00	25.950.000,00	34.300.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				48 Dokumen	48 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				712 Dokumen	712 Dokumen	35.600.000,00	44.275.000,00	53.575.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	132 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Barat Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Parang Luara Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Kampung Beru Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																

							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				192 Orang	192 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2708 Dokumen	2708 Dokumen	135.400.000,00	60.400.000,00	74.800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.572.776.471,00	1.518.000.000,00	1.678.721.580,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	234.497.800,00	184.700.000,00	274.760.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			234.497.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				36 Orang	36 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	-	-	1. Pembangunan Manusia			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.600.000,00	11.600.000,00	9.200.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelo			10.600.000,00	DINAS KESEHATAN

							kesehatan reproduksi									Utara, Towata			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	30.800.000,00	500.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	236 Dokumen	0,00	11.800.000,00	16.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata Kab. Takalar, Polombangkeng Utara,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.800.000,00	DINAS KESEHATAN

																Parang Luara Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Barat Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Kampung Beru							
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	31.500.000,00	42.200.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Parang Luara Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN

															Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Kampung Beru Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Lassang Barat							
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase Penyelenggaraan Sistem informasi Kesehatan Secara Terintegrasi persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			100 % 2 dokumen	100 % 2 dokumen	16.260.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.260.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Towata	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.260.000,00	DINAS KESEHATAN

						Puskesmas Bontomarannu							2.451.222.270,00	2.501.925.000,00	2.586.247.100,00							2.336.645.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.451.222.270,00	2.501.925.000,00	2.586.247.100,00							2.336.645.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.451.222.270,00	2.501.925.000,00	2.586.247.100,00							2.336.645.800,00	
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.417.622.270,00	2.497.955.000,00	2.582.277.100,00							2.303.045.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.405.622.270,00	2.497.955.000,00	2.497.955.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.291.045.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	63.100.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			63.100.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	3.325.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	85.000.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Barangmamase	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	7.200.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	700.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	128.891.000,00	303.380.000,00	303.380.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			128.891.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Barangmamase	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.800.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.085.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.085.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Barangmamase	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	175.450.000,00	108.175.000,00	108.175.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.450.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	1.516.776.470,00	1.456.400.000,00	1.540.722.100,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.324.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	241.894.800,00	311.200.000,00	311.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			241.894.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.600.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong	DAK Non Fisik-Dana	-	6. Perbaikan			25.600.000,00	DINAS KESEHATAN

							kesehatan reproduksi									Selatan, Bontomarannu	BOK-BOK Puskesmas		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	124.100.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			124.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelo			0,00	DINAS KESEHATAN

																Bontomarannu			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
37	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	33.600.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00							33.600.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-			-	-	33.600.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00			-	6. Perbaikan	-		33.600.000,00	DINAS KESEHATAN

						Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontomarannu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.600.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Bontokassi							2.883.717.270,00	3.025.690.000,00	2.929.038.200,00							2.639.340.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.883.717.270,00	3.025.690.000,00	2.929.038.200,00							2.639.340.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.883.717.270,00	3.025.690.000,00	2.929.038.200,00							2.639.340.800,00	
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	-				-	-	2.883.717.270,00	3.025.690.000,00	2.929.038.200,00							2.639.340.800,00	

						MASYARAKAT																
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.871.717.270,00	3.013.690.000,00	3.013.690.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.627.340.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	51.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	34.300.000,00	33.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67 Orang	67 Orang	7.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	105.100.000,00	71.400.000,00	62.400.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Galesong Selatan,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

																Semua Kel/Desa						
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9 Orang	9 Orang	10.650.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	8.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	334.496.000,00	634.840.000,00	547.648.200,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			334.496.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			9.400.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	167.500.000,00	79.400.000,00	79.400.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			167.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.807.776.470,00	1.776.500.000,00	1.776.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.615.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	243.494.800,00	214.400.000,00	214.400.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			243.494.800,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	35 Orang	15.200.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	72.800.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Galesong							3.700.679.270,00	4.087.460.000,00	4.004.209.080,00							3.531.085.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.700.679.270,00	4.087.460.000,00	4.004.209.080,00							3.531.085.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.700.679.270,00	4.087.460.000,00	4.004.209.080,00							3.531.085.000,00	
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	3.700.679.270,00	4.087.460.000,00	4.004.209.080,00							3.531.085.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-	-			-	-	3.700.679.270,00	4.087.460.000,00	4.087.460.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		3.531.085.000,00	DINAS KESEHATAN

						Kabupaten/Kota													Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				561 Orang	561 Orang	48.000.000,00	39.000.000,00	43.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	32.970.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4426 Orang	4426 Orang	105.900.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			105.900.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	22.000.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				561 Orang	561 Orang	26.000.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	275.073.000,00	639.030.000,00	639.030.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			275.073.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	39.300.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			39.300.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	72.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	177.700.000,00	110.350.000,00	110.350.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			177.700.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	2.412.776.470,00	2.442.000.000,00	2.358.749.080,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	307.609.800,00	388.480.000,00	391.230.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			330.792.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	10 Dokumen	40.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	10 Dokumen	200.850.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	72.200.000,00	95.250.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
						Puskesmas Galesong Utara						3.207.707.270,00	3.311.989.800,00	3.265.929.000,00							3.027.830.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.207.707.270,00	3.311.989.800,00	3.265.929.000,00							3.027.830.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.207.707.270,00	3.311.989.800,00	3.265.929.000,00							3.027.830.800,00	
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	3.196.807.270,00	3.273.680.000,00	3.225.458.200,00							3.016.930.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.184.807.270,00	3.261.680.000,00	3.261.680.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.004.930.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				517 Orang	517 Orang	126.500.000,00	58.800.000,00	72.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			126.500.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	14.110.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3754 Orang	3754 Orang	60.900.000,00	28.300.000,00	36.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	54 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	12.600.000,00	7.450.000,00	15.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				579 Orang	579 Orang	13.400.000,00	2.800.000,00	8.400.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			13.400.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	397.326.000,00	624.571.000,00	400.615.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			397.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.400.000,00	23.100.000,00	27.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.700.000,00	38.609.000,00	39.109.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	54 Orang	0,00	7.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	147.200.000,00	48.550.000,00	75.400.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			147.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik					
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.992.776.470,00	1.980.000.000,00	1.933.939.200,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	243.194.800,00	260.800.000,00	401.095.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			243.194.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			13.400.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				62 Orang	62 Orang	23.400.000,00	14.100.000,00	16.700.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				579 Orang	579 Orang	4.200.000,00	2.800.000,00	8.400.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			12.600.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	42.500.000,00	46.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	52.300.000,00	52.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	10.900.000,00	38.309.800,00	40.470.800,00							10.900.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	10.900.000,00	38.309.800,00	38.309.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	1 Dokumen	10.900.000,00	38.309.800,00	40.470.800,00	Kab. Takalar, Galesong Utara,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelo			10.900.000,00	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Puskesmas Aengtowa						2.476.131.270,00	2.525.429.000,00	2.556.870.258,00							2.568.013.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.476.131.270,00	2.525.429.000,00	2.556.870.258,00							2.568.013.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.476.131.270,00	2.525.429.000,00	2.556.870.258,00							2.568.013.800,00	
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.473.781.270,00	2.513.860.000,00	2.545.301.258,00							2.565.663.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.473.781.270,00	2.513.860.000,00	2.513.860.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.565.663.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan				252 Orang	252 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong	DAK Non Fisik-Dana	-	6. Perbaikan			0,00	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar									Utara, Aeng Towa	BOK-BOK Puskesmas		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	356 Orang	0,00	21.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1134 Orang	1134 Orang	56.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Aeng Towa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			0,00	DINAS KESEHATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	21.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2924 Orang	2924 Orang	146.200.000,00	45.350.000,00	45.350.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Aeng Towa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			146.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1364 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik					
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	42 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				702 Orang	702 Orang	35.100.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Aeng Towa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				84 Orang	84 Orang	4.200.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Aeng Towa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik					
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				345 Dokumen	100 Dokumen	327.460.000,00	592.250.000,00	520.019.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Aeng Towa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			547.919.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	114 Dokumen	0,00	52.520.000,00	49.160.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				592 Dokumen	592 Dokumen	29.600.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			29.600.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik					
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				953 Dokumen	953 Dokumen	52.650.000,00	85.200.000,00	121.183.258,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	3780 Orang	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2375 Dokumen	2375 Dokumen	118.600.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			118.600.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.352.776.470,00	1.276.000.000,00	1.345.249.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Aeng Towa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	254.594.800,00	189.660.000,00	189.660.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			254.594.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	200.000,00	50.000,00	50.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			200.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				282 Orang	282 Orang	14.100.000,00	14.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	8.400.000,00	9.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	11.900.000,00	12.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			11.900.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				262 Dokumen	262 Dokumen	13.100.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				878 Dokumen	878 Dokumen	43.900.000,00	45.500.000,00	47.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.900.000,00	DINAS KESEHATAN
43	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	2.350.000,00	11.569.000,00	11.569.000,00							2.350.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	-	-			-	-	2.350.000,00	11.569.000,00	11.569.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		2.350.000,00	DINAS KESEHATAN

						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000,00	11.569.000,00	11.569.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Aeng Towa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.350.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kepulauan Tanakeke							1.863.553.270,00	2.009.630.200,00	1.981.809.500,00							1.670.776.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.863.553.270,00	2.009.630.200,00	1.981.809.500,00							1.670.776.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.863.553.270,00	2.009.630.200,00	1.981.809.500,00							1.670.776.800,00	
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.853.560.270,00	2.000.350.200,00	1.967.669.500,00							1.660.783.800,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.841.560.270,00	2.000.350.200,00	2.000.350.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.648.783.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	39.400.000,00	41.760.000,00	49.440.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	4.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	125.400.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	43.320.000,00	43.320.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Mattiro Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	4.560.000,00	18.240.000,00	27.360.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	

							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	4.560.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				300 Dokumen	300 Dokumen	160.128.000,00	429.958.000,00	408.418.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			160.128.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	27.360.000,00	27.360.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.840.000,00	14.820.000,00	14.820.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.530.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	33.440.000,00	33.440.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Mattiro Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	209.000.000,00	127.370.000,00	131.930.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			209.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	930.776.470,00	811.800.000,00	783.979.300,00	-	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			738.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	226.315.800,00	238.887.200,00	223.947.200,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			226.315.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	

							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	2.280.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	2.280.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	49.380.000,00	21.115.000,00	23.395.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	36.560.000,00	1.520.000,00	3.040.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	54.720.000,00	54.720.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	42.560.000,00	49.020.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA	-				-	-	9.993.000,00	9.280.000,00	14.140.000,00							9.993.000,00	

						T BIDANG KESEHATAN																
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	9.993.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.993.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.993.000,00	9.280.000,00	14.140.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.993.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Bontomangape							3.211.053.270,00	3.496.354.500,00	3.336.900.800,00							3.017.276.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.211.053.270,00	3.496.354.500,00	3.336.900.800,00							3.017.276.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.211.053.270,00	3.496.354.500,00	3.336.900.800,00							3.017.276.800,00	
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	-				-	-	3.196.053.270,00	3.490.754.500,00	3.331.300.800,00							3.002.276.800,00	

						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.184.053.270,00	3.490.754.500,00	3.490.754.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.990.276.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	323 Orang	31.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1691 Orang	1691 Orang	83.350.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			83.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				227 Orang	227 Orang	5.600.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				358 Orang	358 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	175.152.000,00	639.267.000,00	639.267.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.152.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.600.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.630.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	134.550.000,00	70.037.500,00	70.037.500,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			134.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	2.192.776.470,00	2.200.000.000,00	2.040.546.300,00	Kab. Takalar, Galesong, Bontomangape	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	264.894.800,00	255.600.000,00	255.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			264.894.800,00	DINAS KESEHATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8 Orang	8 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.200.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	153.000.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			153.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	15.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00							15.000.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	15.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

						Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle							101.469.837.329,00	118.488.387.392,00	123.225.241.833,00							86.017.623.696,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							101.469.837.329,00	118.488.387.392,00	123.225.241.833,00							86.017.623.696,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							101.469.837.329,00	118.488.387.392,00	123.225.241.833,00							86.017.623.696,00	
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	30.804.305.110,00	29.276.387.392,00	29.276.387.392,00							3.198.818.565,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi berjalan lancar	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		21.415.925,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			4.999.970,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	-	-	-			4.999.850,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA

							Dokumen RKA-SKPD									Kalabbirang							DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			1.702.580,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			4.999.730,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			4.713.795,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	-			100 %	100 %	30.804.305.110,00	29.276.387.392,00	29.276.387.392,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		15.007.860,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA

																		tahan dan Pelayanan Publik				DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4634 Orang/bulan	4634 Orang/bulan	30.804.305.110,00	29.276.387.392,00	29.276.387.392,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			4.999.770,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			5.008.320,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			4.999.770,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		95.921.720,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			95.921.720,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Rumah sakit		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				500 Orang	500 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		60.448.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			60.448.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	-	-	-			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA

																Kalabbiran g						DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa ng, Kalabbiran g	-	-	-			200.000.000 ,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa ng, Kalabbiran g	-	-	-			100.000.000 ,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	PersentaseTersedia nya Jasa Penunjang	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatn ya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		1.826.025.0 60,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa ng, Kalabbiran g	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.826.025.0 60,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		280.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			10.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk				100 %	100 %	70.665.532.219,00	89.212.000.000,00	93.948.854.441,00							82.818.805.131,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Gedung Perawatan sesuai standar	-			100 %	100 %	1.499.952.100,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatknya mutu pelayanan rumah sakit		4.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																	
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	1.499.952.100,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																	
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar,	-	-	6. Perbaika			2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT

							sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit									Pattallassang, Kalabbirang			n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	-			100 %	100 %	69.165.580.119,00	89.212.000.000,00	89.212.000.000,00			-	-	Meningkatknya mutu pelayanan rumah sakit		78.618.805.131,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	64.765.580.119,00	85.000.000.000,00	89.736.854.441,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			75.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			218.805.131,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000.000,00	4.212.000.000,00	4.212.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			3.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terpenuhinya Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatknya mutu pelayanan rumah sakit		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa	-	-	-			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM

							Sistem Informasi Kesehatan									ng, Kalabbirang							DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
						Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman						71.975.083.332,00	62.732.230.883,00	61.135.781.496,00							90.655.864.560,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						71.975.083.332,00	62.732.230.883,00	61.135.781.496,00							90.655.864.560,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						68.393.560.332,00	52.478.415.283,00	53.150.406.396,00							87.615.364.560,00	
50	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	7.881.424.332,00	7.177.121.689,00	7.115.597.722,00							7.388.364.560,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	30.000.000,00	56.954.000,00	56.954.000,00			-	-	-		339.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	18.614.000,00	18.374.910,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN

																						KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.108.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	8.340.000,00	1.662.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	2.503.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	17.000.000,00	15.138.250,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.307.045.340,00	6.695.164.289,00	6.695.164.289,00			-	-	-		6.627.464.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	6.277.045.340,00	6.666.695.289,00	6.666.821.912,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			6.603.964.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.769.000,00	10.768.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.700.000,00	4.057.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	4.573.190,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	33.581.830,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.000.000,00	20.524.300,00	20.524.300,00			-	-	-		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	6.324.300,00	6.293.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	8.500.000,00	7.422.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	5.700.000,00	5.034.060,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00			-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.600.000,00	1.896.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	86.592.800,00	86.592.800,00			-	-	-		42.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

																						PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	994.800,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	6.100.000,00	4.100.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	2.200.000,00	7.040.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHA

																						N DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	76.298.000,00	27.935.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	490.378.992,00	264.871.500,00	264.871.500,00			-	-	-		345.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.678.992,00	37.471.500,00	37.471.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Bajeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			295.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	224.700.000,00	227.400.000,00	227.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Bajeng	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			50.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.038.000.000,00	50.414.800,00	50.414.800,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	4.000.000,00	33.000.000,00	19.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	1.033.500.000,00	17.414.800,00	8.914.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5 1	1	0 3	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	7.920.379.000,00	4.605.854.000,00	691.156.000,00							8.825.000.000,00	
	1	0 3	0 2	2. 01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.135.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	-	-		2.525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 3	0 2	2. 01	00 93	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				5 KM	5 KM	1.035.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 3	0 2	2. 01	01 01	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																	
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				5 KM	5 KM	50.000.000,00	0,00	232.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHA

																						N DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				5 KM	5 KM	50.000.000,00	70.000.000,00	2.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	6.785.379.000,00	4.535.854.000,00	4.535.854.000,00			-	-	-		6.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.050.000.000,00	200.000.000,00	266.950.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah	-	-			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA

																n, Semua Kel/Desa						RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	5.720.379.000,00	4.335.854.000,00	189.556.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																

							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																	
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
52	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	2.355.000.000,00	549.988.800,00	1.794.268.400,00							7.600.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	-	-			-	-	2.355.000.000,00	549.988.800,00	549.988.800,00			-	-	-		7.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

						Kabupaten/Kota															PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan															
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				350 Unit	350 Unit	45.000.000,00	549.988.800,00	520.463.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa																
							Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	245.000.000,00	0,00	5.938.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	50 SR	2.045.000.000,00	0,00	1.267.866.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
53	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00								900.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	15.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TP				1 Ton/hari	1 Ton/hari	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar,	-	-	-				600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN

							S-3R/TPS yang dibangun									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 3	0 4	2. 01	00 13	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	1 Ton/hari	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			200.000.000 ,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 3	0 4	2. 01	00 16	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																
							Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000 ,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5 4	1	0 3	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAN	-				-	-	795.900.000, 00	4.397.140.00 0,00	4.390.067.30 0,00							1.200.000.0 00,00	

						GAN SISTEM AIR LIMBAH																
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	795.900.000,00	4.397.140.000,00	4.397.140.000,00			-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																	
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	100.900.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																	
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				1 M^3/Hari	1 M^3/Hari	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																	
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				1 M^3/Hari	1 M^3/Hari	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																	
							Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				1 M^3/Hari	1 M^3/Hari	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																	
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa																	
							Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
							Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				1 Penyelenggara	1 Penyelenggara	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																	
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	500.000.000,00	4.147.140.000,00	4.140.067.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
55	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	285.000.000,00	1.300.000.000,00	1.301.256.140,00							2.350.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	285.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00			-	-	-		2.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				5000 M	5000 M	255.000.000,00	1.250.000.000,00	1.251.256.140,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	-	-			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA

															n, Semua Kel/Desa							RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				3000 Meter	3000 Meter	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	5.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

							Lingkungan yang disusun									n, Semua Kel/Desa	Pekerjaan Umum						PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHA

																						N DAN KAWASAN PERMUKIMAN
56	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	155.000.000,00	15.245.000,00	99.921.850,00							7.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	-	155.000.000,00	15.245.000,00	15.245.000,00			-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	5.000.000,00	2.481.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	10.245.000,00	97.440.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
57	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	11.650.000.000,00	21.665.179.294,00	24.319.011.524,00							18.200.000.000,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	11.650.000.000,00	21.665.179.294,00	21.665.179.294,00			-	-	-		18.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	11.650.000.000,00	21.665.179.294,00	24.319.011.524,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			18.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
58	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	37.090.857.000,00	12.739.887.500,00	13.092.844.200,00							41.130.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	37.090.857.000,00	12.739.887.500,00	12.739.887.500,00			-	-	-		41.130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	

							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.500.000,00	12.553.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																		
							Panjang Jalan yang Dibangun				8,05 KM	8,05 KM	34.194.161.000,00	10.870.887.500,00	8.034.416.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	-	-			40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	2 KM	500.000.000,00	1.150.000.000,00	4.346.374.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Opsen PKB	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	1.876.696.000,00	699.500.000,00	699.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
59	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	100.000.000,00	25.999.000,00	20.095.860,00							12.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	-	73.000.000,00	10.017.000,00	10.017.000,00			-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																
							Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.250.000,00	10.017.000,00	8.516.860,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	48.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	-	27.000.000,00	15.982.000,00	15.982.000,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				8 Paket Pekerjaan	8 Paket Pekerjaan	27.000.000,00	15.982.000,00	11.579.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
60	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	145.000.000,00	2.000.000,00	326.187.400,00							3.000.000,00	
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	145.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	145.000.000,00	2.000.000,00	326.187.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.581.523.000,00	10.253.815.600,00	7.985.375.100,00							3.040.500.000,00	
61	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	250.750.000,00	175.934.600,00	344.943.500,00							940.500.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	105.000.000,00	80.004.000,00	80.004.000,00			-	-	-		77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																	
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			13.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																	
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.002.000,00	26.580.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA

							Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani									n, Semua Kel/Desa							RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.002.000,00	33.768.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			36.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	-	-			-	-	140.750.000,00	95.930.600,00	95.930.600,00			-	-	-		723.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN

						Program Kabupaten/Kota																KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	95.750.000,00	95.930.600,00	272.094.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-			440.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	1 Unit Rumah	45.000.000,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-			282.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	-	5.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		140.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			140.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
62	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	1.224.000.000,00	8.416.881.000,00	5.177.530.500,00							600.000.000,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	-	10.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	200.000.000,00	199.752.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

																						PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	-	1.214.000.000,00	8.216.881.000,00	8.216.881.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	1.214.000.000,00	8.216.881.000,00	4.977.778.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

63	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	1.273.000,00	0,00	0,00						400.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.273.000,00	0,00	0,00			-	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				2 Unit	2 Unit	1.273.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
64	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	2.105.500.000,00	1.661.000.000,00	2.462.901.100,00						1.100.000.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggar	-	-			-	-	2.105.500.000,00	1.661.000.000,00	1.661.000.000,00			-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN

						aan PSU Perumahan																UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				20 Lokasi	20 Lokasi	2.105.500.000,00	1.661.000.000,00	2.462.901.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						9.262.001.019,00	8.346.233.760,00	8.478.590.020,00								12.723.271.750,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.262.001.019,00	8.346.233.760,00	8.478.590.020,00								12.723.271.750,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.262.001.019,00	8.346.233.760,00	8.478.590.020,00								12.723.271.750,00	
65	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	8.421.172.069,00	8.212.478.140,00	8.322.733.470,00								8.783.271.750,00	

						KABUPATEN /KOTA																
	1	0 5	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	40.439.500,0 0	5.206.290,00	5.206.290,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		37.000.000, 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	0 5	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.323.400,00	568.190,00	465.890,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			7.000.000,0 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	0 5	0 1	2. 01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.540.500,00	746.400,00	641.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,0 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.418.700,00	719.100,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.231.600,00	563.800,00	563.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.853.400,00	1.340.700,00	1.360.170,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.098.600,00	531.800,00	531.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.973.300,00	736.300,00	736.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.286.815.789,00	6.329.633.000,00	6.329.633.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.758.440.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	6.256.813.589,00	6.323.300.800,00	6.323.301.160,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.710.940.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.409.000,00	782.000,00	707.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.899.000,00	2.569.000,00	560.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.061.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.633.200,00	1.620.200,00	863.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.075.300,00	2.134.200,00	2.134.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		22.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.408.900,00	397.400,00	228.000,00	Kab. Takalar, Semua	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG

																Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.551.500,00	391.200,00	391.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.662.200,00	329.200,00	329.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian				1 Laporan	1 Laporan	2.630.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelo			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

							Barang Milik Daerah pada SKPD									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.439.300,00	526.400,00	526.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.383.200,00	490.000,00	165.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

															n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	13.475.000,00	3.489.400,00	3.489.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	762.000,00	80.700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			37.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN

																		Pelayanan Publik				PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.388.300,00	630.100,00	504.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.872.100,00	1.077.300,00	423.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4.214.600,00	1.020.000,00	366.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																		Pelayanan Publik					
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.303.900,00	43.483.190,00	43.483.190,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		45.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	Komponen Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.507.400,00	360.400,00	360.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.042.900,00	281.000,00	281.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	450.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.453.800,00	8.220.490,00	7.723.390,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.025.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.750.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.074.800,00	351.300,00	351.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	16.539.000,00	2.824.000,00	2.824.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.539.000,00	2.824.000,00	40.324.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.843.723.580,00	1.792.078.060,00	1.792.078.060,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.750.231.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.137.900,00	152.100,00	152.100,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG

																Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.019.280,00	14.910.000,00	14.910.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.531.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.056.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				12 Laporan	12 Laporan	1.780.510.400,00	1.777.015.960,00	1.771.015.960,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelo			1.705.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

							Kantor yang Disediakan									n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	129.800.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.130.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	83.290.000,00	33.630.000,00	38.620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN

																		dan Pelayanan Publik				PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	4.380.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN

																		Pelayanan Publik				PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																		Pelayanan Publik					
66	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	465.447.800,00	25.730.580,00	9.177.560,00						1.625.000.000,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	199.737.800,00	17.389.400,00	17.389.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.075.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.011.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.996.000,00	8.820.400,00	4.575.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelo			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

							Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																	
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.795.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

							Telah Dibuat dan Dimutakhirkan									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	74.740.000,00	2.534.000,00	2.218.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	74.990.000,00	1.240.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG

							Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	-	99.960.000,00	8.341.180,00	8.341.180,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.924.560,00	2.380.000,00	Kab. Takalar, Semua	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG

							Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	49.980.000,00	2.751.760,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	49.980.000,00	2.664.860,00	3.960,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	-	-			-	-	165.750.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

						Kabupaten/Kota												Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	165.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
67	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	375.381.150,00	108.025.040,00	146.678.990,00							2.315.000.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	-	-			-	-	355.096.750,00	105.503.380,00	105.503.380,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		1.445.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN

						dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												Pelayanan Publik				PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	17.700.000,00	99.997.400,00	139.997.050,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	129.009.450,00	934.050,00	934.050,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.090.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

							Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.877.300,00	1.855.930,00	725.130,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang				1 Orang	1 Orang	51.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG

							Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																	
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1 Unit	117.420.000,00	991.000,00	991.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

																		Pelayanan Publik				
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN

																		Pelayanan Publik				PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	-	0,00	525.730,00	525.730,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	525.730,00	411.430,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																	

							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	-	20.284.400,00	1.995.930,00	1.995.930,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		705.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	20.284.400,00	1.750.930,00	1.650.330,00	Kab. Takalar,	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaika			100.000.000,00	SATUAN POLISI

							Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia								Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																
							Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	1 Laporan	0,00	245.000,00	245.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																

							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							2.562.476.725,00	3.031.236.816,00	2.928.911.796,00							4.652.206.354,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.562.476.725,00	3.031.236.816,00	2.928.911.796,00							4.652.206.354,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.562.476.725,00	3.031.236.816,00	2.928.911.796,00							4.652.206.354,00	
68	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	2.182.513.455,00	2.781.236.906,00	2.772.309.426,00							2.856.206.354,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.952.290,00	11.042.290,00	11.042.290,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.664.790,00	4.574.790,00	4.324.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.796.800,00	3.386.800,00	2.757.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.490.700,00	3.080.700,00	2.586.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.798.988.936,00	2.438.062.406,00	2.438.062.406,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		1.492.206.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.797.031.436,00	2.435.252.906,00	2.435.252.996,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			1.419.206.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN

							Pelaksanaan Tugas ASN									ng, Semua Kel/Desa			Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor				BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	1.957.500,00	2.809.500,00	2.033.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.451.100,00	1.441.100,00	1.441.100,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertib	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																		an Umum Lintas Sektor				
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.451.100,00	1.441.100,00	1.021.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	62.291.150,00	64.138.210,00	64.138.210,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		387.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Komponen									Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																		Lintas Sektor				
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.553.200,00	10.553.200,00	5.571.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.849.000,00	2.849.000,00	1.472.850,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																		Lintas Sektor				
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	48.888.950,00	50.736.010,00	50.736.010,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																		Lintas Sektor				
	1	0 5	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	20.008.000,0 0	22.934.000,0 0	22.934.000,0 0			-	7. Penguat an Ketentra man dan Ketertib an Umum Lintas Sektor	-		455.000.000 ,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2. 07	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa ng, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguat an Ketentra man dan Ketertib an Umum Lintas Sektor			70.000.000, 00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2. 07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa ng, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguat an Ketentra man dan Ketertib an Umum Lintas Sektor			250.000.000 ,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.008.000,00	22.934.000,00	22.934.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	245.481.979,00	195.978.900,00	195.978.900,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		382.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.281.979,00	2.778.900,00	2.778.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	193.200.000,00	193.200.000,00	193.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			212.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	46.340.000,00	47.640.000,00	47.640.000,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		42.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				8 Unit	8 Unit	42.280.000,00	43.580.000,00	43.580.000,00	Kab. Takalar,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan			18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN

							Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									Pattallassang, Pappa			Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor				BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
69	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	379.963.270,00	249.999.910,00	156.602.370,00							1.796.000.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi	-	-			-	-	235.105.200,00	25.000.100,00	25.000.100,00			-	7. Penguat	-		166.000.000,00	BADAN PENANGGU

						Rawan Bencana Kabupaten/Kota												an Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor				LANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				900 Orang	900 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	235.105.200,00	25.000.100,00	12.967.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																		Lintas Sektor				
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	-	59.858.100,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		997.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				800 Keluarga	800 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																	
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				30 Kawasan	30 Kawasan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling				1 Dokumen	1 Dokumen	30.897.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

							lama dalam 1 (satu) tahun									Reboisasi (DR)		Umum Lintas Sektor				
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.960.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				100 Kawasan	100 Kawasan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	-	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-		98.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																		Lintas Sektor				
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				70 Orang	70 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																		Lintas Sektor				
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	25.000.000,00	22.550.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-				-	-	9.999.970,00	199.999.810,00	199.999.810,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		535.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				100 Kegiatan	100 Kegiatan	9.999.970,00	199.999.810,00	121.085.270,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																	
							Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				150 Laporan	150 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																	
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

							Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun											Ketertiban Umum Lintas Sektor				
						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						5.001.668.020,00	5.798.346.073,00	6.947.482.007,00							6.775.263.322,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						279.000.000,00	580.000.000,00	661.453.000,00							707.500.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						279.000.000,00	580.000.000,00	661.453.000,00							707.500.000,00	
70	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)				90 %	90 %	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							70.000.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial yang dilatih	-			100 Orang	100 Orang	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Sertifikat	3 Sertifikat	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
71	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti				80 %	80 %	166.000.000,00	267.000.000,00	182.909.900,00							375.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Persentase terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,	-			90 %	90 %	160.000.000,00	263.000.000,00	263.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	gelandangan dan pengemis di luar panti															
	1	0 6	0 4	2. 01	00 02	Penyediaan Sandang																
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	101.000.000,00	100.075.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 4	2. 01	00 03	Penyediaan Alat Bantu																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 4	2. 01	00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	58.000.000,00	161.000.000,00	81.129.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 4	2. 02		Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang	-			90 %	90 %	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	4. Penurun	Masyarakat		245.000.000,00	DINAS SOSIAL,

						Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang direhabilitasi												an Kesenjangan Sosial Ekonomi				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	2.000.000,00	1.000.000,00	105.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																	
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan																
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
72	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial				100 %	100 %	7.000.000,00	106.000.000,00	301.803.100,00							97.500.000,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara	-			25 %	25 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi fakir miskin	-			100 %	100 %	5.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				5000 Orang	87629 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	201.438.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				4126 Keluarga	4126 Keluarga	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	30 Keluarga	1.000.000,00	101.000.000,00	99.681.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	500.000,00	184.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAK

							Kewenangan Kabupaten/Kota												Sosial Ekonomi				AT DAN DESA
73	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				95 %	95 %	101.000.000,00	201.000.000,00	170.740.000,00							125.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana Alam dan Sosial yang tertangani	-			95 %	95 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				3000 Orang	3000 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	89.980.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan bencana teratasi	-			100 %	100 %	1.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Kabupaten/Kota																
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	1.000.000,00	101.000.000,00	80.760.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
74	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persentase pengelolaan taman makam pahlawan				100 %	100 %	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00							40.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman MAkam nasional yang dipelihara	-			100 %	100 %	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				4 Makam	4 Makam	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																

							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.722.668.020,00	5.218.346.073,00	6.286.029.007,00							6.067.763.322,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4.722.668.020,00	5.218.346.073,00	6.286.029.007,00							6.067.763.322,00	
75	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.702.668.020,00	3.998.346.073,00	4.043.029.277,00							4.462.763.322,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAK

																		tahan dan Pelayanan Publik				AT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

							Perubahan DPA-SKPD												dan Pelayanan Publik				
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persantase penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	3.498.170.820,00	3.866.193.953,00	3.866.193.953,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		4.055.580.922,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.488.170.820,00	3.856.193.953,00	3.845.953.843,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.030.580.922,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																		Pelayanan Publik				
	2	1 3	0 1	2. 02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.471.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2. 02	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	625.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2. 02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	625.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																		Pelayanan Publik				
	2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	185.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang	-			100 %	100 %	2.256.500,00	2.870.730,00	2.870.730,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.018.300,00	1.352.530,00	1.045.940,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.238.200,00	1.518.200,00	1.518.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			98 %	98 %	15.703.900,00	37.252.130,00	37.252.130,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.703.900,00	2.252.130,00	2.252.130,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	35.000.000,00	24.131.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung				1 Unit	1 Unit	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDA

							Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									ng, Kalabbirang			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				YAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	165.094.200,00	70.586.660,00	70.586.660,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		220.182.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.097.200,00	10.386.660,00	10.386.660,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			142.982.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				4 Laporan	4 Laporan	59.997.000,00	60.200.000,00	51.450.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			77.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

							Kantor yang Disediakan									Kalabbirang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	10.888.600,00	10.888.600,00	10.888.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	8.586.000,00	8.586.000,00	8.586.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.302.600,00	2.302.600,00	82.244.704,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																		dan Pelayanan Publik					
76	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kelembagaan Desa yang ditata sesuai standar				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						200.000.000,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan desa	-			100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																	
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	1 Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
77	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa				98 %	98 %	8.000.000,00	108.000.000,00	1.335.953.320,00							550.000.000,00	

	2	1 3	0 4	2. 01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	-			98 %	98 %	8.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 4	2. 01	00 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 4	2. 01	00 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 4	2. 01	00 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	

							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				87 Orang	452 Orang	1.000.000,00	101.000.000,00	1.334.953.320,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
78	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan				96 Desa	96 Desa	1.010.000.000,00	1.110.000.000,00	905.046.410,00							855.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	-			96 Desa	96 Desa	1.010.000.000,00	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelo	Masyarakat		855.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

						Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	melakukan Kegiatan Pemberdayaan												la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan				7 Dokumen	7 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

							dan Masyarakat Hukum Adat															
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	1.000.000.000,00	500.000.000,00	295.046.410,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				86 Dokumen	86 Dokumen	3.000.000,00	603.000.000,00	603.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				86 Laporan	86 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																		dan Pelayanan Publik				
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
79	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dokumen 2	Dokumen 2	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			Dokumen 2	Dokumen 2	15.194.750,00	18.359.490,00	18.359.490,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.724.400,00	5.530.770,00	3.160.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

																Kalabbirang						BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.069.000,00	3.576.150,00	3.122.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.250,00	1.998.270,00	71.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.083.500,00	1.728.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					NON URUSAN							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
80	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dokumen 2	Dokumen 2	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			Dokumen 2	Dokumen 2	15.194.750,00	18.359.490,00	18.359.490,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDA

																						YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
81	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dokumen 2	Dokumen 2	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			Dokumen 2	Dokumen 2	15.194.750,00	18.359.490,00	18.359.490,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				1 Laporan	1 Laporan	2.160.000,00	2.931.900,00	1.353.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pemban			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN

							Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									ng, Kalabbirang			gunan Manusia				PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.841.100,00	2.238.900,00	1.766.070,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.630.640.390,00	3.633.824.045,00	3.633.824.045,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		4.214.136.552,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				432 Orang/bulan	432 Orang/bulan	3.615.641.390,00	3.618.813.045,00	3.608.509.774,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			4.194.136.552,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.303.000,00	7.474.000,00	3.434.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				1 Laporan	1 Laporan	8.696.000,00	7.537.000,00	2.426.040,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pemban			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN

							Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									ng, Kalabbirang			gunan Manusia				PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			Laporan 4	Laporan 4	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Laporan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	-			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi Persentase	-			dolu,em 1 persen	dolu,em 1 persen	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Dokumen		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

							Pengelolaan Umum perangkay daerah																BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			persen 100	persen 100	24.478.000,00	29.418.000,00	29.418.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	persentase pengelolaan Adminsitrasi		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	0 8	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pemban gunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					NON URUSAN							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	0 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
8 2	2	0 8	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persen 100	Persen 100	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	
	2	0 8	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			persen 100	persen 100	24.478.000,00	29.418.000,00	29.418.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia	persentase pengelolaan Adminsitrasi		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUA

																						N DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00							11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
83	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persen 100	Persen 100	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			persen 100	persen 100	24.478.000,00	29.418.000,00	29.418.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	persentase pengelolaan Adminsitrasi		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

							Undangan yang Disediakan									Kalabbirang							BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	24.478.000,00	29.418.000,00	15.729.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			Laporan 4	Laporan 4	13.374.000,00	270.000,00	270.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Pengadaan BMD		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	270.000,00	5.470.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

																Kalabbirang						BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					NON URUSAN							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00						11.296.003.652,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00						5.119.136.552,00	
84	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Jumlah pengadaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah				Laporan 4	Laporan 4	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00						4.534.136.552,00	
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			Laporan 4	Laporan 4	13.374.000,00	270.000,00	270.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Pengadaan BMD	90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.376.527.320,00	10.989.449.175,00	11.571.596.674,00						11.296.003.652,00	

	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.457.561.320,00	4.245.580.175,00	4.203.631.474,00							5.119.136.552,00	
85	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	"Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				B Laporan Huruf 1	B Laporan Huruf 1	4.031.561.240,00	3.824.930.435,00	3.793.571.784,00							4.534.136.552,00	
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daearah persentase pengelolaan Adminsitrasi	-			38 laporan Laporan 1	38 laporan Laporan 1	318.990.100,00	127.473.900,00	127.473.900,00			-	1. Pembangunan Manusia	Laporan		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	201.390.100,00	12.707.000,00	5.482.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	117.600.000,00	114.766.900,00	113.713.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan daerah Persentase pelaksanaPersentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan daerah Tersedianya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			43 unit Laporan 4	43 unit Laporan 4	28.884.000,00	15.585.000,00	15.585.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Laporan BMD		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	22.410.000,00	9.000.000,00	18.996.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.700.000,00	405.000,00	2.430.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.554.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

																						PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
86	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD				95 70,78 % indeks	70,78 95 indeks %	9.999.990,00	9.999.950,00	3.570.000,00								160.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-			87.93 indeks 90 Persen	87.93 indeks 90 Persen	3.699.990,00	7.719.950,00	7.719.950,00			-	1. Pembangunan Manusia	Lembaga		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

																						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	999.990,00	2.569.990,00	910.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	1.979.460,00	630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota																

							Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				35 Kebijakan	35 Kebijakan	900.000,00	2.365.500,00	770.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																	
							Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				35 Orang	35 Orang	900.000,00	805.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Terlaksanannya Kegiatan pamberdayaan perempuan Bidang Politik , Hukum , Sosial , dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenganan	-			10 organisasi	10 organisasi	3.600.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	organisasi		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

						Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	kabupaten untuk dilaksanakan															PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	2.280.000,00	1.260.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Organisasi	35 Organisasi	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	

							Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				35 Orang	35 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.700.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	lembaga		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat				2 Lembaga	2 Lembaga	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDA

							Advokasi dan Pendampingan															YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				35 Orang	35 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				2 Unit	2 Unit	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
87	2	08	03			PROGRAM PERLINDUN	Jumlah lembaga penyedia layanan				90	layanan 90	72.650.090,00	251.914.680,00	251.914.680,00							175.000.000,00	

						GAN PEREMPUAN	perlindungan perempuan tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan Persentase Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan				layanan % 10	10 %										
	2	0 8	0 3	2. 01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			70.78 indeks 78 indeks 90 % layanan 10	70.78 indeks 78 indeks 90 % layanan 10	40.250.000,00	71.550.000,00	71.550.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	penyediaan Layanan		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2. 01	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	37.250.000,00	71.550.000,00	71.550.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			10 layanan	10 layanan	26.100.090,00	111.345.000,00	111.345.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	layanan Perempuan Korban Kekerasan		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				50 Orang	50 Orang	20.940.090,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

																						PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	10 Layanan	5.160.000,00	111.345.000,00	111.345.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			19 Lembaga	19 Lembaga	6.300.000,00	69.019.680,00	69.019.680,00			-	1. Pembangunan Manusia	Lembaga Penyedia Layanan		95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																

							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				25 Orang	25 Orang	1.500.000,00	69.019.680,00	69.019.680,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan				30 Orang	30 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

							Pemenuhan Kebutuhan Spesifik																PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
88	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelompok perempuan berdaya Persentase kelompok perempuan berdaya				95 90 % %	90 95 % %	0,00	0,00	0,00							40.000.000,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender	-			Indeks p70,78	Indeks p70,78	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Indeks Pemberdayaan Gender		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

						Daerah Kabupaten/Kota																PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																

							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban keakerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten yang disediakan	-			Layanan l10nan	Layanan l10nan	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	penyediaan Layanan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup				10 Layanan	10 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

							Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia															PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
89	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak				Persen 85	Persen 85	0,00	0,00	0,00							30.000.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-			persen 85	persen 85	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	sistem data gender dan Anak		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
90	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kabupaten Layak anak				Madya Predikat	Madya Predikat	45.372.000,00	9.470.110,00	5.310.010,00								75.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-			Madua Predikay	Madua Predikay	12.000.000,00	9.470.110,00	9.470.110,00			-	1. Pembangunan Manusia	Predeikat Kabupaten Layak Anak		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																

							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				40 Organisasi	40 Organisasi	4.500.000,00	4.100.110,00	1.800.010,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.370.000,00	3.510.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tersedianya layanan peningkatan kulaitas hidup anak keweangan kabuapten yang mendapat penguatan dan pengembangan	-			Lembaga 9	Lembaga 9	33.372.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Lembaga penyedia layanan		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

						Kewenangan Kabupaten/Kota																PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	4.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.422.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
91	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				Kasus 30	Kasus 30	297.978.000,00	149.265.000,00	149.265.000,00							105.000.000,00	

	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	-			Kasus 30	Kasus 30	64.950.000,00	30.470.000,00	30.470.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Kasus Kekerasan Anak		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																	
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000,00	520.000,00	520.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan				35 Orang	50 Orang	63.450.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

							/program/ kegiatan pencegahan KTA																PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten	-			Keca,tan 10	Keca,tan 10	128.925.000,00	118.795.000,00	118.795.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Layanan Kasus kekerasan Anak		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				30 Orang	30 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	

							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				10 Layanan	10 Layanan	125.925.000,00	118.795.000,00	118.795.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	-			Kecamtan 19camatan	Kecamtan 19camatan	104.103.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	Lembaga Penyedia Layanan di 10 Kecamatan		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				2 Lembaga	2 Lembaga	13.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDA

																						YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				30 Orang	30 Orang	4.557.090,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																

							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																	
							Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																	
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang				1 Dokumen	1 Dokumen	86.045.910,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

							memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota															PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.918.966.000,00	6.743.869.000,00	7.367.965.200,00							6.176.867.100,00	
92	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kebijakan peraturan daerah ,peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk				Kebijakan 2	Kebijakan 2	71.600.000,00	60.000.000,00	345.200.000,00							220.000.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	[deleted] Jumlah kebijakan peraturan daerah ,peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebijkan peraturan daerah	-			10 sektor 4 dokumen Kebijakan 2	10 sektor 4 dokumen Kebijakan 2	11.600.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	kebijakan peraturan daerah		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																	
							Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

							Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota									Kalabbirang							BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak				35 Organisasi	35 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUA

							Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan															N DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				35 Organisasi	35 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																
							Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																
							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar,	-	-	1. Pemban			10.000.000,00	DINAS PENGENDA

							Pemutakhiran Data Keluarga									Pattallassang, Kalabbirang			gunan Manusia				LIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

							Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																
							Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																
							Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																

							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter	-			10 sektor	10 sektor	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	sektor data profil		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

																						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																
							Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				10 Laporan	10 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																

							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan Laporan	0,00	0,00	231.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Laporan Dokumen	0,00	0,00	54.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																	
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana				18 Unit	18 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

							(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk															PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota																
							Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																
							Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																
							Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
93	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Capaian KB Aktif				85 %	85 %	4.355.766.000,00	4.971.069.000,00	5.309.965.200,00							4.085.267.100,00	

	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontasepsi	-			Angka 71,07	Angka 71,07	1.137.150.000,00	1.089.000.000,00	1.089.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Angka Pemakaian Kontrasepsi		238.140.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	19.830.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																	
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

							Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	10 Laporan	504.120.000,00	604.000.000,00	547.120.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

							(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																
	2	1 4	0 3	2. 01	00 12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			50.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2. 01	00 13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2. 01	00 14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	

							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	10 Organisasi	313.200.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunkan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan	-			persen 100	persen 100	585.000.000,00	2.491.185.000,00	2.491.185.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan		320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																	
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

																						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				618 Orang	618 Orang	585.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.631.185.000,00	1.631.185.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	-	1. Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

							h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																
	2	1 4	0 3	2. 03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan dan jejaringnya seluruh Tingkat wilayah yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR dengan standarisasi pelayanan	-			OPD 35	OPD 35	22.116.000,00	887.384.000,00	887.384.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi		1.422.882.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2. 03	00 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	17.116.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			64.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2. 03	00 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan				720 Orang	720 Orang	0,00	807.584.000,00	807.584.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

							Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									ng, Semua Kel/Desa	Berencana DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB						KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																	
							Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			652.882.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0,00	56.400.000,00	25.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pemban			556.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN

							Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									ng, Kalabbirang			gunan Manusia				PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUA

																						N DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																
							Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta	Meningkatnya Peran serta Organisasi melalui Kampung KB	-			persen 65	persen 65	2.611.500.000,00	503.500.000,00	503.500.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Peran serta Organisasi		2.104.245.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

						Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4 Organisasi	4 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDA

																						YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2. 04	00 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				18 Laporan	18 Laporan	660.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2. 04	00 05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah DASHAT di Kampung KB				18 Unit	18 Unit	1.950.000.000,00	335.500.000,00	762.476.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			1.471.225.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 3	2. 04	00 06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	

							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				18 Kampung	18 Kampung	1.500.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			603.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
94	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Bangga Kencana				Indeks 62	Indeks 62	1.491.600.000,00	1.712.800.000,00	1.712.800.000,00							1.871.600.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapianya Indeks Bangga Kencana	-			Indeks 62	Indeks 62	25.000.000,00	187.600.000,00	187.600.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Indeks Bangga Kencana		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																	

							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				150 Keluarga	150 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCAN

																						A, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	1 4	0 4	2. 01	00 19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				52 Orang	52 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 4	2. 01	00 22	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 4	2. 01	00 24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				52 Orang	52 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																	
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				10 Kelompok	10 Kelompok	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapianaya Indeks bangga Kencana	-			Indeks 62	Indeks 62	1.466.600.000,00	1.525.200.000,00	1.525.200.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	Indeks Bangga Kencana		1.471.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	1. Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	10 laporan	696.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			696.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	10 laporan	765.600.000,00	835.200.000,00	835.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	1. Pembangunan Manusia			765.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan									27.475.382.671,00	16.156.616.084,00	18.307.446.147,00						30.865.527.992,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									9.998.370,00	257.499.140,00	257.499.140,00						383.400.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									9.998.370,00	257.499.140,00	257.499.140,00						383.400.000,00	

95	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi				91.5 Angka	91.5 Angka	7.999.200,00	254.999.210,00	254.999.210,00							278.400.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-			100 %	100 %	6.999.510,00	4.999.210,00	4.999.210,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		128.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	

							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			22.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	2.999.880,00	1.999.600,00	1.999.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			57.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																	
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	499.740,00	999.950,00	999.950,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																	
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.499.890,00	1.999.660,00	1.999.660,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenja			24.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULT

															n, Semua Kel/Desa			ngan Sosial Ekonomi				URA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	499.740,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3,2 Ton	16 Ton	499.740,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	-	499.950,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyera	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

																		pan Tenaga Kerja				
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	0 Laporan	499.950,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
96	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	999.690,00	1.499.760,00	1.499.760,00							55.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	-	499.950,00	1.499.760,00	1.499.760,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	

							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	499.950,00	1.499.760,00	1.499.760,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	499.740,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0 Laporan	499.740,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
97	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	999.480,00	1.000.170,00	1.000.170,00							50.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan	-	-			-	-	999.480,00	1.000.170,00	1.000.170,00			-	4. Penurunan	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN,

						Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota												Kesenjangan Sosial Ekonomi				HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	0 Dokumen	499.740,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	499.740,00	1.000.170,00	1.000.170,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							27.465.384.301,00	15.899.116.944,00	18.049.947.007,00							30.482.127.992,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							27.465.384.301,00	15.899.116.944,00	18.049.947.007,00							30.482.127.992,00	
98	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-				-	-	11.024.652.115,00	11.168.490.484,00	11.147.217.957,00							20.225.027.992,00	

						DAERAH KABUPATEN /KOTA																
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	74.913.210,00	14.889.410,00	14.889.410,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		161.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.499.970,00	6.389.980,00	4.529.980,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			94.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.479.740,00	1.498.520,00	1.148.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.870,00	1.499.810,00	1.499.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.750,00	1.499.680,00	959.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.700.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.880,00	1.499.840,00	1.499.840,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.501.580,00	1.501.580,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	57.434.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.613.357.971,00	10.947.720.814,00	10.947.720.814,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		18.194.810.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	10.600.958.681,00	10.937.323.084,00	10.932.496.867,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.114.810.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1800 Dokumen	1800 Dokumen	2.399.910,00	2.399.710,00	2.382.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.920,00	1.999.760,00	1.999.760,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.010,00	2.499.890,00	2.499.890,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.999.500,00	1.498.810,00	1.498.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	3.499.950,00	1.999.560,00	1.999.560,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	-	-			-	-	5.497.860,00	4.424.700,00	4.424.700,00			-	6. Perbaikan	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN,

						Perangkat Daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.720,00	1.074.840,00	780.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.840,00	1.499.860,00	1.499.860,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.998.300,00	1.850.000,00	490.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULT

																Kalabbirang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				URA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	119.460,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		271.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				123 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			71.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	119.460,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN

																		dan Pelayanan Publik				KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	27.015.770,00	28.794.160,00	28.794.160,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		595.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	999.000,00	998.900,00	998.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	0 Dokumen	1.349.910,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.499.860,00	2.665.260,00	2.665.260,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.167.000,00	25.130.000,00	13.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	298.805.174,00	105.593.670,00	105.593.670,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		611.377.992,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.249.900,00	1.993.670,00	1.473.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	205.155.274,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			334.377.992,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	92.400.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			270.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	4.942.670,00	67.067.730,00	67.067.730,00			-	6. Perbaikan	-		370.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN,

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1.900.000,00	14.387.730,00	14.387.730,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				2 Unit	2 Unit	253.770,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelo			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULT

							Dipelihara/Direhabilitasi									Kalabbirang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				URA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	108.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
99	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	1.203.419.810,00	2.458.605.290,00	2.432.820.390,00							1.873.540.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	-	998.919.730,00	2.404.105.450,00	2.404.105.450,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan	-		1.548.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

																		Tenaga Kerja				
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	4 Laporan	997.019.850,00	2.402.605.300,00	2.376.820.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			1.523.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	1.899.880,00	1.500.150,00	1.500.150,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			25.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	204.500.080,00	54.499.840,00	54.499.840,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		325.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.010,00	2.499.850,00	2.499.850,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	201.500.070,00	51.999.990,00	51.999.990,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan			125.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN,

																Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
100	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	14.797.132.476,00	2.229.983.890,00	2.938.929.380,00							7.619.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	371.464.690,00	5.409.890,00	5.409.890,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		439.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	

							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	369.117.000,00	1.499.980,00	1.499.980,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			399.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																	
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	2.347.690,00	3.909.910,00	3.909.910,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	14.425.667.786,00	2.224.574.000,00	2.224.574.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi	-		7.180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,

																		Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				73 Unit	14 Unit	10.697.499.786,00	1.850.000.000,00	1.992.581.490,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			4.150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	0 Unit	480.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningk			480.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN

																		atan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	548.168.000,00	0,00	372.750.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				25 Unit	15 Unit	2.700.000.000,00	374.574.000,00	568.188.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan			2.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

																		Penyerapan Tenaga Kerja				
101	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	4.530.000,00	4.529.730,00	4.529.730,00						174.700.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.530.000,00	4.529.730,00	4.529.730,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah	-		174.700.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	1 Ha	2.030.000,00	2.029.990,00	2.029.990,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			61.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman				1 Ha	1 Ha	1.500.000,00	2.499.740,00	2.499.740,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan			61.700.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULT

							Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani									n, Semua Kel/Desa			Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				URA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1 Ha	0 Ha	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			52.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
102	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	1.000.180,00	0,00	0,00							150.860.000,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan	-	-			-	-	1.000.180,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		150.860.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,

						Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																
							Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.860.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																

							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	0 Laporan	1.000.180,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			51.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
103	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	434.649.720,00	37.507.550,00	1.526.449.550,00								439.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	-	434.649.720,00	37.507.550,00	37.507.550,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		439.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	

							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	67.500.000,00	5.000.000,00	1.523.942.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			67.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	10 Unit	4.999.910,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana				5 Unit	0 Unit	257.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	-	-	3. Pengembangan			249.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN,

							Penyuluhan Pertanian									Kecamatan, Semua Kel/Desa			dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																	
							Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				2 Unit	1 Unit	4.999.810,00	2.507.550,00	2.507.550,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUN

																		dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja					AN DAN KETAHANAN PANGAN
						Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan							13.194.925.147,00	10.065.046.240,00	10.860.258.550,00						12.664.591.987,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.194.925.147,00	10.065.046.240,00	10.860.258.550,00						12.664.591.987,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							2.020.000.000,00	107.828.450,00	362.598.170,00						2.565.000.000,00	
104	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	-	10.000.000,00	994.600,00	257.139.520,00						50.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	10.000.000,00	994.600,00	994.600,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	994.600,00	257.139.520,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

1 0 5	2	1 0	0 5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	2.000.000.000,00	104.877.650,00	104.565.650,00							2.500.000.000,00	
	2	1 0	0 5	2. 01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.000.000.000,00	104.877.650,00	104.877.650,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		2.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 0	0 5	2. 01	00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	104.877.650,00	104.565.650,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			2.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

1 0 6	2	1 0	0 6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-				-	-	5.000.000,00	990.000,00	165.000,00							10.000.000,00	
	2	1 0	0 6	2. 01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.000.000,00	990.000,00	990.000,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 0	0 6	2. 01	00 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	990.000,00	165.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

							dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
107	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-				-	-	5.000.000,00	966.200,00	728.000,00							5.000.000,00	
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-			-	-	5.000.000,00	966.200,00	966.200,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																	
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	966.200,00	728.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							11.174.925.147,00	9.957.217.790,00	10.497.660.380,00							10.099.591.987,00	
108	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	5.996.010.487,00	8.170.799.690,00	8.326.730.360,00							5.891.591.987,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	70.000.000,00	21.347.690,00	21.347.690,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		62.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	8.575.700,00	8.575.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.167.990,00	2.547.990,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.819.000,00	1.144.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.458.000,00	2.838.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 1	2. 01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.335.000,00	312.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	936.000,00	1.248.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1.056.000,00	593.670,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.174.986.487,00	4.313.837.970,00	4.313.837.970,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5.158.867.987,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan Orang/bulan	12 bulan Orang/bulan	5.109.986.487,00	4.296.687.630,00	4.296.665.530,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.126.850.187,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.124.100,00	981.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			1.017.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.447.300,00	4.952.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.226.740,00	5.226.740,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 02	00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.820.300,00	1.820.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	2.150.400,00	2.150.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1.381.500,00	936.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	2.988.700,00	2.988.700,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	996.800,00	996.800,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	5. Pelestarian			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

																ng, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)		Lingkungan Hidup				DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	999.700,00	918.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	992.200,00	992.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.000.000,00	1.977.500,00	1.977.500,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	984.500,00	984.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																	

							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	993.000,00	535.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	111.000.000,00	4.049.250,00	4.049.250,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	999.250,00	999.250,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	960.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	55 Orang	50.000.000,00	1.240.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	850.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	129.000.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		132.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	Komponen Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

							Perundang-Undangan yang Disediakan									ng, Kalabbirang			Lingkungan Hidup				DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	430.000,00	430.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	120.000.000,00	257.307.560,00	257.307.560,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	257.307.560,00	256.731.560,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	-	-			-	-	186.024.000,00	3.476.991.020,00	3.476.991.020,00			-	5. Pelestarian	-		152.224.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

						Urusan Pemerintahan Daerah												Lingkungan Hidup				DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	127.224.000,00	17.165.500,00	17.165.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			127.224.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.800.000,00	3.459.825.520,00	3.459.825.520,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	85.210.000,00	85.210.000,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	82.830.000,00	82.830.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	45 Unit	150.000.000,00	2.380.000,00	168.880.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
109	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	20.000.000,00	1.036.500,00	624.000,00							20.000.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	15.000.000,00	1.036.500,00	1.036.500,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1.036.500,00	624.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.000.000,00	0,00	0,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 2	2. 02	00 05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
1 1 0	2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	67.000.000,00	8.321.300,00	6.271.300,00							83.000.000,00	
	2	1 1	0 3	2. 01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	-	62.000.000,00	7.179.700,00	7.179.700,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		73.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 3	2. 01	00 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.000.000,00	3.100.000,00	1.050.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				5 Lokasi	5 Lokasi	10.000.000,00	1.119.700,00	1.119.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	-	5.000.000,00	1.141.600,00	1.141.600,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

						Kabupaten/Kota																
	2	1 1	0 3	2. 02	00 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.141.600,00	1.141.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
1 1 1	2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	1.035.000.000,00	156.293.900,00	153.943.720,00							900.000.000,00	
	2	1 1	0 4	2. 01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.035.000.000,00	156.293.900,00	156.293.900,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 4	2. 01	00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Ha	75 Ha	1.035.000.000,00	156.293.900,00	153.943.720,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

																	Pajak Air Tanah						
1 1 2	2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				-	-	5.000.000,00	936.000,00	936.000,00							5.000.000,00	
	2	1 1	0 6	2. 01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.000.000,00	936.000,00	936.000,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 6	2. 01	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	

							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	936.000,00	936.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
113	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	4.051.914.660,00	1.619.830.400,00	2.009.155.000,00							3.200.000.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	-	4.051.914.660,00	1.619.830.400,00	1.619.830.400,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		3.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	227.946.760,00	619.195.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

							Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada															
	2	1 1	1 1	2. 01	00 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				40 Unit	40 Unit	3.751.914.660,00	1.391.883.640,00	1.389.959.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
						Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								3.941.792.868,00	4.374.854.888,00	4.563.936.467,00						5.134.901.100,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.941.792.868,00	4.374.854.888,00	4.563.936.467,00						5.134.901.100,00	
	2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								3.941.792.868,00	4.374.854.888,00	4.563.936.467,00						5.134.901.100,00	
1 1 4	2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				93 93 % Persen	93 93 Persen %	3.341.792.868,00	3.544.854.888,00	3.785.700.767,00							4.267.301.100,00	
	2	1 2	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase capaian laporan dalam Perencanaan,	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	36.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00			-	6. Perbaikan	ASN Disdukcapil		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	17.667.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.983.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	12.000.000,00	5.401.400,00	Kab. Takalar,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaika			3.000.000,00	DINAS KEPENDUD

							SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									Pattallassang, Kalabbirang			n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

							Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									ng, Kalabbirang			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	2.813.933.900,00	2.943.454.888,00	2.943.454.888,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		3.752.744.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.803.933.900,00	2.928.454.888,00	2.917.734.667,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.735.744.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

																Kalabbirang			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	10.480.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	13.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN Disdukcapil		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							administrasi barang milik daerah											Pelayanan Publik				
	2	1 2	0 1	2. 03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 03	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.107.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Barang Milik	-			95 % 95 Persen	95 % 95 Persen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		41.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							Daerah pada Perangkat daerah															
	2	1 2	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				63 Paket	63 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

																		Pelayanan Publik				
	2	1 2	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	88.660.000,00	230.197.000,00	230.197.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		149.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.203.000,00	57.692.700,00	137.590.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	28.880.000,00	88.041.300,00	238.382.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.177.000,00	78.063.000,00	47.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			70 %	70 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2. 07	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			85 Persen	85 Persen	331.109.068,00	239.650.000,00	239.650.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		209.966.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.459.068,00	0,00	27.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			129.366.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	3.250.000,00	11.940.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	236.400.000,00	236.400.000,00	250.800.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	-			95 %	95 %	51.589.900,00	53.053.000,00	53.053.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Disdukcapil		66.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				4 Unit	5 Unit	46.590.000,00	44.550.000,00	63.975.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			46.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

							Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.999.900,00	8.503.000,00	8.503.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
115	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA Perekaman KTP-el Persentase Kepala				93 97 98 60 % %	60 97 93 98 % %	530.000.000,00	759.949.000,00	705.432.700,00							731.600.000,00	

							Keluarga yang memiliki KK Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik				% %	% %										
	2	1 2	0 2	2. 01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan	-			100 %	100 %	505.048.000, 00	735.028.000, 00	735.028.000, 00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		625.000.000 ,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2. 01	00 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				9 Dokumen	9 Dokumen	480.048.000, 00	660.028.000, 00	623.328.800, 00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000.000 ,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2. 01	00 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,0 0	75.000.000,0 0	72.103.900,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			25.000.000, 00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

																		dan Pelayanan Publik				
	2	1 2	0 2	2. 02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		41.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2. 02	00 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																	
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2. 03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kegiatan penyelenggaraan pendaftran penduduk yang tertib administrasi Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan	-			100 %	100 %	24.952.000,00	24.921.000,00	24.921.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN Disdukcapil		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	24.952.000,00	24.921.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 2	2. 04	00 03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																
							Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
116	2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun				99 100 98 % % %	98 100 99 % % %	25.000.000,00	25.000.000,00	20.744.000,00							59.000.000,00	
	2	1 2	0 3	2. 01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan standar pelayanan	-			95 %	95 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 3	2. 01	00 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2. 01	00 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.464.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2. 02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraanpencatatan sipil yang tertib administrasi pencatatan sipil Persentase penyelenggara an pendaftaran penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN Disdukcapil		27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2. 02	00 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																	

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																
	2	1 2	0 3	2. 02	00 03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.280.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2. 02	00 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2. 03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggara pencatatan Persentase peningkatan kapasitas dan	-			98 %	98 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN Disdukcapil dan Operator Layanan		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							kualitas penyelenggara pencatatan sipil												Pelayanan Publik				
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
117	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan data kependudukan persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun				100 98 99 % % %	98 99 100 % % %	33.360.000,00	33.411.000,00	37.291.000,00							57.000.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia	-			100 %	100 %	23.360.000,00	23.411.000,00	23.411.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	ASN Disdukcapil dan OPD/Instansi terkait		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

						Database Kependudukan												dan Pelayanan Publik				
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.360.000,00	13.411.000,00	13.411.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	18.810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang berkualitas Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN Disdukcapil		17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							Kependudukan yang berkualitas															
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.070.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas operator SIAK	-			95 %	95 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN Disdukcapil dan Operator Layanan		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

																		Pelayanan Publik				
	2	1 2	0 4	2. 04	00 03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
118	2	1 2	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama				100 98 % %	98 100 % %	11.640.000,00	11.640.000,00	14.768.000,00							20.000.000,00	
	2	1 2	0 5	2. 01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan	-			100 %	100 %	11.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00			-	-	ASN Disdukcapil, OPD/Instansi terkait, Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 5	2. 01	00 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																

							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	11.640.000,00	11.640.000,00	14.768.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Perhubungan						4.854.110.900,00	7.405.818.172,00	7.670.730.512,00							5.827.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.854.110.900,00	7.405.818.172,00	7.670.730.512,00							5.827.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.854.110.900,00	7.405.818.172,00	7.670.730.512,00							5.827.000.000,00	
119	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	4.160.992.410,00	4.248.075.598,00	4.303.641.938,00							4.878.000.000,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.106.730,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.106.800,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	999.800,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	999.930,00	500.000,00	348.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.200,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	3.795.315.556,00	3.966.349.062,00	3.966.349.062,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.508.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	3.791.315.846,00	3.965.349.062,00	3.965.349.462,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.999.860,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2. 02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.999.850,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	53.995.000,00	63.409.160,00	63.409.160,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		109.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				1 Paket	1 Paket	899.100,00	924.700,00	924.700,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

							Kantor yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.073.500,00	9.217.100,00	8.584.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.507.400,00	1.483.360,00	1.486.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				1 Laporan	1 Laporan	44.515.000,00	51.784.000,00	25.881.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

							dan Konsultasi SKPD									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	262.795.124,00	171.287.376,00	171.287.376,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.287.376,00	3.287.376,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN							4.854.110.900,00	7.405.818.172,00	7.670.730.512,00							5.827.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.854.110.900,00	7.405.818.172,00	7.670.730.512,00							5.827.000.000,00	
120	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-				-	-	4.160.992.410,00	4.248.075.598,00	4.303.641.938,00							4.878.000.000,00	

						DAERAH KABUPATEN /KOTA																
	2	1 5	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	262.795.124,00	171.287.376,00	171.287.376,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.854.110.900,00	7.405.818.172,00	7.670.730.512,00							5.827.000.000,00	
	2	1 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							4.854.110.900,00	7.405.818.172,00	7.670.730.512,00							5.827.000.000,00	
1 2 1	2	1 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	4.160.992.410,00	4.248.075.598,00	4.303.641.938,00							4.878.000.000,00	
	2	1 5	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	262.795.124,00	171.287.376,00	171.287.376,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	1 5	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	44.780.000,00	45.030.000,00	45.030.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	44.780.000,00	45.030.000,00	45.030.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	0 Unit	0,00	0,00	83.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
122	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	693.118.490,00	3.157.742.574,00	3.367.088.574,00							949.000.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.500.000,00	3.000.300,00	3.000.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.000.300,00	1.240.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	615.000.000,00	3.084.238.274,00	3.084.238.274,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		735.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	2.111.181.260,00	2.256.556.260,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	973.057.014,00	1.051.793.314,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	-	-			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembanguna	-	-			-	-	4.499.700,00	6.515.000,00	6.515.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

						n Fasilitas Parkir													Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.499.700,00	6.515.000,00	4.465.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	-	53.118.900,00	47.024.000,00	47.024.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		177.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	7.478.900,00	6.344.000,00	6.344.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

																		Pelayanan Publik				
	2	1 5	0 2	2. 05	00 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2. 05	00 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2. 05	00 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	13.640.000,00	8.680.000,00	4.340.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

																		Pelayanan Publik				
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	13.500.000,00	13.490.000,00	13.490.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.975.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.490.000,00	3.140.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.499.890,00	3.475.000,00	3.475.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	3.499.890,00	3.475.000,00	2.235.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian							4.903.726.129,00	6.627.912.394,00	12.461.973.915,00							5.459.439.415,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.903.726.129,00	6.627.912.394,00	12.461.973.915,00							5.459.439.415,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							4.873.726.129,00	6.478.937.394,00	12.378.175.215,00							5.429.439.415,00	
123	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	3.063.626.129,00	3.392.470.254,00	3.310.258.255,00							3.599.340.295,00	

	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	25.000.000,00	109.301.860,00	109.301.860,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	9.104.860,00	4.430.790,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	83.197.000,00	39.314.510,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.815.910,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.029.370,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.888.640,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.729.210,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.882.097.300,00	3.156.262.394,00	3.156.262.394,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.400.740.295,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.870.097.300,00	3.144.312.394,00	3.144.312.394,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.388.740.295,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 1	2. 02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.257.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.950.000,00	2.464.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.933.740,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	-	-			-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	6. Perbaikan	-		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

						Perangkat Daerah													Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.384.430,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.028.610,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	-		14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK

																		tahan dan Pelayanan Publik				DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	500.000,00	500.000,00	450.170,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	883.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

																		dan Pelayanan Publik				PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	37.428.829,00	42.860.000,00	42.860.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		41.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	697.500,00	697.500,00	697.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.000.000,00	2.931.171,00	1.642.651,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.131.329,00	3.131.329,00	2.416.249,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	30.600.000,00	36.100.000,00	17.860.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	899.211,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	84.600.000,00	44.056.000,00	44.056.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		84.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 1	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	273.670,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

							Perlengkapan Kantor yang Disediakan									ng, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	26.000.000,00	31.490.000,00	31.490.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		26.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				6 Unit	6 Unit	26.000.000,00	31.490.000,00	31.490.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			26.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK

							dibayarkan Pajaknya												tahan dan Pelayanan Publik				DAN PERSANDIAN
124	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	880.000.000,00	1.425.319.240,00	2.497.935.700,00							880.000.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	880.000.000,00	1.425.319.240,00	1.425.319.240,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		880.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																	
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	2 Komunitas	850.000.000,00	1.150.000.000,00	2.049.900.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik																	

							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	12.500.000,00	12.500.000,00	207.235.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	17.500.000,00	262.819.240,00	240.799.890,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
125	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	930.100.000,00	1.661.147.900,00	6.569.981.260,00								950.099.120,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	-	-			-	-	10.000.000,00	52.650.000,00	52.650.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.999.880,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
	2	1 6	0 3	2. 01	00 04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	52.650.000,00	51.889.880,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.999.880,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 3	2. 02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	920.100.000,00	1.608.497.900,00	1.608.497.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		940.099.240,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1 6	0 3	2. 02	00 14	Koordinasi penyusunan proses bisnis																	
							Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	6.155.900,00	4.733.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			14.999.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																		Pelayanan Publik				
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	51.626.200,00	2.537.768.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.999.770,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	40.564.000,00	39.194.080,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																
							Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.570.000,00	16.444.000,00	9.845.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.999.720,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

							kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah									ng, Kalabbirang			Pelayanan Publik				
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				28 unit	28 unit	905.030.000,00	1.493.707.800,00	3.926.549.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			913.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							20.000.000,00	138.975.000,00	76.954.700,00							20.000.000,00	
126	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	20.000.000,00	138.975.000,00	76.954.700,00							20.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	20.000.000,00	138.975.000,00	138.975.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

																		Pelayanan Publik				PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.884.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	5.000.000,00	105.000.000,00	52.902.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	23.975.000,00	18.168.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																		Pelayanan Publik				
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							10.000.000,00	10.000.000,00	6.844.000,00						10.000.000,00	
127	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	6.844.000,00						10.000.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.084.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	3.760.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi							7.309.503.755,00	7.236.193.802,00	7.176.925.878,00							8.459.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.289.503.755,00	7.221.193.802,00	7.169.462.778,00							8.389.000.000,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							27.564.000,00	182.500.000,00	117.026.770,00							90.000.000,00	
128	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				18.6 %	18.6 %	0,00	0,00	0,00							20.000.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana dan Tenaga Kerja Yang Disusun	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																	
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,

															Pattallassang			Sosial Ekonomi				TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
129	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi				100 %	100 %	5.000.000,00	57.500.000,00	47.090.700,00							30.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-			100 %	100 %	5.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				80 Orang	80 Orang	5.000.000,00	57.500.000,00	47.090.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
130	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar				20 %	20 %	22.564.000,00	125.000.000,00	69.936.070,00							30.000.000,00	

							negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota															
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan antar kerja daerah	-			100 %	100 %	22.564.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja																	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1000 Orang	1000 Orang	22.564.000,00	125.000.000,00	69.936.070,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																	

							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Migran yang ditempatkan di Daerah Kabupaten Kota	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
131	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta				20.47 %	20.47 %	0,00	0,00	0,00							10.000.000,00	

							BPJS Ketenagakerjaan)															
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Perusahaan		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1500 Laporan	1500 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7.261.939.755,00	7.038.693.802,00	7.052.436.008,00							8.299.000.000,00	
132	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	6.397.818.875,00	6.346.193.802,00	6.320.495.858,00							7.799.000.000,00	

						DAERAH KABUPATEN /KOTA	Daerah Kabupaten/Kota															
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	21.576.720,00	25.526.720,00	25.526.720,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Dokumen Perencanaan		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.006.500,00	4.006.500,00	4.006.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.113.620,00	7.073.620,00	6.623.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.998.000,00	2.998.000,00	2.827.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.300,00	2.000.300,00	1.896.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.300,00	2.990.300,00	2.886.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	6.138.470.260,00	6.188.578.082,00	6.188.578.082,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Dokumen Keuangan		7.061.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.119.726.860,00	6.168.093.802,00	6.159.338.068,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	16.743.400,00	18.484.280,00	15.444.790,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Persentase Laporan Barang Milik Daerah Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	-			100 %	100 %	2.500.000,00	7.025.000,00	7.025.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah		6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	7.025.000,00	5.849.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan	ASN		57.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA

						Perangkat Daerah	ikut pelatihan Persentase ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				57 Orang	57 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-			100 %	100 %	39.619.000,00	39.531.000,00	39.531.000,00			-	6. Perbaikan	ASN		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA

						Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.644.000,00	3.644.000,00	3.463.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	35.975.000,00	35.887.000,00	18.969.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan Persentase Barang Milik Daerah Yang	-			100 %	100 %	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	Dokumen Pengadaan Barang		243.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,

						Pemerintah Daerah	Diadakan Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah											Pemerintahan dan Pelayanan Publik				TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	9.525.000,00	9.525.000,00	14.725.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	163.219.895,00	53.100.000,00	53.100.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	Dokumen Jasa Tagihan Listrik, Air, Internet, dan Jasa Tenaga Kantor		170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA

							Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Rekening yang terbayarkan,Persentase petugas kebersihan yang bekerja												tahan dan Pelayanan Publik				KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.819.895,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang	Persentase kendaraan dinas	-			100 %	100 %	22.908.000,00	22.908.000,00	22.908.000,00			-	6. Perbaika	Barang Milik Daerah		107.000.000,00	DINAS KOPERASI,

						Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang dipeliharaa Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah												n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	20.958.000,00	20.958.000,00	20.958.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2	1 7	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 3 3	2	1 7	0 3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota				100 %	100 %	0,00	0,00	32.215.600,00							20.000.000,00	
	2	1 7	0 3	2. 01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Lembaga Koperasi		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2	1 7	0 3	2. 01	00 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	0,00	0,00	32.215.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
134	2	1 7	0 5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang bersertifikat kompotensi				100 26 % %	100 26 % %	20.064.000,00	15.000.000,00	108.660.250,00							30.000.000,00	
	2	1 7	0 5	2. 01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Bagi Anggota Koperasi,UMKM Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi	-			100 %	100 %	20.064.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Lembaga Koperasi dan Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	200 Orang	20.064.000,00	15.000.000,00	108.660.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
135	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro				5 52.79 % %	52.795 % %	17.500.000,00	111.500.000,00	58.485.000,00							150.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi Kemitraan, Kemudahan Perizinan,dan Pengembangan Usaha Mikro	-			100 % 5 %	100 % 5 %	17.500.000,00	111.500.000,00	111.500.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	5.000.000,00	7.500.000,00	3.855.380,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	12.500.000,00	104.000.000,00	54.629.620,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
136	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas Persentase jumah usaha yang diinput kedalam sistem ODS				100 48.79 % %	48.79 100 % %	826.556.880,00	566.000.000,00	532.579.300,00							300.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UKM yang diundang dalam pertemuan peningakatan kapasitas UMKM Persentase Usaha Mikro Yang meningkat menjadi Usaha kecil	-			0.5 % 100 %	0.5 % 100 %	826.556.880,00	566.000.000,00	566.000.000,00			-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	513.278.440,00	200.000.000,00	197.859.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																	
							Jumlah yang Difasilitasi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																	
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	213.278.440,00	100.000.000,00	68.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.000.000,00	15.000.000,00	7.463.100,00							70.000.000,00	

	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						20.000.000,00	15.000.000,00	7.463.100,00							70.000.000,00	
137	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Bangunan penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota				20 %	20 %	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi																	
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
138	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas				23 %	23 %	20.000.000,00	15.000.000,00	7.463.100,00							20.000.000,00	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman	Persentase Pengembangan Satuan pemukiman	-			100 %	100 %	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	4. Penurunan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA

						pada Tahap Kemandirian	Pada Tahap Kemandirian												Kesenjangan Sosial Ekonomi				KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																	
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	20.000.000,00	15.000.000,00	7.463.100,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu						3.329.701.160,00	3.426.994.996,00	3.282.058.841,00								0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.329.701.160,00	3.426.994.996,00	3.282.058.841,00								0,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.329.701.160,00	3.426.994.996,00	3.282.058.841,00								0,00	
139	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota				88,75 %	88,75 %	2.678.188.160,00	3.131.994.996,00	3.102.502.641,00								0,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	27.524.200,00	26.598.700,00	26.598.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Perangkat Daerah	yang di susun Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun												tahan dan Pelayanan Publik				
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.197.500,00	4.996.830,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.292.000,00	5.174.240,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																		Pelayanan Publik				
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.430.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.024.200,00	3.629.200,00	3.629.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																		Pelayanan Publik				
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	1.572.000,00	2.280.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.720.000,00	2.112.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.374.140.560,00	2.927.422.096,00	2.927.422.096,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				408 Orang/bulan	408 Orang/bulan	2.363.140.560,00	2.911.468.596,00	2.900.600.671,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	8.957.500,00	8.810.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1 8	0 1	2. 02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.364.000,00	2.804.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.008.000,00	882.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	624.000,00	624.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1 8	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Daerah	-			100 %	100 %	6.680.000,00	5.006.800,00	5.006.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah SKPD		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	3.998.800,00	3.091.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 03	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.680.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang mendapat Pakaian Dinas	-			100 % 58 Pegawai	100 % 58 Pegawai	285.800,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL

						Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pakaian Dinas Persentase Pegawai Yng Mendapat Pakaian Dinas											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	285.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi Persentase Peralatan Kantor,	-			100 %	100 %	56.172.000,00	29.119.000,00	29.119.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

							Bahan Bacaan dan Rapat Koordinasi											tahan dan Pelayanan Publik				
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.832.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	32.340.000,00	28.119.000,00	14.024.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																		dan Pelayanan Publik				
	2	1 8	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Kantor Persentase Penyediaan Jasa Kantor	-			100 %	100 %	168.775.600,00	107.126.400,00	107.126.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Non ASN dan Kantor PLN,PDAM,Telkom		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.975.600,00	14.726.400,00	14.726.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.800.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Terpelihara Persentase Barang Yang Terpelihara	-			100 %	100 %	44.610.000,00	36.722.000,00	36.722.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin Lainnya dan Gedung Kantor		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	36.770.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2.840.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
140	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persenatse penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal				25 %	25 %	2.144.000,00	50.000.000,00	31.300.000,00							0,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif pada Bidang Penanaman Modal Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Pada Bidang penanaman Modal	-			100 %	100 %	624.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	312.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																		Pelayanan Publik				
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	312.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	1.520.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1 8	0 2	2. 02	00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00	50.000.000,00	31.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
141	2	1 8	0 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi				28,72 %	28,72 %	10.000.000,00	30.000.000,00	19.254.000,00							0,00	
	2	1 8	0 3	2. 01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-			100 %	100 %	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perusahaan swasta		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 3	2. 01	00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	4.781.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																		Pelayanan Publik				
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	14.473.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
142	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP				28,971 % %	1 28,97 % %	40.960.000,00	115.000.000,00	66.649.500,00							0,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu pada Bidang Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara	-			100 %	100 %	40.960.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpadu Pada Bidang penanaman Modal															
	2	1 8	0 4	2. 01	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2. 01	00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	20.000.000,00	85.000.000,00	49.148.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2. 01	00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha				60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	20.000.000,00	30.000.000,00	17.500.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

							Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											dan Pelayanan Publik				
	2	1 8	0 4	2. 01	00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				7 Kegiatan Usaha	7 Kegiatan Usaha	340.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
143	2	1 8	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/Penanaman Modal terhadap Penyampaian LKPM				28,10 %	28,10 %	597.785.000,00	100.000.000,00	62.352.700,00							0,00	
	2	1 8	0 5	2. 01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendaian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-			100 %	100 %	597.785.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 5	2. 01	00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																

							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				7 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	89.667.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				275 Pelaku Usaha	275 Pelaku Usaha	328.783.000,00	100.000.000,00	62.352.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan				33 Kegiatan Usaha	33 Kegiatan Usaha	179.335.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

							Pelaksanaan Perizinan Berusaha																	
144	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal				150 % %	150 % %	624.000,00	0,00	0,00							0,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	-			100 %	100 %	624.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	624.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga							5.619.055.498,00	8.148.636.059,00	8.607.380.085,00							11.059.500.000,00	

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							991.921.700,00	1.649.863.520,00	2.066.137.670,00							1.972.000.000,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							991.921.700,00	1.649.863.520,00	2.066.137.670,00							1.972.000.000,00	
145	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan				100 %	100 %	9.387.270,00	349.999.990,00	349.999.990,00							802.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	7.087.270,00	349.999.990,00	349.999.990,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader/Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		472.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor				1 Dokumen	1 Dokumen	412.270,00	349.999.990,00	349.999.990,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	7. Penguatan Ketentraman dan			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

							Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota									n, Semua Kel/Desa			Ketertiban Umum Lintas Sektor				
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				35 Orang	35 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				1 Orang	1 Orang	2.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyera			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		pan Tenaga Kerja				
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	30 Orang	2.375.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	2.300.000,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Organisasi Kepemudaan		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																	
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	2.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
146	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga				100 %	100 %	477.734.600,00	1.099.999.590,00	1.579.447.680,00							870.000.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	-			100 %	100 %	2.250.000,00	60.000.320,00	60.000.320,00			-	4. Penurunan Kesenjangan	Organisasi Keolahragaan		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

						Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												Sosial Ekonomi				
	2	1 9	0 3	2. 01	00 06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	60.000.320,00	33.649.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 3	2. 02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			80 %	80 %	3.900.000,00	39.999.710,00	39.999.710,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Atlet Olahraga		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 3	2. 02	00 04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	2 Kegiatan	800.000,00	39.999.710,00	34.362.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																	
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				5 Orang	5 Orang	3.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-			100 %	100 %	465.559.600,00	499.999.880,00	499.999.880,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Atlet Olahraga		460.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																	
							Jumlah Olahragawan Berprestasi				1 Orang	300 Orang	465.559.600,00	499.999.880,00	1.037.323.880,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang	-	4. Penurunan			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA

							kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Kesenjangan Sosial Ekonomi				DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																	
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			80 %	80 %	1.700.000,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Organisasi Keolahragaan		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																	
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-			80 %	80 %	4.325.000,00	499.999.680,00	499.999.680,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Organisasi Keolahragaan dan para Atlet		140.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	149.999.770,00	79.182.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	1.825.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	15 Lembaga	1.700.000,00	349.999.910,00	394.930.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

147	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan				100 %	100 %	504.799.830,00	199.863.940,00	136.690.000,00							300.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			100 %	100 %	504.799.830,00	199.863.940,00	199.863.940,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Organisasi Kepramukaan		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	499.999.830,00	199.863.940,00	136.690.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				20 Unit	1 Unit	4.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		Umum Lintas Sektor				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.627.133.798,00	6.498.772.539,00	6.541.242.415,00						9.087.500.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							4.627.133.798,00	6.498.772.539,00	6.541.242.415,00						9.087.500.000,00	
148	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.590.433.898,00	5.198.636.279,00	5.224.565.055,00						7.715.500.000,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	10.534.200,00	19.039.360,00	19.039.360,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		98.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.404.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.463.000,00	3.113.930,00	410,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.570.000,00	2.000.100,00	2.000.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.723.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.026.000,00	2.625.710,00	1.519.710,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.826.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.521.500,00	2.299.620,00	2.299.620,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	4.345.738.498,00	4.914.905.819,00	4.914.905.819,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		6.724.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	4.332.869.098,00	4.859.828.199,00	4.850.181.685,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	499.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.557.100,00	8.382.370,00	8.382.370,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.570.000,00	7.772.100,00	7.772.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2 Laporan	1.989.900,00	8.723.400,00	8.723.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2 Dokumen	2.926.000,00	7.772.100,00	7.772.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4 Laporan	3.138.100,00	11.772.000,00	11.774.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.188.500,00	7.655.650,00	2.648.990,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Pelaksanaan Administrasi	-			100 %	100 %	4.565.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	6. Perbaikan	Dinas Pariwisata		22.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA

						Perangkat Daerah	Barang Daerah pada Perangkat Daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemuda dan Olahraga			DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.415.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.098.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.052.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA

																Kalabbirang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	5.662.000,00	2.422.700,00	2.422.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		147.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.850.000,00	537.000,00	537.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																	
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		dan Pelayanan Publik				
	3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.312.000,00	1.885.700,00	1.704.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.909.200,00	11.772.000,00	11.772.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		153.700.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	1.657.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.296.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	12 Dokumen	5.344.000,00	8.772.000,00	8.831.170,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.212.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	21.368.000,00	98.890.200,00	98.890.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		305.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									Komponen								Instalasi

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.560.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.292.000,00	22.934.000,00	22.934.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pallantikang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.010.000,00	2.701.200,00	2.701.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.290.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	6 Laporan	5.016.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	40 Laporan	6.200.000,00	48.274.000,00	43.245.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			50 %	50 %	1.246.600,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		45.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	-	-	6. Perbaikan			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA

							atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.246.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	183.282.500,00	115.008.000,00	115.008.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		160.800.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.182.500,00	5.808.000,00	5.808.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			85.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	700.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.400.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			58.800.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	6.127.100,00	33.598.200,00	33.598.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		Pelayanan Publik				
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	8 Unit	5.150.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	9 Unit	677.100,00	9.750.000,00	59.700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9 Unit	300.000,00	14.968.200,00	14.968.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		Pelayanan Publik				
149	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama kunjungan wisata Lama kunjungan wisata				21 hari %	12 % hari	23.308.900,00	49.999.690,00	49.759.690,00							825.000.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	4.750.000,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Pengembangan daya tarik Wisata Kabupaten/Kota		37.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Galesong Utara,	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa							
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis	-			70 %	70 %	9.885.400,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan	Pelaku Usaha		66.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA

						Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota											Kesenjangan Sosial Ekonomi	Sektor Pariwisata			DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	2.531.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2.354.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			85 %	85 %	6.800.000,00	49.999.690,00	49.999.690,00			-	4. Penurunan Kesenjangan	wisatawan nusantara dan mancanegara		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																			Sosial Ekonomi				
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	6.800.000,00	49.999.690,00	49.759.690,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-			70 %	70 %	1.873.500,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Pelaku Usaha Sektor Pariwisata		22.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																	
							Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				1 Usaha	1 Usaha	1.105.500,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																	
							Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	768.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

150	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota				100 %	100 %	4.831.000,00	800.000.000,00	796.000.570,00							382.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	4.831.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	wisatawan nusantara dan mancanegara		382.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penurunan Kesenjangan			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		Sosial Ekonomi				
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.611.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	720.000,00	200.000.000,00	196.000.570,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
151	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif				90 %	90 %	3.730.000,00	250.000.060,00	200.476.900,00							65.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem	Persentase Pengembangan	-			90 %	90 %	3.730.000,00	250.000.060,00	250.000.060,00			-	4. Penurunan	Pelaku Pariwisata dan		65.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA

						Ekonomi Kreatif	Ekosistem Ekonomi Kreatif											Kesenjangan Sosial Ekonomi	Ekonomi Kreatif			DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	250.000.060,00	200.476.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	2.030.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
152	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi				100 %	100 %	4.830.000,00	200.136.510,00	270.440.200,00							100.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	-			100 %	100 %	480.000,00	200.136.510,00	200.136.510,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

						Kreatif Tingkat Dasar	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar														
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				35 Orang	40 Orang	480.000,00	200.136.510,00	114.167.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-			100 %	100 %	4.350.000,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Pelaku Ekonomi Kreatif		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				30 Orang	35 Orang	4.350.000,00	0,00	156.272.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan							3.983.475.300,00	3.321.025.548,00	3.209.125.538,00							5.827.988.280,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.983.475.300,00	3.321.025.548,00	3.209.125.538,00							5.827.988.280,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.963.620.200,00	3.306.025.548,00	3.196.393.038,00							5.285.988.280,00	

153	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Keterpenuhan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	2.880.979.480,00	2.851.025.548,00	2.847.836.348,00							4.075.988.280,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	-			20 Dokumen 7 Dokumen	20 Dokumen 7 Dokumen	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Dokumen RKA-SKPD									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Perubahan DPA-SKPD											tahan dan Pelayanan Publik				
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan DPK Persentase Realisasi Keuangan DPK	-			100 %	100 %	2.716.376.880,00	2.785.025.548,00	2.785.025.548,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.318.427.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.714.199.700,00	2.769.025.548,00	2.769.025.548,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.262.427.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	9.874.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																	Pelayanan Publik					
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	177.180,00	1.000.000,00	984.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	3.000.000,00	2.056.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												Pelayanan Publik				
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[deleted] Persentase barang milik daerah yang dilaporkan Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	-			100 %	100 %	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1.000.000,00	112.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			66.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	1.000.000,00	789.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	22.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		234.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Jasa yang tersedia Persentase	-			100 % 3 Jasa	100 % 3 Jasa	127.602.600,00	42.000.000,00	42.000.000,00			-	6. Perbaikan	-		385.561.280,00	DINAS PERPUSTAK

						Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				AAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	999.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.603.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			179.561.280,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				15 Laporan	15 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Kantor yang Disediakan									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	11.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 0	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
154	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina Persentase budaya lokal yang dikembangkan				1004 % Angka	1004 % Angka	1.077.640.120,00	440.000.000,00	334.116.690,00							1.040.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE JUMLAH PERPUSTAKAAN YANG DIBINA Persentase Jumlah Perpustakaan yang dikelola	-			100 %	100 %	523.269.560,00	430.000.000,00	430.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																	
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	975.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		Pelayanan Publik				
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan				17 Orang	17 Orang	5.000.000,00	170.000.000,00	69.951.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												dan Pelayanan Publik				
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.144.190,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	204.995.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	300.000,00	1.000.000,00	312.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		Pelayanan Publik				
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	304.999.560,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	-			100 %	100 %	554.370.560,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		340.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				20 Orang	20 Orang	3.499.200,00	4.000.000,00	3.989.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																	
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	699.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	543.172.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				20 Orang	20 Orang	2.499.560,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Tingkat Kabupaten Kota											tahan dan Pelayanan Publik				
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	1 Lokus	4.500.000,00	5.000.000,00	4.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
155	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah Naskah Kuno Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan				89 100 Koleksi %	100 89 % Koleksi	5.000.600,00	15.000.000,00	14.440.000,00							170.000.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Naskah Kuno	-			50 Exemplar Naskah	50 Exemplar Naskah	3.000.600,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																	
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang				170 Eksemplar	170 Eksemplar	3.000.600,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAK

							dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				AAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				25 Eksemplar	25 Eksemplar	1.000.000,00	5.000.000,00	4.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan				25 Eksemplar	25 Eksemplar	1.000.000,00	5.000.000,00	4.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						19.855.100,00	15.000.000,00	12.732.500,00							542.000.000,00	
156	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Jumlah Arsip yang Dikelola Program Pengelolaan Arsip				92.59 100 % %	100 92.59 % %	11.837.700,00	6.800.000,00	5.949.000,00							437.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	-			100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	1.416.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 Berkas	2 Berkas	736.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang				2 Berkas	2 Berkas	680.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaika			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAK

							Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				AAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis yang dikelola Persentase Jumlah Arsip Statis yang dikelola	-			100 %	100 %	1.423.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		116.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																	
							Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				100% Arsip	100% Arsip	680.000,00	1.000.000,00	976.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan,				0 Arsip	0 Arsip	743.000,00	800.000,00	743.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Preservasi dan Akses Arsip Statis									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul JIKN tk. Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Simpul JIKN tK. Kabupaten/Kota	-			100 % 8 Orang	100 % 8 Orang	8.998.700,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																	
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				8 Pengguna	8 Pengguna	4.000.000,00	2.000.000,00	1.530.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	4.998.700,00	2.000.000,00	1.700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		Pelayanan Publik				
157	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang telah Diselamatkan dan Dilestarikan Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban				92.59 100 % %	100 92.59 % %	6.317.400,00	6.500.000,00	6.000.000,00							83.000.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Jumlah Arsip yang dimusnahkan berdasarkan Dokumen JRA	-			100 % 2 Laporan	100 % 2 Laporan	799.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																	
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				12 Berkas	12 Berkas	299.800,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2 Arsip	2 Arsip	499.400,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota yang telah diselamatkan Persentase Jumlah Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota yang telah diselesaikan	-			100 % 10 Surat Izin	100 % 10 Surat Izin	998.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	0 Arsip	499.200,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		Pelayanan Publik				
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				2 Arsip	2 Arsip	499.200,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Jumlah Arsip yang diselamatkan	-			100 %	100 %	2.019.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta				3 Daftar	3 Daftar	499.800,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Arsip	3 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan																	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				10 Arsip	10 Arsip	510.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				8 Arsip	8 Arsip	510.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																	
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				10 Arsip	10 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		Pelayanan Publik				
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																	
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				0 Arsip	0 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang																	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				0 Arsip	0 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																
							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				5 Arsip	5 Arsip	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
158	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Persentase Jumlah Izin yang Dikeluarkan				75 100 % %	75 100 % %	1.700.000,00	1.700.000,00	783.500,00							22.000.000,00	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Izin Penggunaan Arsip Persentase Jumlah Arsip Statis yang berhasil ditemukan	-			100 % 10 Surat Izin	100 % 10 Surat Izin	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat				2 SOP	2 SOP	1.000.000,00	1.000.000,00	83.500,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAK

							Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				AAN DAN KEARSIPAN
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																	
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				2 Arsip	2 Arsip	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Dinas Perikanan						6.844.037.398,00	6.526.814.256,00	7.394.591.446,00							6.456.905.272,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.844.037.398,00	6.526.814.256,00	7.394.591.446,00							6.456.905.272,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						6.844.037.398,00	6.526.814.256,00	7.394.591.446,00							6.456.905.272,00	
159	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	4.681.590.878,00	4.620.813.996,00	4.546.055.256,00							4.904.856.117,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	-	-			-	-	26.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelo	-		89.816.780,00	DINAS PERIKANAN

						Kinerja Perangkat Daerah													la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	950.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.539.830,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.539.830,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			6.319.850,00	DINAS PERIKANAN

							Dokumen Perubahan RKA-SKPD									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.619.960,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.319.850,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			6.619.960,00	DINAS PERIKANAN

							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											tahan dan Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	8.100.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.857.500,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.056.024.940,00	4.380.506.256,00	4.380.506.256,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.092.162.678,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.046.557.580,00	4.379.006.256,00	4.379.006.456,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.062.163.463,00	DINAS PERIKANAN

																		Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	475.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.999.695,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.467.360,00	500.000,00	462.710,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.999.780,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	475.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			9.999.740,00	DINAS PERIKANAN

							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	-	6.000.000,00	1.284.840,00	1.284.840,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		32.267.320,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	284.840,00	173.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.301.470,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.680.500,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	450.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.423.100,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	450.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.862.250,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		59.596.520,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																

							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.798.260,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	474.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.798.260,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		97.334.025,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	950.500,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN

							Administrasi Kepegawaian									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	925.750,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.724.025,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.610.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	244.815.500,00	127.102.000,00	127.102.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	-		158.551.000,00	DINAS PERIKANAN

																		tahan dan Pelayanan Publik					
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	Komponen Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.542.000,00	855.000,00	855.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.505.500,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			5.206.000,00	DINAS PERIKANAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.512.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				75 Laporan	75 Laporan	5.457.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			37.845.000,00	DINAS PERIKANAN

																		dan Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	228.799.000,00	123.425.000,00	49.337.280,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	89.471.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		93.666.050,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	89.471.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			93.666.050,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	121.772.438,00	78.488.900,00	78.488.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		152.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.172.438,00	2.188.900,00	2.188.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.600.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			92.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	125.407.000,00	26.432.000,00	26.432.000,00			-	6. Perbaikan	-		129.461.744,00	DINAS PERIKANAN

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	120.182.000,00	26.432.000,00	26.432.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.029.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.225.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.249.744,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelo			18.183.000,00	DINAS PERIKANAN

							yang Dipelihara/Direhabilitasi									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
160	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	614.190.000,00	1.586.000.200,00	2.528.764.030,00							302.050.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	514.190.000,00	1.375.956.430,00	1.375.956.430,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		202.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	39.190.000,00	8.362.430,00	7.780.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

																		peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				17 Unit	17 Unit	475.000.000,00	1.367.594.000,00	1.367.594.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			152.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	50.000.000,00	205.043.630,00	205.043.630,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyera	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

																		pan Tenaga Kerja				
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	205.043.630,00	148.474.230,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-			-	-	50.000.000,00	5.000.140,00	5.000.140,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	

							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				4 Layanan	4 Layanan	50.000.000,00	5.000.140,00	1.004.915.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
1 6 1	3	2 5	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	712.258.000,00	310.000.060,00	309.865.460,00							800.000.000,00	
	3	2 5	0 4	2. 02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	-	200.000.000,00	5.000.020,00	5.000.020,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2. 02	00 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	

							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				25 Kelompok	25 Kelompok	200.000.000,00	5.000.020,00	4.865.420,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	-	512.258.000,00	305.000.040,00	305.000.040,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)				12 Dokumen	12 Dokumen	37.258.000,00	5.100.040,00	5.100.040,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pengembangan dan Adopsi			37.258.000,00	DINAS PERIKANAN

							Daerah Kabupaten/Kota									n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	475.000.000,00	299.900.000,00	299.900.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			162.742.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningk			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN

																		atan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
162	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	835.998.520,00	10.000.000,00	9.906.700,00						449.999.155,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	-	49.999.330,00	2.424.200,00	2.424.200,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		49.999.489,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.330,00	2.424.200,00	2.424.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam			49.999.489,00	DINAS PERIKANAN

																			peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	-	249.999.400,00	2.940.000,00	2.940.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		249.999.926,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	249.999.400,00	2.940.000,00	2.846.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyera			249.999.926,00	DINAS PERIKANAN

							Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko											pan Tenaga Kerja				
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	535.999.790,00	4.635.800,00	4.635.800,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		149.999.740,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000 Ton	1.000 Ton	99.999.740,00	1.689.200,00	1.689.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	436.000.050,00	2.946.600,00	2.946.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			49.999.740,00	DINAS PERIKANAN
						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								4.851.515.980,00	5.972.794.460,00	5.965.982.730,00							8.251.133.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								4.851.515.980,00	5.972.794.460,00	5.965.982.730,00							8.251.133.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								4.851.515.980,00	5.972.794.460,00	5.965.982.730,00							8.251.133.000,00	
163	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.341.153.280,00	3.528.814.160,00	3.505.989.600,00								4.411.133.000,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	21.319.000,00	19.041.800,00	19.041.800,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		33.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

						Perangkat Daerah	yang disusun tepat waktu											dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.375.000,00	11.093.190,00	8.330.220,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			14.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.035.000,00	1.290.000,00	630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Pelayanan Publik				
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.400,00	2.135.400,00	315.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.008.600,00	1.008.600,00	1.008.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	584.000,00	596.900,00	558.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.181.000,00	2.917.710,00	2.728.950,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan	Presentase Pemenuhan Administrasi	-			100 %	100 %	3.110.446.822,00	3.339.208.280,00	3.339.208.280,00			-	3. Pengembangan	ASN Dinas Peternakan Dan		3.563.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN

						Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah											dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kesehatan Hewan			KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.102.026.422,00	3.330.753.780,00	3.330.760.710,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.550.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	6.092.800,00	6.247.700,00	5.115.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

							Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.327.600,00	2.206.800,00	1.802.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	-			100 %	100 %	6.201.130,00	6.162.500,00	6.162.500,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		22.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Penyerapan Tenaga Kerja					
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.208.500,00	1.014.600,00	918.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.565.530,00	3.582.200,00	3.118.240,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Tenaga Kerja				
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.427.100,00	1.565.700,00	981.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			2.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	10.500.000,00	11.430.000,00	11.430.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33 Paket	10.500.000,00	11.430.000,00	11.430.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	71.026.230,00	68.171.900,00	68.171.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		114.033.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Pelayanan Publik				
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Komponen											Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.033.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.476.230,00	24.675.900,00	24.553.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Pelayanan Publik				
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	273.000,00	129.000,00	129.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	504.000,00	504.000,00	453.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Pelayanan Publik				
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	41.635.000,00	39.725.000,00	25.220.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	120.370.098,00	79.458.300,00	79.458.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		163.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.540.098,00	1.238.300,00	1.238.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.030.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.800.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.290.000,00	1.771.380,00	1.771.380,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		355.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				1 Unit	1 Unit	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN

							Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									ng, Kalabbirang			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.140.000,00	1.621.380,00	1.621.380,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
164	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian/ peternakan				100 %	100 %	319.779.300,00	1.231.720.590,00	1.196.883.400,00							1.470.000.000,00	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan mikroorganisme yang di kelola	-			100 %	100 %	5.415.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyera	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		pan Tenaga Kerja					
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	5.415.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan ternak.	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan,				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	Hasil Pengelolaan Kekayaan	-	3. Pengembangan			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN

							Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)		dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																	
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningk			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		atan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	4.410.000,00	6.989.700,00	6.989.700,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		390.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Tenaga Kerja				
	3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																
							Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				1 Laporan	1 Laporan	4.410.000,00	4.555.200,00	4.472.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.434.500,00	2.430.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-			100 %	100 %	309.954.300,00	1.220.858.890,00	1.220.858.890,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari				20 Ton	20 Ton	3.008.300,00	352.818.190,00	314.329.200,00	Kab. Takalar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN

							Daerah Kabupaten/Kota Lain									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)		dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1000 Ekor	1000 Ekor	306.946.000,00	868.040.700,00	871.780.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
165	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian/ peternakan				100 %	100 %	769.801.000,00	1.172.259.840,00	1.229.154.150,00							1.510.000.000,00	

	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian/peternakan yang dibangun.	-			100 %	100 %	769.801.000,00	1.172.259.840,00	1.172.259.840,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	764.361.000,00	1.160.167.940,00	1.217.245.150,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																	
							Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan				1 Unit	1 Unit	5.440.000,00	4.198.900,00	4.016.000,00	Kab. Takalar, Polomban	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN

							dipelihara serta beroperasi									gkeng Selatan, Sialangrampai Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Kale Lantang			dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																	
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	0,00	7.893.000,00	7.893.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Pengembalaan umum yang di kembangkan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningk	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		atan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja					
	3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																	
							Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				10 Ha	10 Ha	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
166	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				100 %	100 %	400.981.400,00	19.999.980,00	16.435.690,00							490.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan	Persentase Pengendalian ,pembebasan dan penanggulangan	-			100 %	100 %	19.831.400,00	12.349.980,00	12.349.980,00			-	3. Pengembangan dan	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN

						dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kasus Penyakit Hewan Menular												Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	19.831.400,00	12.349.980,00	8.785.690,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				2 Wilayah	2 Wilayah	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyera	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		pan Tenaga Kerja				
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																
							Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang di kelola	-			100 %	100 %	381.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/ Peternak Dan Ternak		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																

							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				3 Laporan	3 Laporan	381.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/ Peternak		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																n, Semua Kel/Desa			Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
167	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase terlaksananya kegiatan perizinan				100 %	100 %	9.708.000,00	9.880.390,00	9.880.390,00							125.000.000,00	
	3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang di bina dan diawasi pelaksanaannya.	-			100 %	100 %	9.708.000,00	9.880.390,00	9.880.390,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																	
							Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas				2 Dokumen	2 Dokumen	9.708.000,00	9.880.390,00	9.880.390,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

							Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan											dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan																
							Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diawasi	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		Penyerapan Tenaga Kerja				
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
168	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan				100 %	100 %	10.093.000,00	10.119.500,00	7.639.500,00							245.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase terlaksananya kegiatan Penyuluhan Peternakan	-			100 %	100 %	10.093.000,00	10.119.500,00	10.119.500,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyera	Masyarakat/ Peternak		245.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																		pan Tenaga Kerja				
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	10.093.000,00	10.119.500,00	7.639.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

						Dinas Perindustrian dan Perdagangan							3.619.694.184,00	4.061.320.822,00	4.251.467.895,00							5.440.895.280,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.619.694.184,00	4.061.320.822,00	4.251.467.895,00							5.440.895.280,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3.599.694.184,00	4.041.320.822,00	4.139.707.895,00							5.065.895.280,00	
169	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	[deleted] PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				94 100 % %	100 94 % %	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin usaha Toko Swalayan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

							Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									Pattallassang			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
170	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI				80 %	80 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00							225.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
171	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok				1,5 %	1,5 %	15.000.000,00	15.000.000,00	10.946.750,00							100.000.000,00	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Perumusan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang				1 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.946.750,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

							dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota												dan Pelayanan Publik				
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 7 2	3	3 0	0 5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKSPOR				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00							100.000.000 ,00	
	3	3 0	0 5	2. 01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		100.000.000 ,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 5	2. 01	00 02	Pameran Dagang Nasional																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000, 00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 5	2. 01	00 03	Pameran Dagang Lokal																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam				30 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelo			50.000.000, 00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

							Pameran Dagang Lokal									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PERDAGANGAN
173	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku				60 %	60 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00							100.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				600 Unit	4 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.890.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	

							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				3 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
174	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran				30 %	30 %	0,00	0,00	0,00							25.000.000,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				25 UMKM	0 UMKM	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

																		Pelayanan Publik				
175	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.564.694.184,00	4.006.320.822,00	4.116.981.145,00							4.465.895.280,00	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	31.817.300,00	28.192.300,00	28.192.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		48.146.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.782.700,00	8.112.700,00	5.026.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan			9.271.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

							Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									ng, Pattallassang			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	6.335.900,00	6.335.900,00	3.375.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.271.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.070.000,00	3.635.000,00	1.930.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.874.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelo			3.234.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

							Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									Pattallassang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	6 Laporan	6.895.000,00	5.975.000,00	3.468.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.234.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.733.700,00	4.133.700,00	2.435.550,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.561.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	3.218.995.280,00	3.693.691.022,00	3.693.691.022,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustria		3.666.975.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

																		tahan dan Pelayanan Publik	n dan Perdagangan			
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				456 Orang/bulan	448 Orang/bulan	3.211.042.280,00	3.686.308.022,00	3.675.909.995,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.658.359.480,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.200.200,00	3.200.200,00	1.109.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				6 Laporan	18 Laporan	4.752.800,00	4.182.800,00	1.794.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			5.615.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

							Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											dan Pelayanan Publik				
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.153.800,00	2.101.800,00	2.101.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.358.900,00	1.298.900,00	1.289.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	794.900,00	802.900,00	494.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	3 0	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.747.600,00	2.667.600,00	2.667.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		89.990.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2. 05	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	2.747.600,00	2.667.600,00	2.459.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.990.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2. 05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				38 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2. 06		Administrasi Umum	Cakupan Pemenuhan	-			100 %	100 %	57.468.300,00	64.935.300,00	64.935.300,00			-	6. Perbaikan	Meningkatnya Tata Kelola		83.475.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

						Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan			PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	16.267.000,00	16.267.000,00	15.615.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.801.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.002.300,00	1.002.300,00	1.002.300,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelo			4.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

							Undangan yang Disediakan									Pattallassang			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10 Laporan	40.199.000,00	47.666.000,00	19.839.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			54.974.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		91.660.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			45.830.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

																		dan Pelayanan Publik				
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.830.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	214.741.904,00	181.102.800,00	181.102.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		117.420.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.251.904,00	4.612.800,00	4.612.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.420.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	3 0	0 1	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2 Laporan	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	24 Laporan	170.400.000,00	170.400.000,00	170.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	36.770.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan		366.427.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	36.770.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.927.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	10 Unit	0,00	0,00	166.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			166.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							20.000.000,00	20.000.000,00	111.760.000,00							375.000.000,00	
176	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah Persentase cakupan pengembangan sentra industri				50 40 30 % % %	50 40 30 % % %	10.000.000,00	10.000.000,00	105.890.000,00							175.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

						Kabupaten/Kota												tahan dan Pelayanan Publik				
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	105.890.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

																		dan Pelayanan Publik				
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				70 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
177	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.870.000,00							175.000.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

						(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota															
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.870.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standa				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelo			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

							r kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PERDAGANGAN
178	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)				25 %	25 %	0,00	0,00	0,00							25.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri	Cakupan Penyediaan Informasi Industri	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan	Meningkatnya Jumlah Industri		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

						untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengolahan dan Manufaktur			PERDAGANGAN
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Sekretariat Daerah							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00						29.323.447.109,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00						29.323.447.109,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00						29.323.447.109,00	
179	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	17.807.571.459,00	31.229.601.768,00	43.273.861.980,00						22.433.447.109,00	

						KABUPATEN /KOTA																
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	18.000.000,00	16.240.110,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	10.999.670,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	10.999.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	10.000.000,00	6.775.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.871.559.353,00	12.748.655.806,86	12.748.655.806,86			-	-	-		15.918.623.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1708 Orang/bulan	1708 Orang/bulan	10.865.649.323,00	12.392.745.776,86	12.472.700.330,45	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			15.721.123.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

																ng, Kalabbiran g	Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	8.470.070,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran g	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	910.030,00	278.910.030,00	243.599.170,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran g	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	34.000.000,00	30.864.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran g	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Kalabbirang	Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	11.000.000,00	8.795.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	8.780.090,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	153.817.000,00	153.817.000,00			-	-	-		105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	31.000.000,00	27.249.220,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

							Barang Milik Daerah pada SKPD									Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	29.817.000,00	23.516.580,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	93.000.000,00	88.018.890,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			-	-	-		2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	55.000.000,00	44.177.250,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-			-	-	9.100.000,00	122.981.670,00	122.981.670,00			-	-	-		92.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

						Perangkat Daerah																
	4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				4 Unit	4 Unit	4.300.000,00	42.349.570,00	34.107.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	4.300.000,00	80.132.100,00	50.227.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	500.000,00	500.000,00	80.050.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	21.133.000,00	1.259.508.688,00	1.259.508.688,00			-	-	-		885.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									Komponen							Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi				15 Paket	15 Paket	2.000.000,00	52.003.300,00	52.003.300,00	Kab. Takalar,	Pajak Daerah Lain-lain PAD	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									Pattallassang, Pallantikang	Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.293.000,00	90.005.388,00	174.985.388,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.100.000,00	56.070.000,00	105.063.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	854.880.000,00	2.144.570.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																ng, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.590.000,00	205.550.000,00	305.550.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	8.857.000,00	2.685.047.109,00	2.685.047.109,00			-	-	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	19.000,00	586.715.000,00	2.331.696.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.838.000,00	369.212.000,00	389.956.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	1.729.120.109,00	1.628.409.209,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.151.922.106,00	2.438.358.692,00	2.438.358.692,00			-	-	-		1.652.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00	118.241.420,00	71.345.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	832.922.106,00	185.998.272,00	185.998.272,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.062.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	751.419.000,00	2.245.183.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.313.700.000,00	1.382.700.000,00	1.704.700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	6.764.267.802,14	6.764.267.802,14			-	-	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	1.000.000,00	4.479.207.000,00	4.668.846.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	1.000.000,00	158.480.000,00	158.170.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				92 Unit	92 Unit	1.000.000,00	2.126.580.802,14	7.940.710.960,55	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	852.000.000,00	1.001.965.000,00	1.001.965.000,00			-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	151.965.000,00	402.547.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00			-	-	-		837.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.281.240.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.241.240.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			287.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	750.000.000,00	759.557.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00								29.323.447.109,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00								29.323.447.109,00	
180	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	17.807.571.459,00	31.229.601.768,00	43.273.861.980,00								22.433.447.109,00	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00			-	-	-			837.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00								29.323.447.109,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							22.528.498.209,00	36.070.977.218,00	49.227.486.570,00								29.323.447.109,00	
181	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	17.807.571.459,00	31.229.601.768,00	43.273.861.980,00								22.433.447.109,00	

						KABUPATEN /KOTA																
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.067.000,00	12.067.000,00	8.340.320,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	22.733.000,00	22.733.000,00	16.720.670,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	15.298.000,00	15.298.000,00	10.236.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	14.902.000,00	14.902.000,00	11.000.170,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	65.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00			-	-	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	309.659.970,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	14.997.400,00	14.997.400,00	9.169.100,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	25.002.600,00	25.002.600,00	69.392.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1 8 2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	4.525.926.750,00	4.539.657.450,00	5.540.943.620,00							5.900.000.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata	-	-			-	-	48.516.810,00	48.516.810,00	48.516.810,00			-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

						Pemerintahan																
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	24.248.430,00	27.631.930,00	79.883.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				6 Dokumen	6 Dokumen	12.619.180,00	9.235.680,00	45.046.370,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.649.200,00	11.649.200,00	35.406.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	-	4.189.046.000,00	4.259.657.450,00	4.259.657.450,00			-	-	-		4.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	4.187.046.000,00	4.257.657.450,00	5.157.027.190,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Hasil	-	-			4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																n, Semua Kel/Desa	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	652.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	652.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	-	271.880.750,00	215.000.000,00	215.000.000,00			-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				600 Dokumen	600 Dokumen	104.074.100,00	59.000.000,00	34.397.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	102.806.650,00	91.000.000,00	125.512.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				600 Dokumen	600 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	39.331.260,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	-	16.483.190,00	16.483.190,00	16.483.190,00			-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6 Dokumen	6 Dokumen	12.303.190,00	12.303.190,00	20.061.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	2 Laporan	4.180.000,00	4.180.000,00	2.974.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
183	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	195.000.000,00	301.718.000,00	412.680.970,00							990.000.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan	-	-			-	-	32.626.000,00	32.626.000,00	32.626.000,00			-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

						Perekonomian																
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.894.000,00	10.894.000,00	39.405.160,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	10.948.000,00	10.948.000,00	163.870.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	10.784.000,00	10.784.000,00	6.934.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program				2 Dokumen	2 Dokumen	21.688.000,00	21.688.000,00	12.789.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

							Pembangunan Daerah									n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	21.859.000,00	21.859.000,00	13.308.350,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	21.453.000,00	21.453.000,00	14.471.630,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	-	65.000.000,00	171.718.000,00	171.718.000,00			-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	4 Dokumen	21.633.000,00	24.433.000,00	14.646.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				800 Dokumen	800 Dokumen	22.073.000,00	24.873.000,00	13.319.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang,	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Kalabbiran g	Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				6 Orang	6 Orang	21.294.000,00	122.412.000,00	109.578.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran g	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	-	32.374.000,00	32.374.000,00	32.374.000,00			-	-	-			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	10.776.000,00	10.776.000,00	6.017.340,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.798.000,00	10.798.000,00	9.024.370,00	Kab. Takalar, Semua	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

							Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian								Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)						
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	9.316.320,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRD							25.899.451.079,00	37.080.972.566,00	36.940.500.236,00							16.677.218.500,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							25.899.451.079,00	37.080.972.566,00	36.940.500.236,00							16.677.218.500,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							25.899.451.079,00	37.080.972.566,00	36.940.500.236,00							16.677.218.500,00	
184	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	22.311.695.479,00	24.517.302.916,00	24.746.011.696,00							10.142.216.500,00	

						KABUPATEN /KOTA																
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	43.506.630,00	203.280.380,00	203.280.380,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.995.000,00	51.142.380,00	50.988.040,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.247.500,00	32.599.000,00	27.168.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamata	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																n, Semua Kel/Desa						
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	4.998.600,00	29.095.500,00	24.944.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.215.590,00	28.686.100,00	24.813.670,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.998.900,00	26.774.500,00	22.158.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																		Pelayanan Publik				
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.999.840,00	27.707.900,00	27.707.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.051.200,00	7.275.000,00	3.241.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.978.504.080,00	4.526.992.632,00	4.526.992.632,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	-		5.384.666.300,00	SEKRETARIAT DPRD

																		dan Pelayanan Publik					
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.946.422.100,00	4.369.885.232,00	4.369.885.232,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.294.666.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.740,00	22.828.900,00	20.289.040,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.659.890,00	57.910.000,00	58.218.680,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.993.400,00	36.539.400,00	36.384.730,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.050,00	3.704.500,00	3.544.120,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				4 Laporan	4 Laporan	6.937.000,00	31.632.700,00	27.684.580,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											tahan dan Pelayanan Publik				
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.491.900,00	4.491.900,00	520.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.928.700,00	50.955.000,00	50.955.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.981.900,00	26.210.600,00	23.720.240,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																		Pelayanan Publik				
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.946.800,00	24.744.400,00	23.161.120,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	16.102.700,00	104.037.300,00	104.037.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		779.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	4.984.000,00	36.097.600,00	34.452.610,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	4.960.000,00	33.254.000,00	33.254.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	1.160.700,00	1.259.700,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			354.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	4.998.000,00	33.426.000,00	33.426.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	241.962.790,00	683.647.800,00	683.647.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		560.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											Komponen						Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14.883.000,00	15.133.000,00	15.133.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	32.553.690,00	330.247.100,00	637.547.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.243.600,00	20.320.800,00	30.976.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.325.000,00	31.115.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				55 Dokumen	55 Dokumen	72.000.000,00	112.365.000,00	106.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	76.800.000,00	86.868.000,00	86.868.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	15.157.500,00	87.598.900,00	86.907.880,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	34.151.370,00	34.151.370,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	34.151.370,00	34.151.370,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.082.310.800,00	719.542.300,00	719.542.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.035.967.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.217.200,00	10.002.700,00	7.094.740,00	Kab. Takalar, Semua	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12 Laporan	463.893.600,00	54.339.600,00	54.339.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			451.652.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	613.200.000,00	655.200.000,00	655.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			569.315.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-			-	-	400.770.000,00	1.425.807.000,00	1.425.807.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	-		1.119.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD

						Pemerintahan Daerah													tahan dan Pelayanan Publik				
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	313.820.000,00	334.910.000,00	334.910.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			714.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6 Unit	49.400.000,00	1.035.097.000,00	1.035.097.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	37.550.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																		dan Pelayanan Publik				
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	16.164.135.379,00	16.168.972.734,00	16.168.972.734,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		520.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	15.675.935.379,00	15.683.547.734,00	15.683.547.734,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	384.600.000,00	381.825.000,00	381.825.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			460.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	103.600.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	-	374.474.400,00	599.916.400,00	599.916.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		548.113.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	34.459.200,00	152.359.800,00	143.408.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	40.200.900,00	84.805.000,00	84.491.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			159.273.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	299.814.300,00	362.751.600,00	362.751.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
185	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	3.587.755.600,00	12.563.669.650,00	12.194.488.540,00							6.535.002.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	433.862.490,00	2.045.651.650,00	2.045.651.650,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		1.330.948.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																		Pelayanan Publik				
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	155.372.300,00	466.752.900,00	464.917.270,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			137.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20 Dokumen	9 Dokumen	169.116.900,00	1.317.484.390,00	1.313.025.020,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			657.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	14.195.590,00	15.783.100,00	13.944.810,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			131.048.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																		Pelayanan Publik				
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Naskah Akademik								Penyusunan								Penjelasan/Keterangan
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	90.096.200,00	241.219.000,00	236.132.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.081.500,00	4.412.260,00	1.222.760,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	212.591.110,00	176.427.000,00	176.427.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.563.577.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	35.251.500,00	33.319.000,00	27.720.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	30.016.500,00	30.355.000,00	26.408.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			68.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.827.000,00	24.437.500,00	21.837.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			437.978.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.110,00	30.922.500,00	27.683.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			319.949.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	23.848.200,00	26.905.200,00	16.766.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.087.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	42.647.800,00	30.487.800,00	28.523.680,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			628.963.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	51.022.300,00	1.926.366.900,00	1.926.366.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	5.686.100,00	13.809.300,00	13.320.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	5.686.100,00	13.851.000,00	12.750.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	

							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	5 Laporan	5.686.100,00	13.794.900,00	12.750.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	5.653.100,00	13.732.900,00	12.750.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				5 Laporan	5 Laporan	5.405.700,00	13.731.600,00	13.507.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.550.800,00	13.682.100,00	12.750.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	4 Dokumen	11.905.900,00	1.829.786.000,00	1.669.913.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah								Laporan										Keterangan
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.448.500,00	13.979.100,00	13.542.580,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	862.898.300,00	2.075.463.500,00	2.075.463.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.180.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	451.380.000,00	1.246.910.000,00	1.119.822.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			875.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																	
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	

							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	9 Orang	252.000.000,00	327.600.000,00	327.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	5.010.600,00	25.171.700,00	20.053.020,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.007.700,00	3.053.000,00	1.481.170,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	

							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				453 Dokumen	453 Dokumen	49.500.000,00	412.728.800,00	411.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	1.527.610.800,00	1.993.619.800,00	1.993.619.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.492.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	11.500.000,00	33.320.000,00	27.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																	
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok				1 Dokumen	1 Dokumen	11.979.200,00	2.043.200,00	1.377.130,00	Kab. Takalar, Semua	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

							Pikiran DPRD yang Disusun									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																	
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.504.131.600,00	1.958.256.600,00	1.942.185.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.430.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	-	8.631.600,00	4.365.800,00	4.365.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		39.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				10	10	4.285.300,00	2.303.800,00	416.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			29.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																		tahan dan Pelayanan Publik					
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	4.346.300,00	2.062.000,00	416.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	491.139.000,00	4.341.775.000,00	4.341.775.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		688.602.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	50 Dokumen	491.139.000,00	4.341.775.000,00	4.342.675.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			688.602.000,00	SEKRETARIAT DPRD

																		Pelayanan Publik				
						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							5.215.243.596,00	6.028.925.697,00	6.571.842.869,00						5.347.742.258,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.215.243.596,00	6.028.925.697,00	6.571.842.869,00						5.347.742.258,00	
	5	01				PERENCANAAN							4.915.245.896,00	5.518.925.717,00	5.719.059.489,00						5.347.742.258,00	
186	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.842.885.866,00	4.194.141.707,00	4.182.475.219,00						4.149.742.258,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	50.634.500,00	61.052.930,00	61.052.930,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.092.500,00	12.999.140,00	12.999.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pelayanan Publik				NGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.372.100,00	8.790.500,00	8.790.510,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.600,00	6.999.240,00	6.999.130,00	-	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.992.800,00	9.819.000,00	9.818.800,00	-	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																		Pelayanan Publik				NGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.361.700,00	7.000.150,00	7.000.150,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.815.800,00	10.000.100,00	9.877.010,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	5.444.800,00	5.444.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																		Pelayanan Publik				NGAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	-			100 %	100 %	3.256.583.466,00	3.531.237.187,00	3.531.237.187,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		4.125.542.258,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.226.697.426,00	3.490.896.317,00	3.512.976.319,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.125.542.258,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1200 Dokumen	1200 Dokumen	14.406.900,00	19.527.950,00	17.515.610,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.433.650,00	13.999.890,00	13.999.890,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.045.490,00	6.813.030,00	6.309.030,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	-			100 %	100 %	39.404.400,00	24.280.400,00	24.280.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.679.000,00	12.948.100,00	11.175.260,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.815.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	30 Laporan	17.910.400,00	11.332.300,00	9.682.320,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi	-			100 %	100 %	9.391.200,00	41.141.100,00	41.141.100,00			-	6. Perbaikan	Bappelitbangda Kab. Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN

						Perangkat Daerah	kepegawaian perangkat daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	11.430.000,00	11.430.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	9.391.200,00	29.711.100,00	24.499.460,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	-	-	6. Perbaikan Tatakelo			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGU

							Peraturan Perundang-Undangan									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				NAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	248.221.900,00	340.235.500,00	340.235.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Komponen							Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.530.000,00	6.530.000,00	6.530.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.946.900,00	183.691.500,00	233.339.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIA

																		tahan dan Pelayanan Publik				N DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					NON URUSAN							5.215.243.596,00	6.028.925.697,00	6.571.842.869,00							5.347.742.258,00	
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.915.245.896,00	5.518.925.717,00	5.719.059.489,00							5.347.742.258,00	
187	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.842.885.866,00	4.194.141.707,00	4.182.475.219,00							4.149.742.258,00	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	248.221.900,00	340.235.500,00	340.235.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Bappelitbangda Kab. Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																		Pelayanan Publik				NGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.215.243.596,00	6.028.925.697,00	6.571.842.869,00							5.347.742.258,00	
	5	01				PERENCANAAN						4.915.245.896,00	5.518.925.717,00	5.719.059.489,00							5.347.742.258,00	
188	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.842.885.866,00	4.194.141.707,00	4.182.475.219,00							4.149.742.258,00	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	248.221.900,00	340.235.500,00	340.235.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	40 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																		Pelayanan Publik				NGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	228.745.000,00	140.014.000,00	67.894.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	173.690.400,00	85.401.810,00	85.401.810,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	106.490.400,00	18.201.810,00	18.201.810,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan	-			100 %	100 %	64.960.000,00	110.792.780,00	110.792.780,00			-	6. Perbaikan	Bappelitbangda Kab. Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	50.340.000,00	35.980.000,00	35.980.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.620.000,00	74.812.780,00	74.812.780,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
189	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Capaian kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja Perangkat Daerah				94 100 % %	94 100 % %	727.424.330,00	1.039.783.980,00	1.356.138.370,00							1.198.000.000,00	

						PEMBANGUNAN DAERAH																
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Program / kegiatan / Sub Kegiatan RKPD dengan kegiatan APBD	-			100 %	100 %	525.537.090,00	719.830.780,00	719.830.780,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		793.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	9.999.720,00	70.948.300,00	54.577.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																	
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.770,00	25.310.660,00	25.310.660,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.999.780,00	45.578.300,00	45.578.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.999.840,00	36.113.100,00	19.493.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	85.582.300,00	82.880.340,00	60.220.530,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1200 Usulan	1200 Usulan	34.999.980,00	41.323.980,00	17.813.980,00	-	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	3 Dokumen	314.955.700,00	417.676.100,00	465.672.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			588.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan dan akses data/informasi perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan dan akses data/informasi perencanaan	-			100 %	100 %	105.713.770,00	191.045.300,00	191.045.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

							pembangunan daerah														
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	5 Dokumen	49.999.970,00	51.944.300,00	51.944.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah															
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				35 Orang	35 Orang	55.713.800,00	139.101.000,00	59.601.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai standar Persentase perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang	-			100 %	100 %	63.503.570,00	90.918.000,00	90.918.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

							terkordinasi dengan baik															
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	29.990.020,00	38.290.080,00	28.615.080,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	33.513.550,00	52.627.920,00	506.041.620,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah Persentase penerapan Sistem Informasi Pemerintahan	-			100 %	100 %	32.669.900,00	37.989.900,00	37.989.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

							Daerah Bidang Pembangunan Daerah																
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				300 Dokumen	300 Dokumen	32.669.900,00	37.989.900,00	21.269.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
190	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 %	100 %	344.935.700,00	285.000.030,00	180.445.900,00							0,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	-			100 %	100 %	114.080.200,00	114.080.200,00	114.080.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19 Dokumen	19 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	59.485.000,00	59.485.000,00	33.885.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

							Pembangunan Manusia															
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	54.595.200,00	54.595.200,00	48.176.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang terkordinasi dengan baik	-			100 %	100 %	108.623.200,00	55.272.000,00	55.272.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	55.272.000,00	55.272.000,00	26.442.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	53.351.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang terkordinasi dengan baik	-			100 %	100 %	122.232.300,00	115.647.830,00	115.647.830,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	

							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	54.985.700,00	54.985.700,00	38.045.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	67.246.600,00	60.662.130,00	33.896.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							299.997.700,00	509.999.980,00	852.783.380,00							0,00	
191	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan				100 %	100 %	299.997.700,00	509.999.980,00	852.783.380,00							0,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase peningkatan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-			20 %	20 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																	
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

							Peraturan yang Diterbitkan												Pelayanan Publik				NGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-			20 %	20 %	130.000.900,00	200.000.100,00	200.000.100,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	169.925.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.900,00	200.000.100,00	304.921.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase peningkatan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan	-			20 %	20 %	115.297.600,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	58.834.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	56.462.700,00	200.000.000,00	188.877.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	99.999.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi dan kelitbangan	-			100 %	100 %	54.699.200,00	109.999.880,00	109.999.880,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Takalar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan				1 Laporan	1 Laporan	49.999.200,00	90.000.080,00	70.300.080,00	Kab. Takalar, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaann	-	6. Perbaikan			0,00	BADAN PERENCANAAN

							Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									Kecamatan, Semua Kel/Desa	ya Bidang Pendidikan		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	4.700.000,00	19.999.800,00	18.759.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	-	-	6. Perbaikan Tatakelo			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGU

							Kekayaan Intelektual								n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				NAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Badan Keuangan dan Aset Daerah						192.837.663.268,00	191.457.207.148,00	189.592.572.318,81							214.041.204.814,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						192.837.663.268,00	191.457.207.148,00	189.592.572.318,81							214.041.204.814,00	
	5	02				KEUANGAN						192.837.663.268,00	191.457.207.148,00	189.592.572.318,81							214.041.204.814,00	
192	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	25.358.155.973,00	22.241.355.340,00	20.905.663.070,81							28.872.755.248,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	354.150.000,00	374.322.440,00	374.322.440,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		354.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							BKAD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	58.570.000,00	64.732.040,00	62.356.940,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	29.580.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	44.525.700,00	33.988.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.028.500,00	27.225.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	43.456.200,00	33.960.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	107.580.000,00	107.580.000,00	97.157.030,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			67.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	21.924.387.033,00	15.018.524.460,00	15.018.524.460,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		21.611.890.048,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	21.511.056.733,00	14.605.205.100,00	13.680.915.810,81	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	59.361.700,00	59.361.700,00	50.380.290,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			77.360.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12000 Dokumen	12000 Dokumen	109.217.900,00	109.207.190,00	95.095.590,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.321.130,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	51.672.010,00	51.671.850,00	41.569.350,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.672.154,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.536.380,00	52.536.310,00	32.870.510,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			82.536.514,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	50.004.050,00	50.004.050,00	41.639.450,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	55.000.300,00	55.000.300,00	48.422.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	35.537.960,00	35.537.960,00	34.349.360,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan administrasi barang milik daerah lingkup BKAD Persentase cakupan	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	228.522.900,00	245.440.900,00	245.440.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	Lingkup BKAD		306.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah											dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.965.100,00	28.268.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.081.700,00	34.541.100,00	23.417.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.000.000,00	29.760.700,00	30.264.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			32.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																		Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.664.000,00	23.984.900,00	25.586.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	49.782.800,00	52.633.400,00	49.499.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	37.203.000,00	33.957.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			38.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																		Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.494.400,00	36.352.700,00	24.034.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	172.908.700,00	170.294.000,00	170.294.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		613.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			104.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.992.800,00	36.596.400,00	26.673.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	101.915.900,00	101.921.600,00	103.787.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			169.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	10.776.000,00	10.176.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen hasil kegiatan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.151.815.300,00	764.429.700,00	764.429.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		2.716.399.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Komponen											Instalasi

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.627.400,00	14.450.900,00	14.450.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	361.295.000,00	0,00	34.159.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.333.400,00	24.025.200,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	141.664.000,00	68.587.900,00	132.910.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			87.384.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	123.000.000,00	123.000.000,00	63.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			169.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.120.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.320.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	421.300.000,00	447.653.000,00	220.642.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.053.035.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.995.500,00	39.092.700,00	30.059.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	-			100 % 3 paket	100 % 3 paket	195.605.000,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		227.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau				3 Unit	3 Unit	195.605.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			156.000.000,00	BADAN KEUANGAN

							Lapangan yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan hasil kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 % 2 Laporan	100 % 2 Laporan	935.767.040,00	5.557.083.840,00	5.557.083.840,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		1.287.160.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				12 Laporan	12 Laporan	296.264.000,00	4.976.380.800,00	4.976.380.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			641.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							dan Listrik yang Disediakan									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	639.503.040,00	580.703.040,00	555.503.040,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			645.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	395.000.000,00	111.260.000,00	111.260.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lingkup BKAD		1.756.106.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				28 Unit	28 Unit	124.670.000,00	111.260.000,00	111.260.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelo			160.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	58.820.000,00	0,00	14.620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.260.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	154.660.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola			1.270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Dipelihara/Direhabilitasi									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	56.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			227.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
193	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen APBD tepat waktu				100 %	100 %	166.247.174.315,00	168.203.851.818,00	167.879.264.258,00							182.591.957.300,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen APBD Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	1.318.914.400,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		3.110.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	115.000.000,00	132.000.000,00	Kab. Takalar, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan			175.000.000,00	BADAN KEUANGAN

																Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	110.000.000,00	118.790.850,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	140.980.000,00	160.000.000,00	76.312.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	124.571.040,00	160.000.000,00	139.170.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelo			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	90.000.000,00	100.000.000,00	71.214.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	90.000.000,00	100.000.000,00	112.329.030,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala				2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	140.000.000,00	105.110.210,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Daerah tentang Penjabaran APBD									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	160.000.000,00	144.906.840,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	70.040.000,00	100.000.000,00	68.442.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.323.360,00	155.000.000,00	144.460.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	100.000.000,00	108.185.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	125.000.000,00	200.000.000,00	401.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																		dan Pelayanan Publik				
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen hasil kegiatan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)	-			100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	1.733.094.200,00	1.225.951.000,00	1.225.951.000,00			-	-	OPD		1.731.497.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	199.701.400,00	199.701.400,00	140.744.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-			209.366.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	2 Laporan	52.108.400,00	52.108.400,00	30.334.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			39.930.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																		tahan dan Pelayanan Publik					
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				840 Dokumen	840 Dokumen	109.676.000,00	109.676.000,00	119.902.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			226.270.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				5000 Dokumen	5000 Dokumen	73.407.600,00	73.407.600,00	51.301.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			106.480.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi				26 Dokumen	26 Dokumen	115.202.000,00	115.202.000,00	82.174.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			133.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												dan Pelayanan Publik				
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	10.730.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.686.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas				48 Laporan	48 Laporan	212.473.600,00	212.473.600,00	158.968.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			226.270.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	41.640.200,00	41.640.200,00	30.682.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.240.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				184 Dokumen	184 Dokumen	133.036.000,00	133.036.000,00	93.580.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			199.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	

							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.765.800,00	32.765.800,00	24.905.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			113.135.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	733.083.200,00	225.940.000,00	443.057.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			359.370.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah Persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	1.243.229.620,00	974.251.220,00	974.251.220,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		1.385.308.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	1 Laporan	76.014.720,00	76.014.720,00	53.850.430,00	Kab. Takalar,	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaika			46.585.000,00	BADAN KEUANGAN

							Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				300 Dokumen	300 Dokumen	201.005.100,00	182.710.900,00	201.491.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			346.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																	
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				19 Laporan	19 Laporan	122.970.700,00	56.742.000,00	41.296.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			266.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang				2 Dokumen	2 Dokumen	168.838.800,00	168.838.800,00	198.252.640,00	Kab. Takalar, Semua	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan			190.333.000,00	BADAN KEUANGAN

							Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	430.504.000,00	304.504.000,00	275.451.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			199.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									Analisis								Laporan
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	165.861.000,00	120.788.000,00	102.104.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			106.480.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	78.035.300,00	64.652.800,00	336.737.260,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-			4 kegiatan	4 kegiatan	161.141.936.095,00	163.493.649.598,00	163.493.649.598,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		175.424.721.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.977.668.185,00	12.096.567.195,00	12.096.567.195,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.473.437.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	

							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	139.253.523.000,00	143.886.337.500,00	143.199.859.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			133.304.589.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000.000,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3.110.744.910,00	3.110.744.903,00	3.110.744.903,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.646.694.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementas	Persentase data yang telah diolah dan	-			100 %	100 %	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00			-	6. Perbaikan	OPD		939.930.000,00	BADAN KEUANGAN

						i Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.930.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	954.007.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
194	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu				100 %	100 %	1.232.332.980,00	1.011.999.990,00	807.644.990,00							2.576.492.266,00	

	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase cakupan pengelolaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	1.232.332.980,00	1.011.999.990,00	1.011.999.990,00			-	-	OPD		2.576.492.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	216.107.300,00	216.023.300,00	193.176.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			581.438.117,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.330.800,00	19.218.800,00	16.102.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			103.640.027,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.378.580,00	26.334.790,00	23.022.590,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			131.745.797,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.052.400,00	36.940.400,00	17.963.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			131.745.797,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	109.650.000,00	94.048.000,00	50.724.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			434.967.573,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	61.799.000,00	19.732.000,00	17.726.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			240.655.656,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	169.044.100,00	39.432.100,00	31.478.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			189.713.948,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	159.895.300,00	191.839.300,00	153.566.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			205.874.257,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				38 Dokumen	38 Dokumen	57.382.200,00	48.831.200,00	30.791.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			156.086.764,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	83.782.100,00	21.809.500,00	17.283.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			149.679.955,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	292.911.200,00	297.790.600,00	255.810.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.944.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah							8.579.994.825,00	10.911.032.803,00	10.039.300.193,00							0,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.579.994.825,00	10.911.032.803,00	10.039.300.193,00							0,00	
	5	02				KEUANGAN							8.579.994.825,00	10.911.032.803,00	10.039.300.193,00							0,00	
195	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	6.051.792.325,00	8.285.319.903,00	7.769.494.053,00							0,00	

						KABUPATEN /KOTA																
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE PEMENUHAN KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	-			100 %	100 %	171.090.140,00	140.569.260,00	140.569.260,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	42.045.840,00	38.729.400,00	28.380.320,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.310.000,00	11.155.400,00	10.086.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	25.904.000,00	18.279.000,00	17.821.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.010,00	5.326.500,00	4.834.500,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	7.276.800,00	5.439.990,00	4.218.380,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	36.651.500,00	37.484.370,00	31.743.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	26.901.990,00	24.154.600,00	31.936.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			98 %	98 %	3.927.215.393,00	5.998.274.003,00	5.998.274.003,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700 Orang/bulan	700 Orang/bulan	3.786.709.833,00	5.891.176.103,00	5.965.010.933,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.138.300,00	22.128.000,00	51.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.040,00	13.900.300,00	32.580.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	1 Laporan	31.027.670,00	27.283.400,00	27.283.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.654.050,00	22.443.400,00	25.190.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20 Laporan	38.685.500,00	21.342.800,00	16.672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Pemenuhan Administrasi	-			90 %	90 %	25.719.670,00	23.110.590,00	23.110.590,00			-	6. Perbaikan	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

						Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.601.000,00	4.928.100,00	4.163.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.998.670,00	5.360.200,00	5.173.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	4.754.400,00	4.516.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

							Milik Daerah pada SKPD									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.120.000,00	8.067.890,00	9.096.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	67.451.000,00	91.405.300,00	91.405.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	2 Paket	38.100.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																		dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.055.000,00	26.346.300,00	34.009.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	19.296.000,00	25.909.000,00	22.909.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			96 %	96 %	458.062.000,00	1.106.870.750,00	1.106.870.750,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Komponen												Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.403.000,00	3.028.700,00	3.028.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.269.000,00	707.879.050,00	707.879.050,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.671.000,00	3.825.700,00	3.825.700,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	10.023.000,00	5.742.400,00	5.742.400,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	9.153.000,00	4.056.900,00	4.056.900,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	397.543.000,00	372.338.000,00	253.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Mebel	-			5 Paket	5 Paket	5.100.000,00	22.295.000,00	22.295.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	5.100.000,00	22.295.000,00	22.295.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	-			60 Laporan	60 Laporan	947.078.522,00	837.927.000,00	837.927.000,00			-	6. Perbaikan	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

						Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	109.151.522,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	48 Laporan	837.927.000,00	837.927.000,00	327.600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Penunjang	-			24 Laporan	24 Laporan	450.075.600,00	64.868.000,00	64.868.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

						Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Daerah											tahan dan Pelayanan Publik					
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	399.999.600,00	40.938.000,00	40.938.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	16 Unit	50.076.000,00	23.930.000,00	23.930.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
196	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				100 %	-	2.528.202.500,00	2.625.712.900,00	2.269.806.140,00							0,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-			98 %	98 %	2.528.202.500,00	2.625.712.900,00	2.625.712.900,00			-	6. Perbaikan Tatakelo	Wajib Pajak, Wajib Retribusi, Objek Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																		la Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dan Subjek Pajak			
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	90.000.000,00	100.479.700,00	40.385.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	48.283.500,00	144.050.600,00	133.220.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	132.387.700,00	49.628.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan	-	6. Perbaikan Tatakelola			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

							Kebijakan Pajak Daerah									n, Semua Kel/Desa	Bagi Hasil Pajak Rokok		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				50 Unit	50 Unit	650.000.000,00	214.100.000,00	212.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				60000 Laporan	60000 Laporan	80.000.000,00	188.646.100,00	129.862.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	40.000.000,00	29.016.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2000 Obyek Pajak	2000 Obyek Pajak	75.000.000,00	64.918.300,00	64.918.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				60000 Dokumen	60000 Dokumen	210.000.900,00	396.445.600,00	347.098.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3000 Layanan	3000 Layanan	35.000.000,00	69.000.000,00	61.582.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																		dan Pelayanan Publik				
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				500 Dokumen	500 Dokumen	85.000.000,00	122.832.000,00	94.606.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				170000 Dokumen	170000 Dokumen	769.917.000,00	851.507.000,00	862.533.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																		Pelayanan Publik				
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	118.188.900,00	125.213.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	145.000.900,00	37.000.000,00	30.126.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	136.157.000,00	78.922.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																		Pelayanan Publik				
						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						5.662.756.564,00	6.340.991.399,00	5.927.762.783,00							5.601.171.899,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.662.756.564,00	6.340.991.399,00	5.927.762.783,00							5.601.171.899,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						4.097.944.354,00	5.364.979.499,00	5.266.457.003,00							5.394.171.899,00	
197	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	4.002.541.724,00	4.756.076.469,00	4.716.669.933,00							5.157.672.899,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.292.100,00	11.157.100,00	11.157.100,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

																		Pelayanan Publik				
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.101.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.030.500,00	2.715.500,00	2.715.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	3.804.379.080,00	4.502.077.499,00	4.502.077.499,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.704.512.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.802.114.580,00	4.497.309.599,00	4.487.419.163,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.674.512.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	191.800,00	191.800,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				4 Laporan	4 Laporan	1.572.700,00	2.117.100,00	2.117.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											tahan dan Pelayanan Publik				DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10	10	500.000,00	2.459.000,00	2.459.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		117.406.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			117.406.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

																		Pelayanan Publik				
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	44.015.060,00	149.771.370,00	149.771.370,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		84.998.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	2.190.000,00	13.890.000,00	13.890.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.060,00	13.156.370,00	14.365.070,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	33.705.000,00	119.605.000,00	89.072.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.998.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	37.616.000,00	43.743.000,00	43.743.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	37.616.000,00	43.743.000,00	43.743.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	100.641.984,00	42.000.000,00	42.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		102.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.641.984,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				5 Laporan	5 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

							Kantor yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	7.410.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		18.755.374,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	7.410.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.755.374,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
198	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	99.402.730,00	612.903.130,00	553.787.170,00							243.499.000,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-			-	-	31.345.130,00	273.231.330,00	273.231.330,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

						Kepegawaian ASN													Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	3.009.400,00	53.246.400,00	28.991.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																	
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.230,00	130.703.230,00	111.843.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	8.765.000,00	28.030.000,00	19.480.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi	-	6. Perbaikan Tatakelo			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA

															n, Semua Kel/Desa	Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.989.000,00	59.043.700,00	49.703.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				20 Dokumen	20 Dokumen	7.830.000,00	800.000,00	5.665.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				50	50	751.500,00	1.408.000,00	13.283.000,00	-	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

																Dana Alokasi Umum (DAU)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	-	33.047.100,00	133.851.300,00	133.851.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Dokumen	500 Dokumen	13.047.200,00	13.857.200,00	13.857.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				600 Dokumen	600 Dokumen	10.000.190,00	109.998.590,00	59.376.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			64.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

																		Pelayanan Publik				
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	9.999.710,00	9.995.510,00	9.995.510,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	-	28.075.000,00	199.210.000,00	199.210.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	5.747.700,00	184.892.700,00	225.622.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center																
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				9 Dokumen	9 Dokumen	8.900.000,00	7.090.000,00	5.230.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	10 Orang	1.027.300,00	1.027.300,00	1.027.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				12 Dokumen	12 Dokumen	12.400.000,00	6.200.000,00	3.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	-	6.935.500,00	6.610.500,00	6.610.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.999.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	3.870.400,00	3.620.400,00	3.620.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.592.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																	
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				100 Orang	100 Orang	1.030.600,00	1.030.600,00	1.030.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.043.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN																	

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				5 Laporan	5 Laporan	2.034.500,00	1.959.500,00	1.959.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.560.812.110,00	972.011.800,00	657.305.680,00							200.000.000,00	
199	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	1.560.812.110,00	972.011.800,00	657.305.680,00							200.000.000,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	-	1.560.812.110,00	972.011.800,00	972.011.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																	
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				21 Orang	21 Orang	1.560.812.110,00	972.011.800,00	657.305.680,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

																		Pelayanan Publik				
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						4.000.100,00	4.000.100,00	4.000.100,00							7.000.000,00	
200	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	4.002.541.724,00	4.756.076.469,00	4.716.669.933,00							5.157.672.899,00	
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.292.100,00	11.157.100,00	11.157.100,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.100,00	4.000.100,00	4.000.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Inspektorat							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00							17.775.613.120,00	

	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00							17.775.613.120,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00							17.775.613.120,00	
201	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	10.645.310.460,00	11.276.705.552,00	10.461.749.915,00							11.195.313.120,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.960.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00			-	-	-		37.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	8.058.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	INSPEKTORAT
	6					NON URUSAN							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00							17.775.613.120,00	
	6	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00							17.775.613.120,00	
202	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	10.645.310.460,00	11.276.705.552,00	10.461.749.915,00							11.195.313.120,00	

						KABUPATEN /KOTA																	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.960.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00			-	-	-		37.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00							17.775.613.120,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00							17.775.613.120,00	
203	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	10.645.310.460,00	11.276.705.552,00	10.461.749.915,00							11.195.313.120,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	52.960.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00			-	-	-		37.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.696.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT

							Dokumen RKA-SKPD									n, Semua Kel/Desa							
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.696.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				1 Laporan	1 Laporan	7.960.000,00	7.500.000,00	3.696.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT

							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									n, Semua Kel/Desa							
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.700.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.436.240.460,00	7.888.904.952,00	7.888.904.952,00			-	-	-		7.687.613.120,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	63 Orang/bulan	6.421.240.460,00	7.878.404.952,00	7.885.169.855,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.672.613.120,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	2.750.000,00	1.710.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT

	6					NON URUSAN							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00								17.775.613.120,00	
	6	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00								17.775.613.120,00	
204	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	10.645.310.460,00	11.276.705.552,00	10.461.749.915,00								11.195.313.120,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.436.240.460,00	7.888.904.952,00	7.888.904.952,00			-	-	-			7.687.613.120,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00								17.775.613.120,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							16.521.240.460,00	17.929.404.952,00	13.932.933.915,00								17.775.613.120,00	
205	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	10.645.310.460,00	11.276.705.552,00	10.461.749.915,00								11.195.313.120,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.436.240.460,00	7.888.904.952,00	7.888.904.952,00			-	-	-			7.687.613.120,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.960.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.750.000,00	1.710.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	15.000.000,00	8.255.200,00	8.255.200,00			-	-	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.960.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.450.200,00	966.100,00	Kab. Takalar,	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT

							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.441.821.400,00	1.461.324.000,00	1.461.324.000,00			-	-	-		1.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	95.304.000,00	95.304.000,00	95.304.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	826.577.000,00	1.094.870.000,00	825.150.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis				58 Orang	58 Orang	519.940.400,00	271.150.000,00	156.004.000,00	Kab. Takalar, Semua	Pajak Daerah	-	-			500.000.000,00	INSPEKTORAT

							Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.138.425.400,00	780.826.400,00	780.826.400,00			-	-	-		915.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																Komponen Instalasi	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.161.000,00	13.161.000,00	13.161.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.764.500,00	5.764.500,00	5.764.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.928.400,00	67.047.400,00	55.811.810,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan				1 Paket	1 Paket	22.498.500,00	22.498.500,00	9.695.750,00	Kab. Takalar,	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT

							Penggandaan yang Disediakan									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	1.000.073.000,00	642.355.000,00	283.993.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.049.695.200,00	679.425.000,00	679.425.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				1 Unit	1 Unit	586.696.000,00	101.676.000,00	101.676.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola			600.000.000,00	INSPEKTORAT

							Dinas Jabatan yang Disediakan									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	78.063.200,00	89.468.000,00	89.468.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	384.936.000,00	488.281.000,00	488.281.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	277.778.000,00	184.525.000,00	184.525.000,00			-	-	-		270.200.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	18.190.000,00	17.000.000,00	3.740.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	118.528.000,00	29.625.000,00	29.625.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			119.400.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.260.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			100.800.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	233.390.000,00	213.245.000,00	213.245.000,00			-	-	-		170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				6 Unit	6 Unit	144.780.000,00	56.330.000,00	56.330.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT

							dibayarkan Pajaknya															
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	88.610.000,00	156.915.000,00	156.915.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT
206	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	4.869.730.000,00	5.644.249.400,00	2.835.684.000,00								5.500.400.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	-	4.107.430.000,00	4.673.869.400,00	4.673.869.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			2.870.400.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				36 Laporan	36 Laporan	422.400.000,00	957.300.000,00	436.620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT

	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				49 Laporan	49 Laporan	1.945.530.000,00	2.196.000.000,00	1.072.890.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	19.800.000,00	37.800.000,00	20.280.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	284.400.000,00	100.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				12 Laporan	12 Laporan	400.500.000,00	360.000.000,00	302.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			320.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																	
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	250.000.000,00	237.169.400,00	230.034.000,00	Kab. Takalar, Semua	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT

							Internal yang Terbentuk									Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				24 Dokumen	24 Dokumen	784.800.000,00	784.800.000,00	504.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			545.400.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	-	762.300.000,00	970.380.000,00	970.380.000,00			-	-	-		2.630.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				22 Laporan	22 Laporan	217.800.000,00	237.600.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			330.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				55 Laporan	55 Laporan	544.500.000,00	732.780.000,00	249.660.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.300.000.000,00	INSPEKTORAT

207	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.006.200.000,00	1.008.450.000,00	635.500.000,00							1.079.900.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	-	9.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00			-	-	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	9.000.000,00	1.350.000,00	1.190.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	-	997.200.000,00	1.007.100.000,00	1.007.100.000,00			-	-	-		1.069.900.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	97.200.000,00	126.900.000,00	69.560.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	

							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	19.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				35 Kegiatan	35 Kegiatan	830.700.000,00	810.900.000,00	544.950.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			610.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			9.900.000,00	INSPEKTORAT
						Kecamatan Pattallassang							9.332.713.021,00	9.796.225.393,00	9.745.200.343,00							10.146.045.934,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							9.332.713.021,00	9.796.225.393,00	9.745.200.343,00							10.146.045.934,00	
	7	01				KECAMATAN							9.332.713.021,00	9.796.225.393,00	9.745.200.343,00							10.146.045.934,00	
208	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	-				-	-	7.641.864.639,00	8.070.347.831,00	8.019.322.931,00							8.226.495.934,00	

						HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.886.000,00	9.886.000,00	9.886.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.056.000,00	3.056.000,00	3.056.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

																		Pelayanan Publik					
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.366.000,00	1.366.000,00	810.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			5.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.776.443.639,00	7.246.140.831,00	7.246.140.831,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7.080.656.884,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	6.770.577.639,00	7.240.274.831,00	7.240.274.981,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.062.656.884,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.366.000,00	2.366.000,00	1.873.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	214.978.800,00	211.123.800,00	211.123.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		249.406.800,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.577.500,00	71.832.500,00	51.354.600,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88.618.800,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan				1 Paket	1 Paket	13.096.300,00	13.096.300,00	6.548.150,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan			13.440.000,00	KECAMATAN

							Penggandaan yang Disediakan									ng, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.720.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	81.675.000,00	81.565.000,00	81.565.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.275.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				75 Laporan	75 Laporan	44.630.000,00	44.630.000,00	8.020.000,00	Kab. Takalar, Pattallassa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			49.353.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

							dan Konsultasi SKPD									ng, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	52.416.000,00	52.416.000,00	52.416.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		126.842.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	13.498.000,00	13.498.000,00	13.498.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	38.918.000,00	38.918.000,00	53.078.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			46.842.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

																		dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	555.537.000,00	518.178.000,00	518.178.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		606.443.850,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.137.000,00	8.778.000,00	8.778.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.443.850,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	509.400.000,00	509.400.000,00	509.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			558.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	32.103.200,00	32.103.200,00	32.103.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		103.146.400,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	15.003.200,00	15.003.200,00	15.003.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			67.306.400,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.840.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
209	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.050.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00							15.600.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

																		Pelayanan Publik				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	4.050.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.525.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.050.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Penurunan Kesenjangan			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

																		Sosial Ekonomi				
2 1 0	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.686.798.382,00	1.721.752.562,00	1.721.752.412,00							1.899.900.000,00	
	7	0 1	0 3	2. 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	1.607.823.382,00	1.642.882.562,00	1.642.882.562,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.818.225.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	0 1	0 3	2. 02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	18.225.000,00	18.810.000,00	18.810.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.225.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	0 1	0 3	2. 02	00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	842.420.550,00	734.099.850,00	803.549.250,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola			1.399.983.200,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

																		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	747.177.832,00	889.972.712,00	820.523.162,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.016.800,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	78.975.000,00	78.870.000,00	78.870.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		81.675.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	78.975.000,00	78.870.000,00	78.870.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			81.675.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

																			Pelayanan Publik				
2 1 1	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	0,00							4.050.000,00	
	7	0 1	0 4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		4.050.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	0 1	0 4	2. 01	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	0 1	0 4	2. 01	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Ketentraman dan			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

							Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											Ketertiban Umum Lintas Sektor				
						Kecamatan Polongbangkeng Utara						8.430.569.419,00	8.415.592.258,00	8.364.779.278,00							9.040.470.570,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						8.430.569.419,00	8.415.592.258,00	8.364.779.278,00							9.040.470.570,00	
	7	01				KECAMATAN						8.430.569.419,00	8.415.592.258,00	8.364.779.278,00							9.040.470.570,00	
212	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				10090 % %	90100 % %	7.101.443.859,00	7.067.523.818,00	7.020.610.838,00							7.760.485.570,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah Yang di Susun Tepat Waktu	-			100 % 7 Dokumen	100 % 7 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		20.565.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	990.000,00	990.000,00	990.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik Capaian Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik Capaian Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik [deleted] Capaian Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik [deleted]1	-			100 %	100 %	6.373.986.359,00	6.384.590.378,00	6.384.590.378,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		6.741.533.410,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

							Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	6.371.586.359,00	6.382.190.378,00	6.382.190.498,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.732.678.410,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang baik Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	-			100 %	100 %	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		3.750.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			750.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.250.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			750.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	16.906.000,00	16.906.000,00	16.906.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		72.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	16.906.000,00	16.906.000,00	4.900.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	179.030.500,00	184.434.940,00	184.434.940,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		363.998.700,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Komponen									Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4.319.200,00	3.947.200,00	3.947.200,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.514.600,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	89.486.600,00	92.681.500,00	74.509.400,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			227.737.140,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.535.300,00	2.377.300,00	2.377.300,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.669.400,00	17.078.940,00	17.078.940,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.131.460,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24.750.000,00	27.080.000,00	27.080.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.601.500,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	38.870.000,00	38.870.000,00	22.135.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			108.014.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan	Kecamatan		77.537.460,00	KECAMATAN POLONGBA

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				NGKENG UTARA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.537.460,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan Persentase jasa	-			100 %	100 %	476.582.000,00	427.793.500,00	427.793.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	Kecamatan		437.290.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

							penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah												tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	65.232.000,00	16.443.500,00	16.443.500,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			690.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				104 Laporan	104 Laporan	395.400.000,00	395.400.000,00	395.400.000,00	Kab. Takalar,	Pajak Daerah Lain-lain PAD	-	6. Perbaika			396.600.000,00	KECAMATAN

							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									Polombangkeng Utara, Palleko	Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	48.699.000,00	47.559.000,00	47.559.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		43.311.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	19.249.000,00	19.249.000,00	19.249.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	29.450.000,00	28.310.000,00	28.310.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Palleko	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.311.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
213	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik				100 %	100 %	6.150.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00							14.490.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	-			100 %	100 %	900.000,00	900.000,00	900.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		900.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	450.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			900.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

																Semua Kel/Desa			tahan dan Pelayanan Publik			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	-			100 %	100 %	2.250.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		8.735.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.735.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			4.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

																		Pelayanan Publik				
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	-			100 %	100 %	2.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan non perizinan yang dilaksanakan oleh kecamatan	-			100 %	100 %	900.000,00	900.000,00	900.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	

							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	450.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.855.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
214	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan				100 95 % %	100 95 % %	1.318.775.560,00	1.338.868.440,00	1.338.868.440,00							1.250.240.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan di desa	-			100 %	100 %	3.975.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		4.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3.975.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			4.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

							Perencanaan Pembangunan di Desa									Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di kelurahan	-			100 %	100 %	1.280.350.560,00	1.300.678.440,00	1.300.678.440,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.200.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	1.151.186.000,00	917.960.000,00	979.532.600,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.022.574.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	129.164.560,00	382.718.440,00	321.145.840,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			177.426.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang	-			100 %	100 %	34.450.000,00	34.165.000,00	34.165.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		46.240.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	31.500.000,00	31.225.000,00	31.225.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.240.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	2.950.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

215	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan				1 20 Kasus %	20 1 % Kasus	600.000,00	600.000,00	600.000,00							3.470.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase sinergisitas kepolisian negara , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di kecamatan	-			100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Masyarakat		3.470.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			3.470.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
216	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan				100 95 % %	95 100 % %	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00							5.000.000,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-			100 %	100 %	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
217	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu				100 %	100 %	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00							6.785.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase peraturan desa dan peraturan Kepala desa yang di susun	-			100 %	100 %	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Masyarakat		6.785.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

						Pemerintahan Desa												Pelayanan Publik				
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.835.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.950.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
						Kecamatan Polongbangkeng Selatan																
													6.857.728.861,00	6.922.588.783,00	6.878.679.202,96						7.572.044.820,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							6.857.728.861,00	6.922.588.783,00	6.878.679.202,96						7.572.044.820,00	
	7	01				KECAMATAN							6.857.728.861,00	6.922.588.783,00	6.878.679.202,96						7.572.044.820,00	
218	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.559.967.290,00	5.711.030.230,00	5.669.427.349,96						6.368.044.820,00	

						HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																
	7	0 1	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	indeks reformasi birokrasi Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 % 90 % B PREDIKAT	100 % 90 % B PREDIKAT	17.900.000,00	8.219.000,00	8.219.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		42.900.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0 1	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0 1	0 1	2. 01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.135.000,00	750.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	4.900.000,00	1.500.000,00	900.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.900.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasase pemenuhan administrasi	-			100 %	100 %	4.728.304.830,00	4.863.879.430,00	4.863.879.430,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.473.827.860,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							keuangan perangkat daerah															
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/bulan	700 Orang/bulan	4.721.309.330,00	4.860.461.930,00	4.860.462.169,20	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.467.827.860,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000,00	941.100,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.995.500,00	1.676.400,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	6.473.000,00	1.443.800,00	1.443.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	786.100,00	250.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.473.000,00	657.700,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	6.000.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	1.515.000,00	1.263.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum	persentase pemenuhan Administrasi Umum	-			100 %	100 %	235.819.000,00	253.073.000,00	253.073.000,00			-	6. Perbaikan	-		263.000.000,00	KECAMATAN POLONGBA

						Perangkat Daerah	perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				NGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	15.292.000,00	71.573.000,00	71.573.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	30 Paket	198.000.000,00	143.643.000,00	125.948.180,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			198.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				120 Laporan	120 Laporan	22.527.000,00	37.857.000,00	18.497.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			15.000.000,00	KECAMATAN POLONGBA

							dan Konsultasi SKPD									Selatan, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				NGKENG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	538.316.960,00	546.970.000,00	546.970.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		538.316.960,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	7.266.960,00	15.920.000,00	15.920.000,76	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.266.960,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				250 Laporan	36 Laporan	531.050.000,00	531.050.000,00	531.050.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			531.050.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	27.153.500,00	35.930.000,00	35.930.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	27.153.500,00	35.930.000,00	35.930.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
219	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan				95 %	95 %	1.288.761.571,00	1.208.214.553,00	1.207.926.853,00							1.176.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di Desa	-			100 %	100 %	5.500.000,00	1.167.700,00	1.167.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	-		4.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	880.000,00	880.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Dokumen	11 Dokumen	2.500.000,00	287.700,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di kelurahan	-			100 %	100 %	1.283.261.571,00	1.207.046.853,00	1.207.046.853,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		1.172.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.159.000,00	990.000,00	990.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	872.360.000,00	798.206.853,00	847.621.223,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			810.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	407.742.571,00	407.850.000,00	358.435.630,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			360.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		Pelayanan Publik					
220	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan				1 Kasus	1 Kasus	3.000.000,00	1.019.000,00	0,00							7.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di desa/ kelurahan	-			100 %	100 %	3.000.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	544.900,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	474.100,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
221	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan				90 %	90 %	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00							10.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			100 %	100 %	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	30 Orang	1.500.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
222	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu				100 %	100 %	4.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00							10.000.000,00	

						N PEMERINTAHAN DESA																
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah status desa berkembang menuju desa maju dan mandiri Persentase administarsi tata pemerintahan desa yang sesuai standar prersentase ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan di desa Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat presentase peraturan desa dan peraturan ke[ala desa yang di susun	-			100 % 5 Desa 83 %	100 % 5 Desa 83 %	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																		Pelayanan Publik				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
						Kecamatan Mangarabombang								3.182.648.504,00	3.359.622.726,00	3.359.854.056,00							4.115.448.512,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.182.648.504,00	3.359.622.726,00	3.359.854.056,00							4.115.448.512,00	
	7	01				KECAMATAN								3.182.648.504,00	3.359.622.726,00	3.359.854.056,00							4.115.448.512,00	
223	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-				-	-	3.019.976.008,00	3.189.521.158,00	3.190.452.488,00							3.879.848.512,00	

						DAERAH KABUPATEN /KOTA																
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.161.800,00	8.668.600,00	8.668.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000,00	1.377.100,00	968.919,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.071.500,00	1.428.000,00	936.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.214.200,00	1.554.400,00	1.119.400,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.348.600,00	1.353.500,00	609.100,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.305.400,00	1.076.600,00	890.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.172.100,00	1.879.000,00	1.564.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.762.601.508,00	2.961.638.558,00	2.961.638.558,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.603.598.512,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.760.217.108,00	2.958.243.659,00	2.970.894.750,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.598.098.512,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.243.900,00	2.024.799,00	1.077.519,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.140.500,00	1.370.100,00	1.244.100,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.788.900,00	2.808.600,00	2.808.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	636.200,00	962.400,00	731.200,00	Kab. Takalar, Mangarab	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			1.500.000,00	KECAMATAN

																ombang, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	842.400,00	844.200,00	422.100,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.310.300,00	1.002.000,00	552.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	97.433.500,00	72.361.000,00	72.361.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	-		108.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Komponen						Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	2.100.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	29.338.000,00	38.469.000,00	38.469.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	1.133.600,00	1.181.000,00	1.181.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			3.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.000.000,00	12.952.000,00	10.642.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.961.900,00	1.452.000,00	1.452.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																		dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	30 Laporan	27.500.000,00	14.714.000,00	10.062.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	50 Unit	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	121.848.700,00	88.914.400,00	88.914.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		90.750.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12 Laporan	39.098.700,00	6.164.400,00	6.164.400,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	12 Laporan	82.750.000,00	82.750.000,00	82.750.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			82.750.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	26.141.600,00	47.430.000,00	47.430.000,00			-	6. Perbaikan	-		47.000.000,00	KECAMATAN

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	18.541.600,00	36.430.000,00	36.430.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	7.600.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			12.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
224	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik				100 %	100 %	8.610.799,00	5.404.000,00	4.704.000,00							7.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	persentase efektifitas kegiatan pemerintahan	-			100 %	100 %	2.534.799,00	1.989.000,00	1.989.000,00			-	6. Perbaikan	-		2.000.000,00	KECAMATAN

						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	ditingkat kecamatan												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.534.799,00	1.989.000,00	1.989.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	-			100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	6.076.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	1.515.000,00	815.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.776.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan				95 %	95 %	154.061.697,00	162.497.568,00	162.497.568,00							215.800.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Persentase	-			100 % 12 Lembaga Kemasyarakatan	100 % 12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		7.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

							ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan di desa											Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di kelurahan	-			0 %	0 %	147.582.697,00	159.472.568,00	159.472.568,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		195.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1 Unit	132.454.200,00	106.643.968,00	116.393.968,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	15.128.497,00	52.828.600,00	43.078.600,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi	-			100 % 12 TP.PKK 1 Laporan	100 % 12 TP.PKK 1 Laporan	4.229.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

							masyarakat yang berkembang															
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	4.229.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			3.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	-			100 % 50 KK	100 % 50 KK	2.250.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				3 Keluarga	3 Keluarga	2.250.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
226	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Jumlah pelanggaran perda dan perbup di kecamatan				1 20 Kasus %	1 20 Kasus %	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00								7.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			0 1 Laporan	0 1 Laporan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00			-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-		2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

							Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Semua Kel/Desa			Ketertiban Umum Lintas Sektor				
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
227	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00							5.800.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi	Fasilitasi Administrasi Tata	-			100 % 11	100 % 11	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaika	-		5.800.000,00	KECAMATAN

						dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Persentase peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di susun				Dokumen 1 Dokumen	Dokumen 1 Dokumen							n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MANGARABOMBANG
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			3.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																	dan Pelayanan Publik					
						Kecamatan Mappakasunggu						2.598.505.070,00	2.495.848.566,00	2.468.255.963,00						2.989.057.700,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.598.505.070,00	2.495.848.566,00	2.468.255.963,00						2.989.057.700,00	
	7	01				KECAMATAN						2.598.505.070,00	2.495.848.566,00	2.468.255.963,00						2.989.057.700,00	
228	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	2.275.338.290,00	2.176.629.346,00	2.156.310.586,00						2.584.557.700,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	13.499.180,00	15.628.500,00	15.628.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		17.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.999.730,00	3.542.200,00	1.528.280,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.990,00	3.150.400,00	2.302.200,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.780,00	2.999.500,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.680,00	3.436.400,00	2.760.170,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	2.021.785.830,00	1.922.968.196,00	1.922.968.196,00			-	-	-		2.301.157.700,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.016.286.180,00	1.916.914.296,00	1.916.914.336,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.294.157.700,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan				5 Laporan	5 Laporan	2.499.720,00	3.022.900,00	1.028.200,00	Kab. Takalar, Mappakas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			3.500.000,00	KECAMATAN

							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									unggu, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.999.930,00	3.031.000,00	1.217.500,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.499.800,00	2.500.550,00	2.500.550,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.499.800,00	2.500.550,00	804.200,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			3.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.499.700,00	3.501.100,00	3.501.100,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	2.499.700,00	3.501.100,00	1.564.700,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	30.955.000,00	31.080.000,00	31.080.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		33.100.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.480.000,00	7.920.000,00	8.580.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.100.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.475.000,00	23.160.000,00	18.660.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	4.695.600,00	7.700.000,00	7.700.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	2.695.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	168.345.180,00	159.060.000,00	159.060.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		189.800.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	12 Laporan	44.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Takalar, Mappakas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			61.000.000,00	KECAMATAN

																unggu, Semua Kel/Desa			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	8.745.180,00	5.460.000,00	5.460.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.800.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	-	31.058.000,00	34.191.000,00	34.191.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelo	-		32.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

						Urusan Pemerintahan Daerah													la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.058.000,00	29.088.000,00	29.088.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
229	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	305.166.780,00	302.839.220,00	298.445.377,00							380.500.000,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	3.900.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.900.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	277.266.780,00	277.334.490,00	277.334.490,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		340.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana				3 Unit	3 Unit	208.001.340,00	140.432.020,00	160.037.997,00	Kab. Takalar, Mappakas	DAU Tambahan Dukungan	-	6. Perbaikan			200.000.000,00	KECAMATAN

							Kelurahan yang Terbangun									unggu, Takalar	Pendanaan Kelurahan		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	69.265.440,00	136.902.470,00	114.452.400,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	24.000.000,00	21.999.730,00	21.999.730,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		36.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	21.999.730,00	20.449.980,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			36.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

																		tahan dan Pelayanan Publik				
230	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	18.000.000,00	16.380.000,00	13.500.000,00							24.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	18.000.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		24.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	16.380.000,00	13.500.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
						Kecamatan Sanrobone							1.377.357.140,00	1.389.137.012,00	1.370.710.512,00							1.579.455.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.377.357.140,00	1.389.137.012,00	1.370.710.512,00							1.579.455.000,00	

	7	01				KECAMATAN							1.377.357.140,00	1.389.137.012,00	1.370.710.512,00							1.579.455.000,00	
231	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				90 %	90 %	1.351.207.140,00	1.363.017.412,00	1.345.427.112,00							1.552.955.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	-			4 Dokumen	4 Dokumen	5.966.000,00	6.364.040,00	6.364.040,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		7.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.966.000,00	2.364.040,00	2.364.040,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan			2.000.000,00	KECAMATAN

							Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SANROBONE
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					1.228.671.126,00	1.235.954.746,00	1.235.954.746,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai		1.402.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.226.171.126,00	1.233.454.746,00	1.233.454.746,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			1.400.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Desa		2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-					5.715.000,00	5.715.000,00	5.715.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai		6.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	5.715.000,00	5.715.000,00	5.715.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan listrik yang tersedia	-			4 Paket	4 Paket	37.752.300,00	40.612.300,00	40.612.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		48.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									Komponen								Instalasi

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.630.500,00	2.630.500,00	2.630.500,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.111.800,00	5.111.800,00	4.821.500,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.010.000,00	32.870.000,00	17.070.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	35.944.264,00	35.683.176,00	35.683.176,00			-	6. Perbaikan	Kecamatan		41.955.000,00	KECAMATAN

						Urusan Pemerintahan Daerah													Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SANROBONE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.944.264,00	11.683.176,00	11.683.176,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.955.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	-			1 Unit	1 Unit	35.158.450,00	36.688.150,00	36.688.150,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin	Kecamatan		45.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

						Pemerintahan Daerah													tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.658.450,00	22.628.150,00	22.628.150,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9.500.000,00	14.060.000,00	14.060.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
232	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	23.000.000,00	22.969.600,00	22.133.400,00							23.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan	Jumlah Lenbaga yang aktif dalam	-			12 lenbaga	12 lenbaga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			-	6. Perbaikan	Masyarakat		4.500.000,00	KECAMATAN

						Pemberdayaan Desa	kegiatan kemasyarakatan											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SANROBONE
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	-			6 Lembaga	6 Lembaga	18.500.000,00	18.469.600,00	18.469.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga kemasyarakatan		18.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	14.969.600,00	14.133.400,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			15.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

																Dana Alokasi Umum (DAU)		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
233	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00							3.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menekan jumlah gangguan keamannan dan ketertiban Masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, TNI dan Kepolosian		3.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian				4 Laporan	4 Laporan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan			3.500.000,00	KECAMATAN

							Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				SANROBONE
						Kecamatan Galesong						1.717.186.620,00	1.929.275.716,00	1.897.201.043,00							2.004.600.798,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.717.186.620,00	1.929.275.716,00	1.897.201.043,00							2.004.600.798,00	
	7	01				KECAMATAN						1.717.186.620,00	1.929.275.716,00	1.897.201.043,00							2.004.600.798,00	
234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.686.900.120,00	1.902.889.716,00	1.879.137.543,00							1.975.100.798,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	8.056.500,00	8.085.000,00	8.085.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		10.700.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.597.500,00	1.626.000,00	104.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

																			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.372.000,00	1.372.000,00	112.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.356.000,00	1.356.000,00	99.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.200.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.000,00	1.160.000,00	63.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

							Dokumen DPA-SKPD											Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.558.719.120,00	1.781.083.516,00	1.781.083.516,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Galesong		1.840.930.798,00	KECAMATAN GALESONG

																		dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.557.414.120,00	1.779.778.516,00	1.767.763.343,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.838.430.798,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.305.000,00	1.305.000,00	997.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang milik Daerah	-			100 %	100 %	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		2.200.000,00	KECAMATAN GALESONG

	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.353.000,00	1.353.000,00	1.164.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.200.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	28.018.000,00	26.173.200,00	26.173.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		34.200.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.945.000,00	5.614.400,00	8.016.200,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.319.000,00	2.419.800,00	897.600,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	684.000,00	684.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.200.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.070.000,00	17.455.000,00	8.330.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	100 %	25.843.000,00	32.135.000,00	32.135.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		20.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				3 Unit	3 Unit	25.843.000,00	32.135.000,00	32.135.000,00	Kab. Takalar,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			20.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

							Bangunan Lainnya yang Disediakan									Galesong, Boddia			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	39.772.500,00	29.214.000,00	29.214.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		40.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	15.772.500,00	5.214.000,00	5.214.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			24.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	25.138.000,00	24.846.000,00	24.846.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Kecamatan Galesong		27.070.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	22.856.000,00	22.856.000,00	25.378.400,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	610.000,00	1.990.000,00	3.370.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.070.000,00	KECAMATAN GALESONG

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.672.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN GALESONG
235	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik oleh Pemerintah				100 %	100 %	2.940.000,00	2.940.000,00	1.775.900,00							4.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan	-			100 %	100 %	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan				4 Laporan	4 Laporan	1.795.000,00	1.795.000,00	987.900,00	Kab. Takalar,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

							Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									Galesong, Boddia			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	-			100 %	100 %	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	1.145.000,00	1.145.000,00	788.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan				100 %	100 %	21.808.000,00	17.907.500,00	13.498.700,00							18.500.000,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	100 %	4.628.000,00	4.628.000,00	4.628.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		5.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.628.000,00	4.628.000,00	4.628.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	17.180.000,00	13.279.500,00	13.279.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		13.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga	6 Lembaga	15.909.000,00	12.008.500,00	8.527.800,00	Kab. Takalar,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan			12.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

							yang Diselenggarakan				Kemasyarakatan	Kemasyarakatan				Galesong, Boddia			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	1.271.000,00	1.271.000,00	342.900,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
237	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa/ Kelurahan				100 %	100 %	2.012.500,00	2.012.500,00	1.006.600,00							4.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas kepolisian,TNI dan instansi vertikal dikecamatan	-			100 %	100 %	2.012.500,00	2.012.500,00	2.012.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		4.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	1.003.500,00	1.003.500,00	309.600,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	1.009.000,00	1.009.000,00	697.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
238	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Yang Selesai Tepat Waktu				100 %	100 %	3.526.000,00	3.526.000,00	1.782.300,00							3.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	-			100 %	100 %	3.526.000,00	3.526.000,00	3.526.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Galesong		3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

						Pemerintahan Desa												Pelayanan Publik				
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.023.000,00	1.023.000,00	387.900,00	Kab. Takalar, Galesong, Boddia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.503.000,00	1.503.000,00	1.394.400,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

																		Pelayanan Publik				
						Kecamatan Galesong Utara						3.115.859.602,00	3.157.625.585,00	3.130.487.152,00							4.264.002.900,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.115.859.602,00	3.157.625.585,00	3.130.487.152,00							4.264.002.900,00	
	7	01				KECAMATAN						3.115.859.602,00	3.157.625.585,00	3.130.487.152,00							4.264.002.900,00	
239	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.804.262.202,00	2.838.741.285,00	2.838.254.752,00							4.037.502.900,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		6.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Bontolebang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	579.300,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	-			100 %	100 %	2.548.834.202,00	2.610.687.285,00	2.610.687.285,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		3.761.674.900,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				476 Orang/bulan	476 Orang/bulan	2.546.834.202,00	2.608.687.285,00	2.632.176.052,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.759.674.900,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang baik	-			100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	271.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan	-			100 %	100 %	51.069.000,00	53.050.000,00	53.050.000,00			-	6. Perbaikan	Seluruh Staf Kantor Kecamatan		68.430.000,00	KECAMATAN

						Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah											Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Galesong Utara			GALESONG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				160 Paket	160 Paket	10.079.000,00	10.155.000,00	10.079.400,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.360.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3000 Paket	3000 Paket	990.000,00	990.000,00	990.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			570.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				340 Laporan	340 Laporan	40.000.000,00	41.905.000,00	24.155.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			60.500.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

							dan Konsultasi SKPD									Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	16.469.000,00	14.488.000,00	14.488.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		10.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.469.000,00	14.488.000,00	14.488.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	157.928.000,00	130.554.000,00	130.554.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		155.528.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	31.928.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.928.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			123.600.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	-			100 %	100 %	21.962.000,00	21.962.000,00	21.962.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Staf Kantor Kecamatan Galesong Utara		33.870.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.140.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	974.000,00	974.000,00	974.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			730.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

240	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik oleh Pemerintah				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	271.000,00							2.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	271.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Cakupan fasilitasi pencapaian standar pelayanan (SPM) di Kecamatan	-			95 %	95 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Masyarakat		1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

						Daerah yang Ada di Kecamatan												Pelayanan Publik				
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan				95 %	95 %	305.597.400,00	312.884.300,00	290.642.400,00							220.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persemtase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di desa	-			100 %	100 %	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		3.500.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum				27 Lembaga Kemasyarakatan	27 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			3.500.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

							Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan	-			100 %	100 %	291.097.400,00	298.384.300,00	298.384.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		202.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	33.000.000,00	15.588.100,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Bontoleba ng	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				300 Unit	2 Unit	111.780.000,00	128.652.000,00	145.880.400,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Bontoleba ng	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			89.880.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																		dan Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	146.317.400,00	136.732.300,00	119.573.200,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Bontolebang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.120.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang	-			90 %	90 %	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.829.700,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				50 Laporan	50 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	271.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
242	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa dan Kelurahan Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan				40 85 Kasus %	85 40 % Kasus	1.000.000,00	1.000.000,00	271.000,00							1.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Sinergitas Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	-			100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	271.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

							dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												tahan dan Pelayanan Publik				
243	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu				100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	1.048.000,00							3.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	506.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	271.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	271.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
						Kecamatan Kepulauan Tanakeke							1.496.056.244,00	1.393.731.718,00	1.345.381.318,00							1.740.550.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.496.056.244,00	1.393.731.718,00	1.345.381.318,00							1.740.550.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.496.056.244,00	1.393.731.718,00	1.345.381.318,00							1.740.550.000,00	
244	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	1.404.061.244,00	1.344.058.118,00	1.324.774.358,00							1.678.050.000,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	11.215.000,00	21.405.400,00	21.405.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		17.250.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	4.745.000,00	3.836.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.200.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2.200.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.700.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.365.000,00	3.986.200,00	3.986.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	4.021.200,00	4.021.200,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	-	-			-	-	1.357.450.620,00	1.260.552.718,00	1.260.552.718,00			-	6. Perbaika	-		1.606.500.000,00	KECAMATAN

						Perangkat Daerah												n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.352.360.620,00	1.255.131.718,00	1.255.134.958,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.600.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.755.000,00	2.105.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.200.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.690.000,00	2.666.000,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.200.000,00	2.596.000,00	2.596.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.750.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	2.596.000,00	392.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.900.000,00	4.784.000,00	4.784.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		2.250.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																		Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	4.784.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.250.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.200.000,00	27.330.000,00	27.330.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			2.300.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																		Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.900.000,00	24.030.000,00	13.956.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	23.695.624,00	18.600.000,00	18.600.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.095.624,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	-	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	2.400.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		13.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	2.400.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
245	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	23.300.000,00	11.244.700,00	8.550.000,00							15.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	4.450.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.450.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																		Pelayanan Publik				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	15.850.000,00	5.064.700,00	5.064.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	1.904.700,00	950.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	10.450.000,00	3.160.000,00	1.900.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	3.000.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	4.280.000,00	3.800.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
246	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	39.915.000,00	18.341.200,00	11.149.800,00							32.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	24.915.000,00	11.688.200,00	11.688.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		15.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																		Pelayanan Publik				
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	8.890.200,00	8.890.200,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	14.915.000,00	2.798.000,00	1.398.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	15.000.000,00	6.653.000,00	6.653.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		17.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.653.000,00	861.600,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
247	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	9.550.000,00	3.969.500,00	0,00							2.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	9.550.000,00	3.969.500,00	3.969.500,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	9.550.000,00	3.969.500,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																			dan Pelayanan Publik				
248	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	19.230.000,00	16.118.200,00	907.160,00							12.500.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	19.230.000,00	16.118.200,00	16.118.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00	3.766.600,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	4.920.000,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan			3.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUA

							Perencanaan Pembangunan Partisipatif									Tanakeke, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				N TANAKEKE
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	4.980.000,00	3.970.000,00	463.860,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	3.950.000,00	3.461.600,00	443.300,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
						Kecamatan Galesong Selatan							1.876.300.560,00	1.722.482.120,00	1.694.490.530,00							2.108.921.438,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.876.300.560,00	1.722.482.120,00	1.694.490.530,00							2.108.921.438,00	
	7	01				KECAMATAN							1.876.300.560,00	1.722.482.120,00	1.694.490.530,00							2.108.921.438,00	

249	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	1.856.990.960,00	1.700.890.120,00	1.685.122.730,00							2.087.878.953,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		18.016.173,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				dOKUMEN Dokumen	dOKUMEN Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.665.500,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.924.154,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			2.350.519,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

							Dokumen Perubahan RKA-SKPD									Bontokassi			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.790.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.816.500,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				DOKUMEN Dokumen	DOKUMEN Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.800.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				Laporan Laporan	Laporan Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.745.800,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			6.125.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											tahan dan Pelayanan Publik				
	7	0 1	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.727.290.560,00	1.579.928.130,00	1.579.928.130,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.950.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	0 1	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang/Bulan Orang/bulan	Orang/Bulan Orang/bulan	1.727.290.560,00	1.579.928.130,00	1.579.950.440,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.950.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	0 1	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.839.780,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Laporan Laporan	Laporan Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.839.780,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	37.471.000,00	40.005.990,00	40.005.990,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		39.794.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket Paket	Paket Paket	12.589.000,00	13.714.000,00	12.303.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Paket Paket	Paket Paket	1.972.000,00	2.071.990,00	2.071.990,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.800.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan Laporan	Laporan Laporan	21.350.000,00	22.660.000,00	9.080.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.994.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	16.131.000,00	16.131.000,00	16.131.000,00			-	6. Perbaikan	-		19.529.000,00	KECAMATAN

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.131.000,00	16.131.000,00	16.131.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.529.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	-	-			-	-	29.010.000,00	22.554.000,00	22.554.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		23.700.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Laporan Laporan	Laporan Laporan	11.010.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			11.700.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan Laporan	Laporan Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	29.088.400,00	24.271.000,00	24.271.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Unit Unit	Unit Unit	29.088.400,00	24.271.000,00	24.271.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			35.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

																		Pelayanan Publik				
250	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.600.000,00	4.812.000,00	619.300,00							4.600.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	2.299.800,00	2.654.700,00	2.654.700,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				Laporan Laporan	Laporan Laporan	2.299.800,00	2.654.700,00	213.300,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	-	-			-	-	2.300.200,00	2.157.300,00	2.157.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola	-		2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

						kepada Camat													Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	2.300.200,00	2.157.300,00	406.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
251	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	6.581.000,00	9.806.800,00	4.968.600,00							6.700.000,00	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	6.581.000,00	9.806.800,00	9.806.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.700.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				Lembaga Kemasya	Lembaga Kemasya	4.581.000,00	8.456.000,00	4.594.000,00	Kab. Takalar,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaika			4.700.000,00	KECAMATAN

							yang Diselenggarakan				rakat Lembaga Kemasyarakatan	rakat Lembaga Kemasyarakatan				Galesong Selatan, Bontokassi			n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				GALESONG SELATAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.350.800,00	374.600,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
252	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	850.000,00							3.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Laporan Laporan	Laporan Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	850.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
253	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	5.128.600,00	3.973.200,00	2.929.900,00								6.742.485,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	5.128.600,00	3.973.200,00	3.973.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			6.742.485,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	2.130.300,00	2.130.300,00	1.311.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			4.742.485,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	2.998.300,00	1.842.900,00	1.618.900,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Bontokassi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						5.023.917.479,00	5.421.497.176,00	5.438.312.956,00							5.554.555.807,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.023.917.479,00	5.421.497.176,00	5.438.312.956,00							5.554.555.807,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.023.917.479,00	5.421.497.176,00	5.438.312.956,00							5.554.555.807,00	
254	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	2.593.501.759,00	2.966.824.426,00	2.957.166.406,00							3.162.554.207,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.051.100,00	18.951.100,00	18.951.100,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan	-		13.428.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																		dan Pelayanan Publik				
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.800,00	4.570.800,00	2.710.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.031.600,00	1.791.600,00	1.779.060,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.865.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.943.700,00	1.843.700,00	1.574.420,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.315.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																		Pelayanan Publik				
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.968.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.480.000,00	2.685.000,00	1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.660.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1 Laporan	1 Laporan	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			1.604.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Realisasi Kinerja SKPD												Pelayanan Publik				
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.264.000,00	4.124.000,00	3.504.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.415.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.359.595.770,00	2.775.096.386,00	2.775.096.386,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.938.457.588,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.355.472.770,00	2.769.629.386,00	2.769.629.996,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.935.123.388,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.276.000,00	3.620.000,00	2.888.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.322.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.847.000,00	1.847.000,00	1.249.270,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.011.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.583.000,00	4.203.000,00	4.203.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	815.000,00	815.000,00	815.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.380.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.264.000,00	2.884.000,00	2.264.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	504.000,00	504.000,00	504.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-			-	-	6.076.000,00	3.596.000,00	3.596.000,00			-	6. Perbaikan	-		25.929.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA

						Perangkat Daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.606.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.429.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.470.000,00	1.610.000,00	1.020.290,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelo			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA

							Penilaian Kinerja Pegawai									n, Semua Kel/Desa			la Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	97.214.370,00	99.203.370,00	99.203.370,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.938.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Komponen							Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerin			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																		tahan dan Pelayanan Publik				
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.728.000,00	2.728.000,00	2.120.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	900.400,00	900.400,00	881.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.669.000,00	6.669.000,00	6.368.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																		dan Pelayanan Publik				
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.660.970,00	2.660.970,00	1.406.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.838.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	3.375.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																		Pelayanan Publik				
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	76.258.000,00	81.072.000,00	81.072.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	78.579.719,00	46.122.770,00	46.122.770,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		78.579.719,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.289.719,00	832.770,00	832.770,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.289.719,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.290.000,00	3.290.000,00	2.560.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.290.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	29.401.800,00	19.651.800,00	19.651.800,00			-	6. Perbaikan	-		31.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	29.401.800,00	19.651.800,00	19.651.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
255	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	-				-	-	607.750.120,00	642.907.150,00	410.400.880,00							802.785.600,00	

						KEBANGSAAN																
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	-	607.750.120,00	642.907.150,00	642.907.150,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		802.785.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15 Orang	15 Orang	3.332.000,00	702.150,00	689.280,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.328.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka				15 Orang	15 Orang	2.054.400,00	3.914.400,00	3.231.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	2 Laporan	2.364.000,00	2.364.000,00	1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.921.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																	
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																	
							Jumlah Paskibraka				85 Orang	85 Orang	599.999.720,00	635.926.600,00	405.240.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																		Pelayanan Publik				
256	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	1.104.584.000,00	1.116.257.000,00	1.113.157.000,00							960.536.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil	-	-			-	-	1.104.584.000,00	1.116.257.000,00	1.116.257.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		960.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Orang	12 Orang	1.103.155.000,00	1.109.868.000,00	1.109.868.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			952.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi				2 Laporan	2 Laporan	1.429.000,00	6.389.000,00	3.289.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												Pelayanan Publik				
257	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	3.466.800,00	3.466.800,00	1.476.800,00							12.722.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	-	3.466.800,00	3.466.800,00	3.466.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.722.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,				12 Orang	12 Orang	1.606.800,00	1.606.800,00	856.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola			3.836.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									n, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.860.000,00	1.860.000,00	620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.886.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
258	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	10.754.800,00	5.881.800,00	1.740.000,00							26.958.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	-	-			-	-	10.754.800,00	5.881.800,00	5.881.800,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	-		26.958.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						Sosial dan Budaya													Pelayanan Publik				
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Orang	12 Orang	7.894.800,00	2.271.800,00	620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.886.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Orang	12 Orang	1.860.000,00	2.610.000,00	620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
259	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	703.860.000,00	686.160.000,00	954.371.870,00							589.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	-	-			-	-	703.860.000,00	686.160.000,00	686.160.000,00			-	7. Penguatan Ketentra	-		589.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA

						Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												man dan Ketertiban Umum Lintas Sektor				DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	190.000.000,00	171.686.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			52.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang				12 Orang	12 Orang	1.555.000,00	1.685.000,00	315.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												Lintas Sektor				
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.305.000,00	2.305.000,00	560.070,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	492.170.000,00	781.810.000,00	Kab. Takalar, Semua	Pajak Daerah	-	7. Penguatan			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA

							Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor				DAN POLITIK
	JUMLAH											**1.204.395.532.532,00**	**1.183.542.239.179,00**	**1.183.578.276.814,00**							**929.281.467.116,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator Suistanable Development Goals (SDGs), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. PDRB Perkapita
3. Tingkat Kemiskinan
4. Tingkat Penganggurasn Terbuka (TPT)
   - Jumlah Penganggur (Ribu orang)
5. Gini Ratio
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
   - Harapan Lama Sekolah (HLS)
   - Angka Harapan Hidup (AHH)
   - Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)
   - ADHB
   - ADHK

Target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Takalar Tahun 2024-2026

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025	Target RKPD tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,34	6,10-7,14	4,45	6,10 – 7,14
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,75	6,69	7,62-5,16	6,69
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,84	3,58	3,58	2,2
4.	Indeks Gini	Angka / Nilai	0,385	0,361-0,350	0,361-0,350	0,34
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka / Nilai	72,06	73,45	72,24	73,45
6.	PDRB Perkapita (ADHB)	Jt. Rp.	42,36	51,24	42,49-47,03	49,52

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2025

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini

Indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RPJMD yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RPJMD yang digariskan pada Tahun 2022. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel VI-2 berikut ini :

Tabel VI-2
Capaian Indikator Kinerja Utama 2024, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Takalar Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Asumsi Capaian Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Tahun 2026
			Target	Capaian Tahun 2024			
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	2,45	3,21 *(capaian 2023)*	3,25	3,25	3,27
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,70	72,06	72,24	72,24	72,56
3	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,18	79,77	79,90	79,90	80,63
4	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	34,07	42,36	42,49 - 47,03	42,49 - 47,03	42,49 - 47,03
5	Indeks Gini	Angka	0,364	0,385	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350
6	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,04-6,52	4,34	4.45	4.45	5,02
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,49	3,84	3,58	3,58	3,57
8	Angka kemiskinan (%)	Persen	6,90	7,75	7,62 - 5,16	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	59,06	67,21	70.22	70.22	70.93
10	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Predikat	BB (73-75)	CC (52,33)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
11	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)	B (63,37)	B (60-70)	B (60-70)	BB (71-80)
12	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM (Capaian Standar Minimal)	Persen	70-80	93,78			
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (76,61 - 88,30)	B (86,25)			

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Asumsi Capaian Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Tahun 2026
			Target	Capaian Tahun 2024			
14	Angka kriminalitas	Persen	89,41 per 100.000 Penduduk	189,57 per 10.000 penduduk			

Sumber : BPS, RPD 2023-2026

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indkator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 Kabupaten Takalar sudah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 merujuk pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel VI-3
Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Takalar

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I	**Pelayanan Urusan Wajib Layanan Dasar**				
A	**Urusan Wajib Pendidikan**				
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80.57	10.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99.32	92.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89.78	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	21.71		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
B	**Kesehatan**				
5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	per 1000 penduduk	1,55		Dinas Kesehatan
6	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	75		Dinas Kesehatan
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,09		Dinas Kesehatan
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	89,35		Dinas Kesehatan
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	91,44		Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	92,99		Dinas Kesehatan
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94,41		Dinas Kesehatan
12	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	78,81		Dinas Kesehatan
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	77,46		Dinas Kesehatan
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	54,52		Dinas Kesehatan
15	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99,28		Dinas Kesehatan
16	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	90,84		Dinas Kesehatan
17	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	93,67		Dinas Kesehatan
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	75,56		Dinas Kesehatan
19	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	jiwa/1000 kelahiran hidup	3,8		Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
20	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	jiwa/100.000 kelahiran hidup	95,40		Dinas Kesehatan
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**				
21	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	36.11	37.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/kota	Persen	23.22	25.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	74.22	75.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapa air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	98.13	98.12	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	98.47		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	1.57	2.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	63.46	72.20	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	0.07	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
29	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konsruksi	Persen	100.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Luasan RTH Publik seluas 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan	Persen	0.03	20.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
31	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	2.11	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Persen	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Persen	1.05	10.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	5,66	6.45	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	N/A	40.30	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
36	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	98,8	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
37	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
38	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	51,145	100	BPBD
39	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	178	100	BPBD

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
40	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	14	100	BPBD
41	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	Satpol
42	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	8,8	8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
F	**Sosial**				
43	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	100	100	Dinas Sosial dan PMD
44	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas Sosial dan PMD
II	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**				
A	**Tenaga Kerja**				
45	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	Tidak tersedia		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
46	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	Persen	1,91		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
47	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	Rp. juta / Orang	52,97		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
48	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	99,6		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
49	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	0		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
50	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.06		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
51	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	17,58	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
52	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	1,77		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
C	**Pangan**				
53	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	340.44		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
D	**Pertanahan**				
54	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
55	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
56	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ha			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
57	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap direditribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente	Ha			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
58	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Ha			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
59	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
60	Persentae luas lahan bersertifikat				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
61	Penyelesaian kasus tanah Negara dan izin lokasi				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
E	**Lingkungan Hidup**				
62	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
63	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	12,42		Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
64	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	PPersen			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
F	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
65	Perekaman KTP elektronik	Persen	99	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
67	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	30,25	50	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
68	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
69	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	12	20	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
G	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
70	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	37,5	60	Dinas Sosial dan PMD
71	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	47,06	60	Dinas Sosial dan PMD
H	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
72	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2.09		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
73	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR)	Persen	68.51		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
74	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9,46		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
I	**Perhubungan**				
78	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	6		Dinas Perhubungan
79	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	N/A		Dinas Perhubungan
J	**Komunikasi dan Informatika**				
80	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	21,05		Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
81	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	71,43	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
82	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	Persen	91,58	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
K	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**				
83	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	11,67		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
84	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	4,76		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
L	**Penanaman Modal**				
85	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	Persen	204,78		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
M	**Kepemudaan dan Olahraga**				
86	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,67		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
87	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,55		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
88	Peningkatan prestasi olahraga	medali	7		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
N	**Statistik**				
89	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic	Persen	100		Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
90	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100		Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
O	**Persandian**				
91	Tingkat keamanan informasi pemerintah		N/A		Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
P	**Kebudayaan**				
92	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	12,86		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Q	**Perpustakaan**				
93	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62.37		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
94	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	75,44		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
R	**Kearsipan**				
95	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 50 Undang – undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Persen	55,67		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
96	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	9,17		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
III	**Layanan Urusan Pilihan**				
A	**Kelautan dan Perikanan**				

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
97	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	105,83		Dinas Perikanan
B	**Pariwisata**				
98	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-86.39		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
99	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	-42.19		
100	Tingkat hunian akomodasi	Persen	4.87		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
101	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0.33		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
102	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	Persen	1.06		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
C	**Pertanian**				
103	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
	- Padi	Ton/Ha	5,20		
	- Jagung	Ton/Ha	6.54		
	- Kedelai	Ton/Ha	1,39		
	- Ubi Kayu	Ton/Ha	22,03		
	- Ubi Jalar	Ton/Ha	19,58		
	- Kacang Tanah	Ton/Ha	1.65		
	- Kacang Hijau	Ton/Ha	1,41		
104	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	80.70	100	Dinas Peternakan
D	**Perdagangan**				

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
105	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	3.09		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
106	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	56.5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
107	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	Persen	43.20		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
E	**Perindustrian**				
108	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Persen	0,48		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
109	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	N/A		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
110	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	1,67		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
111	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
112	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	0.00%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
113	Tersedianya informal industry secara lengkap dan terkini				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
VI	**Penunjang Urusan**				
A	**Perencanaan dan Keuangan**				
114	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	21.2	25.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
115	Rasio PAD	Persen	12.14	14	Badan Pendapatan Daerah
116	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2.984	3.000	Inspektorat
117	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	3	3	Inspektorat
118	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	67.36	72.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
119	Opini laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
B	**Pengadaan**				
120	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
121	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	18.6		Bagian Perngadaan Barang dan Jasa Setda
122	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	40.94		Bagian Perngadaan Barang dan Jasa Setda
C	**Keuangan**				
123	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD	Persen	0,09	0.05	Badan Keuangan dan Aset Daerah
124	Deviasi realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	Persen	0.4	0.35	Badan Keuangan dan Aset Daerah
125	Manajemen Aset				Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1. Apakah ada daftar aset tetap?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset	(Ya/Tidak)	Tidak	Tidak	
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	
126	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	1.98	10.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
D	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**				
127	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	84,62		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
128	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	18,96		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
129	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	49,28		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
V	**Pengawasan Urusan Pemerintahan**				
A	**Transparansi**				
130	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	94,93		Badan Keuangan dan Aset Daerah
131	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber Data: Bapppelitbangda Kabupaten Takalar Tahun 2025, Data Diolah

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian lebih teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-4
Realisasi SPM Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Target 2025 (Permendagri No 59 Tahun 2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025	
Pendidikan						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartispasi dalam PAUD	Persen	100	62.55	80.57	100
Pendidikan Dasar						
	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	87.74	99.32	100
Pendidikan Keseteraan						
	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	17.31	21.71	100
Kemampuan Literasi						
	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Persen				
	SD			42.14	47.71	100
	SMP			32.42	50.65	100
Kemampua Numerasi						
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Persen				
	SD		100	33.56	44.31	100

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025	
	SMP		100	23.48	48.39	100
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B						
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	100	55.31	65.8	100
Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4						
	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	100	62.17	68.06	100
Iklim Keamanan						
	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan					
	SD	Persen	100	67.73	70.56	100
	SMP	Persen	100	64.26	65.35	100
Iklim Kebhinekaan						
	Indeks Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan					
	SD	Persen	100	59,51	65,88	100
	SMP	Persen	100	58,84	64,17	100
Iklim Inklusivitas						
	Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan					
	SD	Persen	100	52.35	54.88	100
	SMP	Persen	100	52.96	53.57	100
Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	89	90.09	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025	
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	92	89.35	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	95	91.44	100
Pelayanan kesehatan balita						
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	73	92.99	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	98	94.41	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,						
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	78	79.81	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;						
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	80	77.46	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	48	54.42	100
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025	
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	96	99.28	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	90	90.84	100
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	48	93.67	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)						
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	94	75.56	100
Pekerjaan Umum						
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	97.2	98.13	100

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025	
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	97.96	98.47	100
Perumahan Permukiman						
Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota						
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	229	3	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota						
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	tidak terdapat relokasi program pemerintah daerah	tidak terdapat relokasi program pemerintah daerah	100
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	95	100
Pelayanan informasi rawan bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	505	188	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	19.325	51.145	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	36	26	100
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100	94,44	100	100
Sosial						
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti						
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025	
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti						
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	0	0	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota						
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100

Sumber Data: Bagian Pemrintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, Data Diolah

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar. Penyusunan P-RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Adapun Target Indikator Kinerja Pembangunan dan Pagu Indikatif P-RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan capaian triwulan II tahun 2025 serta target 2025.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya Perubahan RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025- 2029, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2045, serta RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional. Dokumen Perubahan RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional memuat tema, prioritas Perubahan RKPD dan arah kebijakan serta program prioritas yang sifatnya strategis dan berupa matriks rencana program dan kegiatan prioritas setiap Perangkat Daerah disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif dan menjadi pedoman sinergitas bagi setiap pelaku pembangunan.

Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka Dokumen Perubahan RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sementara itu, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Takalar selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Takalar juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Takalar sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

7.2 Kesimpulan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Takalar dan Stakholder terkait dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergia antar Perangkat Daerah, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antar Prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan

kegiatan Perangkat Daerah. Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 mempunyai fungsi pokok;

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun kedepan;
3. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
4. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan umum anggaran dan Perubahan Prioritas plafon anggaran sementara.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Takalar untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BUPATI TAKALAR

ttd

MOHAMMAD FIRDAUS

Perencanaan, Pengendalian &
Evaluasi Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA KAB. TAKALAR
TAHUN 2024

Jl. Syech Yusuf No. 2 Kab. Takalar 92212
bappelitbangdaperencanaan@gmail.com